Kabupaten
Kepulauan Selayar

Perbup Nomor 18 Tahun 2025

Tentang

RKPD 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan menyinergikan program pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional, provinsi serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2026;
   b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026; dan
   c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Tahun 2026;
   d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026;
   e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026;
   f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   g. BAB VII Penutup.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025
NOMOR 867

DAFTAR ISI

Sampul i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xii
Daftar Grafik xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 6
1.4. Maksud dan Tujuan 7
1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 12
2.1. Gambaran Umum Wilayah 12
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 12
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 42
2.2. Capaian Indikator Pembangunan Daerah 146
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 161
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 161
2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 195
2.4 Capaian Indikator Pembangunan 220
2.4.1. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) 220
2.4.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) 227
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah 235
2.5.1 Permasalahan Pembangunan terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 235
2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 237
2.6 Isu Strategis 241
2.7 Inovasi Daerah 252
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 254
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 254
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah 255
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 267
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah 271
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 300
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 300
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan 308
4.3. Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Daerah 326

4.4. Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional 333
4.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 391
4.6. Rumusan Usulan Program/ Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar 398
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 400
5.1. Kerangka Pendanaan 400
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 401
5.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 413
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 823
6.1. Indikator Makro Pembangunan 823
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 823
6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) 824
6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 844
6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs 847
BAB VII PENUTUP 854
7.1. Kaidah Pelaksanaan 854
7.2. Kesimpulan 855

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar 12
Tabel 2. 2 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 16
Tabel 2. 3 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar . 17
Tabel 2. 4 Sumber Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar 26
Tabel 2. 5 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah . 32
Tabel 2. 6 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah 32
Tabel 2. 7 Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 37
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 39
Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 39
Tabel 2. 10 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk per Kilometer Persegi di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 40
Tabel 2. 11 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 .. 40
Tabel 2. 12 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024 41
Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 41
Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 42
Tabel 2. 15 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 43
Tabel 2. 16 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 44
Tabel 2. 17 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 45
Tabel 2. 18 Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 46
Tabel 2. 19 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 46
Tabel 2. 20 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 47
Tabel 2. 21 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 49

Tabel 2. 22 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 50
Tabel 2. 23 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 52
Tabel 2. 24 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024 54
Tabel 2. 25 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024 55
Tabel 2. 26 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024..... 61
Tabel 2. 27 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Jenis Penghasilan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 68
Tabel 2. 28 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 74
Tabel 2. 29 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 75
Tabel 2. 30 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 75
Tabel 2. 31 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 76
Tabel 2. 32 Perbandingan TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 81
Tabel 2. 33 Total Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 84
Tabel 2. 34 Nilai Realisasi Dan Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 100
Tabel 2. 35 Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 111
Tabel 2. 36 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar 111
Tabel 2. 37 Jumlah Kerjasama dan Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.... 114
Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 115

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 116
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 118
Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 119
Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 120
Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 121
Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 122
Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 123
Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Bidang Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 123
Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 124
Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 125
Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 126
Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 128
Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 128
Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 129
Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 130
Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 131
Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 131
Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 132
Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 132
Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Bidang Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 133

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 133
Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 134
Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 134
Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 135
Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 137
Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 137
Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 138
Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 139
Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 140
Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 141
Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 141
Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 142
Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 144
Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 144
Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 145
Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 145
Tabel 2. 77 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 147
Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 148
Tabel 2. 79 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 161

Tabel 2. 80 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Kabupaten Kepualauan Selayar 162
Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Fisik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar per Perangkat Daerah 188
Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar per Bidang Urusan Pemerintahan 192
Tabel 2. 83 Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD, Renja dan APBD Tahun 2024..... 195
Tabel 2. 84 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD terhadap Renja dan APBD Tahun 2024 198
Tabel 2. 85 Penjabaran Kerangka Pendanaan dalam RKPD, Renja PD dan APBD Tahun 2024..... 202
Tabel 2. 86 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Prioritas RPJMD Tahun 2024..... 206
Tabel 2. 87 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Kepulauan Selayar..... 218
Tabel 2. 88 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024..... 220
Tabel 2. 89 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024..... 221
Tabel 2. 90 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 223
Tabel 2. 91 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024..... 223
Tabel 2. 92 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 225
Tabel 2. 93 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 225
Tabel 2. 94 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020-2024. 226
Tabel 2. 95 Capaian Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024..... 227
Tabel 2. 96 Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2024..... 253
Tabel 3. 1 Perbandingan Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024 dan Perkiraan tahun 2025 dan Target tahun 2026 260
Tabel 3. 2 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 261
Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha Tahun 2020-2024 261

Tabel 3. 4 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 262
Tabel 3. 5 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 263
Tabel 3. 6 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 264
Tabel 3. 7 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 264
Tabel 3. 8 Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 265
Tabel 3. 9 Perbandingan Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 265
Tabel 3. 10 Target Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar..... 270
Tabel 3. 11 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026..... 273
Tabel 3. 12 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026..... 276
Tabel 3. 13 Proyeksi Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026..... 277
Tabel 3. 14 Proyeksi Belanja Wajib Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 278
Tabel 3. 15 Proyeksi Belanja Sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 280
Tabel 3. 16 Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026..... 292
Tabel 3. 17 Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah Terhadap Pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026..... 294
Tabel 3. 18 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026..... 297
Tabel 3. 19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026..... 298
Tabel 3. 20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2026..... 298

Tabel 4. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 302
Tabel 4. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Target Kinerja Tahun 2026 302
Tabel 4. 3 Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dengan RKPD Tahun 2026 305
Tabel 4. 4 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2026 309
Tabel 4. 5 Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2026 .. 310
Tabel 4. 6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... 313
Tabel 4. 7 Penjabaran Program Pembangunan Daerah dari Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 315
Tabel 4. 8 Hubungan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 324
Tabel 4. 9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026..... 327
Tabel 4. 10 Target Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026..... 333
Tabel 4. 11 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2026 334
Tabel 4. 12 Keselarasan Target Makro Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 373
Tabel 4. 13 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 373
Tabel 4. 14 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulsel dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 375
Tabel 4. 15 Keselarasan Program Pembangunan Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 376
Tabel 4. 16 Dukungan Program dan Sub Kegiatan Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Tahun 2026..... 384
Tabel 4. 17 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026..... 389
Tabel 4. 18 Sinergitas dan Sinkronisasi Tujuan SDGs dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 391
Tabel 4. 19 Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 398
Tabel 5. 1 Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2026 400
Tabel 5. 2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 402

Tabel 5. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026..... 414
Tabel 6. 1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024..... 823
Tabel 6. 2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022- 2024..... 824
Tabel 6. 3 Capaian dan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 824
Tabel 6. 4 Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024..... 844
Tabel 6. 5 Capaian dan Target Indikator TPB/ SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024..... 847

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar 6
Gambar 1. 2 Hubungan Antara Dokumen Perencaaan dan Penganggaran 7
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 13
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 17
Gambar 2. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten kepulauan Selayar..... 18
Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar 20
Gambar 3. 1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah 272

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 25
Grafik 2. 2 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 26
Grafik 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024 27
Grafik 2. 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 28
Grafik 2. 5 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 29
Grafik 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... 30
Grafik 2. 7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023 31
Grafik 2. 8 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2021 33
Grafik 2. 9 Capaian Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 34
Grafik 2. 10 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 34
Grafik 2. 11 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 35
Grafik 2. 12 Konsumsi Ikan Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023..... 36
Grafik 2. 13 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023..... 37
Grafik 2. 14 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... 38
Grafik 2. 15 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024..... 42
Grafik 2. 16 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024..... 48
Grafik 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 50
Grafik 2. 18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024..... 51
Grafik 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024..... 53
Grafik 2. 20 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024..... 55
Grafik 2. 21 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 56

Grafik 2. 22 Jumlah Kematian Ibu per 100 Ribu Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 56
Grafik 2. 23 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023 57
Grafik 2. 24 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 58
Grafik 2. 25 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 59
Grafik 2. 26 Persentase Balita Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 59
Grafik 2. 27 Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 60
Grafik 2. 28 Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 62
Grafik 2. 29 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 62
Grafik 2. 30 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 63
Grafik 2. 31 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024 . 64
Grafik 2. 32 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024 65
Grafik 2. 33 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 66
Grafik 2. 34 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Informal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 67
Grafik 2. 35 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023 70
Grafik 2. 36 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 70
Grafik 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 72
Grafik 2. 38 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 72
Grafik 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 73

Grafik 2. 40 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 76
Grafik 2. 41 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 77
Grafik 2. 42 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 78
Grafik 2. 43 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023 79
Grafik 2. 44 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 79
Grafik 2. 45 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 80
Grafik 2. 46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 81
Grafik 2. 47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 82
Grafik 2. 48 Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 83
Grafik 2. 49 Produktivitas Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 ... 83
Grafik 2. 50 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 85
Grafik 2. 51 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 86
Grafik 2. 52 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022 87
Grafik 2. 53 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 88
Grafik 2. 54 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2022-2024 89
Grafik 2. 55 Capaian Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 89
Grafik 2. 56 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 90
Grafik 2. 57 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 91
Grafik 2. 58 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 92
Grafik 2. 59 Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 92
Grafik 2. 60 Rincian Capaian Setiap Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 93

Grafik 2. 61 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024..... 93
Grafik 2. 62 Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar 94
Grafik 2. 63 Proporsi Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar..... 95
Grafik 2. 64 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 95
Grafik 2. 65 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 97
Grafik 2. 66 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 98
Grafik 2. 67 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 99
Grafik 2. 68 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 102
Grafik 2. 69 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024..... 103
Grafik 2. 70 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 104
Grafik 2. 71 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 105
Grafik 2. 72 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 106
Grafik 2. 73 Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 107
Grafik 2. 74 Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 108
Grafik 2. 75 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 110
Grafik 2. 76 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 112
Grafik 2. 77 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024..... 113

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD disusun dengan berdasar pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambaran awal capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,33 persen, PDRB Perkapita (ADHB) sebesar 58,29 juta rupiah, Tingkat Kemiskinan 10,79 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 2,05 persen, Gini Rasio 0,329 dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,98. Selain capaian indikator makro tersebut, dalam penyusunan RKPD tahun 2026 juga memperhatikan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan penyusunan RKPD.

RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun Pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada **“Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera**".

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16, mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top-down bottom-up* serta berorientasi pada substansi dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial (THIS). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar sektor maupun antar urusan pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepuluan Selayar Tahun 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

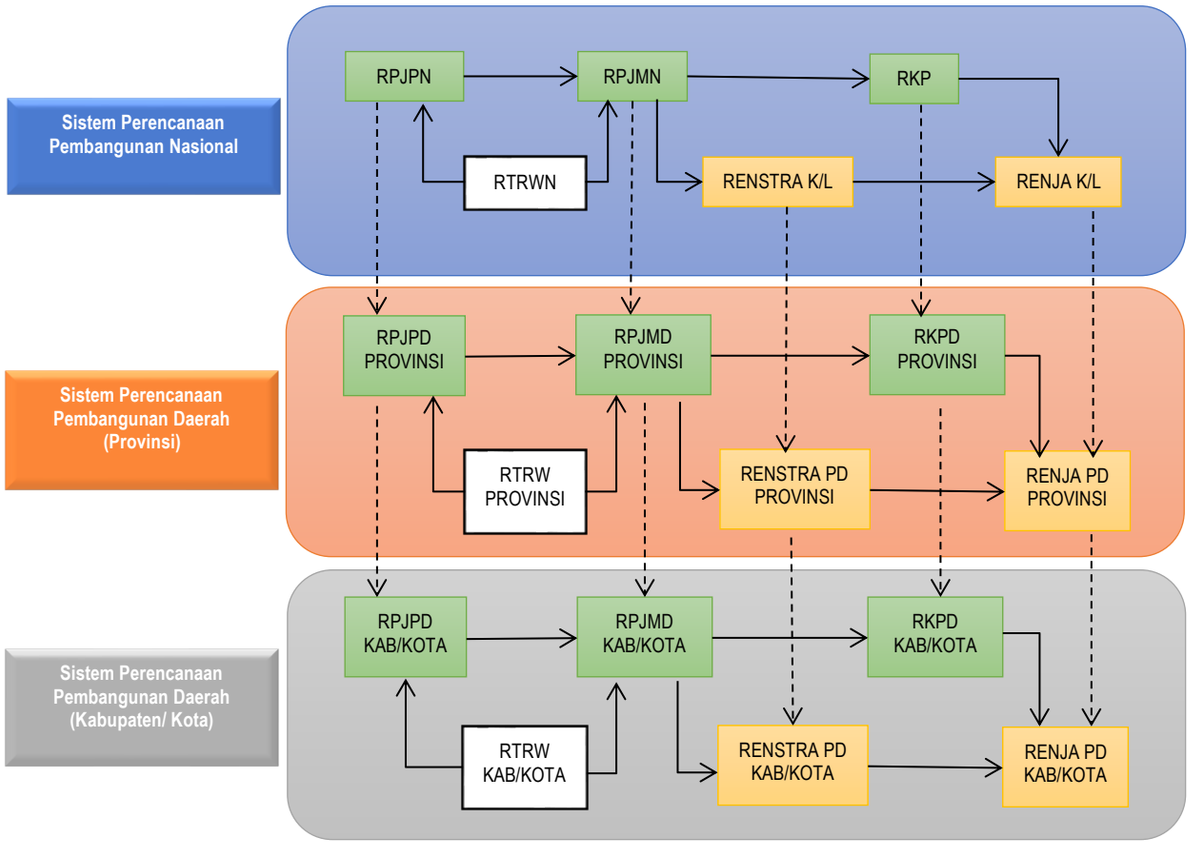
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Nageri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361).
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor … Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor …);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor ….);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
42. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 berpedoman dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi yang termuat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, serta arah kebijakan, prioritas dan program pembangunan daerah Tahun 2026 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, digambarkan pada **Gambar 1.1.**

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026



Sumber: Permendagri 86 tahun 2017, diolah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam empat periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. RPJMD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja SKPD menjadi masukan untuk penyusunan dan penetapan RKPD. Selanjutnya, RKPD yang telah difasilitasi menjadi pedoman bagi penyempurnaan Renja SKPD. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk

memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada **Gambar 1.2.**

Gambar 1. 2 Hubungan Antara Dokumen Perencaaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 tahun 2017, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan dan penetapan APBD. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

a. Merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
b. Menjadi acuan operasional tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
c. Menjadi acuan untuk menentukan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.

Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 adalah:

1. Menyediakan acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
3. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun anggaran 2026; dan
4. Untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat uraian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memuat uraian hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi / Kabupaten, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memuat kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Memuat kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Memuat kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan, ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis. Khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Memuat kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan, ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis. Khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang

dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Deskripsi sub-bab ini dicantumkan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan permasalahan dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat arahan kebijakan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Memuat prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan kesimpulan yang berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik berupa gugus kepulauan terletak antara 5°40’ - 7°35’ LS dan 120°15’ - 122°30’ BT dengan luas wilayah sebesar 10.503,69 km^2, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km^2, dan luas wilayah laut 9.146,66 km^2, dengan panjang garis pantai 670 km.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

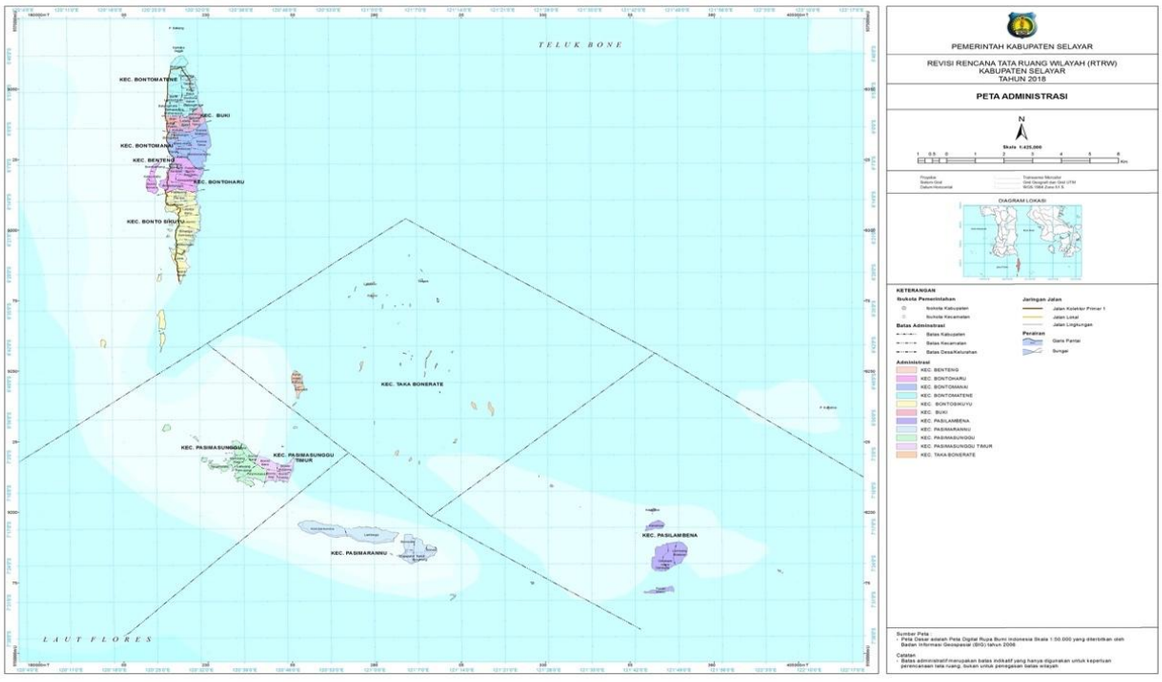
No	Kecamatan	Luas (km^2)
1	Pasimarannu	195,33
2	Pasilambena	114,88
3	Pasimasunggu	131,8
4	Taka Bonerate	49,3
5	Pasimasunggu Timur	67,14
6	Bontosikuyu	248,22
7	Bontoharu	128,12
8	Benteng	24,63
9	Bontomanai	136,42
10	Bontomatene	193,05
11	Buki	68,14

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 130 Pulau dengan pulau berpenghuni sebanyak 34 buah, terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan

internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 - 2032

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi terdiri dari tiga satuan morfologi, yaitu: Satuan morfologi daratan alluvial pantai, Satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat. Pulau Selayar terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi disini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.

2.1.1.2.2. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen.

Umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan.

2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di

Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5-6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1-4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Berdasarkan pencatatan pada beberapa stasiun di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, secara rata-rata jumlah hari hujan di daerah ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,6 hari per bulan dan rata-rata curah hujan sebesar 106,6 mm^2 dibanding dengan kondisi pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022, rata-rata hari hujan sebesar 11,08 hari dengan rata-rata curah hujan sebesar 120,78 mm^2. Berikut disajikan jumlah hari hujan dan curah hujan berdasarkan data BPS dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2. 2 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^2)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^2)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^2)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^2)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^2)
Januari	13	415	30	839,9	14	146,9	9	88,0	16	118,1
Februari	12	364	20	397	15	257,1	17	211,8	14	128,4
Maret	7	121	23	626,3	14	162,8	12	141,3	21	230,0
April	7	214	11	294	11	102,6	17	167,5	23	425,7
Mei	7	268	11	78,1	13	124,4	10	176,0	14	110,4
Juni	4	106	14	87	20	199,8	9	97,8	11	103,7
Juli	-	-	9	77,3	12	116,4	14	127,6	6	76,4
Agustus	2	4	8	104,2	4	23,4	3	5,5	2	3,7
September	5	137	11	82,5	4	10,5	2	4,8	1	2,7
Oktober	3	111	17	245,4	7	60,5	0	0	5	47,3
November	5	82	26	542	7	44,4	9	74,8	12	142,9
Desember	16	439	28	860,3	12	200,8	14	184,0	19	386,6
Rata-rata	6,75	188,42	17,3	352,8	11,08	120,78	9,6	106,6	11,96	148,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 di atas, hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100 mm^2) antara Bulan Februari-Juli dan Desember dengan curah hujan rata-rata 168,06 mm^2 sedangkan bulan relatif lembab (60-100 mm^2) terjadi pada Bulan Januari, Juni dan November dengan curah hujan rata-rata 86,89 mm^2 sementara bulan relatif kering (<60 mm^2) antara Bulan Agustus-Oktober dengan curah hujan rata-rata 3,44 mm^2.

2.1.1.3. Kondisi Penggunaan Lahan

Gambaran umum kondisi penggunaan lahan Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi distribusi penggunaan lahan, kondisi penggunaan lahan menurut jenisnya, kondisi penggunaan lahan kawasan terbangun, penggunaan lahan kawasan non terbangun, dan penggunaan lahan menurut fungsinya.

2.1.1. Distribusi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya. Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti sungai, rawa dan danau).

2.1.2. Kondisi Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya

Salah satu aspek yang dikaji dalam melihat potensi fisik dasar adalah penggunaan lahan eksisting pada suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan merupakan gambaran dari pemanfaatan lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut dapat dilihat luas penggunaan lahan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

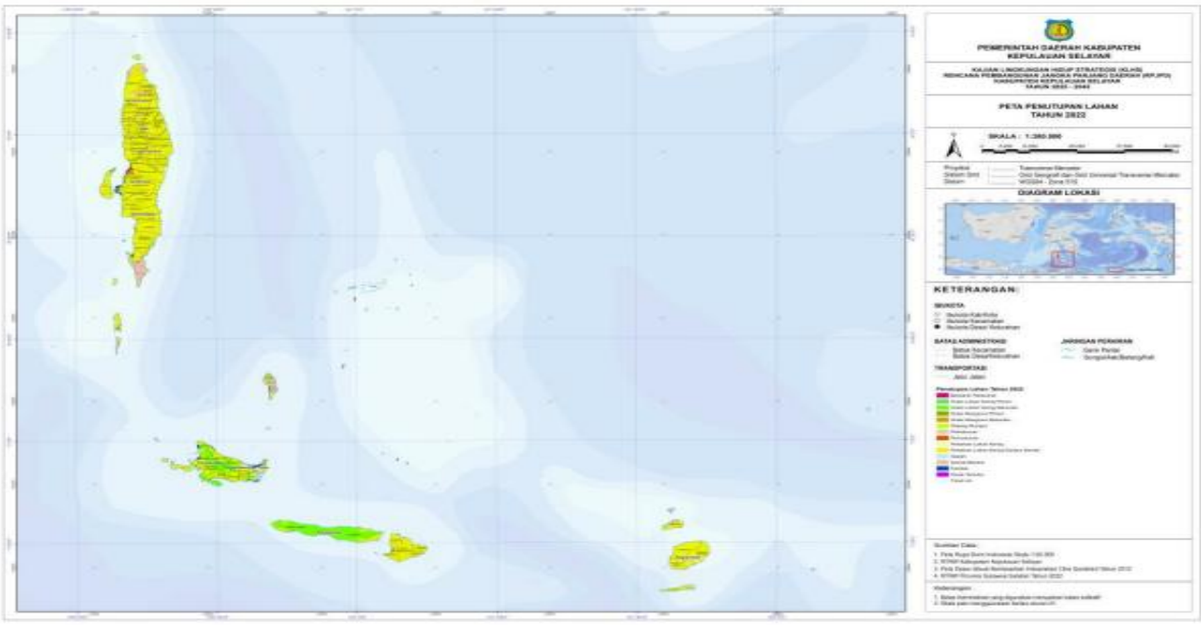
Kondisi eksisting dan rencana penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan **Tabel 2.3**.

Tabel 2. 3 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penutupan Lahan	Luas Penutupan Lahan (ha)			Perubahan Tutupan Lahan (ha)	
	2009	2015	2023	2009-2015	2015-2023
Bandara	0,00	39,16	38,00	39,16	-1,16
Hutan Lahan Kering Primer	218,11	137,45	39,30	-80,67	-98,15
Hutan Lahan Kering Sekunder	16.657,68	17.371,64	17.821,22	713,96	-449,58
Hutan Mangrove Primer	280,17	259,23	222,79	-20,95	-36,44
Hutan Mangrove Sekunder	333,33	285,52	546,53	-47,80	261,01
Hutan Tanaman	1.154,52	1.155,04	0,00	0,52	-1.155,04
Padang Rumput	13.324,88	10.099,39	663,22	-3.225,50	-9.436,17
Perkebunan	1.770,93	1.576,71	1.949,24	-194,22	372,53
Permukiman	553,52	526,27	1.154,11	-27,24	627,84
Pertanian Lahan Kering	3.686,15	13.333,44	1.290,46	9.647,29	-12.042,98
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	29.721,95	19.984,47	84.648,50	-9.737,48	64.664,03
Sawah	57,06	56,86	1.200,39	-0,21	1.143,54
Semak Belukar	46.359,56	46.023,88	6.697,95	-335,68	-39.325,93
Tambak	526,26	245,13	933,63	-281,13	688,50
Tanah Terbuk	89,39	72,60	73,66	-16,79	1,06
Tubuh Air	2.536,97	6.103,70	2.335,27	3.566,73	-3.768,43

Sumber Data: BPKHTL Wilayah VII Makassar

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2045

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi infrastruktur (aksesibilitas) yang masih terbatas, sehingga sangat berpengaruh terhadap laju pemeratan pembangunan. Namun demikian dalam perspektif pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi tersebut memiliki nilai strategis.

Secara geografis, KKS terletak di tengah bentangan barat-timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan

Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.

Terkait dengan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan utara Pulau Selayar dinilai memiliki peranan penting dalam mentransformasikan KKS, dari salah satu daerah tertinggal di KTI menjadi daerah yang maju dan mandiri. Keadaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan kawasan utara Pulau Selayar sebagai Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2042, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

a. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
b. Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone yang meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.1.4.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas pengembangan sistem pusat permukiman dan pengembangan sistem jaringan prasarana. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dapat dilihat pada (**Gambar 2.4**).

Gambar 2. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten kepulauan Selayar



Sumber: Draft Perda tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 – 2043

Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berada di Benteng. Upaya untuk mengintegrasikan seluruh wilayah kabupaten ke dalam satu kesatuan wilayah yang utuh, diperlukan pengembangan sistem pusat pemukiman berupa Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pemukiman PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa, terdiri atas:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Batangmata di Kecamatan Bontomatene;
b. Pusat Pelayanan Kawasan Batang di Kecamatan Taka Bonerate;
c. Pusat Pelayanan Kawasan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu;
d. Pusat Pelayanan Kawasan Bontobangun di Kecamatan Bontoharu;
e. Pusat Pelayanan Kawasan Polebungin di Kecamatan Bontomanai;
f. Pusat Pelayanan Kawasan Kembang Ragi di Kecamatan Pasimasunggu;
g. Pusat Pelayanan Kawasan Bontobulaeng di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
h. Pusat Pelayanan Kawasan Harapan di Kecamatan Bontosikuyu;
i. Pusat Pelayanan Kawasan Buki di Kecamatan Buki; dan
j. Pusat Pelayanan Kawasan Kalaotoa di Kecamatan Pasilambena.

Sedangkan PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa kegiatan antar desa. PPL yang dimaksud terdiri atas :

a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontosunggu di Kecamatan Bontoharu;
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Barugaiya di Kecamatan Bontomanai;
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bonea Timur di Kecamatan Bontomanai;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Appatanah di Kecamatan Bontosikuyu;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowa di Kecamatan Bontosikuyu;
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Bongaiya di Kecamatan Bontomatene;
g. Pusat Pelayanan Lingkungan Onto di Kecamatan Bontomatene;
h. Pusat Pelayanan Lingkungan Jinato di Kecamatan Taka Bonerate;
i. Pusat Pelayanan Lingkungan Tambuna di Kecamatan Taka Bonerate;
j. Pusat Pelayanan Lingkungan Rajuni di Kecamatan Taka Bonerate;
k. Pusat Pelayanan Lingkungan Karumpa di Kecamatan Pasilambena;
l. Pusat Pelayanan Lingkungan Pulo Madu di Kecamatan Pasilambena;
m. Pusat Pelayanan Lingkungan Lembang Mate'ne di Kecamatan Pasilambena;
n. Pusat Pelayanan Lingkungan Lambego di Kecamatan Pasimarannu;
o. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontomalling di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontobaru di Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan
q. Pusat Pelayanan Lingkungan Batangmata Sapo di Kecamatan Bontomatene.

2.1.1.4.2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten dikembangkan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu:

a. Aspek pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten;
b. Aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis kabupaten meliputi:

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
b. Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Detail Kawasan strategis dapat dilihat pada **Gambar 2.5** berikut.

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: Draft Perda tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045

2.1.1.4.3. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap memiliki luas sekitar 1,8 (satu koma delapan) hektar tersebar di beberapa perairan wilayah kepulauan, khususnya di:

a. Kecamatan Bontosikuyu;
b. Kecamatan Benteng; dan
c. Kecamatan Taka Bonerate.

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup budidaya laut *(mariculture)* dan budidaya air payau *(brackish cultivation)* dengan total luas 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektar. Lokasi pengembangan perikanan budidaya tersebar di:

a. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
b. Kecamatan Bontoharu;
c. Kecamatan Pasimasunggu;
d. Kecamatan Bontosikuyu; dan
e. Kecamatan Taka Bonerate.

2.1.1.4.4. Kawasan Pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas sawah lahan basah dan lahan kering seluas 4.239 (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar tersebar di:

a. Kecamatan Bontoharu;
b. Kecamatan Bontomanai;
c. Kecamatan Pasimasunggu;
d. Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan
e. Kecamatan Bontosikuyu.

Selain itu, terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.829 hektar yang tersebar di :

a. Kecamatan Pasimasunggu Timur seluas kurang lebih 834 (delapan ratus tiga puluh empat) hektar;
b. Kecamatan Pasimasunggu seluas kurang lebih 819 (delapan ratus sembilan belas) hektar;
c. Kecamatan Bontosikuyu seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
d. Kecamatan Bontomanai seluas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar; dan
e. Kecamatan Bontoharu seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar.

b. Kawasan Holtikultura

Fungsi kawasan hortikultura yaitu menghasilkan hasil pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduk bagi masyarakat seluas 14.142 (empat belas ribu seratus empat puluh dua) hektar. Kawasan hortikultura tersebar di:

a. Kecamatan Bontomatene;
b. Kecamatan Bontosikuyu;
c. Kecamatan Pasimarannu;
d. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
e. Kecamatan Pasimasunggu;
f. Kecamatan Bontoharu;
g. Kecamatan Pasilambena;
h. Kecamatan Buki;
i. Kecamatan Taka Bonerate; dan
j. Kecamatan Bontomanai.

c. Kawasan Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Selayar adalah Kelapa, yang telah lama dikembangkan sebagai bagian dari budaya lokal. Selain Kelapa, terdapat komoditas lain, seperti Jambu Mente, Cengkeh, Kemiri, Pala, Melinjo dan Jeruk Keprok

Kawasan peruntukan perkebunan mencakup 43.773 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar dan tersebar di :

a. Kecamatan Bontosikuyu;
b. Kecamatan Bontomanai;
c. Kecamatan Bontoharu;
d. Kecamatan Pasilambena;
e. Kecamatan Pasimarannu;
f. Kecamatan Buki;

g. Kecamatan Bontomatene;
h. Kecamatan Pasimasunggu;
i. Kecamatan Taka Bonerate; dan
j. Kecamatan Pasimasunggu Timur

d. Kawasan Peternakan

Usaha peternakan di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ternak besar dan kecil (Sapi, Kuda, Kerbau, Kambing, dan Domba) serta ternak unggas (Ayam Buras, Ras, dan Itik). Kawasan peternakan seluas 4.062 (empat ribu enam puluh dua) hektar, tersebar di :

a. Kecamatan Pasimasunggu;
b. Kecamatan Bontomatene; dan
c. Kecamatan Pasimarannu.

2.1.1.4.5. Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar difokuskan pada pengembangan Taman Nasional Takabonerate dan wilayah sekitarnya. Luas kawasan pariwisata mencapai 5.126 (lima ribu seratus dua puluh enam) hektar dan tersebar di :

a. Kecamatan Bontoharu;
b. Kecamatan Bontomanai;
c. Kecamatan Bontomatene;
d. Kecamatan Bontosikuyu;
e. Kecamatan Buki;
f. Kecamatan Pasilambena;
g. Kecamatan Pasimarannu;
h. Kecamatan Taka Bonerate;
i. Kecamatan Pasimasunggu; dan
j. Kecamatan Pasimasunggu Timur.

2.1.1.4.6. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dalam bentuk padat, cair, atau gas, sebagimana pada petan atau data geologi. Kawasan ini menjadi lokasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang. Lokasi dapat berada di daratan maupun perairan, dan tidak terbatas pada kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Kawasan pertambangan mencerminkan sebaran potensi bahan tambang di bawah permukaan tanah yang diproyeksikan ke permukaan, sehingga mempengaruhi pemanfaatan lahan di atasnya. Kawasan energi di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar berlokasi di Kecamatan Bontomanai.

2.1.1.4.7. Kawasan Peruntukan Industri

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan, di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sektor ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menggerakkan sektor-sektor pembangunan lainnya. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup luas 3.327 (tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare tersebar di:

a. Kecamatan Bontosikuyu; dan
b. Kecamatan Bontomatene.

2.1.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk.

2.1.1.5.1. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersedian air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Total ketersediaan air Kabupaten Kepulauan Selayar bersumber dari SK. No. 146 MENLHK 1.2.2023. Kemudian, dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,2 m^3/tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai *safety factor*.

Berdasarkan hasil analisis, total ketersediaan air Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2023 hingga tahun 2029 masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak pada tahun 2023 adalah Kecamatan Bontosikuyu sebesar 594.579.402,10 m^3/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 206.942.308,05 m^3/tahun, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 387.637.094,06 m^3/tahun. Sementara itu, kecamatan dengan ketersediaan air terendah pada tahun 2023

adalah Kecamatan Benteng sebesar 16.311.717,65 m^3/tahun, dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) mencapai 21.911.013,94 m^3/tahun, sehingga terjadi defisit air sebesar -5.599.296,30 m^3/tahun. Sedangkan, pada proyeksi tahun 2029, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kebutuhan air total (domestik dan lahan) sebesar 942.056.364,67 m^3/tahun dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 2.294.101.888,41 m^3/tahun yang berarti status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

2.1.1.5.2. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuatitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (Kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari.

Berdasarkan data pada tahun 2023 dan 2029 dari Kabupaten Kepulauan Selayar, terlihat bahwa total ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kabupaten. Pada tahun 2023, jumlah total ketersediaan pangan mencapai 7.181.010.874 Kkal dengan kebutuhan pangan domestik sebesar 305.515.004 Kkal, menghasilkan surplus sebesar 6.875.495.869 Kkal. Kecamatan dengan ketersediaan pangan ter&nggi pada tahun tersebut adalah Kecamatan Pasimasunggu, dengan ketersediaan sebesar 1.013.827.215 Kkal dan selisih surplus sebesar 984.662.464 Kkal. Selain itu, Kecamatan Bontosikuyu memiliki ketersediaan pangan sebesar 1.195.304.158 Kkal, dengan surplus mencapai 1.160.839.657 Kkal. Di sisi lain, Kecamatan Benteng mengalami defisit sebesar 22.107.290 Kkal pada tahun tersebut, menjadi satu-satunya kecamatan yang mengalami defisit pangan pada tahun itu.

Tahun 2029, situasi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar semakin membaik dengan total ketersediaan pangan yang tetap tinggi, mencapai 7.181.010.874 Kkal dan kebutuhan pangan meningkat menjadi 367.447.905 Kkal. Surplus yang diperoleh meningkat menjadi 6.813.562.968 Kkal. Kecamatan dengan ketersediaan pangan tertinggi pada tahun 2029 adalah Kecamatan Pasimasunggu, dengan ketersediaan pangan sebesar 1.195.304.158 Kkal dan surplus sebesar 1.150.926.007 Kkal. Kecamatan Bontosikuyu kembali menunjukkan surplus besar dengan ketersediaan 1.195.304.158 Kkal dan selisih 1.150.926.007 Kkal. Namun, Kecamatan Benteng kembali mengalami defisit pangan yang lebih besar, yaitu

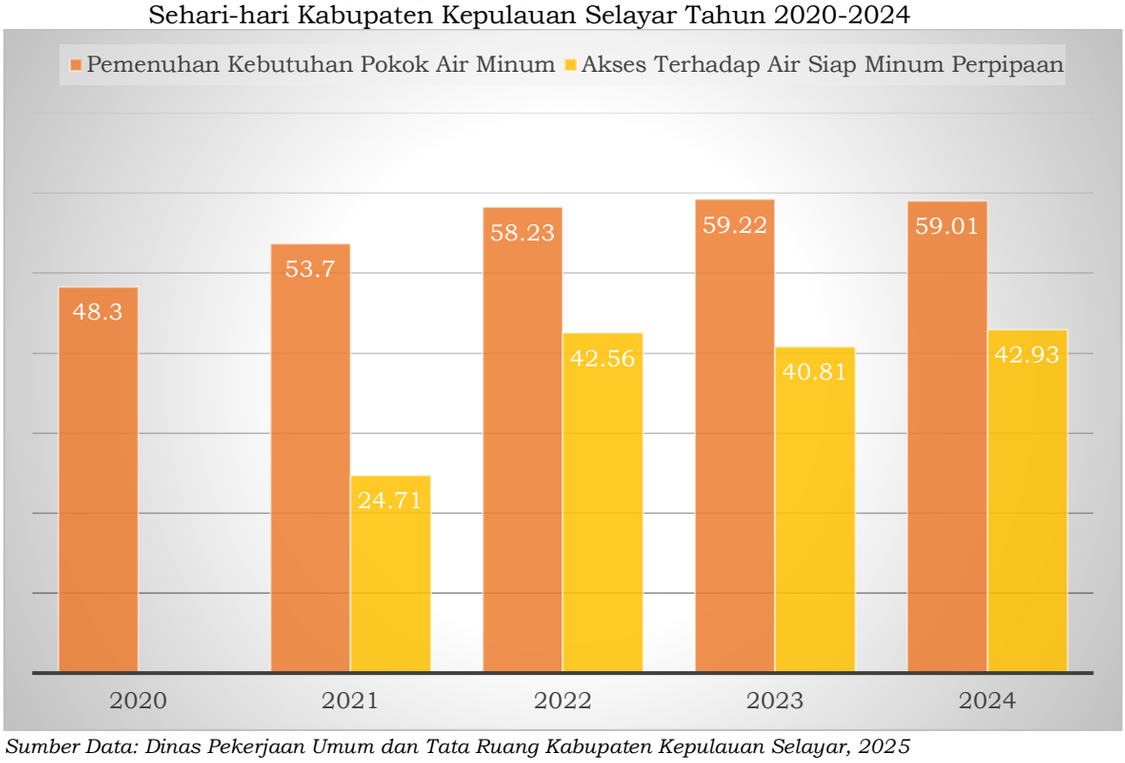
sebesar 23.216.690 Kkal, yang menandakan tantangan yang terus berlanjut di kecamatan ini meskipun sebagian besar wilayah lain mengalami surplus yang signifikan.

2.1.1.6. Ketahanan Air, Energi dan Kemandirian Pangan

2.1.1.7.1. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Penyediaan air minum aman merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan, ketersediaan air minum aman bagi masyarakat belum optimal terpenuhi. Hal ini disebabkan, wilayah geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan beberapa diantaranya tidak memiliki sumber air. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di pulau-pulau kecil dengan membangun embung, sumur dan melalui penyulingan air laut ataupun pembangunan arsinum di beberapa wilayah. Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.1** berikut.

Grafik 2. 1 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa dari 59,01 persen masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2024, terdapat sekitar 40 persen rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan. Hal ini disebabkan karena PDAM sebagai perusahaan daerah atau lembaga yang bertanggungjawab untuk menyediakan akses terhadap air minum perpipaan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Disamping itu, air yang disediakan oleh PDAM terkadang keruh dan tidak aman untuk digunakan sebagai air minum sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan air sumur sebagai sumber air sehari-hari.

2.1.1.7.2. Kapasitas Air Baku

Ketersediaan air baku merupakan faktor krusial dalam mendukung kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan kegiatan pariwisata serta pemenuhan air minum masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sumber-sumber air baku sangat diperlukan untuk menjaga kapasitas air baku yang ideal bagi masyarakat. Air baku umumnya diperoleh dari berbagai sumber seperti mata air, sungai, dan air tanah, tergantung pada kondisi hidrologis dan geografis wilayah. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, sumber utama air baku berasal dari beberapa mata air alami yang tersebar di kawasan perbukitan. Mata air tersebut merupakan hasil dari infiltrasi air hujan yang tersimpan dalam lapisan akuifer dan kemudian keluar ke permukaan melalui rekahan tanah atau batuan. Beberapa mata air utama yang dimanfaatkan pada Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.4.**

Tabel 2. 4 Sumber Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	NAMA	JENIS	KAPASITAS (L/detik)	KAPASITAS TERPAKAI (L/detik)
1	Sungai Balang Kalambu	Sungai	20	10
2	Mata Air Muntea	Mata Air	2	35
3	Mata Air Tajuiya	Mata Air	50	40
4	Mata Air Eremata	Mata Air	12	0
5	Sungai Jene Karring	Sungai	20	10
6	Mata Air Topa	Mata Air	225	60
7	Mata Air Bontojaya	Mata Air	5	2,5

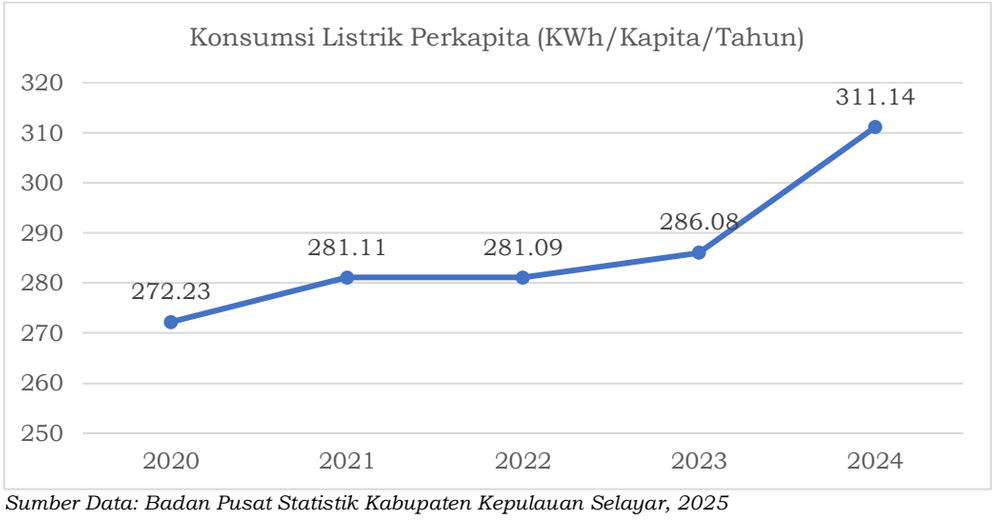
Sumber Data: SIMSPAM, 2025

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air baku meliputi degradasi daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan, serta ancaman pencemaran dari aktivitas permukiman dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian kawasan hulu serta penerapan sistem distribusi air yang efisien dan berkelanjutan agar kapasitas air baku tetap terjaga

2.1.1.7.3. Konsumsi Listrik Per-Kapita

Konsumsi energi listrik rumah tangga perkapita mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,00 sampai 10,00 persen. Konsumsi Listrik perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.2** berikut.

Grafik 2. 2 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



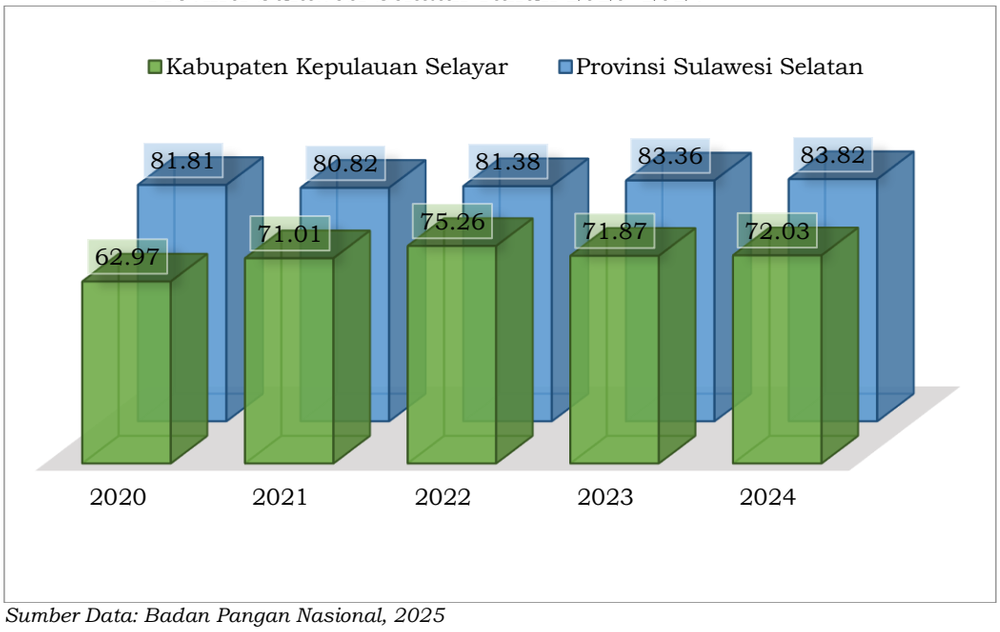
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan konsumsi listrik perkapita sebagaimana yang tergambar pada grafik di atas disebabkan oleh infrastruktur kelistrikan yang semakin berkembang dan merata khususnya di wilayah kepulauan. Beberapa wilayah kepulauan termasuk Pulau Jampea dan Pulau Bonerate telah menikmati jaringan listrik PLN. Selain itu, pada tahun 2023, terdapat 4 (empat) PLTS yang dibangun yaitu 3 (tiga) PLTS dibangun di wilayah kepulauan yaitu di Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, serta 1 (satu) PLTS dibangun di wilayah daratan Kepulauan Selayar.

2.1.1.7.4. Indeks Ketahanan Pangan

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah : a) Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap produksi bersih; b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; c) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; d) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; e) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; f) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; g) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; h) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); i) Angka harapan hidup pada saat lahir. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2.3.**

Grafik 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024



Sumber Data: Badan Pangan Nasional, 2025

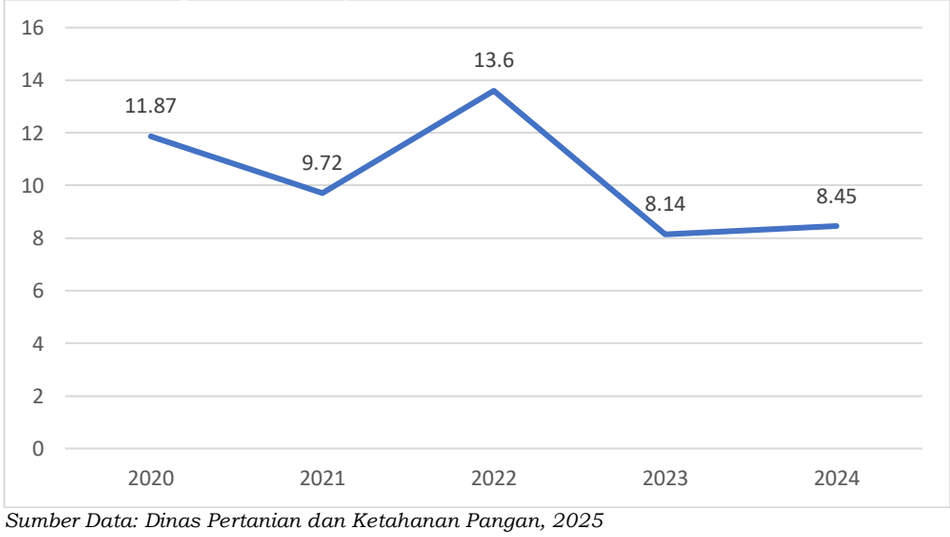
Secara umum IKP kabupaten maupun kota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2024 masuk dalam kategori Sangat Tahan Pangan, kecuali Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam kategori Tahan Pangan (> 67,75– 75,68). Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut antara lain produktivitas pertanian dan perikanan yang belum dimaksimalkan secara optimal karena teknologi pertanian dan perikanan yang masih tradisional, terbatasnya akses terhadap pupuk, bibit unggul, dan alat

pertanian modern, serta masalah degradasi lahan, kekeringan musiman, dan ketersediaan air yang tidak merata. Selain itu, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung gizi berupa akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan masih terbatas terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil serta pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan pola makan sehat juga masih kurang. Lebih lanjut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki keterbatasan aksesibilitas dan transportasi. Letak geografis Kepulauan Selayar yang terpisah dari daratan utama Sulawesi menjadikan distribusi pangan lebih sulit dan mahal dan ketergantungan pada transportasi laut membuat daerah ini rentan terhadap gangguan pasokan, terutama saat cuaca buruk.

2.1.1.7.5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi sehari-hari biasanya dari makanan, dimana makanan yang dikonsumsi tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Ketidakcukupan konsumsi energi sehari-hari dinyatakan dalam bentuk persentase ketidakcukupan konsumsi pangan *(undernourishment)* yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.4.**

Grafik 2. 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif dari tahun 2020 sampai 2024, namun pada tahun 2022, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan memiliki capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2024, capaian *PoU* sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini berarti semakin meningkatnya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum energi (kalori) harian untuk hidup sehat dan aktif. Hal ini diakibatkan oleh produksi tanaman

pangan yang mengalami penurunan pada tahun 2024 terutama pada pangan pokok seperti beras dan jagung. Selain itu, faktor kekeringan juga mempengaruhi produktivitas dan ketersediaan pangan, dikarenakan sistem irigasi dan pengairan yang belum optimal.

2.1.1.7.6. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sampai 2024, seperti tergambar pada **Grafik 2.5.**

Grafik 2. 5 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024



Sumber Data: Badan Pangan Nasional, 2025

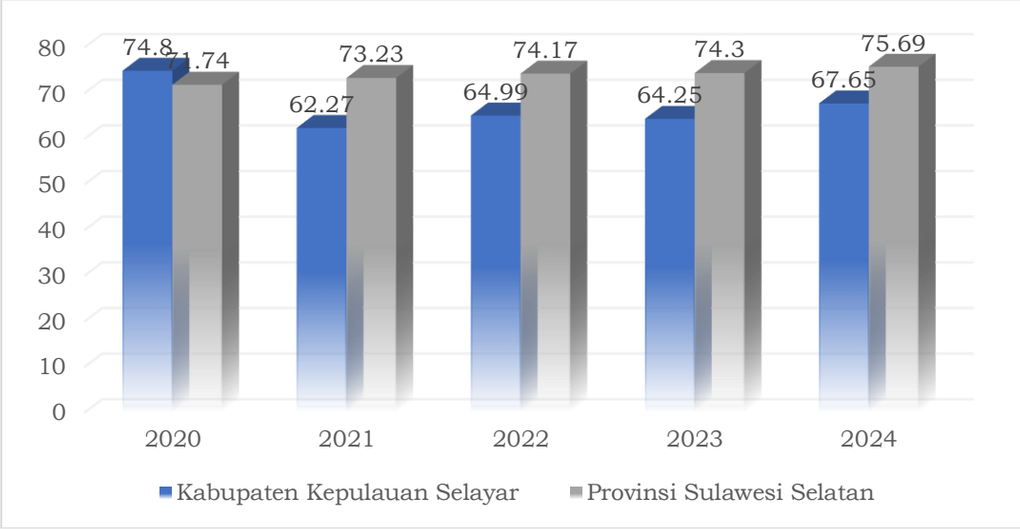
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan menurunnya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab penurunan skor PPH di Kepulauan Selayar antara lain ketergantungan pada pangan pokok tertentu. Masyarakat cenderung mengonsumsi padi-padian secara berlebihan, sementara konsumsi kelompok pangan lain seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan masih rendah. Hal ini menyebabkan pola konsumsi yang tidak seimbang dan berdampak pada skor PPH yang rendah. Lebih lanjut bahwa sebagai wilayah kepulauan, Selayar menghadapi tantangan dalam distribusi pangan. Transportasi yang bergantung pada laut dan infrastruktur yang terbatas menyebabkan pasokan pangan menjadi tidak stabil dan harga pangan meningkat, terutama saat kondisi cuaca buruk. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pangan yang beragam dan bergizi. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang masih terbatas. Kurangnya edukasi gizi menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya variasi dalam pola makan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

2.1.1.7. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.8.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup suatu daerah dapat dilihat dari capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar tiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2023 nilai IKLH sebesar 64,25 (kategori sedang), penurunan ini disebabkan perubahan tutupan lahan yang semakin berkurang dan penambahan luas permukiman. Selain itu, penurunan kualitas air juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dimaksud. Nilai IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di bawah nilai IKLH Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian IKLH di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Seluwesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.6**.

Grafik 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

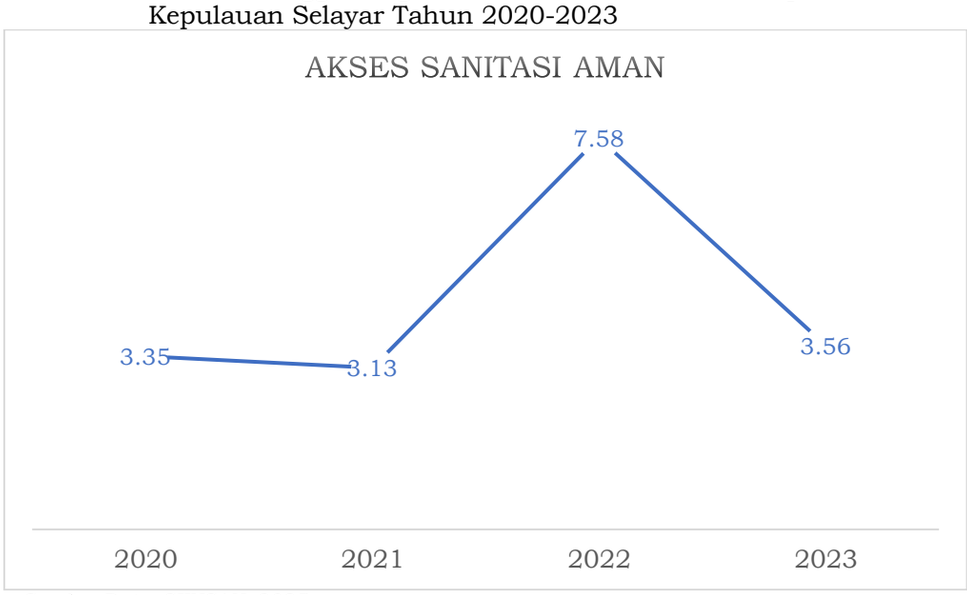
Capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dibarengi oleh peningkatan capaian 3 komponen pembentuk indeks ini yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Beberapa faktor pendukung peningkatan IKLH ini antara lain lokasi geografis yang strategis yang jauh dari sumber polusi atau industri besar, inisiasi penggunaan energi baru terbarukan dalam penyediaan energi listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi masyarakat, pelaksanaan konservasi hutan dan ekosistem di sekitar sumber air oleh Pemerintah Daerah, pengadaan bibit penghijauan oleh Pemerintah Daerah serta penguatan Program Kampung Iklim. Meskipun ada peningkatan, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai nilai IKLH yang lebih baik, antara lain belum optimalnya penanganan sampah dan limbah domestik yang mencemari sumber-sumber air baku, keberadaan lahan kritis, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dan limbah di sumber air, luas RTH di wilayah perkotaan serta wilayah kepulauan yang sebagian besar adalah kawasan pesisir yang semakin berkurang, semakin bertambahnya polusi kendaraan.

2.1.1.8.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong masih rendah karena Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Selain itu, beberapa wilayah kepulauan terkhusus pulau-pulau kecil masih memiliki keterbatasan terhadap akses air bersih. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkhusus dalam pemanfaatan sarana prasarana sanitasi turut berkontribusi pada rendahnya capaian indikator ini.

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 3,56 persen, lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 12,83 persen dan rata-rata nasional sebesar 10,21 persen. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.7**.

Grafik 2. 7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023



Sumber Data: SIINSAN, 2025

2.1.1.8.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan data tahun 2023, capaian persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,30 persen dengan timbulan sampah sebesar 20.568,63 ton, timbulan sampah yang terkelola sebesar 4.975,50 ton dan daur ulang sampah sebesar 265,00 ton. Hal ini diakibatkan karena Kabupaten Kepulauan Selayar hanya memiliki satu buah bank sampah yang terletak di Kota Benteng. Selain itu, penanganan sampah yang masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu Kumpul-Angkut-Buang kemudian ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengakibatkan semakin banyaknya timbulan sampah yang tidak terkelola yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pelayanan pengumpulan melalui mobil sampah yang masih melayani masyarakat yang berdomisili pada wilayah Kota Benteng sehingga pengurangan timbulan sampah tidak maksimal. Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2. 5 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah terkelola (ton/tahun)	Persentase Sampah terkelola	Sampah Masuk TPA (ton/tahun)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
2021	20.488,47	9.381,90	45,79	8.212,50	5,71
2022	20.144,20	6.420,45	31,87	5.381,59	5,16
2023	20.568,63	4.975,50	24,19	4.708,50	1,30
2024	20.746,60	4.943,58	23,83	4.404,46	2,60

Sumber Data: SIPSN-KLHK, 2025

2.1.1.8.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mengacu pada SEB penyelarasan RPJPN dengan RPJPD yaitu: a) Rumah tangga menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah; b) Rumah tangga memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Proporsi rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah hingga tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar belum dilakukan. Informasi yang tersedia adalah proporsi rumah tangga dengan layanan dasar pengumpulan sampah, yang pada tahun 2023 baru mencapai 5,45 persen, dan cenderung semakin turun persentasenya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini lebih rendah dari proporsi capaian rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 33,31 persen. Hal ini menunjukkan masih ada daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum menerima pelayanan pengumpulan sampah. Pada daerah yang tidak terlayani pengumpulan sampah, sampah yang dihasilkan tidak dikumpulkan ke TPS dan diangkut ke TPA, namun dikelola sendiri antara lain dibuang ke sungai/kebun, dikubur, atau dibakar. Capaian proporsi rumah tangga dengan layanan dasar pengumpulan sampah dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2. 6 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
	a	b	c=(b/a)*100
2021	34.490	2.186	6,34%
2022	34.752	2.254	6,49%
2023	45.501	2.457	5,45%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pengukuran Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah untuk tahun 2024, dilaksanakan tahun 2025 sehingga capaiannya belum ada. Berdasarkan data dari Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2024, capaian indikator ini adalah sebesar 2,96 persen atau hanya sebesar 1.060 rumah tangga yang mendapatkan layana penuh pengumpulan sampah, dengan rincian 860 rumah tangga yang sampahnya diolah di Bank Sampah dan 200 rumah tangga yang sampahnya diolah di TPS3R.

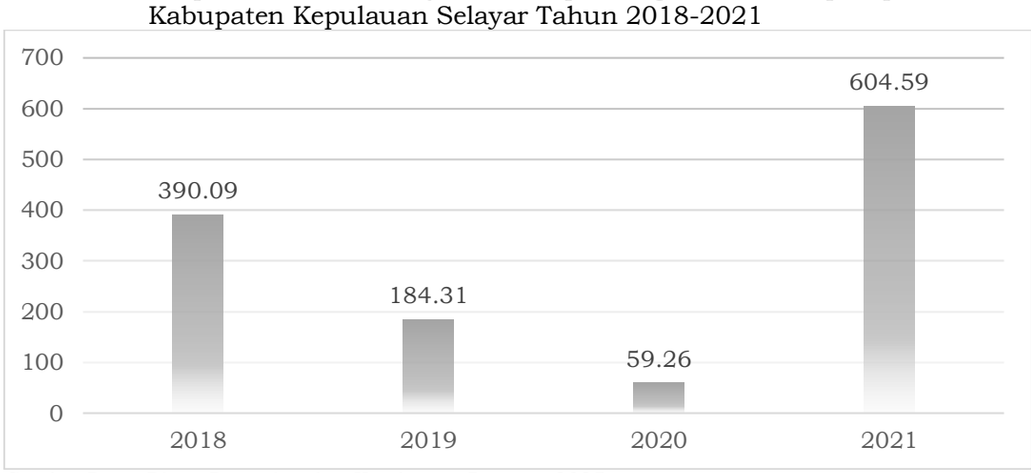
Tahun 2024, belum ada rumah tangga yang sampahnya diolah di TPST diluar TPA, di Pusat Daur Ulang Sampah, di Rumah Kompos, di komposting skala kecil, biodigiseter, serta pada *Refuse Derived Fuel.*

2.1.1.8.5. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia

Penyiangan dan pemupukan merupakan praktik pertanian yang penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pengelolaan proses pemupukan sangat erat kaitannya dengan peningkatan keanekaragaman hayati. Proses pemupukan harus melindungi atau meningkatkan keanekaragaman hayati lahan pertanian untuk lingkungan ekologi yang lebih baik dengan tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi penggunaan herbisida.

Paparan pestisida terhadap keanekaragaman hayati di darat dapat menyebabkan efek mematikan pada tanaman, sehingga membunuh tanaman non-target. Sisa herbisida fenoksi yang masih tertinggal di udara atau menguap dapat melukai pohon dan semak di dekatnya. Serupa dengan pestisida, pemberian pupuk kimia yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tanah sehingga akan berpotensi merusak tanaman serta keanekaragaman hayati lainnya. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.8.**

Grafik 2. 8 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2021



Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

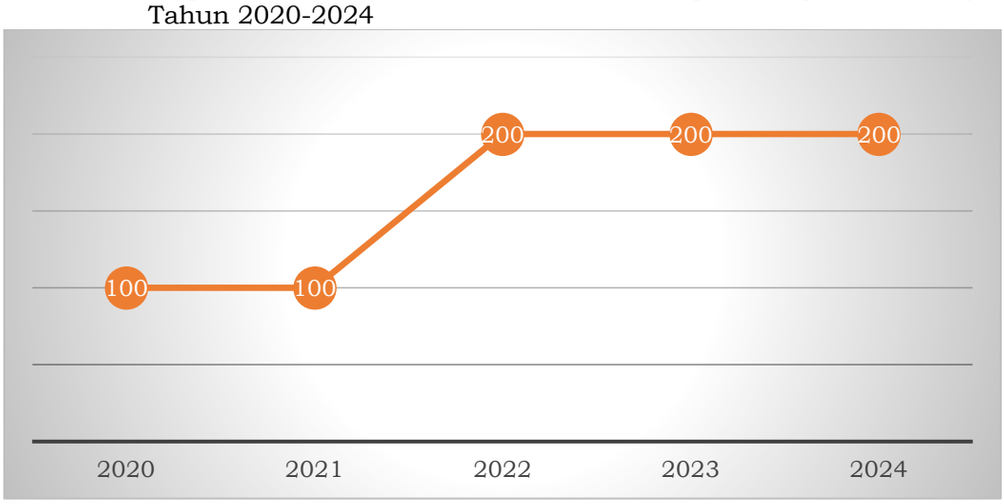
Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia pada masyarakat, maka penyaluran bantuan pupuk organik sangat perlu untuk dilakukan. Terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar, selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2021, jumlah pupuk organik yang disalurkan selalu lebih banyak dari jumlah pupuk kimia yang disalurkan ke masyarakat, terkecuali pada tahun 2020.

2.1.1.8.6. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks Pertanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainnya.

Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah IP 100. Hal ini dapat diartikan bahwa petani dapat melakukan panen atau menanam padi sebanyak satu kali dalam setahun. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024, Indeks Pertanaman Padi meningkat ke angka 200 yang berarti bahwa petani telah melakukan panen sebanyak dua kali dalam setahun. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan tekonologi pertanian kepada para kelompok tani. Selain itu, program dan kegiatan Pemerintah untuk perbaikan dan penambahan jaringan irigasi turut berkontribusi dalam peningkatan waktu panen padi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.9.**

Grafik 2. 9 Capaian Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

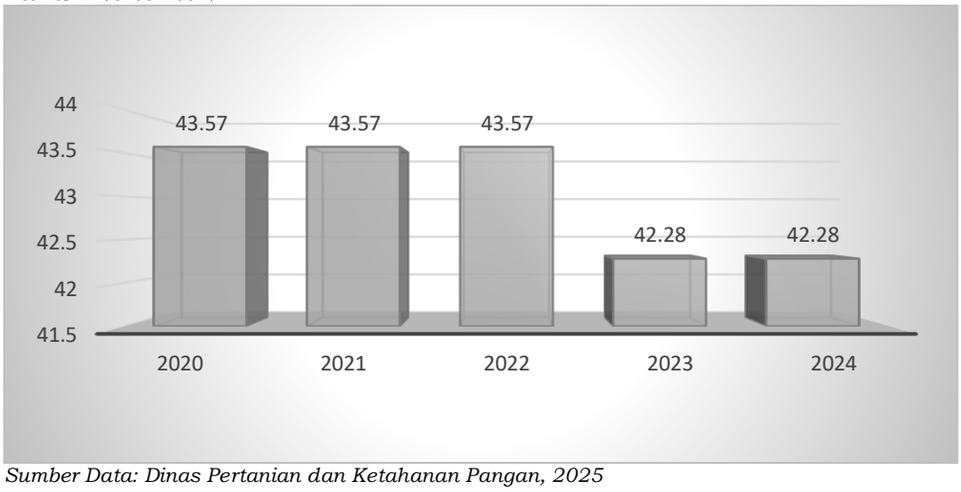


Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.1.8.7. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi merupakan indikator penting dalam mengukur ketahanan dan produktivitas sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Sawah irigasi merujuk pada lahan sawah yang mendapatkan pasokan air secara teratur melalui jaringan irigasi teknis, setengah teknis, atau sederhana. Keberadaan irigasi yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung intensifikasi pertanian dan menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Proporsi sawah irigasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.10.**

Grafik 2. 10 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.1.8.8. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya mengalami kondisi yang fluktuatif dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar masih cenderung rendah karena sektor perikanan masih difokuskan pada perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.11**.

Grafik 2. 11 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Faktor penghambat kurang maksimalnya produksi perikanan budidaya dalam beberapa tahun terakhir atara lain fokus Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi perikanan diprioritaskan pada sektor perikanan tangkap. Lebih lanjut bahwa fasilitas pendukung seperti *hatchery* (balai benih), *cold storage*, sistem karamba jaring apung, dan peralatan budidaya masih terbatas atau kurang memadai serta akses terhadap air bersih dan listrik di beberapa pulau juga menyulitkan proses budidaya yang intensif. Jika dilihat dari segi ketersediaan sumber daya manusia, minimnya tenaga kerja terampil dalam teknik budidaya modern menyebabkan hasil produksi kurang optimal. Selain itu, musim angin kencang (barat dan timur) seringkali menyebabkan kerusakan sarana budidaya laut seperti keramba dan tambak. Selanjutnya beberapa lahan tambak dan kawasan pesisir yang potensial untuk budidaya telah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman atau pariwisata.

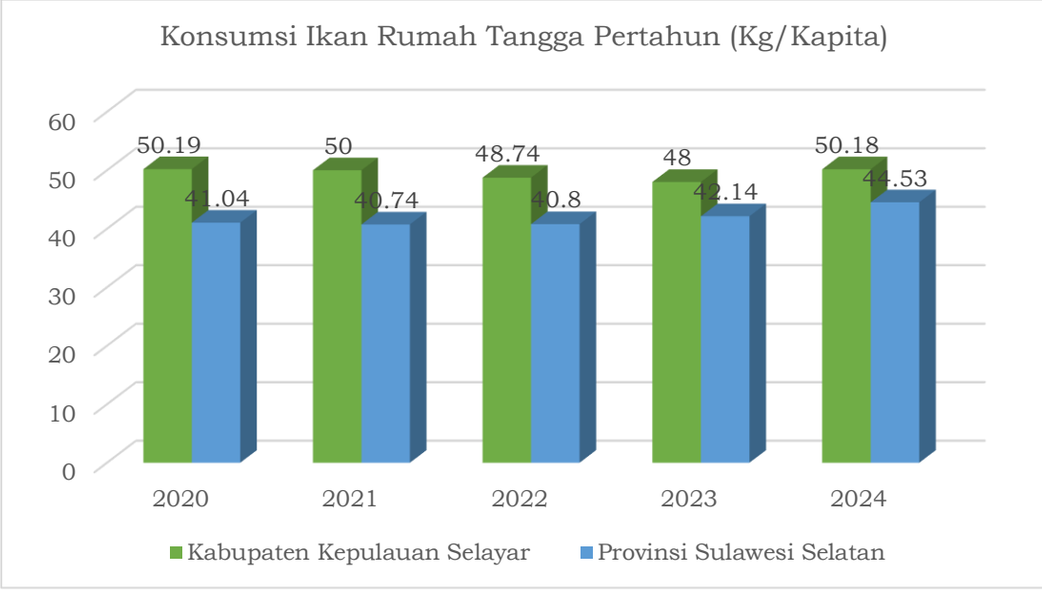
2.1.1.8.9. Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga

Angka konsumsi ikan rumah tangga merupakan indikator penting yang mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Konsumsi ikan yang cukup dan merata berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Sebagai daerah pesisir dan kepulauan, Selayar memiliki sumber daya ikan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, distribusi ikan ke seluruh pulau dan desa belum merata. Pada musim-musim tertentu, terutama saat cuaca buruk, hasil tangkapan menurun dan memengaruhi ketersediaan ikan segar di pasar lokal. Secara umum, masyarakat Selayar memiliki

budaya makan ikan yang kuat, namun variasi konsumsi jenis ikan masih terbatas. Beberapa rumah tangga mungkin lebih memilih ikan tertentu yang harganya lebih mahal atau tidak tersedia sepanjang tahun, sehingga menurunkan total konsumsi kuantitatif. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan angka konsumsi ikan melalui berbagai program. Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, angka konsumsi ikan dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Adapun nilai angka konsumsi ikan dapat dilihat pada **Grafik 2.12.**

Grafik 2. 12 Konsumsi Ikan Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023



Sumber Data: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

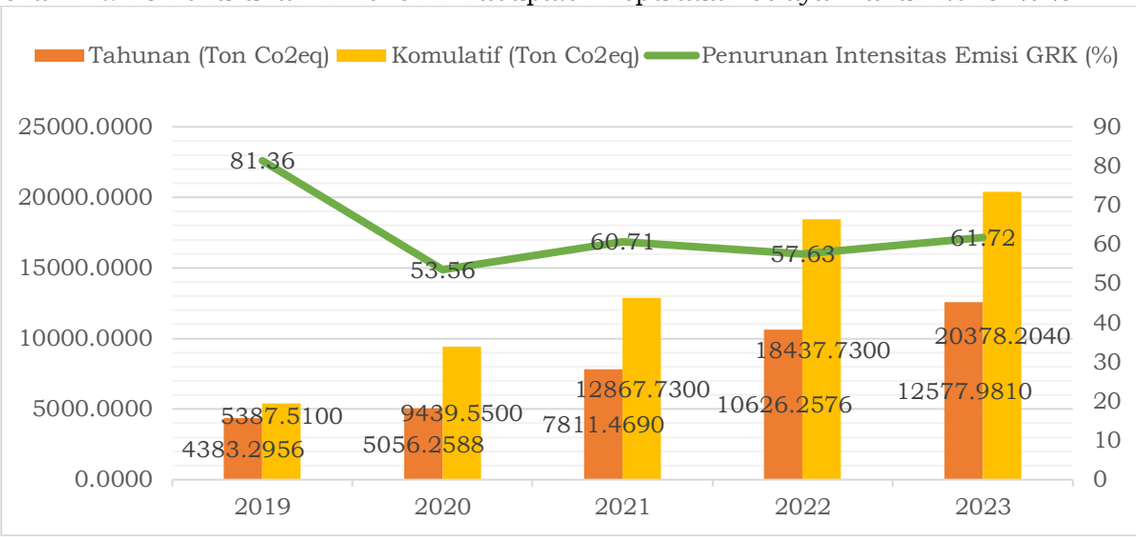
Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang berlimpah tentunya memiliki angka konsumsi ikan rumah tangga yang cukup tinggi bahkan melebihi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, rata-rata angka konsumsi ikan rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2019 sampai 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 50,18 kg/kapita. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, aman, dan bergizi. Ketersediaan produk perikanan tangkap yang tinggi dan budaya konsumsi masyarakat terhadap produk ikan, merupakan pendorong tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.1.8. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.8.1. Penurunan Intensitas GRK

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen internasional untuk secara bersama menahan laju pemanasan global. Progres penurunan emisi tahun 2023 cukup baik (10.626,25 tonCO_2eq). Untuk penurunan emisi, *track record* pada tahun 2018 realisasi penurunan emisi 1.004,21 tonCO_2eq, meningkat ditahun 2019 sebesar 4393,29 tonCO_2eq, meningkat ditahun 2020 sebesar 5056,25 tonCO_2eq dan tahun 2022 sebesar 10.626,25 tonCO_2eq (**Grafik 2.13**).

Grafik 2. 13 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023



Sumber Data: Aplikasi AKSARA, 2025

2.1.1.8.2. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua desa dan kelurahan sepanjang pantai Barat dan pantai Timur serta 33 pulau berpenghuni pada 5 (Lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut. Dibawah ini disajikan data kejadian bencana (**Tabel 2.7**).

Tabel 2. 7 Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

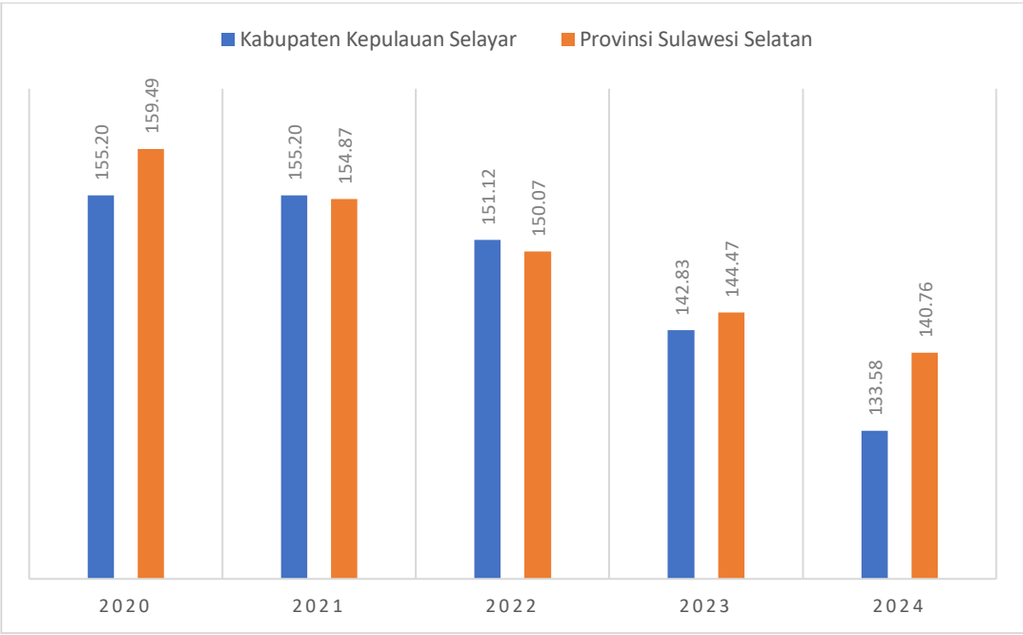
Kejadian Bencana		Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Angin Kencang	Lokasi	Kec.	6	6	7	10	8
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	10 KK	4 KK	157 jiwa	212 jiwa	133 jiwa
	Kejadian	Kali	10	27	236	93	36
	Kerugian	Juta Rp.	69	111,143	-	61,75	49
Banjir/Banjir Rob	Lokasi	Kec.	-	4	3	2	2
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	7 KK	68 jiwa	34 jiwa	15 jiwa
	Kejadian	Kali	-	8	4	2	2
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	-	-
Tanah Longsor	Lokasi	Kec.	-	1	4	-	-
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	1	2 jiwa	-	-
	Kejadian	Kali	-	1	5	-	-
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	-	-
Kebakaran	Lokasi	Kec.	6	2	4	6	6
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	17 KK	1 KK	52 jiwa	43 jiwa	52 jiwa
	Kejadian	Kali	6	2	5	33	13
	Kerugian	Juta Rp.	109	23,144	-	63,53	19
Gempa Bumi	Lokasi	Kec.	-	2	1	-	-
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	1176 KK	-	-	-
	Kejadian	Kali	-	1	1	-	-
	Kerugian	Juta Rp.	-	8.691,30	-	-	-
Kekeringan	Lokasi	Kec.	-	-	-	-	1
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	-	-	-	806 jiwa
	Kejadian	Kali	-	-	-	-	1
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	-	-

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren penurunan nilai indeks tetapi Kabupaten Kepulauan

Selayar masih termasuk daerah dengan tingkat resiko bencana tinggi. Namun, pada tahun 2024, IRB Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berada pada kategori sedang. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini terlihat pada **Grafik 2.14**.

Grafik 2. 14 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Penurunan IRB Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : teridentifikasinya wilayah-wilayah yang rawan bencana, meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui beberapa pelatihan serta pembentukan relawan tanggap bencana serta pembangunan beberapa infrastruktur untuk mencegah bencana. Namun, terdapat beberapa faktor yang masih perlu ditingkatkan terkait pencegahan dan penanggulangan bencana, antara lain : perencanaan dan tata ruang yang responsif terhadap resiko bencana, penyediaan sistem peringatan dini, dukungan kebijakan dan kelembagaan maupun pendanaan serta investasi dalam rangka pengurangan resiko bencana.

2.1.1.9. Kondisi Demografi

2.1.1.9.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 143.096 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 24.378 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 137.071 jiwa, kemudian pada tahun 2024 tumbuh menjadi 143.096 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2020-2024 sebesar 2,16 persen. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.8.**

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	10.492	10.603	10.736	10.951	11.065
Pasilambena	8.005	8.096	8.202	8.578	8.722
Pasimasunggu	8.638	8.702	8.782	9.261	9.433
Taka bonerate	13.484	13.541	13.623	14.774	15.101
Pasimasunggu Timur	7.866	7.885	7.919	8.009	8.218
Bontosikuyu	15.303	15.328	15.381	16.030	16.164
Bontoharu	14.608	14.762	14.945	15.325	15.489
Benteng	24.849	25.096	25.397	24.514	24.378
Bontomanai	13.703	13.790	13.903	14.119	14.079
Bontomatene	13.381	13.398	13.441	13.565	13.522
Buki	6.742	6.773	6.816	6.920	6.925
Kepulauan selayar	**137.071**	**137.974**	**139.145**	**142.100**	**143.096**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk rata-rata lima tahun terakhir mencapai 1,49 persen. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Benteng merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan dengan capaian negatif. Hal ini disebabkan oleh terjadinya migrasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah non perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu disebabkan oleh pernikahan ataupun masyarakat yang beralih profesi untuk bekerja sebagai petani atau nelayan di wilayah kecamatan lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.9.**

Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kecamatan	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-rata
Pasimarannu	12,01	1,06	1,25	1,67	1,37	3,47
Pasilambena	2,69	1,14	1,31	4,58	1,68	2,28
Pasimassunggu	0,62	0,74	0,92	5,45	1,86	1,92
Takabonerate	-3,41	0,42	0,61	8,45	2,21	1,66
Pasimassunggu Timur	3,81	0,24	0,43	2,27	1,47	1,64
Bontosikuyu	-0,35	0,16	0,35	4,22	0,84	1,04
Bontoharu	6,76	1,05	1,24	2,54	1,07	2,53
Benteng	-6,94	0,99	1,2	-3,48	-0,55	-1,76
Bontomanai	6,32	0,63	0,82	1,55	-0,28	1,81
Bontomatene	1	0,13	0,32	0,92	-0,32	0,41
Buki	4,32	0,46	0,63	1,6	0,07	1,42
Kepulauan Selayar	**1,07**	**0,66**	**0,85**	**2,13**	**0,86**	**1,49**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.2. Kepadatan Penduduk

Jika kepadatan penduduk dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, persebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 belum merata, namun terdapat progres pemerataan yang lebih baik. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 adalah 105,45 jiwa/km^2. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah daratan sebesar 24,63 km^2 dihuni oleh 24.378 jiwa dan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 989,77 jiwa/km^2. Adapun daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu 56,65 jiwa/km^2. Berikut disajikan data rata-rata penduduk per desa, kepadatan dan rata-rata anggota rumah tangga tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.10.**

Tabel 2. 10 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk per Kilometer Persegi di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas Area (Km²)	BANYAKNYA		RATA-RATA	
		Desa	Penduduk	Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk per km²
Pasimarannu	195,33	8	11.065	1.838	56,65
Pasilambena	114,88	6	8.722	1.454	75,92
Pasimasunggu	131,8	7	9.433	1.348	71,57
Taka bonerate	49,3	9	15.101	1.678	306,31
Pasimasunggu Timur	67,14	6	8.218	1.370	122,40
Bontosikuyu	248,22	12	16.164	1.347	65,12
Bontoharu	128,12	8	15.489	1.936	120,89
Benteng	24,63	3	24.378	8.126	989,77
Bontomanai	136,42	10	14.079	1.408	103,20
Bontomatene	193,05	12	13.522	1.127	70,04
Buki	68,14	7	6.925	989	101,63
2024	**1.357,03**	**88**	**143.096**	**1.626**	**105,45**
2023	1.357,03	88	142.100	1.615	104,71
2022	1.357,03	88	139.145	1.581	103
2021	1.357,03	88	137.974	1.568	102
2020	1.357,03	88	137.071	1.558	101

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.3. Rasio Jenis Kelamin

Data sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 96,86 yang berarti bahwa penduduk laki-laki di kabupaten Kepulauan Selayar 3,14% lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren meningkat. Kecamatan Bontobaharu memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, sebesar 99 persen dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Bontomatene memiliki nilai rasio jenis kelamin terendah yaitu sebesar 92 persen. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2. 11 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	98	99	97	97	96,61
Pasilambena	98	98	98	98	97,73
Pasimasunggu	96	96	97	97	97,18
Taka bonerate	98	98	99	100	99,72
Pasimasunggu Timur	96	96	97	96	96,27
Bontosikuyu	96	96	98	99	98,67
Bontoharu	100	100	99	99	98,76
Benteng	93	93	94	94	93,85
Bontomanai	98	98	99	99	99,00
Bontomatene	93	93	92	93	92,57
Buki	97	97	96	97	96,84
Kepulauan selayar	**97**	**97**	**97**	**97**	**96,86**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada **Tabel 2.12** berikut.

Tabel 2. 12 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar 2020-2024

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasimarannu	5.437	5.628	11.065	96,61
2	Pasilambena	4.311	4.411	8.722	97,73
3	Pasimasunggu	4.649	4,784	9.433	97,18
4	Takabonerate	7.540	7.561	15.101	99,72
5	Pasimasunggu Timur	4.031	4.187	8.218	96,27
6	Bontosikuyu	8.028	8.136	16.164	98,67
7	Bontoharu	7.696	7.793	15.489	98,76
8	Benteng	11.802	12.576	24.378	93,85
9	Bontomanai	7.004	7.075	14.079	99,00
10	Bontomatene	6.500	7.022	13.522	92,57
11	Buki	3.407	3.518	6.925	96,84
	2024	**70.405**	**72.691**	**143.096**	**96,86**
	2023	69.907	72.193	142.100	96,83
	2022	68.296	70.849	139.145	96,40
	2021	67.713	70.261	137.974	96,37
	2020	67.262	69.809	137.071	96,35

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.4. Struktur Usia

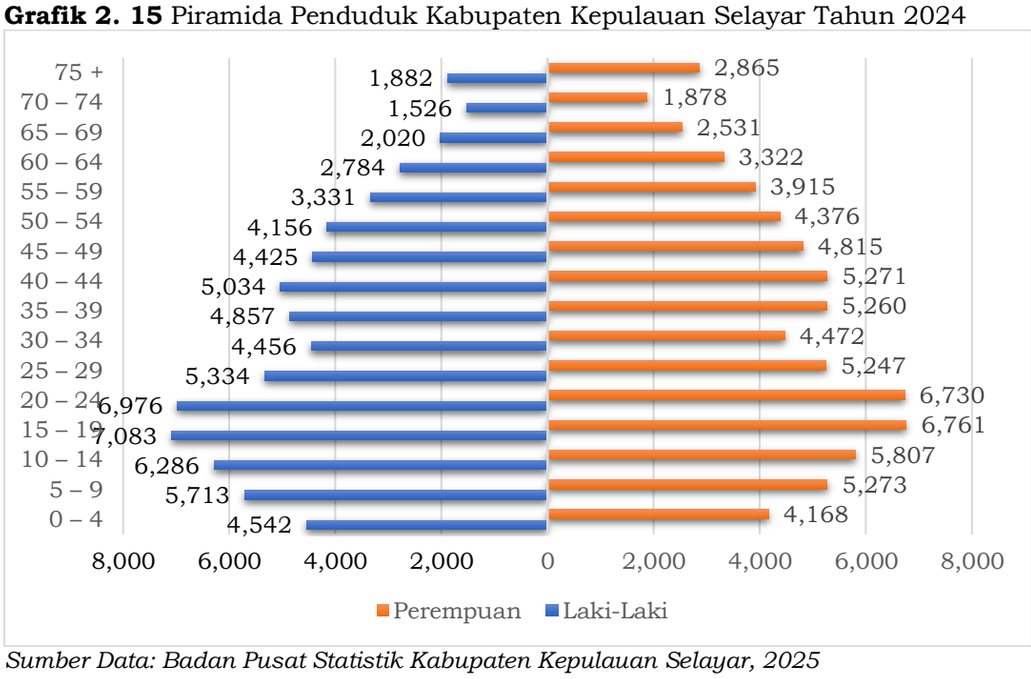
Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori sedang, karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40 persen atau pada tahun 2024 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun sebesar 22,22 persen (31.789 jiwa, terdiri dari 16.541 laki-laki dan 15.248 perempuan) dari total jumlah penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 98.605 jiwa (68,91 persen) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 8,88 persen atau 12.702 jiwa (terdiri dari 5.428 laki-laki dan 7.274 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.13** dan **Grafik 2.15.**

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
1	0 – 4	4.542	4.168	8.710	108,97
2	5 – 9	5.713	5.273	10.986	108,34
3	10 – 14	6.286	5.807	12.093	108,25
4	15 – 19	7.083	6.761	13.844	104,76
5	20 – 24	6.976	6.730	13.706	103,66
6	25 – 29	5.334	5.247	10.581	101,66
7	30 – 34	4.456	4.472	8.928	99,64
8	35 – 39	4.857	5.260	10.117	92,34
9	40 – 44	5.034	5.271	10.305	95,50
10	45 – 49	4.425	4.815	9.240	91,90
11	50 – 54	4.156	4.376	8.532	94,97
12	55 – 59	3.331	3.915	7.246	85,08
13	60 – 64	2.784	3.322	6.106	83,80
14	65 – 69	2.020	2.531	4.551	79,81
15	70 – 74	1.526	1.878	3.404	81,26
16	75 +	1.882	2.865	4.747	65,69
JUMLAH		70.405	72.691	143.096	96,86

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Grafik 2. 15 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2021 mengalami mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,02 persen dari -1,78 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2022 mengalami perlambatan menjadi 3,67 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 3,68 persen, sementara itu di tahun 2024 kembali melambat menjadi 3,33 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten lain dalam wilayah setara dengan pembagian kelompok wilayah berdasarkan kawasan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi terakhir dan Kabupaten Jeneponto merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03 persen. Jika dilihat antara tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional terkecuali pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten dalam wilayah setara dapat dilihat pada **Tabel 2.14**.

Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Satuan	Pertumbuhan Ekonomi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeneponto	%	0,16	5,40	3,81	1,90	6,03
2	Sinjai	%	1,55	5,23	4,87	5,71	5,17
3	Bulukumba	%	0,43	4,76	3,81	4,11	4,60
4	Bantaeng	%	0,52	8,86	15,45	5,56	4,36
5	**Kepulauan Selayar**	**%**	**-1,78**	**4,02**	**3,67**	**3,68**	**3,33**
	Sulawesi Selatan	**%**	**-0,70**	**4,65**	**5,09**	**4,51**	**5,02**
	Nasional	**%**	**-2,07**	**3,70**	**5,31**	**5,04**	**5,03**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Memperhatikan Tabel 2.14 di atas, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada 2024 terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan pada sektor-sektor dominan perekonomian daerah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang hampir 40% PDRB hanya tumbuh 1,38%, sementara sektor Konstruksi yang berkontribusi sekitar 18% hanya tumbuh 2,11%. Keduanya tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Ketergantungan tinggi pada sektor primer dengan pertumbuhan yang stagnan, ditambah kontraksi kecil pada sektor pertambangan, menjadi faktor utama perlambatan. Meskipun beberapa sektor jasa menunjukkan pertumbuhan tinggi, kontribusinya terhadap PDRB masih terlalu kecil untuk mengimbangi perlambatan di sektor-sektor utama. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi yaitu dari 0,24 persen tahun 2023 menjadi -0,62 persen tahun 2024, sementara sektor lainnya mengalami pertumbuhan meskipun tidak signifikan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor sebesar 0,073 poin. Laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.15.**

Tabel 2. 15 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Satuan	Pertumbuhan PDRB				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	%	1,44	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	%	-0,20	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	7,45	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	13,46	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	%	2,01	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-0,42	5,28	7,86	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan	%	-19,00	9,98	11,67	4,84	2,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-11,85	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	%	11,33	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	4,23	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	%	10,32	1,25	0,73	4,88	3,73
M,N	Jasa Perusahaan	%	-10,56	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3,65	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	%	7,22	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	12,01	9,41	8,50	5,34	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	-4,95	5,77	3,12	5,21	11,72
Produk Domestik Regional Bruto		**%**	**-1,78**	**4,02**	**3,67**	**3,68**	**3,33**

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dengan memperhatikan data di atas, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan sebesar 0,35 poin. Hal tersebut disebabkan karena sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten mengalami perlambatan sebesar 1,88 poin (3,26 persen tahun 2023 menjadi 1,38 persen tahun 2024), sektor lain yang juga merupakan penyumbang PDRB terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami perlambatan antara lain adalah sektor konstruksi melambat

dari 3,45 persen menjadi 2,11 persen, sektor tranportasi dan pergudangan melambat menjadi 2,41 persen tahun 2024 dari 4,84 persen tahun 2023.

Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, namun akibat perubahan iklim serta kekeringan menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian. Produksi beberapa tanaman pangan seperti padi dan jagung juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Pertumbuhan yang juga melambat pada sektor konstruksi disebabkan oleh penurunan realisasi belanja modal dari APBD terutama belanja modal gedung, jalan, jaringan dan irigasi dari 149 milyar lebih pada tahun 2023 menjadi 105 milyar pada tahun 2024. Sektor transportasi juga mengalami perlambatan, disebabkan oleh tidak optimalnya kunjungan wisatawan. Selain itu, transportasi penerbangan juga belum normal seperti saat sebelum pandemi Covid 19. Terkhusus pada sektor pertambangan dan penggalian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki kewenangan pada pengelolaan sektor tambang dan penggalian.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 4.047,38 Milliar Rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 4.182,33 Milliar Rupiah. Nilai PDRB (ADHK) tahun 2024 menurut lapangan usaha yang terbesar adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1.665,77 Milliar Rupiah, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 760,50 Milliar Rupah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 406,50 Milliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB sektor-sektor tersebut disebabkan antara lain karena mata pencaharian masyarakat Selayar didominasi oleh pertanian dan perikanan, banyaknya kegiatan konstruksi, tingginya tingkat konsumsi dan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.16.**

Tabel 2. 16 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.501,5	1.550,58	1.591,13	1.643,05	1.665,77
B	Pertambangan dan Penggalian	29,6	31,60	34,02	35,22	35,20
C	Industri Pengolahan	118,4	124,49	133,48	138,53	146,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	5,71	5,76	6,21	6,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,5	5,51	5,74	5,75	5,79
F	Konstruksi	661,3	688,54	719,95	744,81	760,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323,0	340,01	366,73	384,71	406,50
H	Transportasi dan Pergudangan	77,1	87,74	94,63	99,21	101,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,9	9,24	10,49	11,03	11,71
J	Informasi dan Komunikasi	139,5	141,47	143,78	153,05	160,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,7	44,97	45,17	46,46	47,59
L	Real Estat	64,5	65,27	65,74	68,95	71,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,6	0,57	0,58	0,60	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	306,4	319,14	312,04	318,64	344,33

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	233,9	244,96	257,68	268,07	282,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,2	87,76	95,22	100,31	109,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	19,8	20,99	21,64	22,77	25,44
Produk Domestik Regional Bruto		**3.620,2**	**3.765,56**	**3.903,80**	**4.047,38**	**4.182,33**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 7.986,24 Milliar Rupiah, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 8.340,51 Milliar Rupiah pada tahun 2024. Sepanjang lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2024 sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 3.595,17 Milliar Rupiah atau 43,10 persen, selanjutnya adalah sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,36 persen (1.781,79 Milliar Rupiah) dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 594,19 Milliar Rupiah (7,12 persen). Sementara sektor Jasa Perusahaan sebagai penyumbang PDRB terkecil yaitu sebesar 1,33 Milliar Rupiah (0,02 persen). Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.17.**

Tabel 2. 17 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.712,9	2.913,58	3.268,73	3.504,83	3.595,17
B	Pertambangan dan Penggalian	59,7	64,26	71,11	75,72	75,34
C	Industri Pengolahan	179,4	191,83	207,73	224,94	244,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	5,88	5,99	6,43	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7	7,07	7,45	7,55	7,59
F	Konstruksi	1.401,6	1.494,77	1.621,53	1.732,60	1.781,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	499,1	532,85	599,82	645,43	692,55
H	Transportasi dan Pergudangan	127	142,50	169,67	187,92	195,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,3	15,07	17,31	18,74	20,33
J	Informasi dan Komunikasi	160,6	165,03	167,74	178,76	188,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,6	89,01	95,55	100,94	106,01
L	Real Estat	93,3	94,78	96,44	102,09	107,39
M,N	Jasa Perusahaan	1,1	1,08	1,16	1,22	1,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	501,1	526,87	518,76	537,26	594,19
P	Jasa Pendidikan	371,2	397,82	420,18	437,27	473,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,7	157,90	173,45	184,75	205,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	32,7	35,10	37,63	39,81	44,64
Produk Domestik Regional Bruto		**6.392,7**	**6.835,40**	**7.480,47**	**7.986,24**	**8.340,51**

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 696.252,76 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,20 persen, dan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mencapai 396.141,74 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,06 persen. Selama lima tahun terakhir, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan.

Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih seiring dengan perekembangan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2. 18 Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Periode	PDRB		Kontribusi (%)
	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)			
2020	6.392,74	504.478,54	1,27
2021	6.835,40	545.230,03	1,25
2022	7.480,47	605.144,68	1,23
2023	7.986,24	652.574,05	1,22
2024	**8340,51**	**696.252,76**	**1,20**
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)			
2020	3.620,20	328.192,82	1,10
2021	3.765,56	343.402,51	1,09
2022	3.903,80	360.874,18	1,08
2023	4.047,38	377.162,17	1,07
2024	**4.182,33**	**396.141,74**	**1,06**

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah pendapatan per kapita yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan perekonomian.

2.1.2.2.2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berikut ini digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020-2024 (**Tabel 2.19**).

Tabel 2. 19 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Periode	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2020	46,73	26,46
2021	49,47	27,25
2022	53,56	27,95
2023	56,57	28,67
2024	**58,45**	**29,31**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan PDRB yang tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Tahun 2024, PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar 8,34 milyar lebih dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 7,99 milyar lebih atau tumbuh sebesar 4,44 persen. Disisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2024 hanya sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 disebabkan oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor lapangan usaha kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa lainnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat untuk jasa-jasa praktis, seperti : laundry, tukang cukur, servis motor dan elektronik. Banyaknya permintaan ini kemudian menyebabkan tumbuhnya UMKM baru yang bergerak dibidang jasa. Sektor lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2024 adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelayanan jaminan sosial wajib oleh Pemerintah Daerah termasuk program dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau program bantuan sosial lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada urutan ketiga dari lima kabupaten/kota setara dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan PDRB Perkapita sebesar 31,16 Juta Rupiah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,57 Juta Rupiah dan Nasional Sebesar 78,62 Juta Rupiah. Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada **Tabel 2.20.**

Tabel 2. 20 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Satuan	PDRB Per Kapita ADHB				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bantaeng	Juta Rp	45,68	50,79	60,57	62,78	65,48
2	Sinjai	Juta Rp	43,74	46,99	51,13	55,29	59,07
3	**Kepulauan Selayar**	**Juta Rp**	**46,73**	**49,47**	**53,56**	**56,57**	**58,45**
4	Bulukumba	Juta Rp	33,34	35,97	38,66	41,90	44,48
5	Jeneponto	Juta Rp	25,70	27,28	28,74	29,32	31,16
	Sulawesi Selatan	**Juta Rp**	**56,51**	**59,66**	**65,59**	**69,70**	**73,57**
	Nasional	**Juta Rp**	**57,27**	**62,26**	**71,03**	**74,96**	**78,62**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

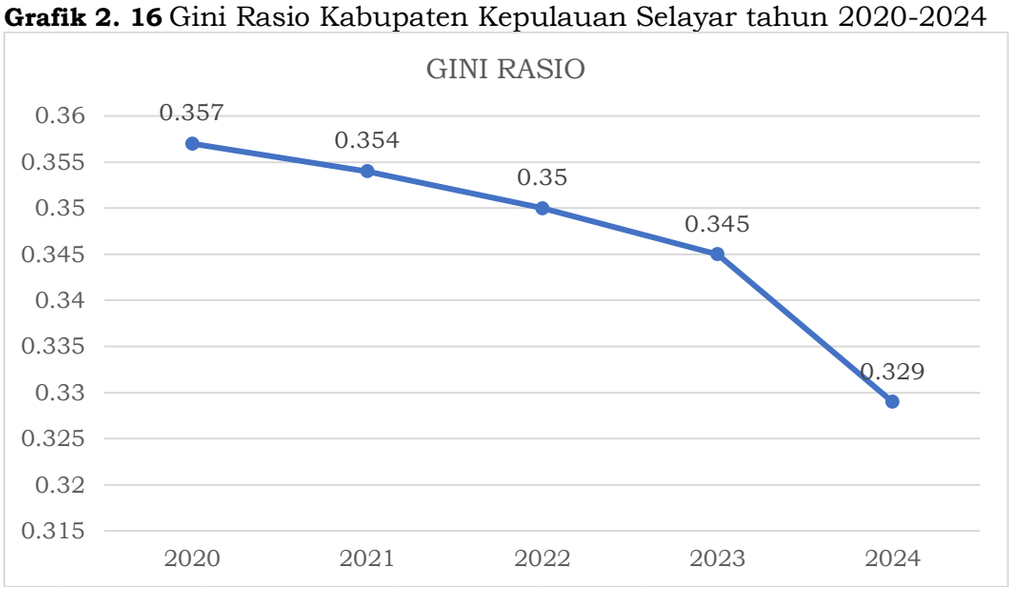
2.1.2.2.3. Gini Rasio

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata.

Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahun terakhir, pada tahun 2021 gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,354, begitupun dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,350 dan 0,345. Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.16.**

Grafik 2. 16 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Berdasarkan **Grafik 2.3**, penurunan angka gini rasio dipengaruhi oleh menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 0,80 persen pada tahun 2021 menjadi 0,70 persen pada tahun 2022 dan menurun lagi menjadi 0,64 pada tahun 2023, sementara golongan pengeluaran ≥ 300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian dimaksud, antara lain: pengembangan program sosial untuk masyarakat miskin, pembangunan dermaga plensengan di beberapa wilayah kecamatan kepulauan untuk menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa ke wilayah terpencil serta pemberian bantuan alat perikanan, pertanian, UMKM serta alat-alat yang mendukung produktivitas tenaga kerja lainnya. Faktor-faktor dimaksud sangat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah kepulauan khususnya sehingga ketimpangan pendapatan menjadi semakin kecil.

Disamping itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi penyebab meningkatnya Indeks Gini. Beberapa faktor dimaksud antara lain letak geografis yang terdiri dari 130 pulau mengakibatkan tingginya harga bahan pokok di wilayah kepulauan sehingga daya beli sebagian masyarakat menjadi lemah, infrastruktur dasar yang belum merata terutama air bersih,

infrastruktur transportasi, jaringan listrik dan telekomunikasi. Sebagian masyarakat di wilayah kepulauan yang bekerja sebagai petani dan nelayan sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dengan masyarakat di wilayah daratan yang lebih memiliki akses terhadap akses lapangan pekerjaan yang bervariasi, ketimpangan kesempatan dalam pendidikan dan kesehatan.

Angka gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan keenam jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, kabupaten dengan gini rasio terendah di wilayah ini adalah Kabupaten Bantaeng yakni sebesar 0,249. Sedangkan kabupaten dengan gini rasio tertinggi adalah Kabupaten Bulukumba dengan nilai gini rasio sebesar 0,329 (sama dengan gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar). Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,363, sementara jika dibandingkan dengan Nasional, capaian Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih lebih baik, dimana pada tahun 2024 gini rasio Nasional sebesar 0,381. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.21.**

Tabel 2. 21 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Gini Rasio				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bantaeng	0,344	0,332	0,320	0,336	0,249
2	Sinjai	0,372	0,384	0,357	0,345	0,287
3	Jeneponto	0,349	0,353	0,338	0,340	0,304
4	**Kep.Selayar**	**0,357**	**0,354**	**0,350**	**0,345**	**0,329**
5	Bulukumba	0,371	0,362	0,361	0,379	0,329
	Sulawesi Selatan	**0,389**	**0,377**	**0,338**	**0,377**	**0,363**
	Nasional	**0,385**	**0,381**	**0,381**	**0,388**	**0,381**

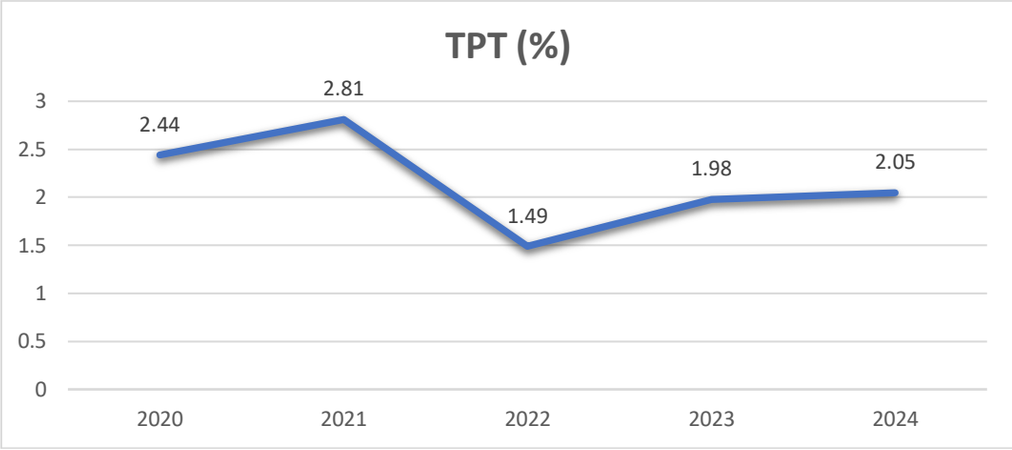
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.2.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah angkatan kerja, karena TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 142.700 jiwa dan sebesar 74.971 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 2,05 persen atau 1.540 jiwa merupakan pengangguran terbuka.

Capaian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mengalami peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2023. Melihat data capaian tahun 2024 tersebut, walapun mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan persentase, diharapkan kembali dapat terus diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Detail capaian persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.17.**

Grafik 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Menurunnya TPAK sebagaimana disajikan diatas, sangat berpengaruh terhadap meningkatnya TPT, dimana peningkatan TPT menunjukkan bahwa semakin banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 2,05 persen berarti terdapat 2-3 pengangguran dalam 100 angkatan kerja. Berdasarkan status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, terdapat 4 sektor yang mengalami penurunan yaitu pekerja keluarga/tak dibayar turun dari 12,61 persen tahun 2023 menjadi 8,51 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap turun dari 9,91 persen menjadi 6,43 persen, berusaha dibantu buruh tetap turun dari 2,46 persen menjadi 1,89 persen, dan pekerja bebas mengalami penurunan dari 5,10 persen menjadi 1,51 persen. Sementara hanya 2 sektor yang mengalami peningkatan yaitu buruh/ karyawan/pegawai meningkat dari 36,10 persen tahun 2023 menjadi 44,92 persen, dan berusaha sendiri meningkat dari 33,82 persen menjadi 36,75 persen.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 merupakan yang terendah kedua. Kabupaten dengan TPT terendah adalah Kabupaten Sinjai dengan TPT sebesar 1,52 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng dengan TPT sebesar 2,57 persen. Angka TPT Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan TPT Nasional. Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.22.**

Tabel 2. 22 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	TPT (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sinjai	2,65	2,61	1,80	1,69	1,52
2	**Kepulauan Selayar**	**2,44**	**2,81**	**1,49**	**1,98**	**2,05**
3	Bulukumba	3,42	3,14	1,26	1,31	2,23
4	Jeneponto	2,31	2,38	2,21	2,13	2,47
5	Bantaeng	4,27	4,07	2,72	3,71	2,57
	Sulawesi Selatan	**6,31**	**5,72**	**4,51**	**4,33**	**4,19**
	Nasional	**7,07**	**6,49**	**5,86**	**5,32**	**4,91**

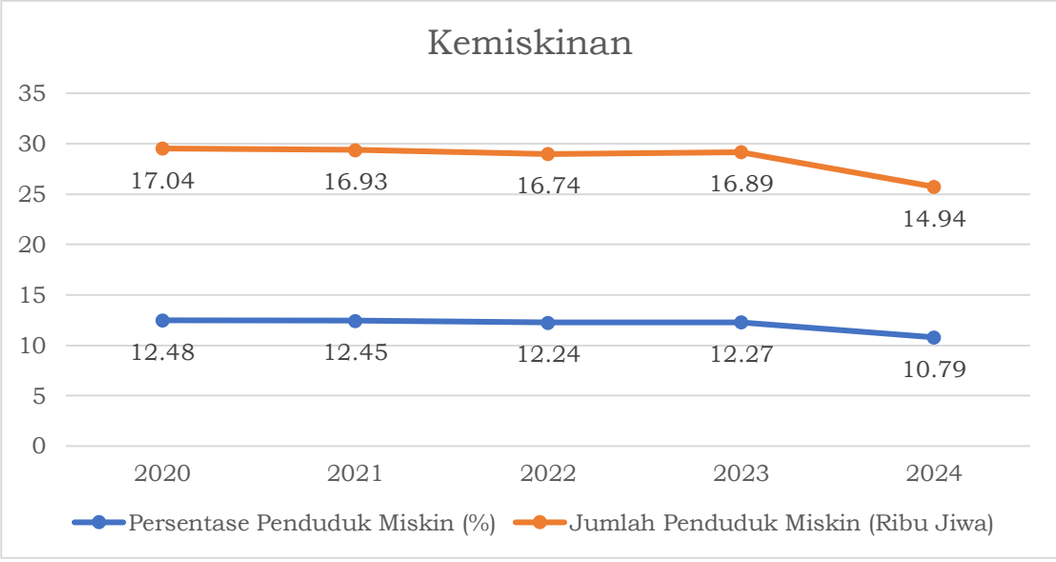
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

TPT Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan TPT secara nasional. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga pemberian alat-alat pertanian dan perikanan, serta bantuan bibit pertanian menyebabkan masyarakat masih bekerja dan tidak menganggur. Selain itu, pemberian bantuan alat-alat pengolahan bagi UMKM yang dibarengi dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, mampu menghasilkan tenaga kerja baru. Namun, jika dilihat dari tren dari tahun 2022 sampai 2024, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab, antara lain: ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta sektor pemerintahan; rendahnya kualitas angkatan kerja, 79 persen diantaranya tidak berkualifikasi pendidikan tinggi; perlambatan pertumbuhan PDRB sektor konstruksi mengakibatkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan, serta komposisi penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibandingkan sektor formal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stagnan menyebabkan para pekerja rawan untuk kembali menganggur.

2.1.2.2.5. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu lima tahun persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dari 12,48 persen pada tahun 2020 menjadi 10,79 persen pada tahun 2024, namun jika dilihat data antara tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari 12,24 persen menjadi 12,27 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,42 persen (525 jiwa). Data persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar secara detail dapat dilihat pada **Grafik 2.18.**

Grafik 2. 18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Sektor

primer cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. Namun, persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : pemberian bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin; pemberian bantuan alat-alat yang dapat menunjang produktivitas kerja masyarakat; pemberian pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD untuk menurunkan tingkat kemiskinan; pelaksanaan program-program padat karya; pelaksanaan Pilkada serentak mendatangkan pendapatan yang meningkat di kalangan UMKM maupun masyarakat umum.

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan empat Kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, dimana yang terendah adalah Kabupaten Bulukumba sebesar 6,71 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 11,82 persen. Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka angka kemiskinan Kepulauan Selayar masih diatas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,06 persen dan angka kemiskinan Nasional sebesar 8,57 persen. Tingkat kemiskinan dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 2.20.**

Tabel 2. 23 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	Tingkat Kemiskinan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bulukumba	7,10	7,43	7,39	7,22	6,71
2	Sinjai	9,00	8,84	8,8	8,55	7,82
3	Bantaeng	8,95	9,41	9,07	9,18	8,26
4	**Kepulauan Selayar**	**12,48**	**12,45**	**12,24**	**12,27**	**10,79**
5	Jeneponto	14,58	14,28	13,73	13,06	11,82
	Sulawesi Selatan	**8,72**	**8,78**	**8,63**	**8,70**	**8,06**
	Nasional	**10,19**	**9,71**	**9,54**	**9,36**	**8,57**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

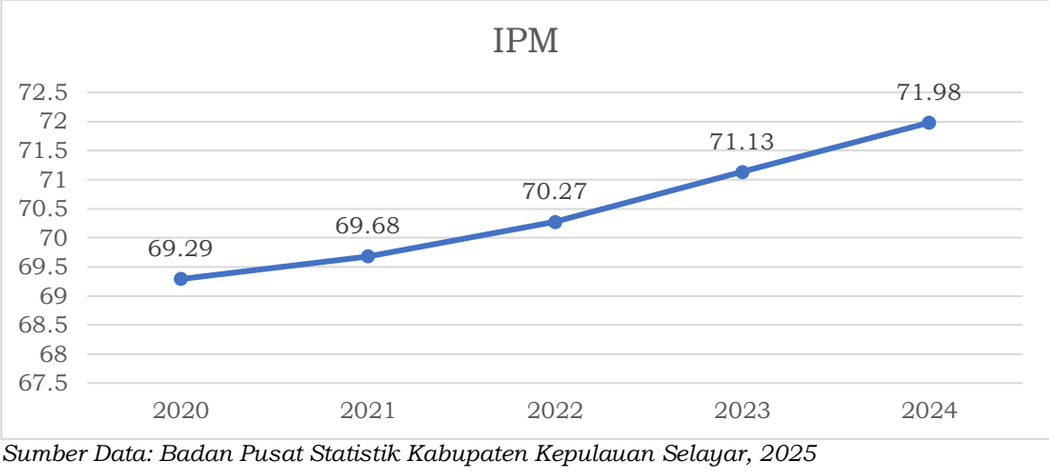
Peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Garis kemiskinan pada tahun 2022 berada pada kisaran 430.976 rupiah, meningkat menjadi 453.432 rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 15.323 dibandingkan tahun 2023 sehingga menjadi 468.755 rupiah. Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, namun pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan P1 dan P2 tahun 2023.

2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM terbentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan hasil *long form* sensus penduduk tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2020 sebesar 69,29, pada tahun 2021 sebesar 69,68 dan pada tahun 2024 menjadi 71,98. Capaian tersebut termasuk kategori tinggi karena telah melampaui angka IPM 70 yang merupakan angka terendah untuk ketegori IPM tinggi. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.19.**

Grafik 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada Grafik 2.19, salah satu yang mempengaruhi capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan serta ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan seluruh indikator komposit IPM dari tahun ke tahun dan perhitungan angka harapan hidup berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 menghasilkan Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat signifikan. Namun disisi lain, terdapat pula faktor yang menjadi permasalahan dalam rangka peningkatan capaian IPM dimaksud. Beberapa faktor itu, antara lain : angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan AHLS Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada peringkat 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, UHH Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada peringkat 18 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta Pengeluaran per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada peringkat 20 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten lain dalam Kawasan Setara berdasarkan kawasan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ketiga. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai sebesar 69,45 dan yang tertinggi adalah Kabupaten Bulukumba dengan nilai sebesar 74,43. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 1,19 persen hanya berada dibawah Kabupaten Bantaeng dengan laju pertumbuhan IPM yang sama yaitu 1,29 persen. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah. Dimana pada tahun 2024 capaian IPM Sulawesi Selatan sebesar 75,18 dan capaian Nasional sebesar 75,02. Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.24.**

Tabel 2. 24 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	IPM					Laju IPM (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
1	Bulukumba	71,37	72,02	72,75	73,64	74,43	1,07
2	Bantaeng	69,45	69,71	70,41	71,28	72,20	1,29
3	**Kepulauan Selayar**	**69,29**	**69,68**	**70,27**	**71,13**	**71,98**	**1,19**
4	Sinjai	69,86	70,02	70,6	71,20	71,81	0,86
5	Jeneponto	67,22	67,54	68,13	68,95	69,45	0,73
	Sulawesi Selatan	**73,08**	**73,38**	**73,96**	**74,60**	**75,18**	**0,78**
	Nasional	**72,81**	**73,16**	**73,77**	**74,39**	**75,02**	**0,85**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke 22, terjadi sedikit peningkatan menjadi urutan ke 21 pada tahun 2022, posisi tersebut masih sama pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali meningkat 1 peringkat ke urutan 20. Hal ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sangat tertinggal jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, jika dilihat dari capaian keempat indikator pembentuk IPM yakni indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup, serta indikator pengeluaran per kapita.

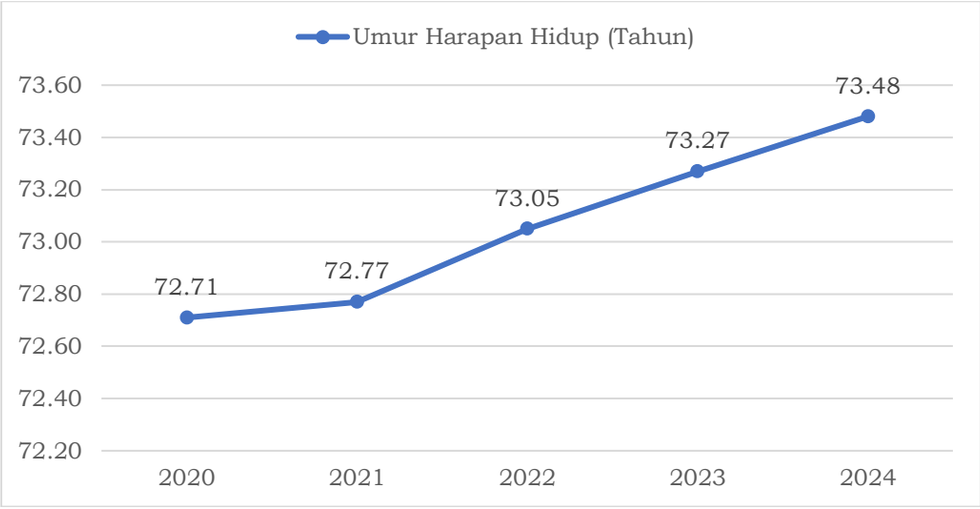
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan estimasi rata-rata tambahan usia yang diharapkan dapat dijalani seseorang sejak lahir atau setelah mencapai usia tertentu (usia ke-x). Angka usia harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 adalah 72,77 tahun, pada tahun 2022 naik menjadi 73,05 tahun dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,22 poin menjadi 73,27 tahun dan meningkat lagi menjadi 73,48 tahun pada tahun 2024. Angka

usia harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.20.**

Grafik 2. 20 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan ini seiring dengan kebijakan pembangunan dan pemerataan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, yaitu : pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah kepulauan; pelayanan kesehatan bergerak ke wilayah terpencil dan kepulauan; penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Tabel 2. 25 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kab./ Kota	UHH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bulukumba	73,06	73,25	73,67	74,01	74,18
2	Jeneponto	73,11	73,23	73,60	73,81	74,00
3	**Kepulauan Selayar**	**72,71**	**72,77**	**73,05**	**73,27**	**73,48**
4	Sinjai	72,22	72,30	72,60	72,83	73,04
5	Bantaeng	72,15	72,20	72,46	72,67	72,85
	Sulawesi Selatan	**73,02**	**73,11**	**73,40**	**73,63**	**73,84**
	Nasional	**73,37**	**73,46**	**73,70**	**73,93**	**74,15**

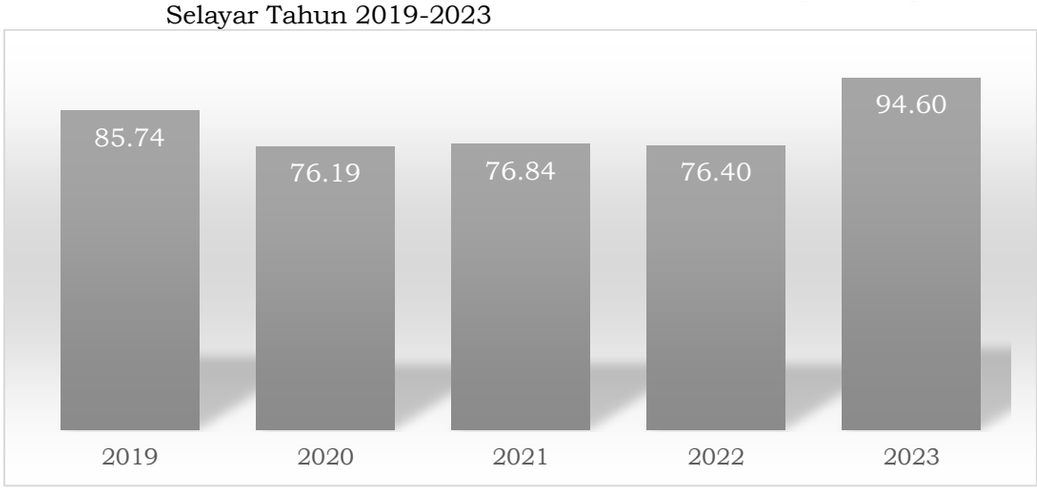
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.2.2.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi adalah dengan mendorong agar setiap persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, atau bidan, serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin merupakan indikator pelayanan wajib dasar dalam Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, dan wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten / kota untuk seluruh warganya tanpa terkecuali.

Pada tahun 2023, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1.868 orang, dan sebanyak 1.767 orang diantaranya menjalani proses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran cakupan persalinan di fasilitas kesehatan selama periode tahun 2019 hingga 2023 terlihat pada **Grafik 2.21**.

Grafik 2. 21 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

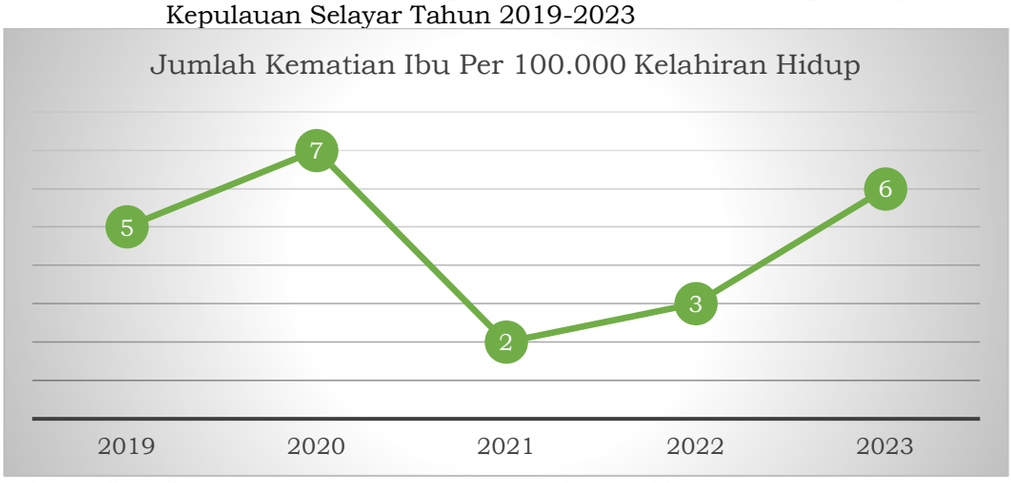
Peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2023, disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat pada fasilitas kesehatan akibat peran aktif kader kesehatan dan petugas kesehatan untuk melakukan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya persalinan aman. Selain itu, program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin sangat membantu masyarakat melakukan persalinan ataupun pelayanan kesehatan lainnya.

2.1.2.2.3. Angka Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, indikator ini menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 sebesar 6, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 6 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 kematian ibu hamil, 1 kematian ibu bersalin dan 1 kematian ibu nifas. Tren jumlah kematian ibu Kabupaten Kepulauan Selayar per 100.000 kelahiran hidup terlihat pada **Grafik 2.22**.

Grafik 2. 22 Jumlah Kematian Ibu per 100 Ribu Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

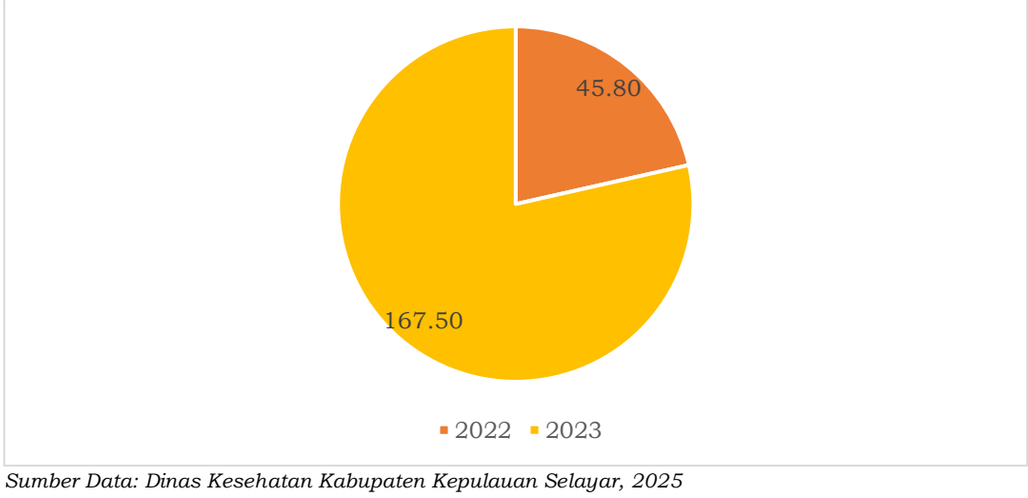
Berdasarkan tabel di atas, jumlah kematian ibu pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 terbesar adalah karena

perdarahan sebanyak 2 kasus, disusul kematian ibu disebabkan karena gangguan cerebrovascular sebanyak 1 kasus dan disebabkan penyebab lain-lain sebanyak 3 kasus. Standar Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat baik. Hal ini menunjukkan upaya menjaga kesehatan ibu hamil dan bersalin sangat baik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografis dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

2.1.2.2.4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Jumlah penemuan kasus TBC dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk meminimalisir penularan TBC (misalnya: penderita tidak menggunakan masker saat berinteraksi dengan masyarakat dan terlambatnya masyarakat untuk berobat secara lengkap). Pada tahun 2023, berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah perkiraan penderita Tuberculosis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 496 orang. Dari jumlah tersebut, pada kenyataannya, jumlah penderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 831 orang, sehingga capaian *treatment coverage* kasus Tuberculosis pada tahun 2023 sebesar 167,5 persen. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis terlihat pada **Grafik 2.28**.

Grafik 2. 23 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan *treatment coverage* disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: penerapan strategi aktif penemuan kasus berupa skrining aktif (*Active Case Finding*/ACF), yaitu mencari kasus TB secara proaktif di komunitas, terutama di kelompok risiko tinggi seperti penderita HIV, narapidana, dan pekerja kesehatan serta penguatan pelacakan kontak (*contact tracing*) terhadap orang-orang yang tinggal serumah atau berinteraksi erat dengan pasien TB.

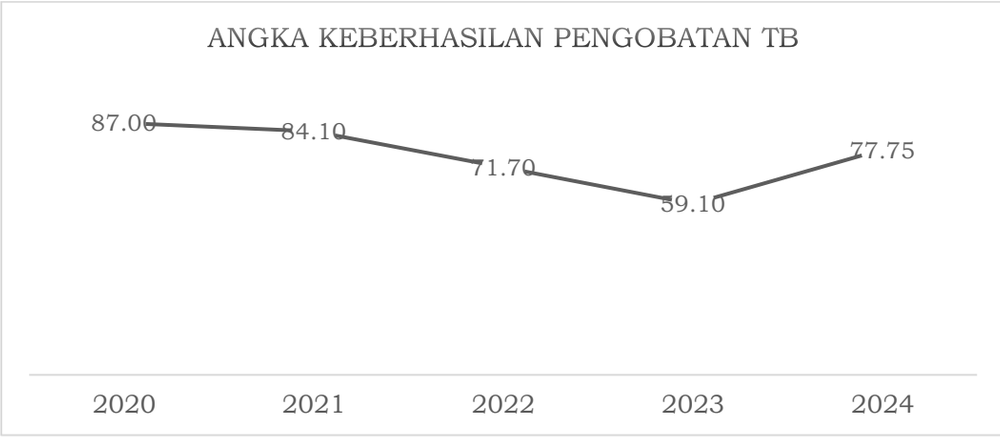
2.1.2.2.5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan TBC *(Success Rate)* adalah jumlah kasus TBC yang sembuh dengan pengobatan lengkap diantara kasus TBC yang diobati

dan dilaporkan. Penderita TBC yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10-15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TBC) yang dievaluasi pada tahun berjalan.

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2023, meskipun secara jumlah orang yang berhasil sembuh semakin meningkat. Pada tahun 2023, jumlah pasien TBC yang berhasil diobati sebanyak 240 orang dari 406 kasus yang ditemukan pada tahun sebelumnya atau sebesar 59,1 persen. Rincian angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis terlihat pada **Grafik 2.24**.

Grafik 2. 24 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Salah satu faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pengobatan TB adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Pengobatan TB memiliki durasi minimal enam bulan dan membutuhkan disiplin tinggi dari pasien untuk mengonsumsi obat secara teratur. Ketidakpatuhan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan pengobatan dan berkembangnya resistensi obat.

Faktor berikutnya adalah ketersediaan dan kelengkapan obat anti tuberkulosis (OAT). Obat yang tersedia secara gratis, tepat jenis, dan tidak terputus sangat membantu keberlanjutan terapi. Kualitas layanan kesehatan juga menjadi penentu. Petugas kesehatan yang terlatih dalam penatalaksanaan TB, fasilitas pemeriksaan yang memadai (seperti mikroskop, alat tes cepat molekuler/TCM, dan rontgen), serta sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat sangat mendukung proses diagnosis dan monitoring pengobatan. Layanan kesehatan yang responsif dapat mendeteksi kasus lebih awal dan memberikan pengobatan yang sesuai.

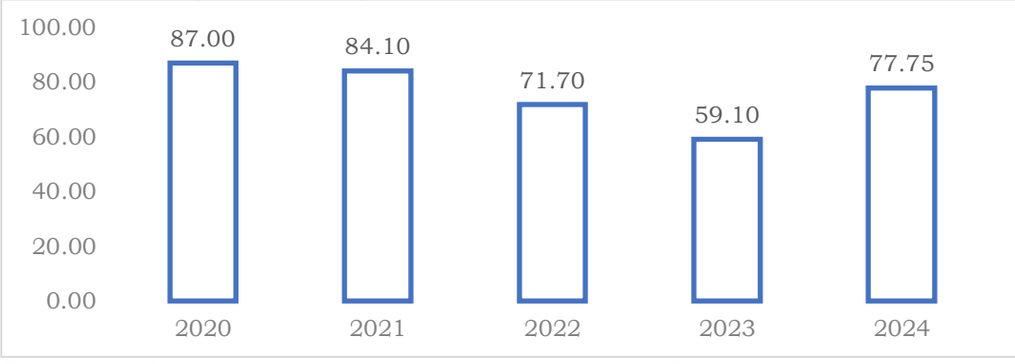
Dari sisi sistem, dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah merupakan faktor kunci. Program nasional pengendalian TB yang terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam pencatatan dan pelaporan TB, turut memperkuat pengendalian penyakit ini secara menyeluruh. Penemuan kasus aktif, pelacakan kontak, dan pelibatan masyarakat menjadi bagian dari pendekatan yang komprehensif. Dengan pendekatan multi-sektor, integratif, dan berbasis komunitas, angka keberhasilan pengobatan TB dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya eliminasi TB nasional dan global.

2.1.2.2.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan nasional atau BPJS bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Untuk menjamin seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional, maka pemerintah wajib mendaftarkan dan membayarkan warga miskin dan kurang mampu sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar telah melampaui target nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar beberapa kali menerima penghargaan *Universal Health College* atas capaian dimaksud. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.25.**

Grafik 2. 25 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

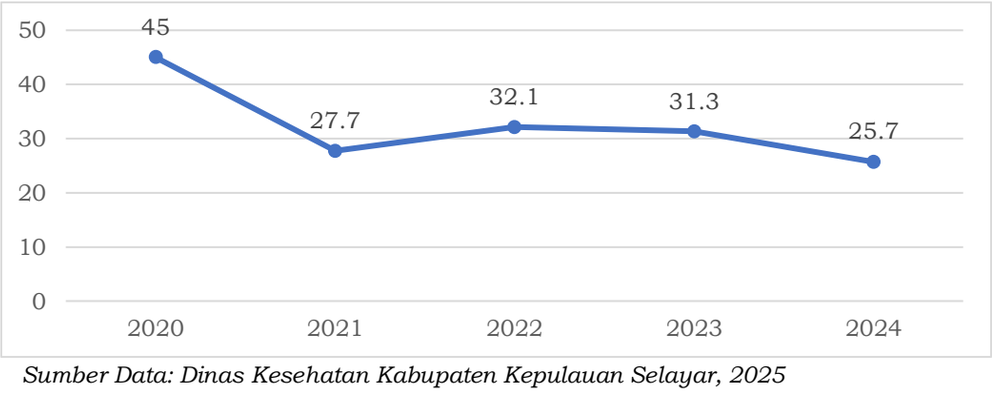


Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.2.7. Prevalensi Stunting

Status Stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain asupan makan, penyakit infeksi, ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, dan pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan. Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir terus mengalami tren penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 60 persen dapat ditekan hingga pada tahun 2021 menjadi 27,7 persen. Namun berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 meningkat menjadi 32,1 persen kemudian menurun menjadi 31,3 persen pada tahun 2023. Berikut ini disajikan data prevalensi balita stunting Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 berdasarkan SSGI/SKI, dapat dilihat pada **Grafik 2.26**.

Grafik 2. 26 Persentase Balita Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data dari Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, persentase Balita Stunting tahun 2023 sebesar 18,38 persen dan turun menjadi 16,91 pada tahun 2024. Beberapa faktor penyebab tingginya angka Stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah banyak keluarga di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil di Selayar menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, sebagian masyarakat di Kepulauan Selayar belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi layak dan air bersih, pengetahuan ibu tentang pola makan sehat selama kehamilan dan menyusui, serta praktik pemberian MP-ASI yang tepat, masih menjadi tantangan, distribusi tenaga kesehatan dan layanan gizi belum merata di seluruh wilayah Kepulauan Selayar, khususnya di wilayah kepulauan, kemiskinan turut memengaruhi daya beli keluarga terhadap makanan bergizi dan akses terhadap layanan kesehatan.

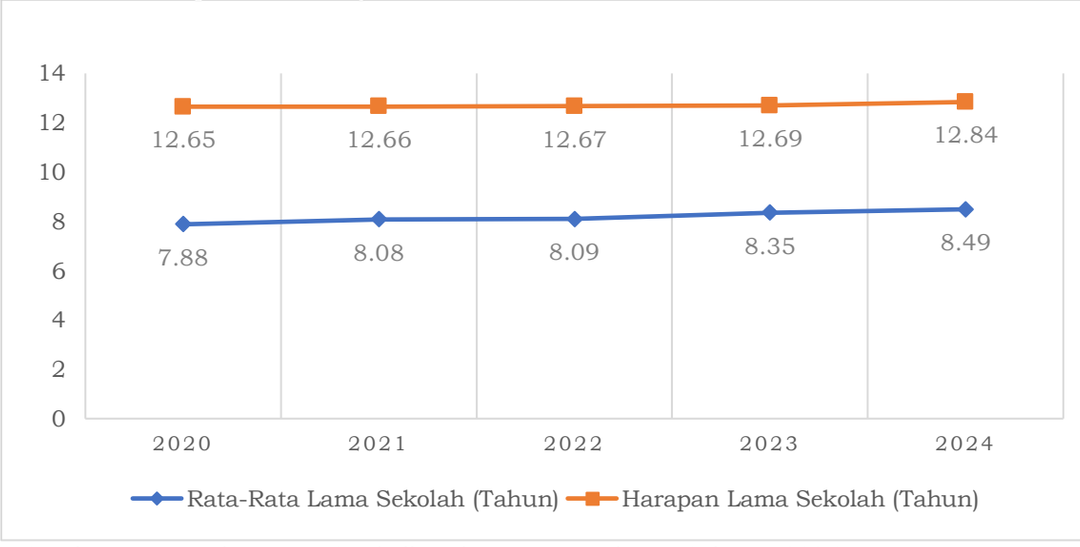
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Besar kecilnya angka ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan keinginan penduduk untuk menempuh Pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 adalah 7,88 tahun dan pada tahun 2024 naik menjadi 8,49 tahun.

Angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 12,65 pada tahun 2020 menjadi 12,84 tahun 2024. Artinya, seorang anak usia 7 tahun saat ini diperkirakan dapat menikmati pendidikan formal selama kurang lebih 13 tahun atau setara dengan menyelesaikan jenjang pendidikan hingga kelas 3 SLTA. Grafik angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Grafik 2.27.**

Grafik 2. 27 Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tabel 2. 26 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024

No.	Kab./ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS
1	Bulukumba	7,67	13,17	7,82	13,41	8,01	13,42	8,26	13,43	8,52	13,45
2	**Kepulauan Selayar**	**7,88**	**12,65**	**8,08**	**12,66**	**8,09**	**12,67**	**8,35**	**12,69**	**8,49**	**12,84**
3	Sinjai	7,75	13,05	7,78	13,06	7,79	13,25	7,80	13,26	7,82	13,27
4	Bantaeng	6,72	12,04	6,77	12,05	6,81	12,30	7,09	12,53	7,26	12,79
5	Jeneponto	6,59	11,98	6,60	12,10	6,75	12,11	7,00	12,12	7,01	12,14
	Sulawesi Selatan	**8,38**	**13,45**	**8,46**	**13,52**	**8,63**	**13,53**	**8,76**	**13,54**	**8,86**	**13,55**
	Nasional	**8,90**	**12,98**	**8,97**	**13,08**	**9,08**	**13,10**	**9,13**	**13,15**	**9,22**	**13,21**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

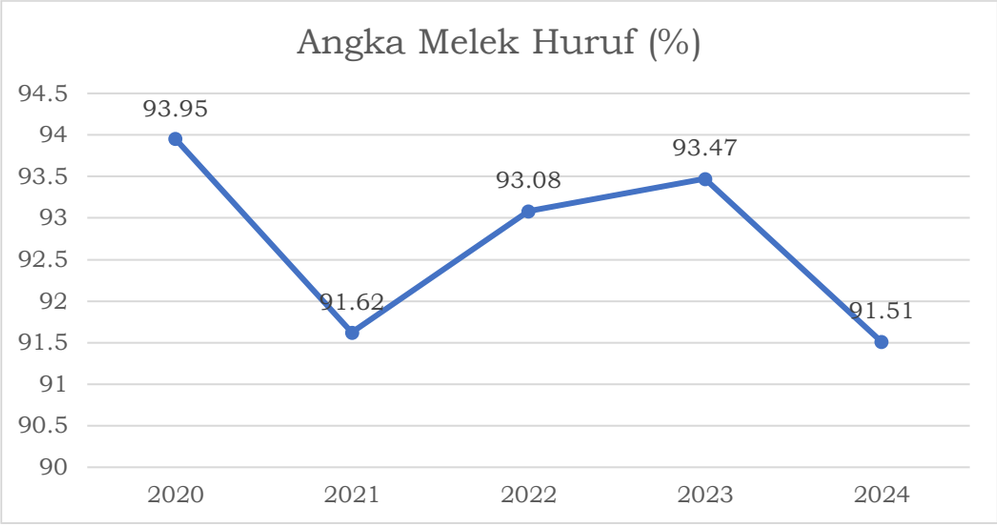
Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab Angka Rata-rata Lama Sekolah tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 11,00 tahun, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan. Namun apabila melihat data setiap tahun sebagaimana pada grafik dan tabel di atas, RLS dan HLS Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan peran Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah membangun dan merehabilitasi banyak sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya serta disisi lain, kesadaran masyarakat akan pendidikan juga semakin bertambah. Hal ini diperkuat dengan, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memiliki 2 (dua) Perguruan Tinggi sebagai tempat bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan, yaitu kampus vokasi Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM).

2.1.2.3.2. Angka Melek Huruf

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Persentase angka melek huruf pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, menurun sebesar 2,33 persen dari 93,95 persen menjadi 91,62 persen, namun pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 1,46 poin menjadi 93,08 persen kemudian turun kembali pada tahun 2024 menjadi 91,51 persen. **Grafik 2.28** menunjukkan persentase angka melek huruf tahun 2020-2024.

Grafik 2. 28 Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024



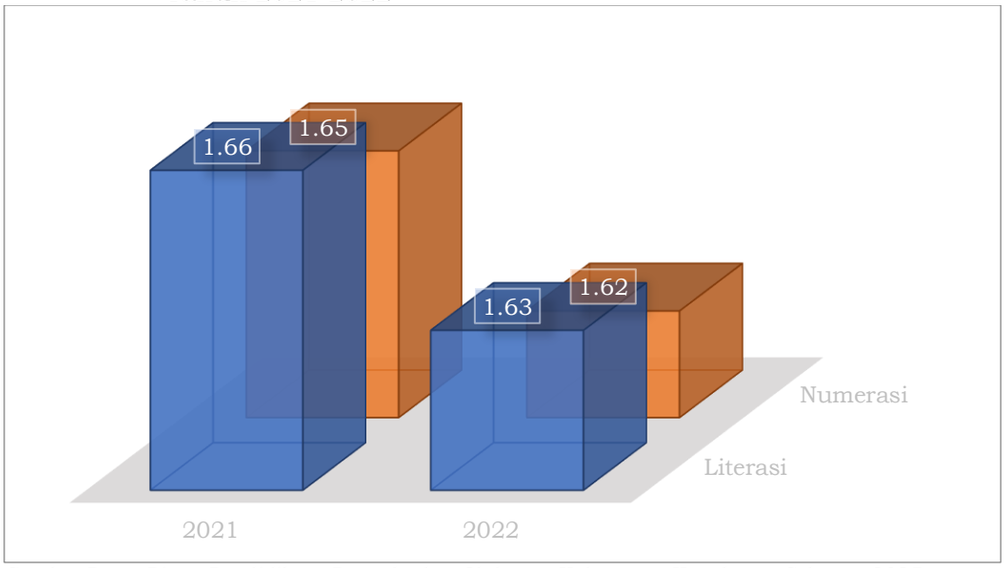
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.3. Nilai Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada Asesmen Tingkat Nasional

Pendidikan yang berhasil selain diukur dari tingkat partisipasi sekolah, juga diukur dari kualitas pembelajaran yang dihasilkan oleh para siswa. Kualitas hasil pembelajaran dimaksud diukur menggunakan tingkat literasi dan numerasi dari sebuah satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan kemampuan numerasi paling sedikit 75 persen (level"cakap") peserta didik pada satuan pendidikan.

Nilai rata-rata kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada tahun 2022. Oleh karena itu, kedepan pemerintah mendorong peserta didik mencapai kompetensi minimum. Capaian dimaksud dua tahun terakhir dapat terlihat pada **Grafik 2.29.**

Grafik 2. 29 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2022

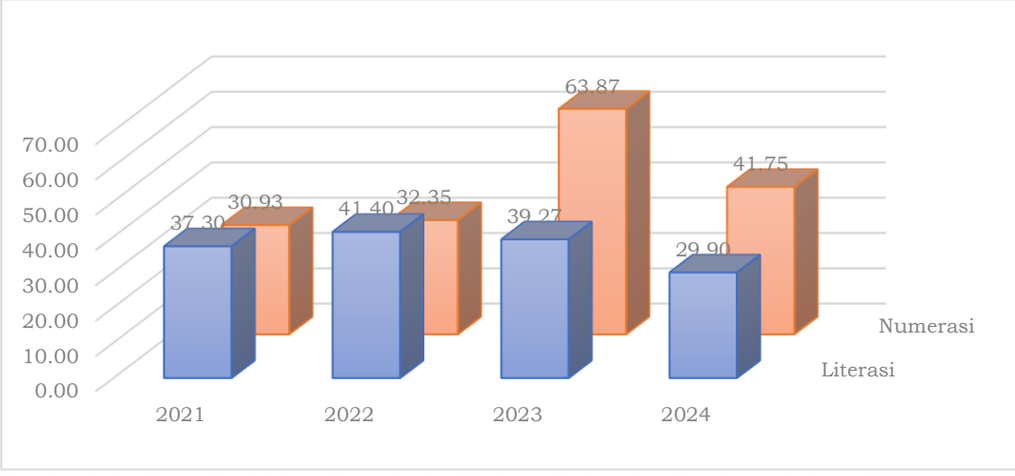


Sumber Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten

Satuan pendidikan yang memiliki tingkat literasi sesuai standar minimum meningkat dari tahun 2021 sampai 2022. Begitupula dengan capaian numerasinya. Lebih lanjut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lebih banyak satuan pendidikan yang mencapai standar minimum tingkat literasi dibandingkan dengan kemampuan numerasi. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi terlihat pada **Grafik 2.30.**

Grafik 2. 30 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2022



Sumber Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, geografis, dan sosial. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang sangat menentukan kualitas pembelajaran peserta didik, serta menjadi indikator penting dalam penilaian mutu pendidikan. Ketika capaian ini menurun, hal tersebut menandakan adanya tantangan fundamental yang perlu segera ditangani. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang merata, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan yang terpencil. Letak geografis Kabupaten Selayar yang tersebar di pulau-pulau kecil menyebabkan banyak satuan pendidikan menghadapi hambatan dalam hal distribusi guru, bahan ajar, serta minimnya fasilitas penunjang pembelajaran. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas proses belajar-mengajar, terutama pada jenjang dasar.

Selain itu, kualitas dan distribusi tenaga pendidik juga menjadi kendala. Beberapa sekolah masih mengalami kekurangan guru yang kompeten, terutama dalam mata pelajaran dasar seperti Bahasa Indonesia dan Matematika. Guru yang bertugas di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang memadai, sehingga tidak mengikuti perkembangan pendekatan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Faktor lain yang tak kalah penting adalah rendahnya keterlibatan orang tua dan lingkungan rumah dalam mendukung

kegiatan belajar siswa. Di beberapa wilayah, orang tua belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, baik karena faktor ekonomi maupun pola pikir tradisional. Akibatnya, anak-anak kurang mendapatkan rangsangan literasi sejak usia dini, serta minim dukungan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah di rumah. Penggunaan waktu belajar yang belum optimal dan kultur belajar yang masih lemah di sebagian sekolah juga turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian literasi dan numerasi. Pembelajaran yang bersifat hafalan, minim praktik kontekstual, dan belum mendorong daya pikir kritis siswa, membuat kemampuan dasar siswa tidak berkembang secara optimal.

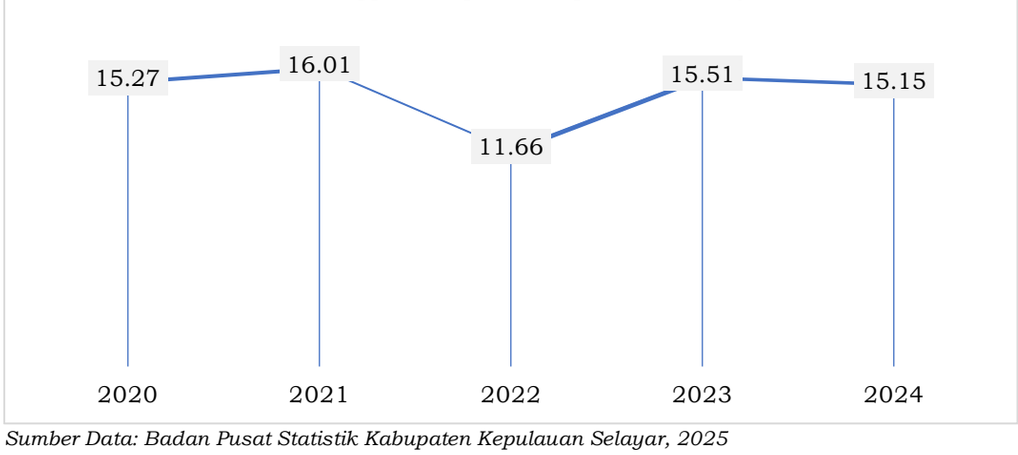
Di sisi lain, terbatasnya bahan bacaan yang sesuai usia dan kontekstual dengan lingkungan lokal menyebabkan minat baca anak tidak tumbuh dengan baik. Perpustakaan sekolah dan taman baca masyarakat di banyak wilayah belum berfungsi secara maksimal, baik dari sisi koleksi maupun pemanfaatannya dalam pembelajaran. Dari sisi tata kelola, monitoring dan evaluasi terhadap capaian literasi-numerasi belum dilaksanakan secara sistematis dan berbasis data. Kurangnya pemanfaatan asesmen formatif serta hasil Asesmen Nasional dalam perencanaan sekolah mengakibatkan intervensi yang dilakukan belum tepat sasaran.

2.1.2.3.5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun terkahir cenderung fluktuatif. Capaian indikator ini menurun pada tahun. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang setelah tamat SMA memilih untuk langsung bekerja di luar daerah dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Capaian indikator ini dapat dilihat pada **Grafik 2.31**.

Grafik 2. 31 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terdapat variasi yang signifikan dalam partisipasi kerja kelompok ini. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin besar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil. Persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menggambarkan kualitas angkatan kerja dari masyarakat yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 mayoritas atau sekitar 38 persen tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SD, 19 persen tenaga kerja yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat pendidikan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir terlihat pada **Grafik 2.32**.

Grafik 2. 32 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

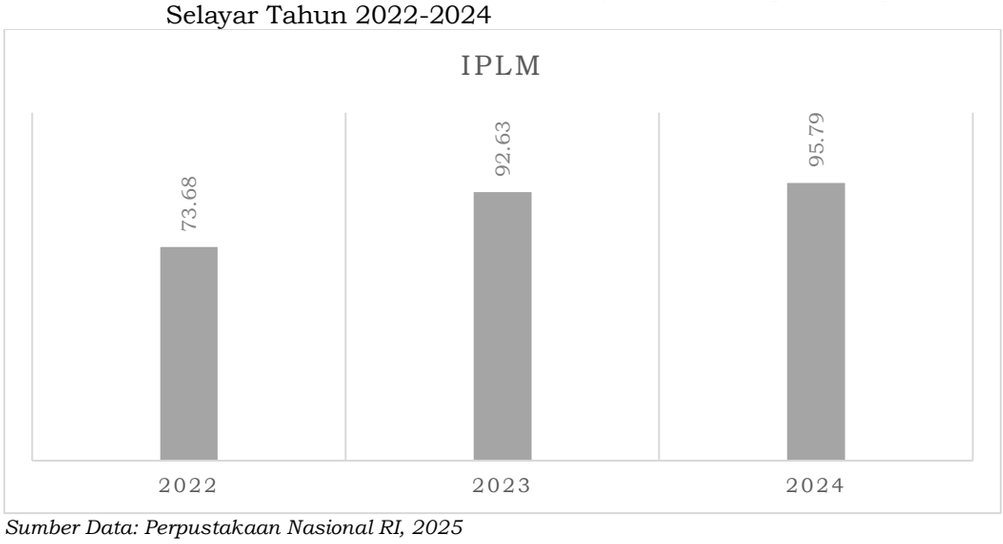
Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun capaian indikator ini menurun pada tahun 2024 yang disebabkan karena lulusan pendidikan tinggi mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan lulusan perguruan tinggi hanya di sektor pemerintahan sehingga lapangan kerja pada kualifikasi ini cenderung tidak beragam. Banyak lulusan pendidikan tinggi yang memilih merantau ke kota besar atau luar daerah karena keterbatasan lapangan kerja lokal di Kepulauan Selayar. Selain itu, sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal, seperti pertanian yang cenderung tidak mensyaratkan pendidikan tinggi sehingga tidak terdata sebagai pekerja karena status pekerjaan tidak formal.

2.1.2.3.7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2024, capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta kerjasama yang baik dari masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran IPLM untuk kabupaten/kota dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI yang dimulai pada tahun 2022, maka capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sampai 2024 terlihat pada **Grafik 2.33**.

Grafik 2. 33 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber Data: Perpustakaan Nasional RI, 2025

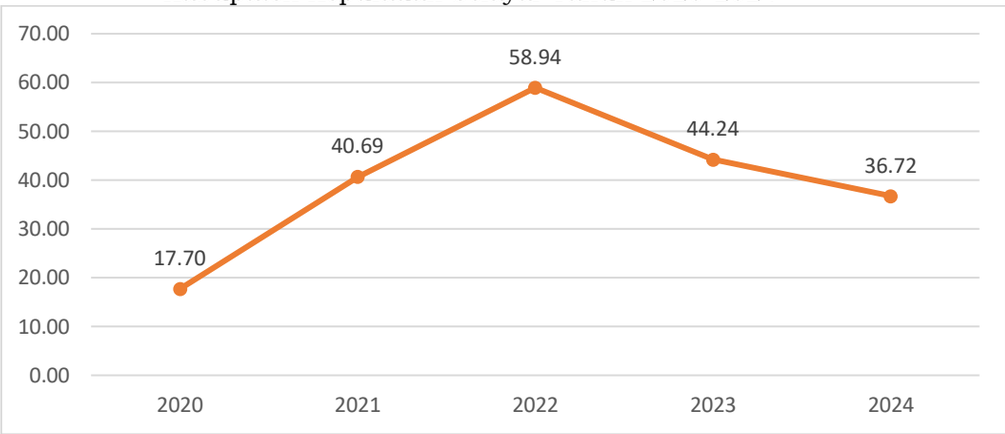
Beberapa upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, antara lain : pemerataan layanan perpustakaan di desa, mencukupkan koleksi dan tenaga perpustakaan, serta sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan pembinaan pada perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah sehingga semakin banyak perpustakaan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.34.**

Grafik 2. 34 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Informal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja memiliki capaian yang fluktuatif. Capaian indikator ini dari tahun 2020 terus meningkat sampai 2022. Namun dua tahun berikutnya, capaiannya justru terus menurun hingga tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh banyak tenaga kerja di sektor informal (petani, nelayan, pedagang kecil) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial karena tidak terdaftar sebagai pemberi kerja, kurangnya pemahaman tentang manfaat kepesertaan, serta ketidakmampuan membayar iuran secara mandiri. Lebih lanjut, masih ada beberapa perusahaan atau pelaku usaha belum mendaftarkan pekerjanya karena ingin menghindari biaya iuran tambahan.

2.1.2.4.2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang meliputi: (1) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, (2) memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, (3) memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, (4) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, (5) mendapatkan program kembali bekerja, (6) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, (7) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, (8) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Melihat hal tersebut, seluruh pemerintah di berbagai tingkatan baik dari pusat maupun daerah wajib mengakomodir masyarakat disabilitas untuk bekerja di berbagai sektor terkhusus pada sektor formal. Jumlah penyandang disabilitas menurut tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis penghasilan tertera pada **Tabel 2.27**.

Tabel 2. 27 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Jenis Penghasilan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Pendidikan (Orang)				
Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma
301	204	47	54	1
Penghasilan per bulan (Orang)				
0	1 - 500 ribu	500.001 - 1 juta	lebih 1,5 juta	
546	55	4	2	
Pekerjaan (Orang)				
tidak bekerja	pelajar/mahasiswa	buruh	petani	lainnya
380	34	10	31	152

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum pada tabel di atas, Jumlah masyarakat disabilitas pada tahun 2023 sebanyak 607 orang. Dari 607 orang, 380 orang atau sekitar 62,6 persen tidak bekerja, 34 orang atau sekitar 5,6 persen berprofesi sebagai pelajar, 10 orang sebagai buruh, 31 orang sebagai petani, serta 152 orang atau 25,04 persen yang bekerja di sektor lainnya. Sejak tahun 2020 sampai 2024, dari 607 disabilitas di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 5 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal atau sektor pemerintahan sehingga persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal Kabupaten Kepulauan Selayar konsisten selama 5 tahun pada angka 0,008 persen.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui berbagai instansi seperti Kementerian Agama (Kemenag), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penggerak PKK, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA secara aktif memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan di wilayah ini. Dukungan tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, deklarasi, dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah, serta kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu memberikan dukungan baik itu dukungan kebijakan ataupun dukungan anggaran terhadap seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, capaian untuk indikator ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 100 persen.

2.1.2.5.2. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Sejatinya, cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui

proses penetapan. Oleh karena itu, suatu tempat harus punya ciri khas dan daya tarik wisata maupun atraksi di dalamnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 39 cagar budaya yang dilestarikan dan diregistrasi. Dari tahun 2019 hingga 2023 dari 36 cagar budaya yang dilestarikan baru 31 cagar budaya yang telah ditetapkan. Namun capaian indikator ini tidak berubah sampai tahun 2023 pada angka 79,49 persen yang disebabkan oleh belum ada lagi benda, bangunan ataupun situs yang didaftarkan atau diregistrasi menjadi cagar budaya sejak tahun 2018.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

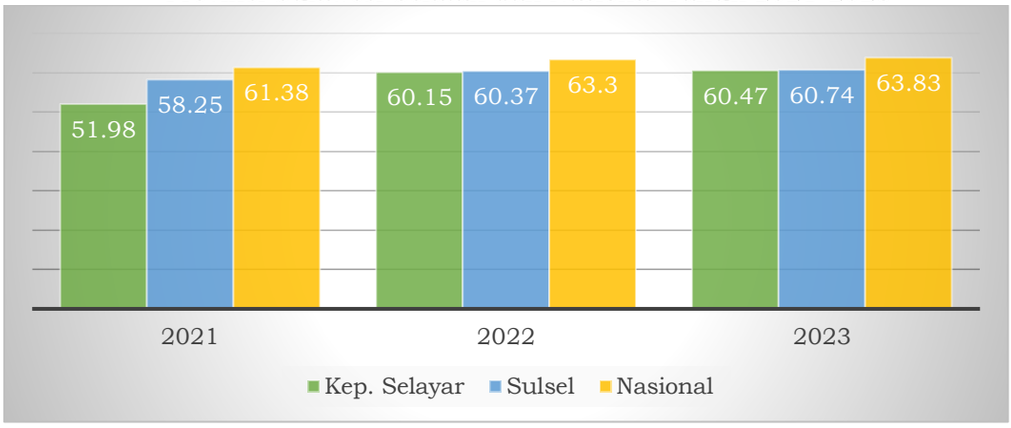
Salah satu visi utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas emas. Perwujudan SDM yang berkualitas emas di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Melalui berbagai program dan kebijakan, Kemen PPPA berfokus pada upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diharapkan sebanyak 79,5 juta anak (0-17 tahun) di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Tingginya kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima klaster, sebagai berikut : Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Capaian IPA untuk tingkat kabupaten/kota baru diukur sejak tahun 2021 oleh Kemen PPA, dimana capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sampai tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan capaian IPA Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Jika dilihat dari 5 indeks komposit pembentuk IPA dimaksud, indeks klaster 1 yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan yang capaiannya lebih rendah dengan rata-rata capaian IPA Sulawesi Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal dimaksud antara lain masih rendahnya partisipasi anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar. Lebih lanjut, masih kurangnya anak yang pernah mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Selain itu, tingginya angka stunting juga sangat berpengaruh terhadap capaian tersebut. Hal ini menunjukkan masih perlunya dukungan perlindungan dan membangun resiliensi bagi anak-anak khususnya usia dini hingga usia 18 tahun.

Meskipun capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari capaian IPA Sulawesi Selatan dan nasional, namun selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023 terus meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya perkawinan anak, angka partisipasi sekolah anak yang cukup tinggi, serta jaminan kesehatan pada anak khususnya kategori miskin yang telah ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional terlihat pada **Grafik 2.35.**

Grafik 2. 35 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023



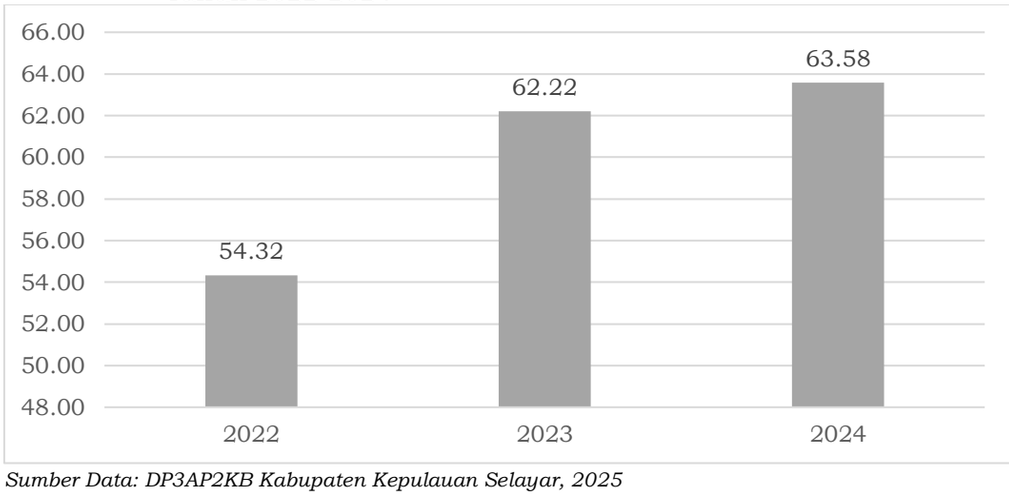
Sumber Data: Kemen PPA, 2025

2.1.2.6.2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan dengan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga terdiri atas 3 dimensi, yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.

Kabupaten Kepulauan Selayar baru melakukan pengukuran terhadap capaian indeks dimaksud pada tahun 2022. Dari hasil pengukuran, capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat selama tiga tahun terakhir, dapat diartikan bahwa pembangunan kualitas keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori cukup responsif gender dan anak. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.36.**

Grafik 2. 36 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kondisi ini menunjukkan kualitas pengasuhan anak dan pemenuhan kewajiban orang tua / keluarga terhadap anak masih menjadi prioritas kedepan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai intervensi kebijakan dan program yang terintegrasi, antara lain:

1. Program Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia yang memperkuat peran keluarga dalam mendidik dan melindungi anggotanya.
2. Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, KB, dan gizi keluarga.
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan.

Beberapa faktor kunci yang mendukung peningkatan kualitas keluarga di daerah, antara lain:

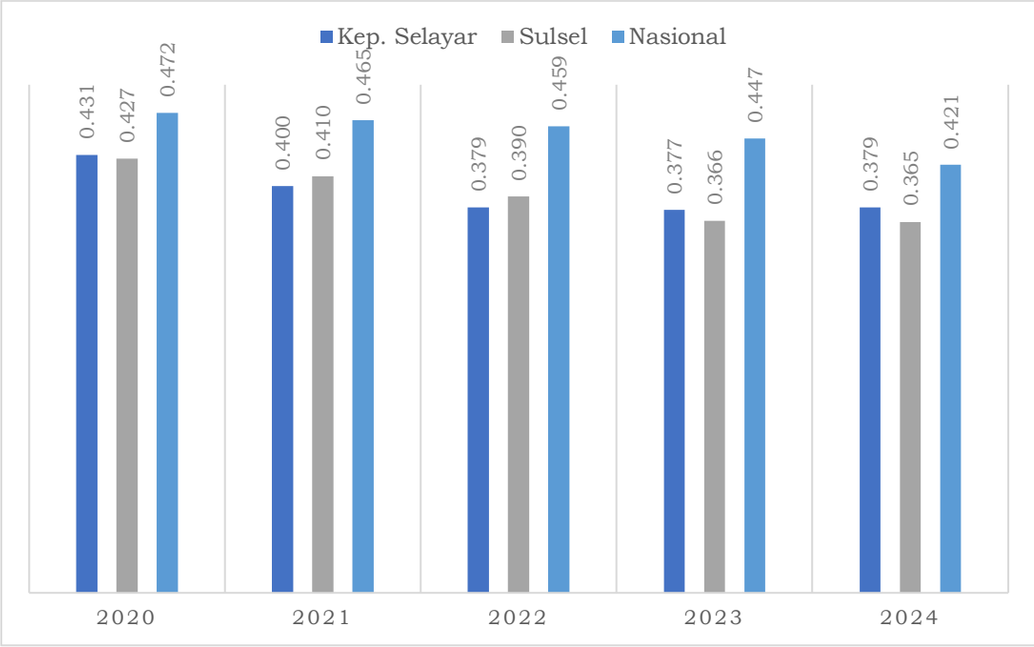
1. Komitmen lintas sektor, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan lembaga sosial.
2. Pemanfaatan data *by name by address* melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk penentuan sasaran program secara tepat.
3. Peran aktif kader dan kelompok masyarakat, seperti kelompok UPPKA, PIK Remaja, dan Pusyan Gatra.
4. Peningkatan edukasi keluarga melalui penyuluhan, konseling, dan kampanye keluarga berketahanan.

2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender, meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 sampai 2023, namun sedikit meningkat pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki dari tahun ke tahun lebih setara, ditandai dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang semakin meningkat selama kurun waktu dimaksud. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.37.**

Grafik 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



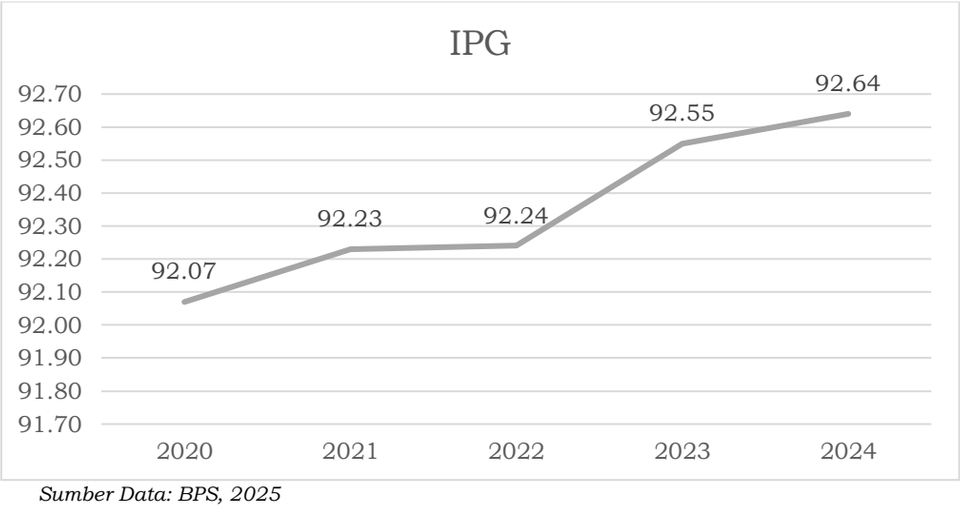
Sumber Data: BPS, 2025

2.1.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPG dihitung dengan membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki, sehingga mencerminkan tingkat keadilan gender dalam pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat IPG sebesar 92,64. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pencapaian pembangunan perempuan telah mencapai 92,64 persen dari pencapaian laki-laki. Meskipun masih terdapat kesenjangan, nilai ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.38.**

Grafik 2. 38 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2025

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender didukung oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan: Program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan telah menunjukkan hasil positif, dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan tingkat melek huruf di kalangan perempuan.
2. Peningkatan Kesehatan Perempuan: Upaya dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, serta program kesehatan reproduksi, telah berkontribusi pada peningkatan harapan hidup perempuan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Inisiatif untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

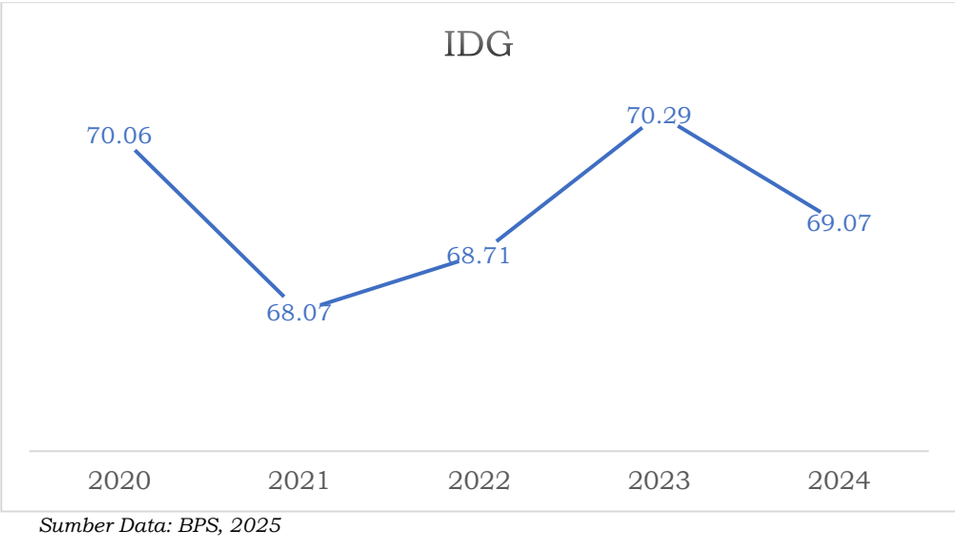
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti:

1. Kesenjangan Pendapatan: Perempuan cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang dapat mempengaruhi standar hidup layak.
2. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam kebijakan publik.

2.1.2.6.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta mengakses sumber daya ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki capaian yang fluktuatif selama lima tahun terakhir, namun, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang juga menurun pada tahun 2024. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.39.**

Grafik 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinfestasi dan sumber daya manusia. Namun karena keterbatasan data, hanya dapat ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

2.1.3.1. Daya saing Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.17. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapitra Tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel 2.28.**

Tabel 2. 28 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Ribu Rp.	982.570	967.487	996,286	1.054.071	1.111.674

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat data di atas, pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 982.570 rupiah, dan pada tahun 2021 turun menjadi sebesar 967.487 rupiah, yang merupakan salah satu dampak dari masih merebaknya Covid-19 sampai dengan akhir tahun 2021. Namun pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan yang didorong oleh adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, sehingga mendorong pendapatan yang lebih tinggi, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4.4.18. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani, NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Selain nilai tukar nelayan, digunakan pula Nilai Tukar Pembudiaya untuk mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Untuk hasil penghitungan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menyajikan data NTP dan NTN Kabupaten, sehingga digunakan data NTP dan NTN Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana NTP pada tahun 2020 sebesar 97,86, dan terus mengalami peningkatan selama periode 2021-2024 sehingga menjadi sebesar

121,01, sedangkan untuk NTN dan Nilai tukar pembudidaya hanya tersedia data dari tahun 2022 yakni sebesar 109,29 dan 109,98 dan data tahun 2023 sebesar 111,49 dan 111,35. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Gabungan dapat dilihat pada **Tabel 2.29**.

Tabel 2. 29 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	97,86	100,37	101,12	114,25	121,01
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	-	-	109,29	111,49	111,92
Nilai Tukar Pembudidaya	Poin	-	-	109,98	111,35	106,84

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.4.4.19. Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingginya persentase desa berstatus swasembada menandakan bahwa semakin banyak desa dalam suatu daerah yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Namun sejak tahun 2019, status desa swasembada diganti menjadi desa maju untuk Indeks Desa Membangun (IDM). Persentase desa berstatus swasembada/ desa maju di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 sebesar 3,75 persen, meningkat secara signifikan setiap tahunnya sehingga tahun 2024 menjadi 48,14 persen. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa dapat dilihat pada **Tabel 2.30.**

Tabel 2. 30 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	3,75	10,0	27,16	38,27	48,14

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Persentase Desa berstatus swasembada (Mandiri dan Maju) terhadap total Desa untuk Tahun 2024 sebesar 48,14 % (39 Desa) dimana dari 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Desa yang berstatus Desa Mandiri sebanyak 22 Desa, sedangkan Desa Maju sebanyak 17 Desa.

2.1.4.4.20. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(Dependency ratio)* adalah angka yang menunjukan persentase jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju, sedang berkembang atau daerah yang tertinggal. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun berfluktuasi, sebagaimana data pada tahun 2020 sebesar 0,46 meningkat pada tahun 2021

menjadi sebesar 0,47 serta kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,45 pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.31.**

Tabel 2. 31 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	32.356	32.356	31.600	32.126	31.789
2	Jumlah Penduduk usia 15-64 Tahun	93.749	93.749	95.709	97.824	98.605
3	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	10.966	11.869	11.836	12.150	12.702
4	Rasio Ketergantungan	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Angka ketergantungan semakin menurun, menunjukkan proporsi penduduk usia produktif semakin dominan dalam struktur kependudukan. Angka ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan, ini menunjukkan bahwa daerah ini mulai memasuki fase bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi tanggungan (anak-anak dan lansia). Kondisi ini menciptakan peluang emas bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah, karena lebih banyak penduduk berada pada usia kerja yang produktif akan berpotensi mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, seperti perikanan, pariwisata, pertanian, dan UMKM.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan kontribusi pendapatan dari sektor industri pengolahan terhadap seluruh pendapatan masyarakat pada tahun berlaku. Melihat capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. (masih dibawah 3 persen). Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.40**.

Grafik 2. 40 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



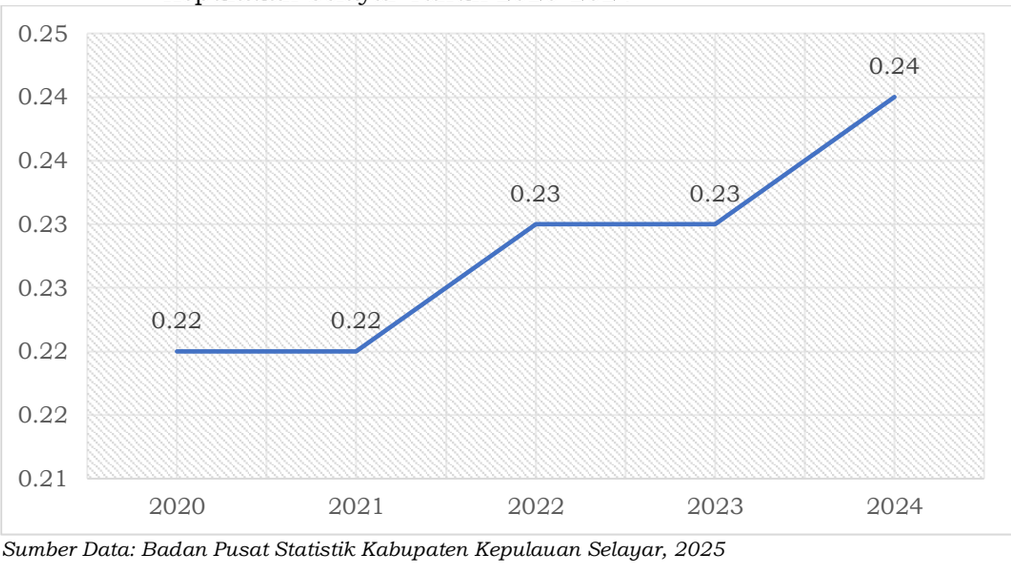
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Rendahnya PDRB sektor industri pengolahan disebabkan oleh belum adanya industri besar di Kepulauan Selayar, industri masih didominasi oleh industri mikro, kecil dan menengah. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan oleh sebagian besar Industri Kecil Menengah (IKM) belum memiliki pasar yang luas baik itu di kalangan masyarakat Kepulauan Selayar maupun pasar ekspor ke luar wilayah. Lebih lanjut, hilirisasi produk-produk unggulan belum terlaksana secara optimal serta industrialisasi sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi andalan dari Kabupaten Kepulauan Selayar belum terlaksana secara optimal dikarenakan keterbatasan APBD yang diikuti oleh tidak optimalnya investasi untuk mengembangkan dua sektor ini.

2.1.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB menggambarkan kontribusi pendapatan dari sektor akomodasi dan makan minum terhadap seluruh pendapatan masyarakat pada tahun berlaku. Indikator dimaksud dapat menggambarkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PDRB sektor harga berlaku. Capaian indikator rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 sampai 2024 masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi dari sektor akomodasi, makan dan minum yang berkisar 0,2 persen selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2024. Kedepan ketersediaan objek wisata andalan terus dipercepat pembangunannya sebagai komponen terpenting untuk meningkatkan lama tinggal wisataan yang secara langsung dapat meningkatkan kontribusi jasa akomodasi dan makan minum pada PDRB. Capaian rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.41**.

Grafik 2. 41 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



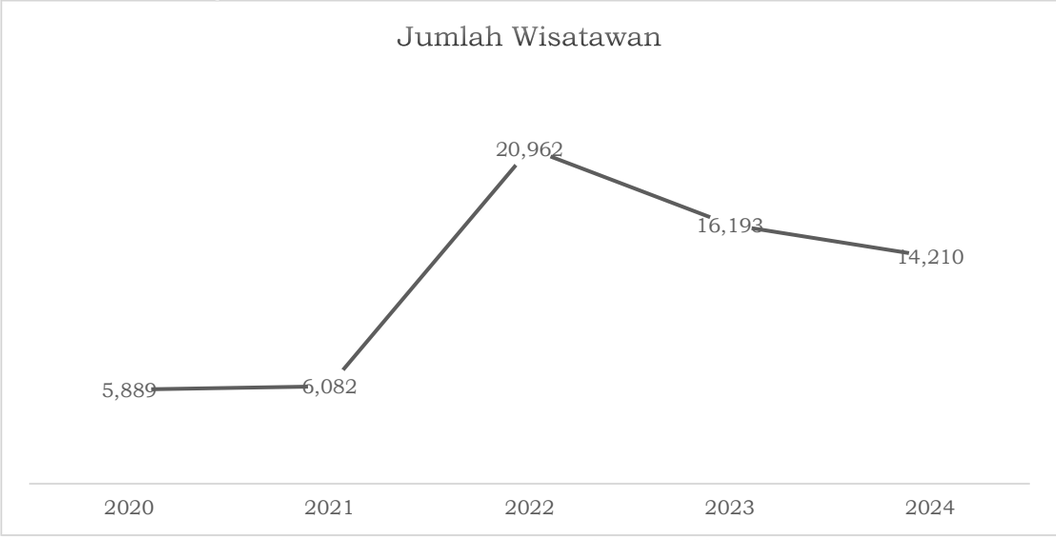
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Rendahnya pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkhusus pada saat dunia dilanda pandemi Covid-19, namun mengalami lonjakan kunjungan pasca pandemi pada tahun 2022 yang dipengaruhi oleh beberapa

pelaksanaan event-event tingkat provinsi dan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.42**.

Grafik 2. 42 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

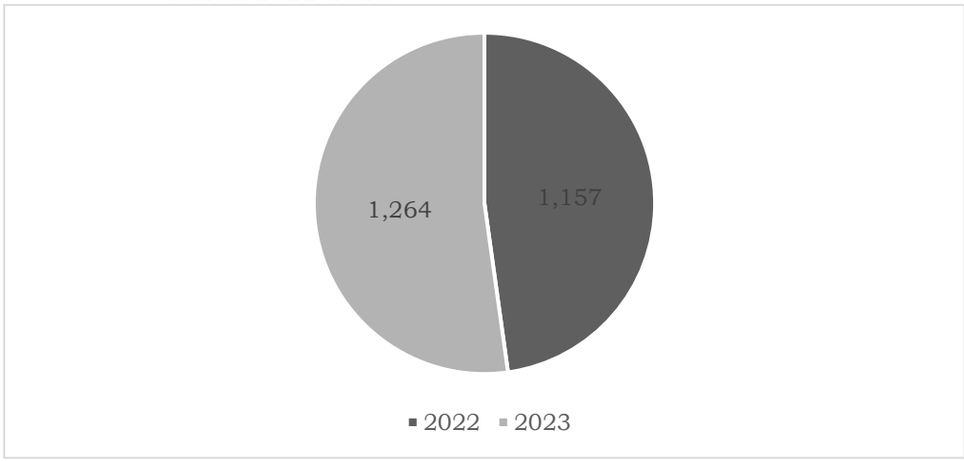
Penurunan jumlah kunjungan wisatawan menjadi sinyal penting bagi sektor pariwisata daerah untuk mengevaluasi strategi dan kesiapan dalam menjaga daya tarik destinasi wisata. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut, antara lain tingginya biaya akses transportasi ke Kepulauan Selayar, terutama dari wilayah Sulawesi Selatan dan luar provinsi, terbatasnya kapasitas akomodasi dan layanan pendukung wisata, terutama pada musim libur, kurangnya promosi wisata yang konsisten dan terintegrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta fluktuasi kondisi cuaca dan infrastruktur seperti pelabuhan atau bandara yang bisa mempengaruhi kenyamanan wisatawan.

2.1.3.2.4. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Industri ekonomi kreatif adalah industri yang berkontribusi oleh aktivitas ekonomi yang bersumber dari ekonomi kreatif, aktivitas dimaksud terdiri dari 17 subsektor yaitu fesyen, kuliner, kriya, film, animasi dan video, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni rupa, desain produk, periklanan, penerbitan, arsitektur, desain interior.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah industri ekonomi kreatif pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 bahwa 92 persen lebih dari seluruh industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah industri yang bergerak di sektor ekonomi kreatif berupa industri kuliner, kerajinan, sandang atau pakaian dan industri lainnya. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.43.**

Grafik 2. 43 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023



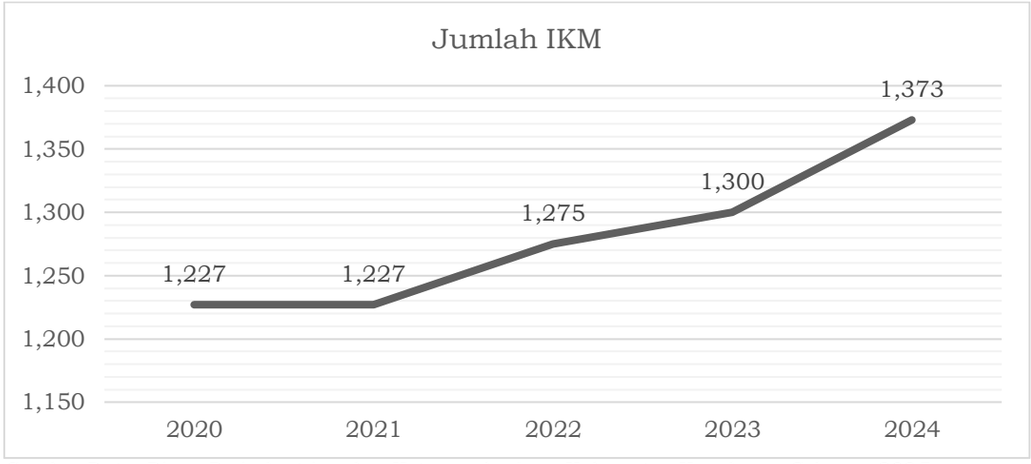
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya industri ekonomi kreatif adalah peran pemerintah dalam mengembangkan industri-industri ekonomi kreatif melalui beberapa pelatihan serta pemberian bantuan peralatan dalam menunjang berkembangnya industri di sektor ekonomi kreatif.

2.1.3.2.5. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sesuai data dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak memiliki industri dengan kategori mikro dan belum memiliki industri besar, hanya memiliki industri kategori kecil dan menengah. Oleh karena itu, proporsi jumlah industri kecil dan menengah tidak dapat dihitung. Terkait dengan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah IKM terus meningkat dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Jumlah IKM dimaksud terlihat pada **Grafik 2.44**.

Grafik 2. 44 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023



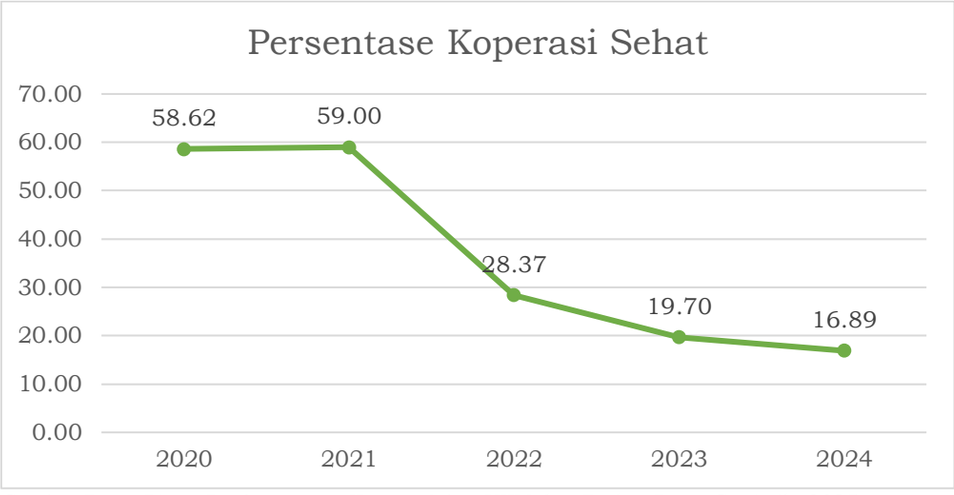
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.6. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 - 100 dalam penilaian kesehatan koperasi, meliputi 4 aspek pemeriksaan, yaitu: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami penurunan terutama

pada tahun 2022 yang menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data koperasi melalui sistem *Online Data System* (ODS), sehingga banyak koperasi yang tidak aktif atau fiktif akhirnya dihapus dari data koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.45**.

Grafik 2. 45 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



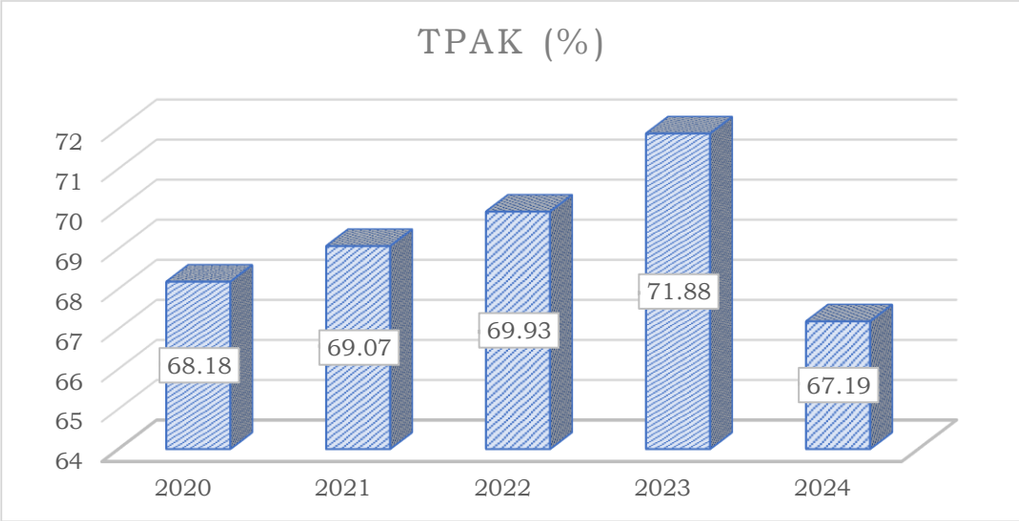
Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik, 2025

Kurangnya koperasi kategori sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh proses revitalisasi koperasi masih belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam hal peningkatan kapasitas manajemen, tata kelola, dan pelaporan keuangan. Masih banyak koperasi masih memiliki manajemen yang lemah, tidak transparan, dan kurang akuntabel. Selain itu, akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar menyebabkan banyak koperasi menghadapi masalah likuiditas, penurunan omset, dan meningkatnya kredit macet, khususnya koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen.

2.1.3.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara angkatan kerja dan total penduduk dengan rentang usia yang sama. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 adalah 69,07 persen, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,93 persen dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 71,88 persen, sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,68 poin sehingga menjadi 67,19 persen. Hal ini disebabkan karena bertambahnya penduduk yang bukan angkatan kerja pada tahun 2024. Berdasarkan data dari BPS, sekitar 4.000 lebih masyarakat terutama perempuan yang berhenti bekerja untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, masih kurangnya lapangan pekerjaan mengakibatkan sebagian penduduk usia kerja memilih tidak aktif mencari kerja atau melakukan migrasi ke daerah lain untuk mencari kerja sehingga mengurangi jumlah penduduk yang tercatat aktif bekerja secara lokal. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Grafik 2.13.**

Grafik 2. 46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Perbandingan TPAK Kabupaten pada wilayah setara berdasarkan kawasan menunjukkan bahwa tahun 2024 TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah, sementara kabupaten dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng sebesar 78,39 persen. Apabila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 67,38 persen dan Nasional 70,63 persen pada tahun 2024, maka TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dari provinsi dan nasional, hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.25.**

Tabel 2. 32 Perbandingan TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Dalam Kawasan Setara, Provinsi Selatan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

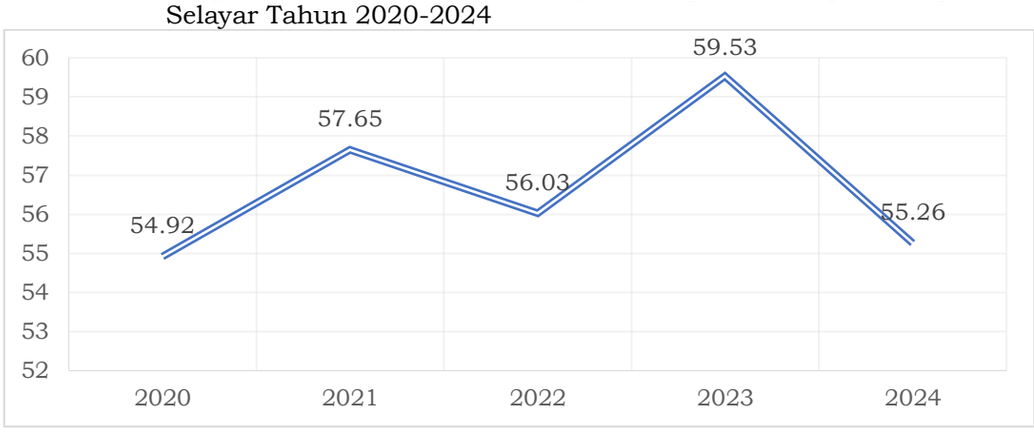
No	Kab./ Kota	TPAK (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bantaeng	73,14	74,32	75,36	75,58	78,39
2	Sinjai	69,9	71,91	63,34	67,16	72,87
3	Bulukumba	68,26	65,46	65,27	70,78	72,39
4	Jeneponto	68,87	67,39	75,26	66,44	67,48
5	**Kepulauan Selayar**	**68,18**	**69,07**	**69,93**	**71,88**	**67,19**
	Sulawesi Selatan	**63,4**	**64,73**	**66,18**	**65,66**	**67,38**
	Nasional	**67,77**	**67,80**	**68,63**	**69,48**	**70,63**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.2.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024. Data tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sudah berada diatas 50 persen, ini menunjukkan bahwa perempuan usia produktif (berusia 15 tahun keatas) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar sudah bekerja untuk mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga. TPAK Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.47**.

Grafik 2. 47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada tahun 2024, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Beban ganda: Perempuan sering menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam angkatan kerja.
2. Akses terbatas terhadap peluang kerja: Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilan perempuan dapat menyebabkan penurunan partisipasi mereka dalam angkatan kerja.
3. Norma sosial dan budaya: Norma yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.
4. Kurangnya pelatihan dan pendidikan: Keterbatasan dalam pelatihan dan pendidikan yang relevan dapat menghambat kemampuan perempuan untuk memasuki pasar kerja.

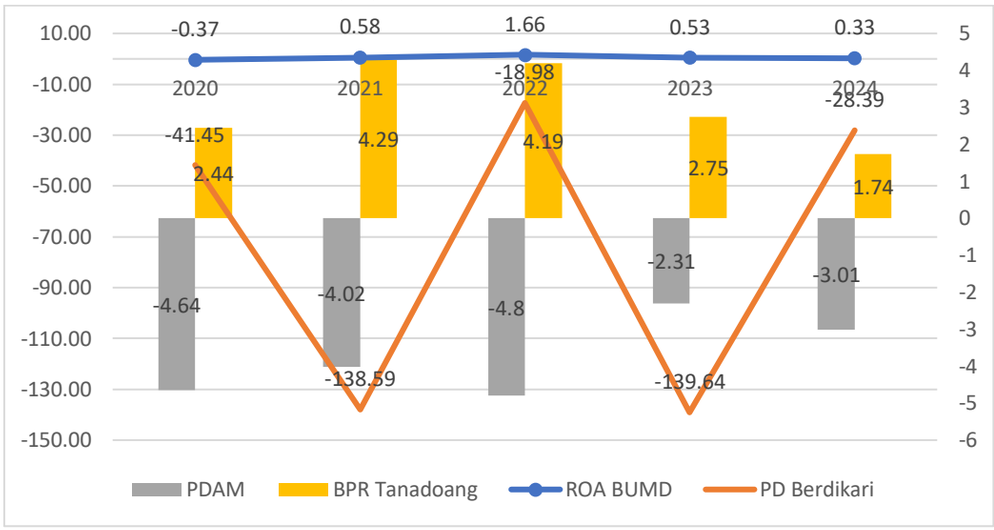
2.1.3.2.9. *Return on Aset* (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu Perusahaan Daerah Berdikari, PDAM, serta PT. Bank Pesisir Tanadoang. Dari tiga BUMD dimaksud, dua BUMD yaitu PD Berdikari serta PDAM belum menghasilkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, sedangkan PT Bank Pesisir Tanadoang telah menghasilkan keuntungan bagi Daerah dari tahun 2019 sampai 2023. Kondisi ini disebabkan oleh tidak optimalnya pengelolaan dan manajemen keuangan, serta BUMD tidak memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga tidak mendatangkan kemandirian dan hanya mengharapkan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah. BUMD di Kabupaten Kepulauan Selayar juga kekurangan SDM yang berkualitas yang dapat

menghambat inovasi dan pengembangan BUMD. Capaian *Return On Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar serta capaian ROA masing-masing BUMD terlihat pada **Grafik 2.55**

Grafik 2. 48 *Return On Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

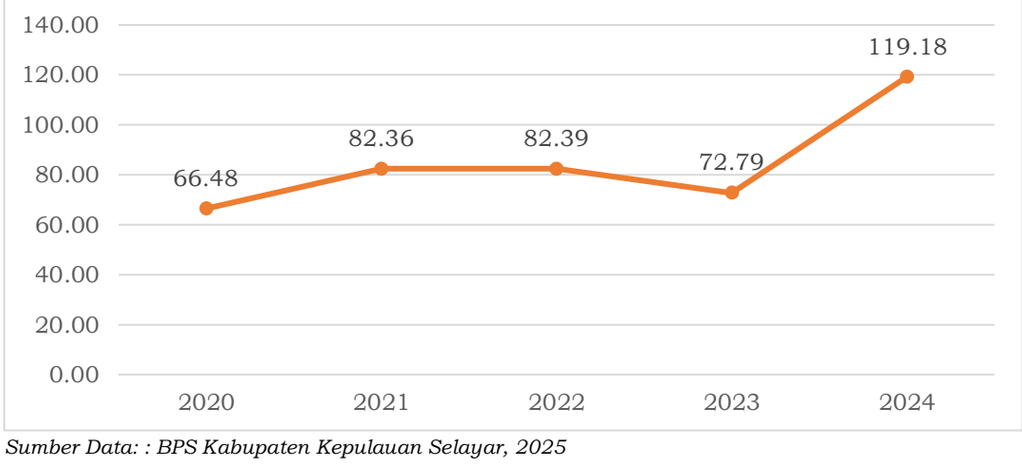


Sumber Data: : Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.10. Produktivitas Padi

Produktivitas padi merupakan indikator untuk mengukur produksi padi per hektar untuk kurun waktu tertentu. Produktivitas padi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, produksi padi Kabupaten Kepulauan Selayar 23.896 ton mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 24.512,88 ton. Namun, sejalan dengan itu, luas panen padi pada tahun 2024 juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1.362 Ha dibandingkan tahun 2023. Di tengah penurunan luas panen padi, tetapi penurunan produksi tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga produktivitasnya meningkat. Penurunan produksi juga disebabkan fenomena El Niño yang terjadi pada semester II tahun 2023 menyebabkan perubahan pola cuaca, seperti penurunan curah hujan dan peningkatan suhu. Hal ini mengakibatkan mundurnya musim tanam padi di awal tahun 2024,. Penundaan ini berdampak pada berkurangnya luas panen di awal tahun. Produktivitas padi selama lima tahun terakhir terlihat pada **Grafik 2.56**.

Grafik 2. 49 Produktivitas Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan produktivitas padi tahun 2024 didukung oleh peningkatan penggunaan sarana pertanian berupa benih, pupuk, pestisida dan alsintan sesuai anjuran, faktor iklim juga sangat mempengaruhi produktivitas tanaman seperti kemarau yang terjadi pada tahun 2023 dan masih berlanjut sampai dengan awal tahun 2024. Selain itu, didukung pula oleh kebijakan pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan untuk meningkatkan produksi pangan strategis. Penurunan produktivitas pada tahun 2024 disebabkan oleh terjadinya penurunan luas panen karena curah hujan yang rendah dan berkurangnya penggunaan benih unggul serta sarana pendukung pertanian lainnya.

2.1.3.2.11. Jumlah Total Produksi Perikanan

Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan cukup tinggi karena merupakan produsen perikanan terbesar karena merupakan daerah *fishing ground*. Total produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen, dari 25.432,35 ton pada tahun 2023 menjadi 26.118,36 ton. Realisasi produksi ini telah melebihi target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 23.039 ton, dengan capaian mencapai 113,36 persen. Peningkatan produksi ini terutama dikontribusikan oleh perikanan tangkap yang mencapai 25.610,40 ton atau 98,05 persen dari total produksi, sementara perikanan budidaya menyumbang 507,97 ton atau 1,94 persen. Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar pertahun dapat dilihat pada **Tabel 2.33**.

Tabel 2. 33 Total Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan	Ton	19.567	21.407	21.752	25.431	26.118

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan pengumpulan dan analisa data terlihat bahwa peningkatan produksi didominasi pada kelompok komoditas Ikan Demersal, sementara pada kelompok komoditas Ikan Pelagis cenderung menurun. Gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Meningkatnya produksi pada kelompok Ikan Demersal dipengaruhi oleh efektifitas alat tangkap; jaring insang tetap, bubu, pancing ulur, rawai dasar dan panah. Faktor lain yang turut mempengaruhi yaitu musim timur yang agak panjang sehingga menambah masa produksi bagi nelayan. Penurunan produksi Ikan Pelagis disebabkan penurunan stok sumberdaya yang terjadi secara periodik, biasanya sekali dalam 4 tahun.

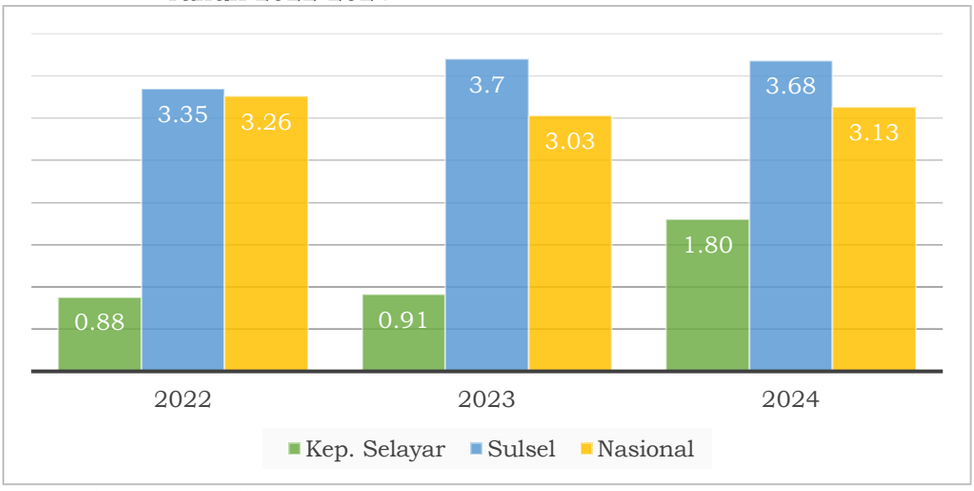
Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap produksi perikanan dalam beberapa tahun terakhir antara lain: kondisi perairan tidak mendukung aktivitas budidaya rumput laut; Belum ada peta partisipatif tentang potensi detail rumput laut per lokasi budidaya; Adanya bencana alam (banjir) di sentra budidaya tambak;

Masih lemahnya penanganan hama dan penyakit ikan; Pengembangan Budidaya air tawar belum optimal; Kelembagaan usaha nelayan dan jenis usaha yang beragam menjadikan usaha penangkapan ikan sangat parsial dan lemah; Logistik penangkapan ikan yang belum terpenuhi secara maksimal; serta Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah.

2.1.3.2.12. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi merupakan salah satu pilar dalam mengukur daya saing suatu daerah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Kapabilitas inovasi juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Capaian nilai Indeks Kapabiltas Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.50**.

Grafik 2. 50 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



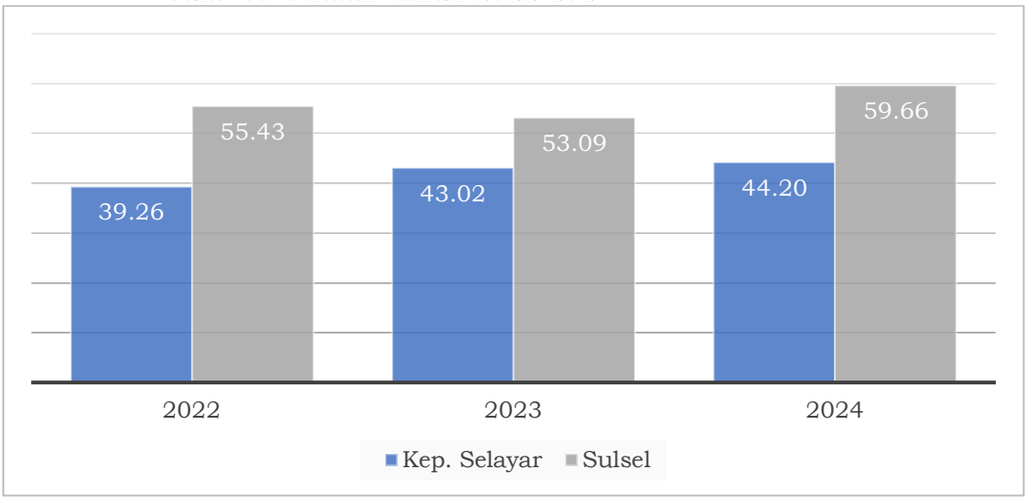
Sumber Data: : BRIN, 2025

Capaian Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir (tahun 2022 sampai 2024). Hal ini disebabkan peningkatan belanja riset pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun capaiannya masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: riset daerah yang belum berkembang ditandai publikasi ilmiah yang masih sedikit, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas peneliti.

2.1.3.2.13. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2023. Pada tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar telah tergolong sebagai kabupaten yang inovatif. Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.51**.

Grafik 2. 51 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024



Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: semakin banyaknya produk-produk inovasi yang dilakukan oleh OPD dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja masing-masing OPD dimaksud. Salah satu kendala dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah kurang maksimalnya pelaporan inovasi, terdapat beberapa inovasi sudah dilaporkan namun belum melengkapi indikator-indikator ataupun data pendukung yang diperlukan.

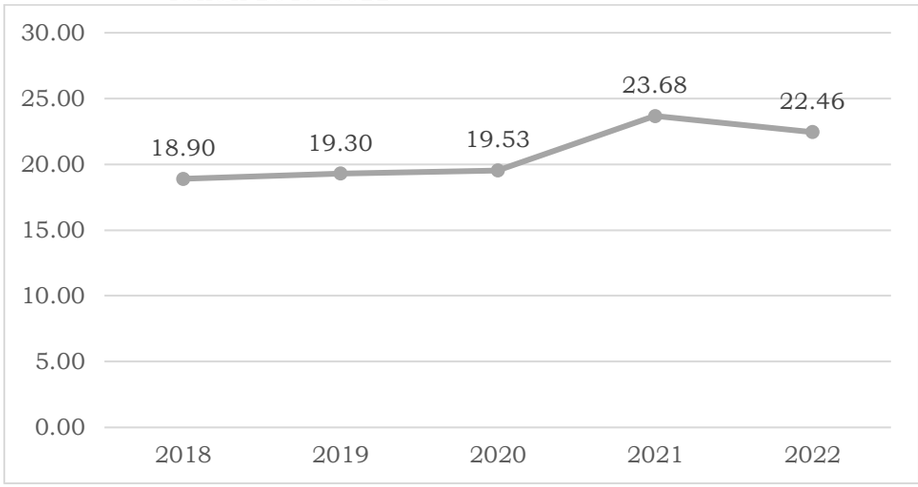
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Bappenas menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini menggabungkan 3 pilar, yaitu : pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100, maka indeks ini semakin sangat baik. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada level baik.

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung fluktuatif. Jika ditinjau dari 3 pilar pembentuk Indeks Ekonomi Hijau, beberapa indikator memiliki capaian yang belum optimal. Beberapa diantaranya adalah produktivitas padi yang tidak optimal dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki keterbatasan lahan untuk menanam padi serta karakteristik daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki luas laut dan potensi perikanan tangkap yang melimpah sehingga pengembangan perikanan budidaya belum optimal. Lebih lanjut, pada pilar sosial ekonomi, tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup tinggi. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.52.**

Grafik 2. 52 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022



Sumber Data: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sejalan dengan konsep ekonomi biru. Indeks Ekonomi Biru menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur sejauh mana pembangunan wilayah memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif.

Berdasarkan perhitungan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 mencapai angka 83,56, tertinggi ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa indikator ini baru dilakukan perhitungan pada tahun 2023. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki skor indeks yang relatif tinggi pada aspek kesehatan ekosistem, mengingat kawasan ini mencakup wilayah Taman Nasional Takabonerate dan perairan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Namun, skor masih perlu ditingkatkan pada aspek nilai tambah ekonomi dan hilirisasi hasil laut, mengingat dominasi praktik perikanan tangkap tradisional dan terbatasnya industri pengolahan. Selain itu, akses terhadap pasar, infrastruktur pelabuhan perikanan, serta sistem rantai dingin *(cold storage)* yang belum merata di seluruh pulau-pulau kecil turut mempengaruhi efektivitas pemanfaatan potensi ekonomi biru secara optimal.

Sementara itu, upaya pemerintah daerah dalam mendorong ekowisata bahari, seperti wisata selam di kawasan atol dan wisata pulau kecil, telah berkontribusi pada peningkatan inklusi ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Selayar bukan hanya mengandalkan sektor perikanan, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Upaya meningkatkan Indeks Ekonomi Biru ke depan, Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperkuat sinergi antar-sektor, memperluas investasi dalam infrastruktur maritim, mendorong inovasi dan teknologi perikanan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya laut.

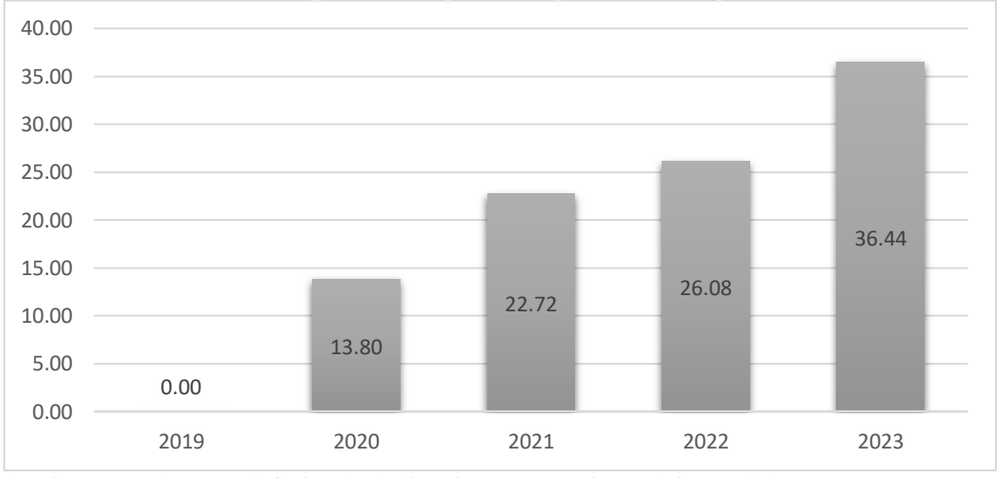
2.1.3.4. Transformasi Digital

2.1.3.4.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara *Online* dan Terintegrasi

Berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pemerintah Daerah telah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berupaya agar seluruh layanan publik diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi agar seluruh stakeholder dapat memiliki akses yang sama dalam layanan publik dimaksud. Layanan publik yang diselenggarakan secara *online* adalah layanan publik berbasis elektronik serta layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan beberapa pelayanan publik sudah berbasis *website/internet* yang dapat digunakan masyarakat dalam mendapatkan layanan pelayanan pada sarana pelayanan publik (sarana kesehatan, pelayanan identitas kependudukan dan layanan perizinan). Hal ini diperkuat oleh pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2021 yang merupakan MPP pertama di wilayah kepulauan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.53**

Grafik 2. 53 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023



Sumber Data: Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

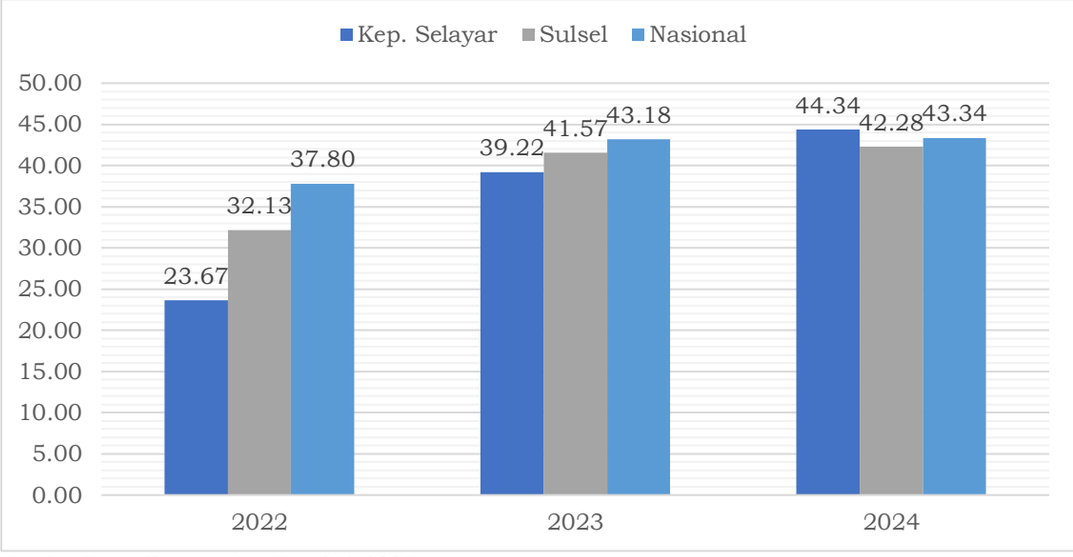
2.1.3.4.2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah ukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menggambarkan tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024, berada pada angka 44,34, yang menempatkannya dalam kategori “Cukup”. Capaian IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 telah

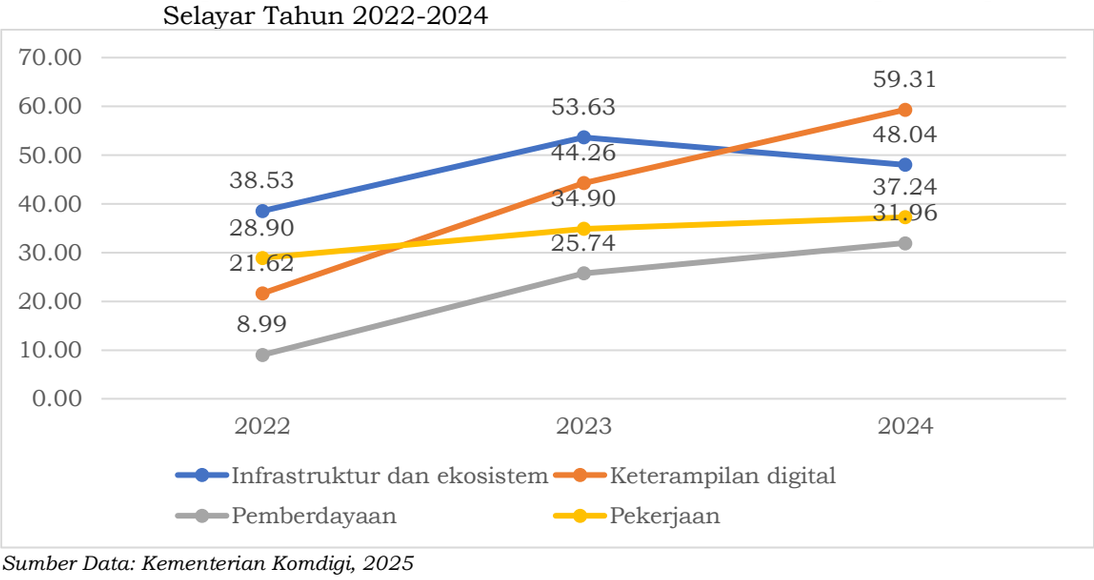
melampaui capaian IMDI Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, setelah dua tahun sebelumnya memiliki capaian lebih rendah dari IMDI Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Capaian ini menggambarkan kondisi masyarakat digital di Kepulauan Selayar yang masih dalam tahap transisi menuju masyarakat yang sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : semakin meningkatnya akses dan adopsi tekonologi digital baik itu di sektor pemerintahan maupun bisnis dan privat. Lebih lanjut, upaya Pemerintah Daerah sudah melakukan pelatihan terkait keterampilan digital kepada masyarakat dan kelompok masyarakat, seperti pelatihan teknologi digital kepada UMKM ataupun sektor pemerintahan. Selain itu, sebagian besar masyarakat Kepulauan Selayar telah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan beragam peralatan komunikasi berbasis teknologi digital seperti penggunaan media sosial ataupun media digital lainnya. Capaian IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.54** serta capaian keempat pilar pembentuk IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.55**

Grafik 2. 54 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2022-2024



Sumber Data: Kementerian Komdigi, 2025

Grafik 2. 55 Capaian Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber Data: Kementerian Komdigi, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh pilar pembentuk IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki capaian yang meningkat dari tahun 2022 sampai 2024, kecuali pilar infrastruktur yang mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki akses internet terutama sekolah yang terletak di wilayah pulau-pulau kecil.

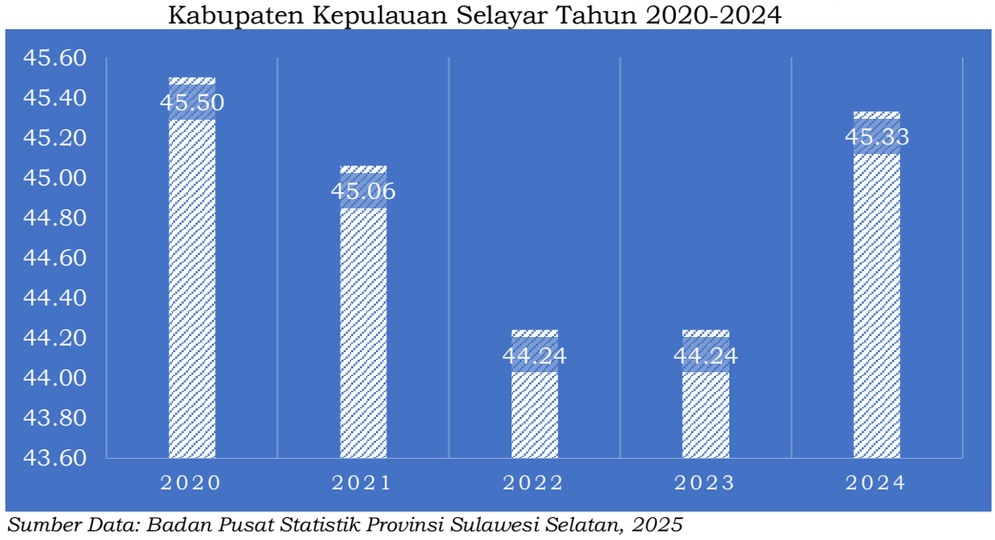
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan suatu daerah.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan pengoperasian 3 pelabuhan penyeberangan/plengsengan di wilayah kepulauan serta pembangunan 3 PLTS juga di wilayah kepulauan, yang anggarannya bersumber dari APBN. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Grafik 2.56.**

Grafik 2. 56 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



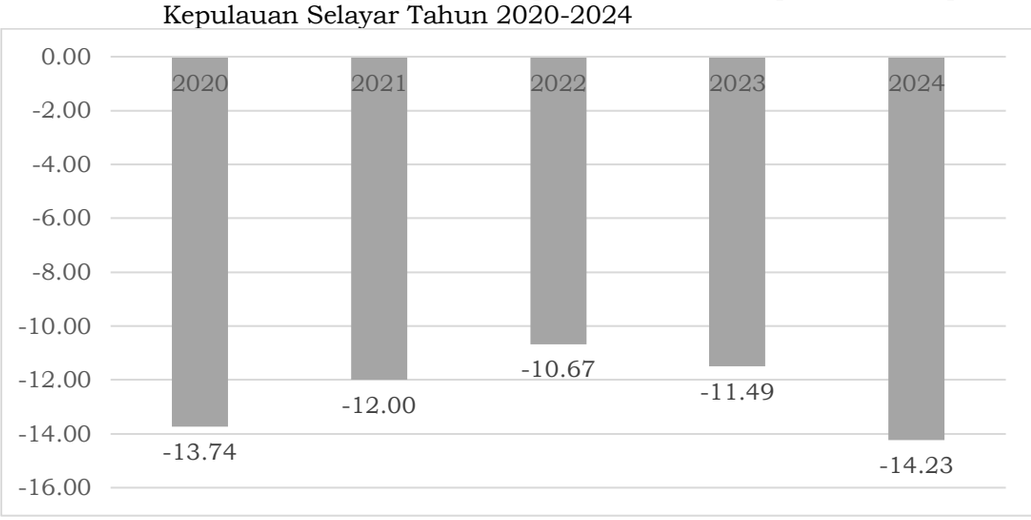
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor dan impor sangat mempengaruhi PDRB suatu daerah. Ekspor yang meningkat dan lebih banyak dari impor akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan suatu daerah. Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, net ekspor Kabupaten Kepulauan Selayar selalu negatif. Hal ini berarti impor Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih banyak dari ekspornya. Kabupaten Kepulauan

Selayar masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk dari luar daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar lebih banyak mengimpor bahan pangan, barang konsumsi, bahan baku, atau barang modal karena belum optimal dalam memproduksi sendiri atau produksi daerah habis dikonsumsi secara lokal, sehingga tidak tersedia cukup untuk diekspor. Lebih lanjut bahwa produksi daerah belum kompetitif untuk diekspor baik itu dari segi kualitas, harga ataupun volumenya. Selain itu, masih kurangnya diversifikasi produk ekspor mengakibatkan nilai ekspor masih rendah. Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.57**.

Grafik 2. 57 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

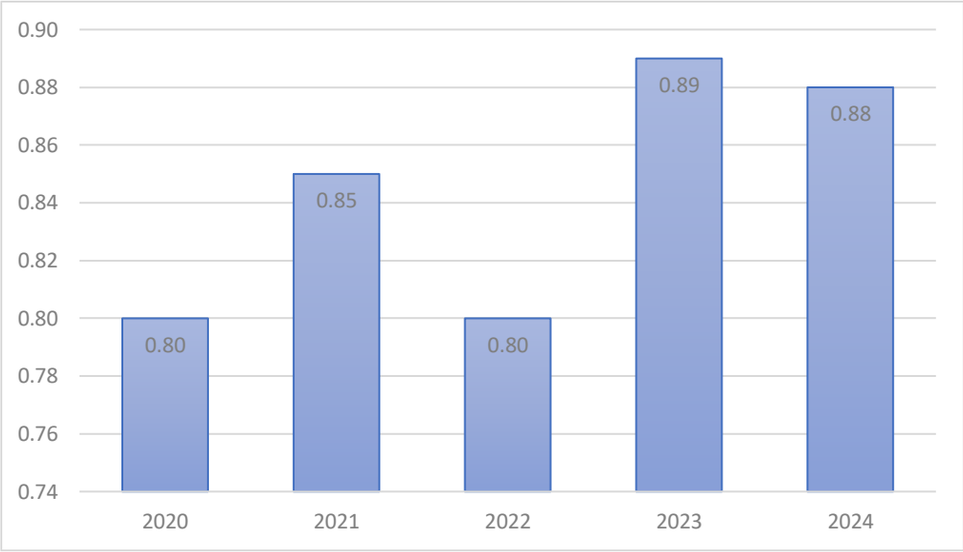
2.1.3.5.3. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok

Barang kebutuhan pokok (Bapok) merupakan komoditi yang banyak diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan yang cukup dan harga yang terjangkau sangat diperlukan. Harga yang stabil dan terjangkau merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama yang memiliki pendapatan rendah.

Stabilisasi harga merupakan salah satu aspek dalam kebijakan pangan yang senantiasa menjadi agenda pemerintah. Stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harga itu sendiri selalu dimonitor oleh pemerintah, mengingat sebagian besar komoditi Bapok merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik produksi bersifat musiman dan harga berfluktuasi sementara permintaan terjadi sepanjang waktu

Stabilitas harga dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga. Semakin kecil nilai koefisien variasi harga menunjukkan fluktuasi harga rendah (stabil) dan sebaliknya. Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun, mencakup 11 komoditi yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu diperoleh dari rata-rata koefisien variasi 11 komoditi. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok terlihat pada **Grafik 2.67**.

Grafik 2. 58 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



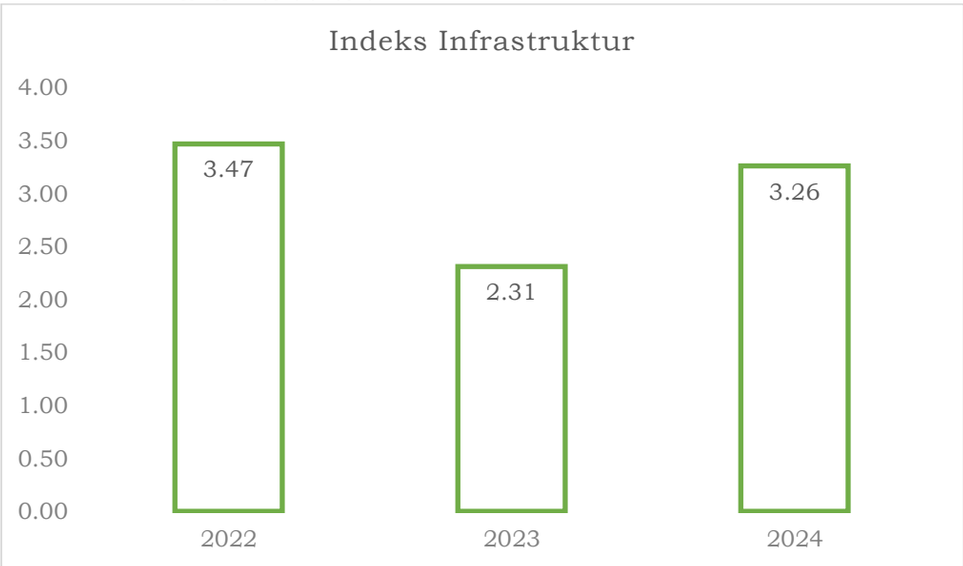
Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1. Indeks Infrastruktur

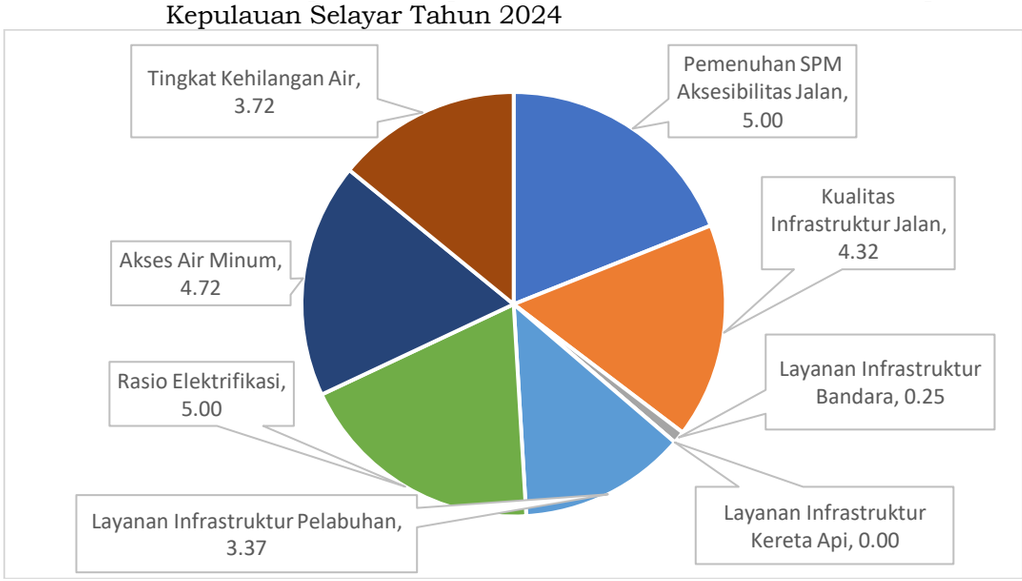
Indeks infrastruktur merupakan salah satu pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah. Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pemenuhan SPM aksesibilitas jalan, kualitas jalan, serta akses air minum layak yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, disisi lain beberapa faktor yang menghambat capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar adalah layanan infrastruktur bandara yang tidak berjalan optimal akibat pandemi Covid 19, serta beberapa wilayah kepulauan yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses air minum layak. Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.59,** serta rincian capaian setiap indikator pembentuk Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 terlihat pada **Grafik 2.60.**

Grafik 2. 59 Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber Data: BRIN, 2025

Grafik 2. 60 Rincian Capaian Setiap Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024



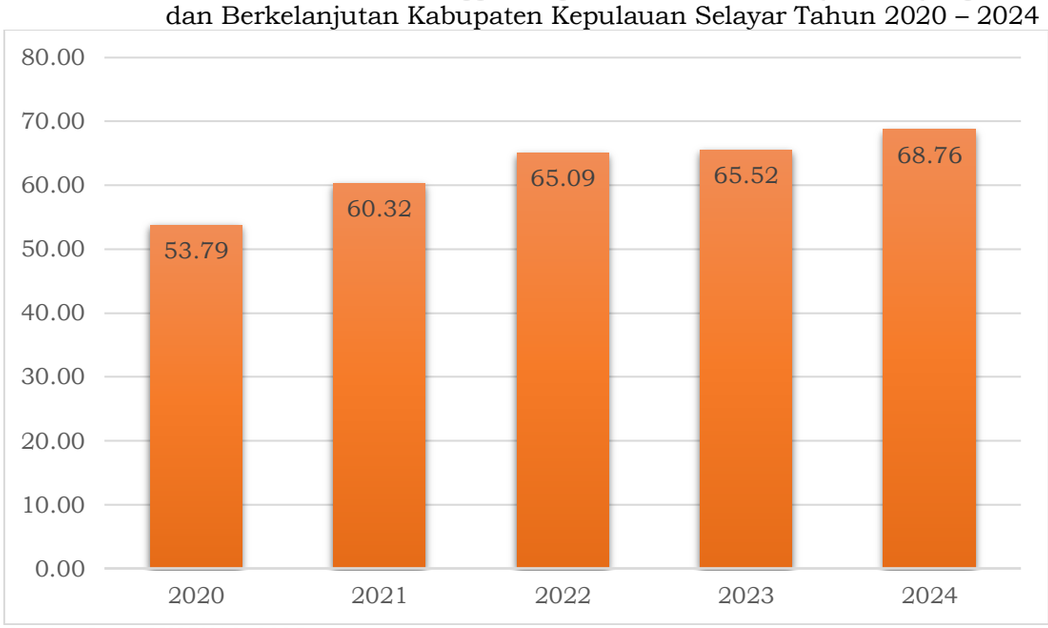
Sumber Data: BRIN, 2025

2.1.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Rumah yang layak dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Jumlah rumah layak huni dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peningkatan dimaksud merupakan *impact* dari beberapa intervensi baik dari Pemerintah Pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program Pemerintah Daerah melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan terlihat pada **Grafik 2.61**.

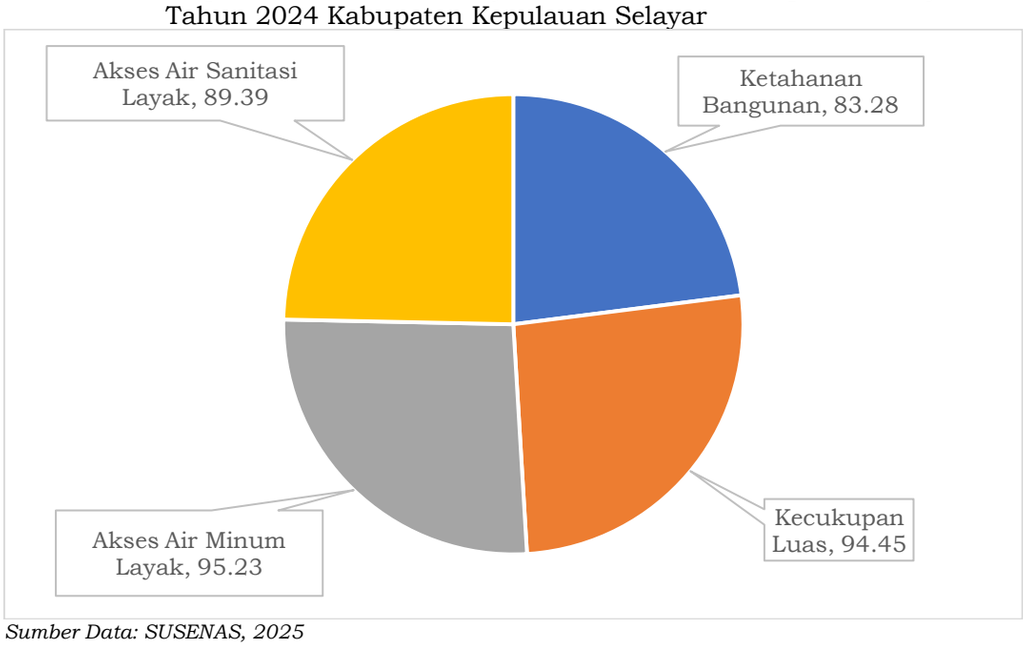
Grafik 2. 61 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: SUSENAS, 2025

Rumah layak huni dapat diidentifikasi dari beberapa komponen yang dimiliki. Komponen Rumah Layak Huni (RLH) merujuk pada elemen-elemen minimum yang harus dipenuhi agar sebuah rumah dapat dikategorikan aman, sehat, dan layak ditempati. Beberapa komponen utama rumah layak huni meliputi (1) ketahanan bangunan, berupa kondisi fisik dari bangunan rumah mulai dari atap, dinding, lantai serta ketahanan terhadap cuaca, (2) kecukupan luas, berupa luasan rumah yang ideal jika dibandingkan dengan jumlah penghuni rumah, (3) akses air minum layak, berupa ketersediaan air bersih yang layak untuk minum dan mandi, berasal dari sumur terlindung, PDAM, atau sumber aman lainnya, serta (4) akses sanitasi layak, berupa ketersediaan sanitasi yang layak dan tidak mencemari lingkungan. Capaian komponen rumah layak huni Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024, disajikan pada **Grafik 2.62.**

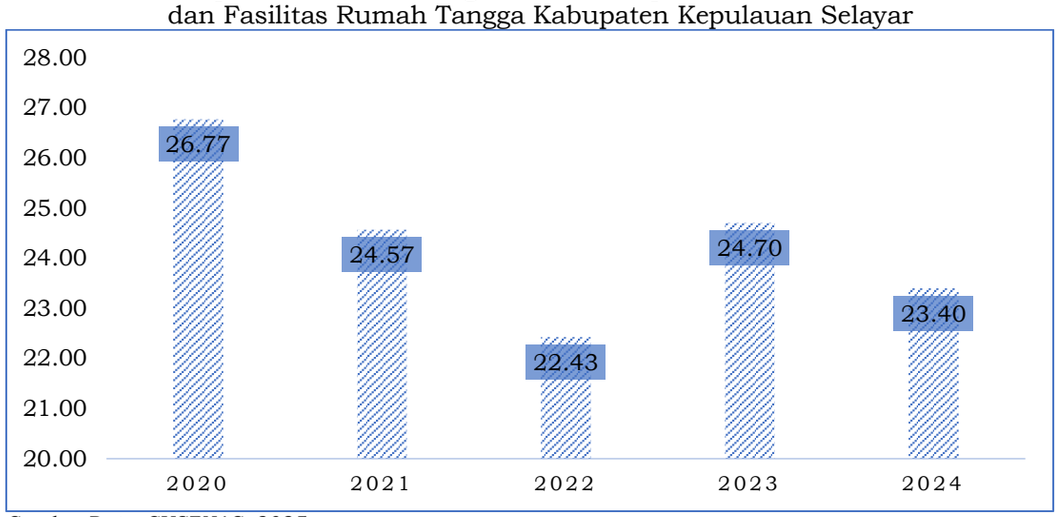
Grafik 2. 62 Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber Data: SUSENAS, 2025

Kemampuan rumah tangga memiliki hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan, yang mengukur kemampuan pengeluaran perkapita untuk membiayai kebutuhan terkait hunian. Menurut standar *World Bank*, proporsi pengeluaran hunian dari total pengeluaran rumah tangga yang ideal tidak melebihi 30 persen. Jika melebihi 30 persen, maka biaya hunian telah membebani kemampuan ekonomi dan tidak layak secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa optimal dalam menjangkau akses hunian yang layak sehingga masih terdapat 31 persen lebih rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Capaian proporsi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.63**

Grafik 2. 63 Proporsi Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar

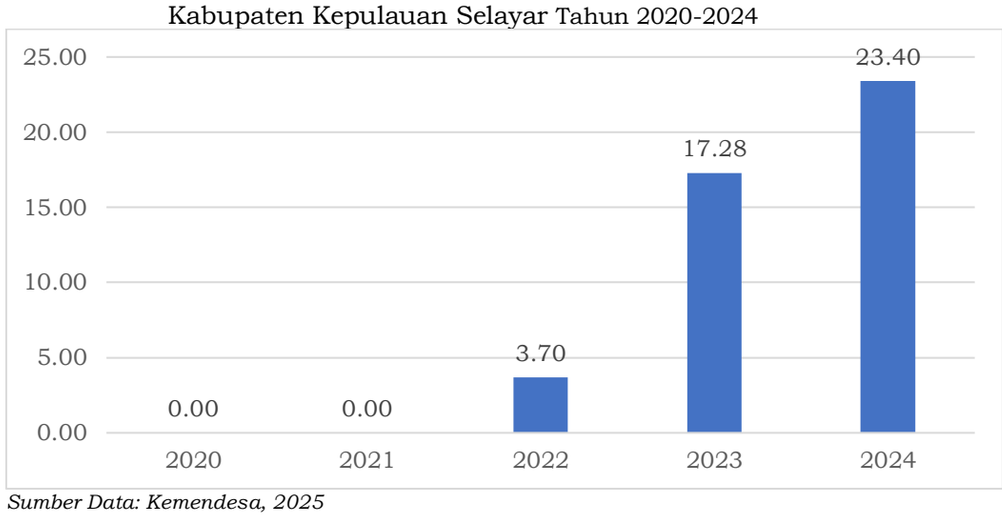


Sumber Data: SUSENAS, 2025

2.1.3.6.3. Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasikan status desa berdasarkan nilai indeks komposit yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Berdasarkan IDM yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), status desa dibagi menjadi lima, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, belum memiliki desa mandiri. Pada tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkatkan status sebanyak 3 desa menjadi desa mandiri, meningkat menjadi 22 desa pada tahun 2024. Persentase desa mandiri berdasarkan IDM di Kabupaten Kepulauan terlihat pada **Grafik 2.64**

Grafik 2. 64 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Kemendesa, 2025

Meningkatnya jumlah desa mandiri (22 desa) tidak terlepas dari pelaksanaan program strategis “Gerbang Sari” yang merupakan akronim dari Gerakan Membangun Desa Mandiri yang dimulai pada tahun 2022. Pelaksanaan program Gerbangsari dilakukan melalui beberapa penanganan secara menyeluruh yang dilaksanakan melalui kolaborasi dan integrasi antar OPD untuk mengoptimalkan pencapaian indikator pembangunan daerah. Program Gerbangsari sebagai salah satu program unggulan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Melihat hal ini, pemilihan gerbangsari sebagai salah satu

strategi peningkatan kualifikasi desa serta penurunan angka kemiskinan merupakan aplikasi dari **pendekatan tematik** untuk menjamin pelaksanaannya telah searah dengan tema dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya pada **pendekatan holistik**, untuk menurunkan angka kemiskinan dengan penanganan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, penyediaan akses informasi yang merata, SDM unggul serta peningkatan pendapatan.

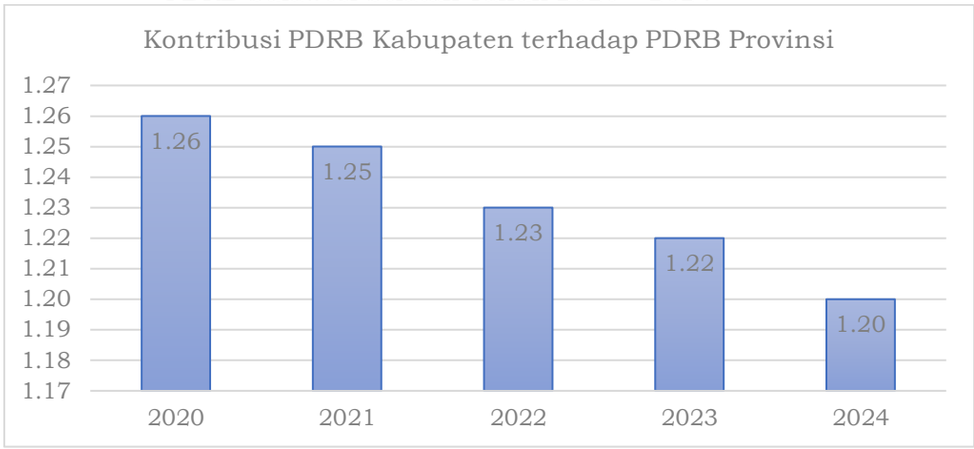
Kemudian **pendekatan integratif** melalui perumusan beberapa program dan kegiatan multisektor dan terintegrasi antar OPD. Secara khusus pada aspek peningkatan pendapatan, sangat diperlukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar seluruh komponen, baik itu Perangkat Daerah, perbankan, BUMDesa serta pemerintah desa. Selanjutnya, untuk menjamin program dan kegiatan tepat sasaran, maka diperlukan **pendekatan spasial**, dimana intervensi kegiatan dilakukan pada desa tertentu sesuai dengan potensi lokal desa. Sebagaimana diketahui bahwa pada Program Gerbangsari, ada 4 desa sasaran sesuai dengan potensi lokal desa dimaksud yaitu Desa Wisata, Desa Tani, Desa Nelayan dan Desa Koperasi dan UMKM.

Peningkatan status desa juga sangat berkaitan dengan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa dengan status maju atau mandiri cenderung memiliki BUMDes yang aktif, produktif, dan memiliki unit usaha yang berjalan baik. Berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 36 BUMDes dari 36 Desa dengan kategori aktif. Namun, jika dilihat dari Pendapatan yang dihasilkan oleh ke 36 BUMDes, belum ada BUMDes yang menghasilkan pendapatan asli desa yang lebih besar dari penyertaan modal ke BUMDes dimaksud. Hal ini membutuhkan upaya bagi Pemerintah Desa setempat untuk mengembangkan BUMDesnya.

2.1.3.6.4. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai satu-satunya daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi provinsi, khususnya di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Meskipun secara geografis tergolong daerah dengan aksesibilitas terbatas, potensi ekonomi yang dimiliki sangat besar, terutama di sektor-sektor primer yang berbasis sumber daya alam pesisir dan laut. Secara kuantitatif, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di daratan utama seperti Makassar, Gowa, atau Maros. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk yang lebih sedikit, keterbatasan infrastruktur ekonomi, serta rendahnya tingkat industrialisasi. Capaian kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan terlihat pada **Grafik 2.65**.

Grafik 2. 65 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: BPS, 2025

Walaupun kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil, namun dalam konteks pembangunan wilayah yang berkeadilan dan inklusif, angka kontribusi PDRB bukan semata-mata menjadi indikator utama. Kepulauan Selayar memiliki potensi untuk meningkatkan peran strategisnya dalam struktur PDRB provinsi melalui optimalisasi sektor unggulan, seperti:

1. Perikanan tangkap dan budidaya, khususnya rumput laut dan hasil laut bernilai ekspor.
2. Pariwisata bahari dan konservasi, termasuk Kawasan Taman Nasional Takabonerate sebagai destinasi kelas dunia.
3. Pertanian lokal, yang menyokong ketahanan pangan regional.
4. Ekonomi biru dan energi terbarukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan investasi, pembangunan infrastruktur konektivitas antar-pulau, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kabupaten Kepulauan Selayar berpeluang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Sulawesi Selatan secara lebih signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan angka statistik, kontribusi Selayar mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berpihak pada wilayah kepulauan melalui kebijakan afirmatif, pembangunan infrastruktur maritim, serta pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan dalam struktur ekonomi provinsi.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi

pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (**Grafik 2.66)**.

Grafik 2. 66 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: diolah dari data LKPD Kepulauan Selayar dan BPS, 2025

Tren peningkatan rasio pajak terhadap PDRB dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
2. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak.
3. Edukasi dan penyuluhan pajak kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Melihat konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, rasio pajak daerah terhadap PDRB masih berada pada level yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menggambarkan bahwa potensi fiskal daerah belum sepenuhnya tergali secara optimal, terutama dalam pemungutan pajak seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Beberapa faktor penyebab rendahnya rasio ini antara lain:

1. Struktur ekonomi lokal yang masih didominasi sektor informal dan primer (pertanian, perikanan).
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan sistem pemungutan.
3. Kurangnya basis data pajak yang akurat dan terintegrasi.
4. Belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah.

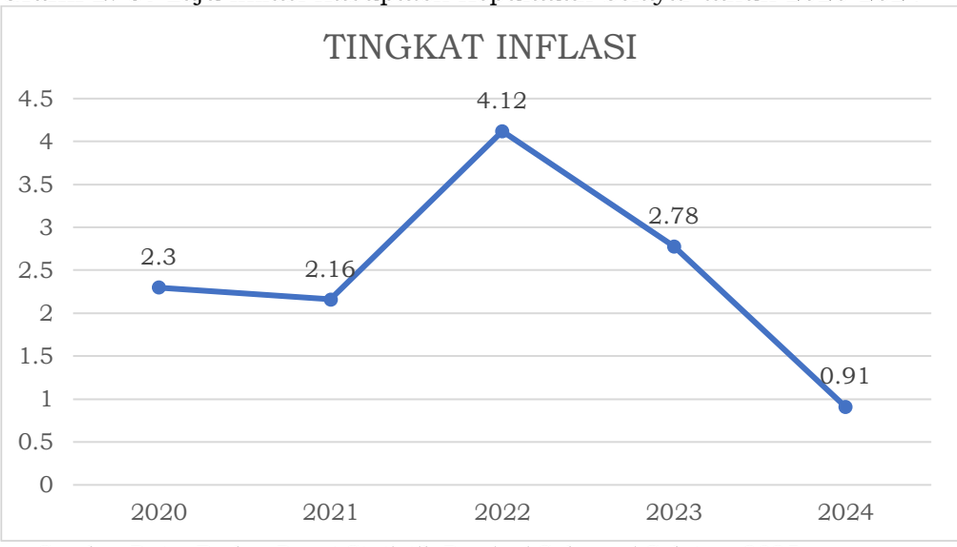
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dengan peningkatan rasio ini, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Rasio pajak daerah yang sehat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

2.1.3.7.2. Tingkat Inflasi Gabungan

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa.

Karena Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba, sehingga inflasi yang digunakan mengacu pada inflasi Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba) dapat dilihat pada **Grafik 2.67.**

Grafik 2. 67 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, gula pasir, bawang putih, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe, dan sabun cair/cuci piring. Berdasarkan grafik di atas, penurunan inflasi yang disebabkan oleh menurunnya nilai/ harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Tiga kelompok yang sangat berpengaruh terhadap penurunan inflasi adalah kelompok transportasi yang menurun dari 12,70 pada tahun 2022 menjadi 0,09 pada tahun 2023, kelompok pakaian dan alas kaki menurun dari 1,89 pada tahun 2022 menjadi 0,89 pada tahun 2023, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menurun dari 2,03 menjadi -0,75. Selain itu, salah satu kelompok yang nilainya masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yang masih berada pada angka 4,59 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 6,27 pada tahun 2023.

2.1.3.7.3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terjadi, jika ada kenaikan produksi barang dan jasa dalam perekonomian, atau ditunjukkan oleh kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak hanya berarti telah terjadi kenaikkan produksi barang dan jasa, tetapi juga berarti terciptanya lapangan pekerjaan.

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi dapat mendorong pertambahan pendapatan daerah (pertumbuhan ekonomi), selain itu investasi juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, yang berarti akan mengurangi jumlah pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan, yang akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain. Selain itu investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 76,286 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 83,19 persen. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Tabel 2.22.**

Tabel 2. 34 Nilai Realisasi Dan Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)		Pertumbuhan Investasi
		Jumlah Pelaku Usaha (Orang)	Nilai Investasi	
1.	2020	209	39.200.520.000	34,40
2.	2021	-	67.442.916.200	41,88
3.	2022	8	12.826.155.311	(425,82)
4.	2023	17	76.286.000.000	83,19
5.	2024	25	28.462.000.000	(168,03)

Sumber Data: DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Laju pertumbuhan investasi pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, mengingat investasi baik dari sektor swasta maupun publik merupakan motor utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

Penurunan pertumbuhan investasi tercermin dari turunnya nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perikanan, dan infrastruktur pendukung. Beberapa faktor utama diduga penyebab penurunan ini, antara lain:

1. Tingginya biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan yang masih sulit dijangkau.

2. Minimnya kepastian hukum dan perizinan yang masih dianggap rumit oleh pelaku usaha.
3. Kurangnya promosi investasi yang terarah dan berbasis potensi lokal.
4. Dampak lanjutan dari kondisi ekonomi global dan nasional, yang menyebabkan investor lebih berhati-hati menanamkan modal di daerah dengan risiko geografis tinggi.
5. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan zona ekonomi potensial lainnya di wilayah Kepulauan Selayar.
6. Penurunan ini tentu berdampak pada terhambatnya realisasi proyek-proyek strategis daerah, lambatnya penyerapan tenaga kerja lokal, serta stagnasi pertumbuhan ekonomi riil di sejumlah kecamatan.

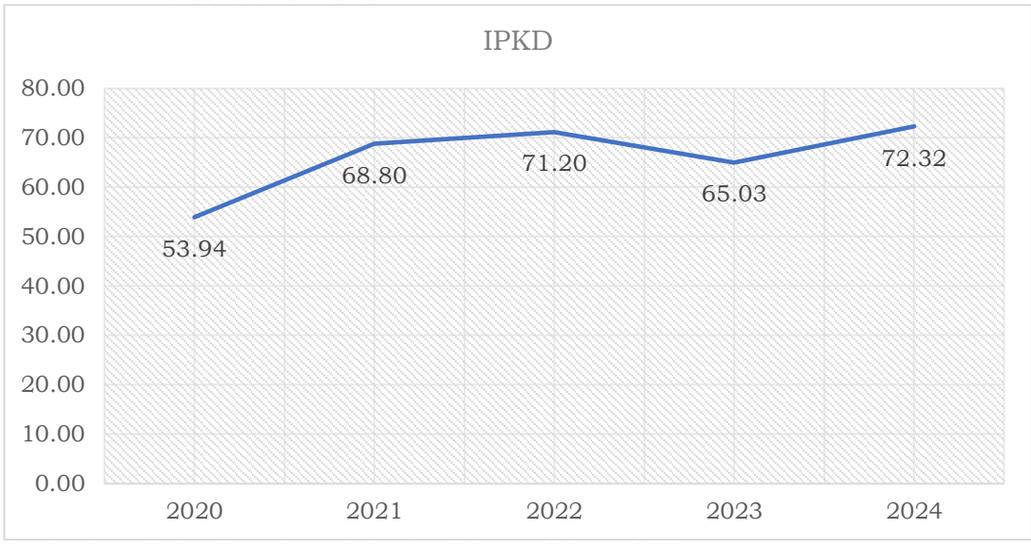
2.1.3.7.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Stabilitas ekonomi makro suatu daerah sangat tergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang kuat dan stabil akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan serta mengoptimalkan capaian-capaian indikator ekonomi makro lainnya. Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur, yaitu : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan dan cukup rendah karena pada saat itu perencanaan dan penganggaran daerah belum menggunakan SIPD sehingga perencanaan dan penganggaran menjadi tidak terintegrasi. Namun setelah menerapkan SIPD pada tahun 2021 dan 2022 sehingga mengalami peningkatan. Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh capaian WTP yang diraih sebanyak 8 kali berturut-turut.

Beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kemandirian keuangan. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan sumber pendanaan dari dana transfer Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Daerah belum mampu memaksimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.68**.

Grafik 2. 68 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan reformasi hukum secara sistematis dan terukur. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmen dalam mendorong terciptanya tata kelola hukum yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah upaya aktif dalam peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM diperoleh hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam reformasi hukum. Hal ini ditunjukkan melalui:

1) Koordinasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah

   Pemerintah daerah secara aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan untuk memastikan seluruh produk hukum daerah, baik berupa rancangan peraturan daerah (ranperda) maupun peraturan kepala daerah (perkada), telah sesuai dengan prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal.

2) Peningkatan Kompetensi Aparatur

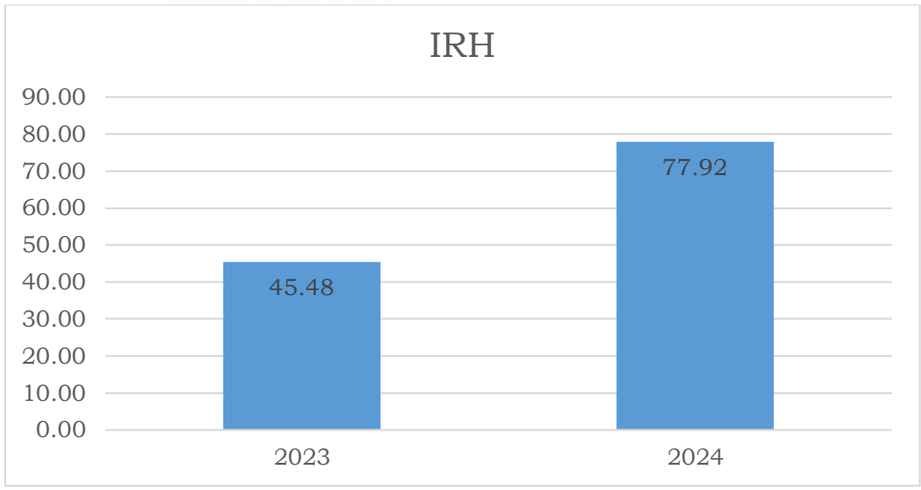
   Dalam rangka memperkuat kapasitas perancang peraturan, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mengikutsertakan ASN dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar proses legislasi di tingkat daerah dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

3) Pemanfaatan Teknologi dan Keterbukaan Informasi

   Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap regulasi daerah dengan mengembangkan sistem digitalisasi produk hukum, yang diharapkan dapat diakses masyarakat melalui website resmi PEMERINTAH DAERAH.

Indeks Reformasi Hukum untuk tingkat kabupaten baru dilakukan pada tahun 2023. Oleh karena itu, untuk melihat capaian IRH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dan tahun 2024 selengkapnya pada **Grafik 2.69**

Grafik 2. 69 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024



Sumber Data: Kemenkumham RI, 2025

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran kinerja penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2024, hasil evaluasi menunjukkan Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori “Cukup” dengan nilai 2,57. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dari capaian tahun sebelumnya, namun juga menandakan perlunya peningkatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan digital.

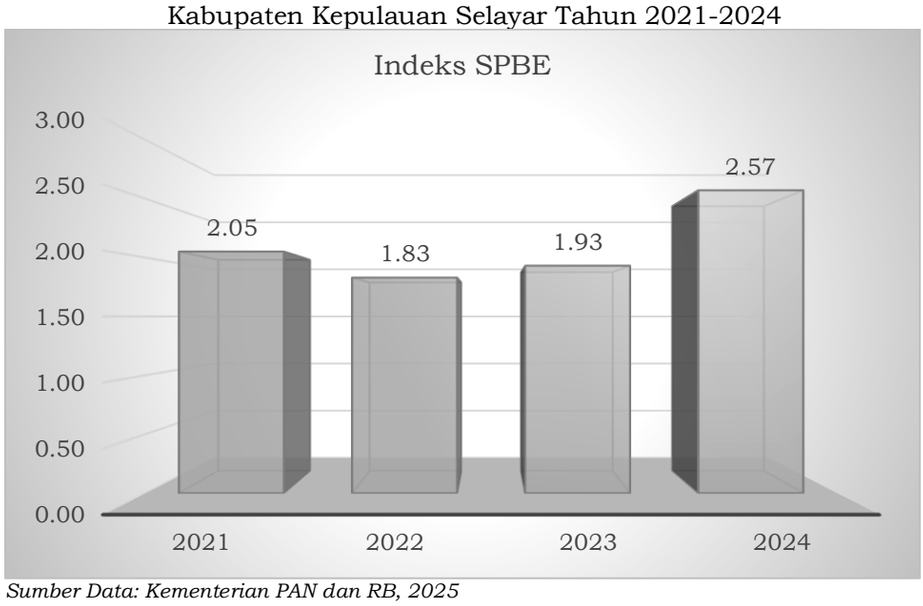
Untuk mendorong peningkatan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1) **Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE**: Melakukan penyesuaian terhadap arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE daerah agar selaras dengan arsitektur dan peta rencana SPBE nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.
2) **Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah**: Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE, guna memastikan implementasi SPBE berjalan efektif dan efisien.

3) **Peningkatan Kapasitas SDM**: Menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan SPBE.
4) **Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi**: Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan SPBE, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik berbasis elektronik.
5) **Monitoring dan Evaluasi Berkala**: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan SPBE untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi yang tepat, serta memastikan keberlanjutan program SPBE di masa mendatang.

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sampai 2024 selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.70**

Grafik 2. 70 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024



Sumber Data: Kementerian PAN dan RB, 2025

2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penilaian ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor terpenting yang mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah komitmen Pimpinan Daerah yang diikuti oleh komitmen pimpinan Perangkat Daerah. Komitmen ini mencakup alokasi anggaran, kebijakan internal, dan arahan strategis. Dukungan penuh dari kepala daerah, kepala dinas, atau pimpinan unit pelayanan sangat menentukan penerapan standar pelayanan

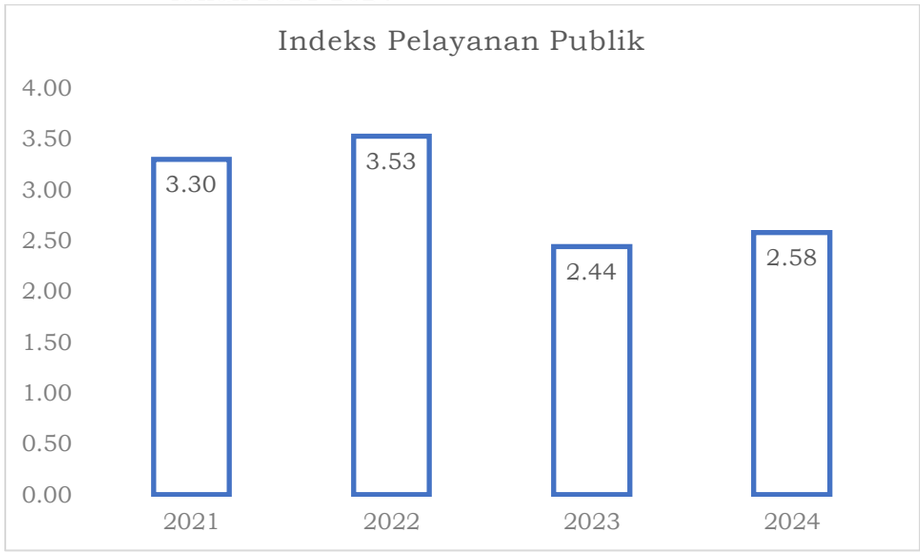
secara konsisten. Lebih lanjut, sistem pengawasan dan evaluasi yang baik juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat, Ombudsman RI) serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan dan kinerja pelayanan, disertai tindak lanjut atas temuan.

Selain itu, beberapa faktor lain yang berpengaruh positif, antara lain :

1. Peran masyarakat dalam memberikan umpan balik, saran, dan pengaduan melalui kanal resmi baik itu melalui website Pemerintah Daerah ataupun aplikasi SP4N Lapor
2. Penerapan inovasi pelayanan (seperti Mal Pelayanan Publik, layanan keliling, aplikasi *online*) dapat mempercepat kepatuhan dan efisiensi layanan.

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada kategori “Baik” dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada pada kategori “Kurang”. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.71**.

Grafik 2. 71 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024



Sumber Data: Kemenpan RB, 2025

Melihat faktor-faktor pendukung di atas, masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

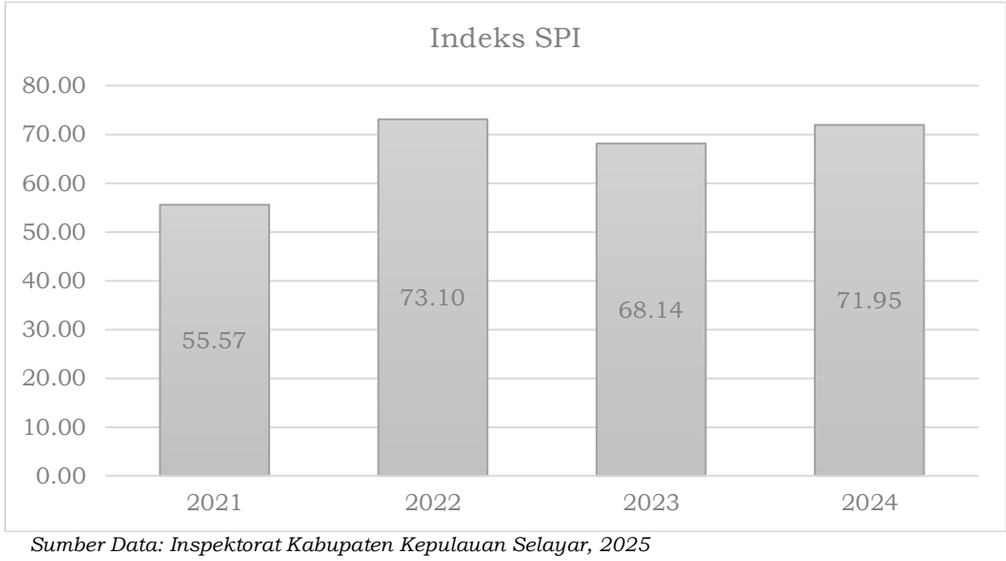
1. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen Standar Pelayanan yang lengkap dan memenuhi unsur sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 (misalnya: jenis layanan, persyaratan, jangka waktu, biaya, prosedur, produk akhir).
2. Masih terbatasnya SDM petugas pelayanan yang memiliki kompetensi teknis dan etika pelayanan publik sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan terkait pelayanan prima, komunikasi, dan pengelolaan pengaduan
3. Belum optimal infrastruktur dan sarana pendukung, berupa ketersediaan sarana fisik (loket, ruang tunggu, *signage*) dan non-fisik (aplikasi digital, website layanan).

2.1.4.1.4. Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui persepsi dan pengalaman masyarakat serta pegawai pemerintah terhadap potensi praktik korupsi dan integritas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Skor SPI Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 71.95 pada tahun 2024. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/ pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/ jabatan/ layanan strategis/ kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi. Indeks Survei Penilaian Integritas diukur mulai dari tahun 2021. Capaian Indeks SPI Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir memiliki capaian yang fluktuatif, sebagaimana yang tergambar pada **Grafik 2.72.**

Grafik 2. 72 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024



Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian Indeks Survei Penilaian Integritas, sebagai berikut :

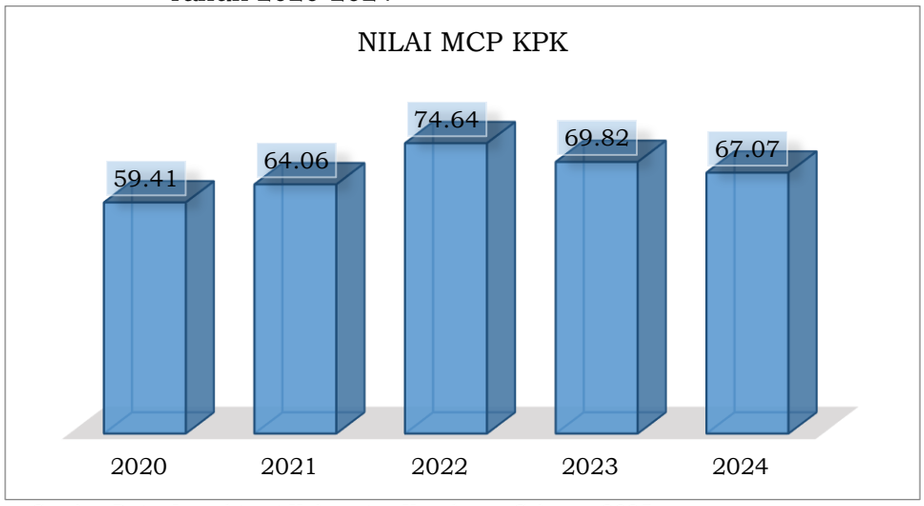
a. Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai;
b. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan;
c. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif;
d. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan;
e. Mempertahankan upaya peningkatan kesadaran untuk melaporkan dan menolak gratifikasi;
f. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas.

2.1.4.1.5. Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salah satu bentuk concern dan komitmen tinggi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi daerah adalah melakukan pemberantasan korupsi daerah melalui tugas koordinasi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah dilakukan melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi baik sebelum terjadi korupsi maupun setelah upaya penindakan korupsi telah dilakukan baik oleh KPK maupun APH lain.

Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu 2020 sampai 2024 cenderung fluktuatif. Namun capaian nilai MCP KPK selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.73.**

Grafik 2. 73 Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar selama dua tahun terakhir, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

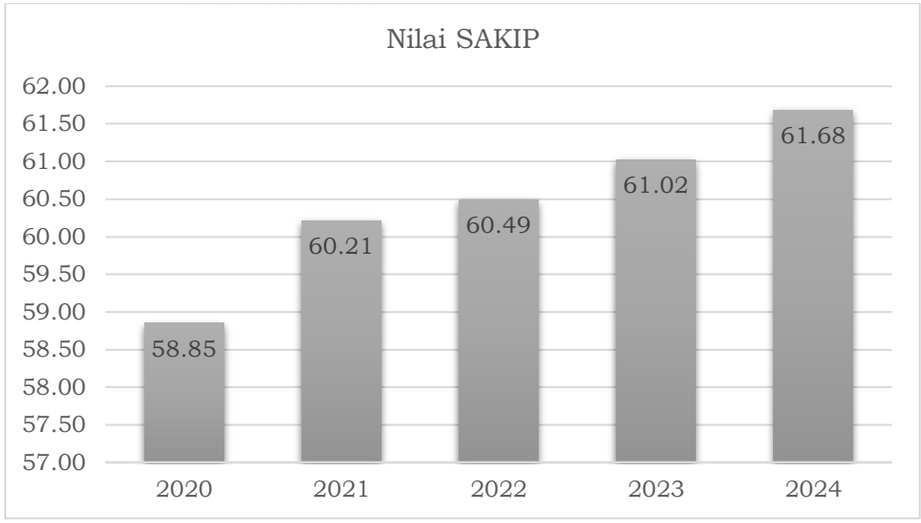
1. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap bantuan keuangan, pemberian bantuan sosial dan hibah serta belum optimalnya inventarisasi penganggaran honorarium dan perjalanan dinas Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya pengawasan APIP;
3. Belum optimalnya Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN;
4. Belum optimalnya Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD;
5. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa.

2.1.4.1.6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Capaian nilai SAKIP

Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir, selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.74.**

Grafik 2. 74 Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun, peningkatan dimaksud tidak terjadi secara signifikan. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pada aspek perencanaan kinerja, masih banyak OPD yang menyusun perencanaan kinerja belum berorientasi hasil serta belum semua indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART
2. Indikator kinerja Utama pada beberapa Perangkat Daerah belum memiliki formulasi perhitungan, definisi operasional, sumber data dan penanggungjawab
3. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan kepada Perangkat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Sebagian besar Perangkat Daerah belum mengunggah Laporan Hasil Evaluasi Internal.

2.1.4.1.7. Indeks Maturitas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang fluktuatif, sehingga masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada Level 2 (berkembang), yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mulai menerapkan unsur-unsur pengendalian intern secara parsial. Beberapa kebijakan dan prosedur sudah disusun, namun implementasinya belum konsisten di seluruh unit kerja. Dokumentasi belum menyeluruh, dan evaluasi pengendalian masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Namun, untuk mencapai Level 3 (terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur) dan Level 5 (Optimal), masih dibutuhkan perbaikan dalam hal

monitoring berkelanjutan, evaluasi efektivitas pengendalian, dan integrasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian indeks maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 3,002, menurun menjadi 1,3 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2,84 pada tahun 2024.

Indeks maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berada pada Level 2, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Jumlah dan kompetensi auditor internal serta petugas pengendalian internal belum merata di seluruh OPD, yang menyebabkan lemahnya pengawasan fungsional.
2. Belum Terintegrasinya Manajemen Risiko Secara Optimal
   Belum terdapat pedoman manajemen resiko Pemerintah Dearah Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun ada, pelaksanaan manajemen risiko belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan di OPD.
3. Kultur Organisasi yang Belum Mendukung
   Masih terdapat resistensi terhadap perubahan, serta persepsi bahwa SPIP hanya bersifat administratif, bukan sebagai alat bantu manajerial.

Untuk mendorong peningkatan ke level maturitas SPIP yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperkuat peran Inspektorat sebagai *quality assurance* dalam pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Strategi penguatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan integrasi SPIP dalam siklus manajemen pembangunan daerah menjadi kunci utama menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan efektif.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Sustansial

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Peraturan Daerah Kabupeten Kepulauan Selayar pada lima tahun terakhir (tahun 2020 sampai 2024) sebesar 100 persen.

Beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam mengoptimalkan persentase penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda), baik oleh pemerintah daerah, Satpol PP, maupun aparat penegak hukum lainnya adalah :

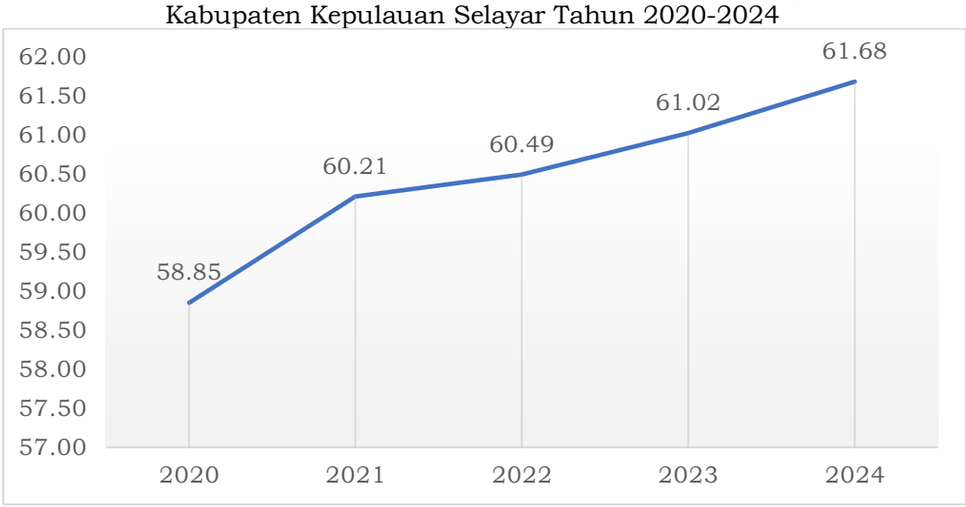
1) Kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih akan lebih mendorong implementasi Perda secara konsisten. Kepemimpinan ini juga berpengaruh dalam penguatan kelembagaan Satpol PP dan perangkat pendukung lainnya.

2) Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
3) Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sangat penting, terutama untuk Perda yang mengandung sanksi pidana atau perdata.
4) Pengawasan masyarakat dan partisipasi publik. Partisipasi ini bisa melalui pelaporan pelanggaran, sosialisasi, atau keterlibatan dalam forum musyawarah.
5) Kampanye publik, penyuluhan, dan dialog dengan komunitas penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Perda.

2.1.4.2.2. Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Selama 4 kali pemilihan legislatif, jumlah anggota DPRD perempuan terpilih sebanyak 4 sampai 6 orang dengan persentase sebesar 16 sampai 24 persen, yang dapat dilihat pada **Grafik 2.75.**

Grafik 2. 75 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2025

2.1.4.2.3. Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya konstribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan keseluruhan potensi-potensi di daerah demi kemakmuran masyarakat.

Sejalan dengan era reformasi, salah satu unsur penting yang selalu mengiringi implementasi desentralisasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian

daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari unsur eksekutif maupun legislatif telah menghasilkan beberapa Peraturan Daerah setiap tahunnya dalam rangka mengatur pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, dari beberapa Peraturan Daerah dimaksud belum ada Peraturan Daerah yang dihasilkan merupakan inisiatif dari DPRD melainkan keseluruhan adalah inisiatif atau usulan dari unsur eksekutif. Olehnya itu, kedepannya DPRD dapat melakukan inisiasi untuk membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian masalah dimaksud. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.35**.

Tabel 2. 35 Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	Jumlah Peraturan Daerah inisiatif DPRD
1	2020	6	0
2	2021	10	0
3	2022	10	0
4	2023	11	0
5	2024	11	0

Sumber: BPS Kepulauan Selayar dan Bagian Hukum Setda, 2025

2.1.4.2.4. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Peran perempuan dalam partai politik sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan dalam Pemilu bukan hanya sekedar pelengkap semata, melainkan keterwakilan perempuan dan partisipasi politik perempuan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan berkontribusi dalam perubahan secara nyata dan dapat dirasakan oleh perempuan.

Persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar telah melebihi 30 persen sebagaimana syarat sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai politik. Persentase perempuan pengurus partai politik sudah mencapai 38,66 persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024, dengan rincian setiap partai tertera pada **Tabel 2.36.**

Tabel 2. 36 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar

Partai Politik	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
PKB	18	7	38,89
Gerindra	26	9	34,62
PDIP	15	5	33,33
Nasdem	31	11	35,48
Buruh	3	1	33,33
Gelora	3	1	33,33
PKS	44	19	43,18
PKN	9	4	44,44

Partai Politik	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Hanura	13	5	38,46
Garuda	7	4	57,14
PAN	23	9	39,13
PBB	9	4	44,44
Demokrat	48	22	45,83
PSI	5	2	40,00
PPP	3	1	33,33
Ummat	16	5	31,25
Golkar	40	12	30,00
TOTAL	**313**	**121**	**38,66**

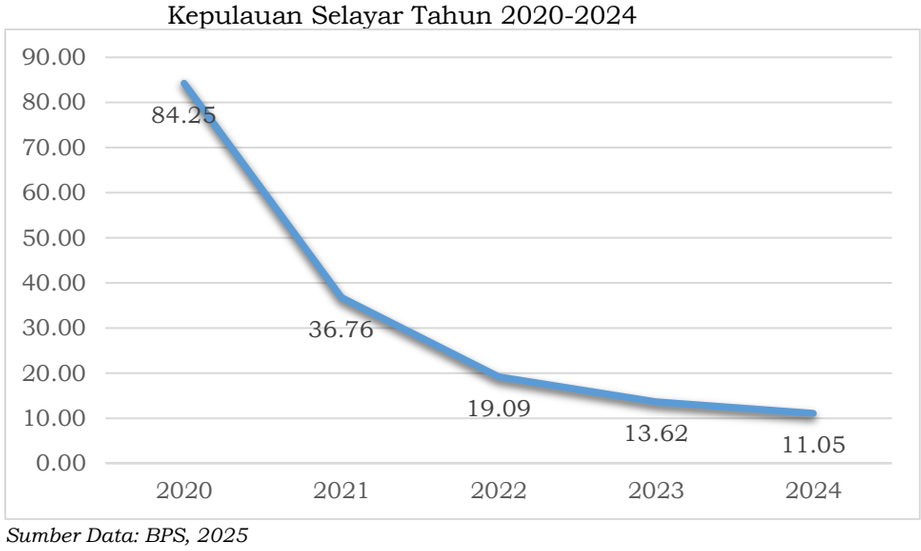
Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.2.5. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Pembangunan suatu daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu daerah. Semakin kondusif keadaan di suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tenang dalam menjalankan aktivitas di segala bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial ataupun budaya.

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah tindak pidana meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu melebihi 300 tindak pidana dari yang sebelumnya hanya pada kisaran 100 tindak pidana. Persentase tindak kriminal yang ditangani juga mengalami capaian yang fluktuatif dan yang tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 84,25 persen. Persentase tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.76**.

Grafik 2. 76 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2025

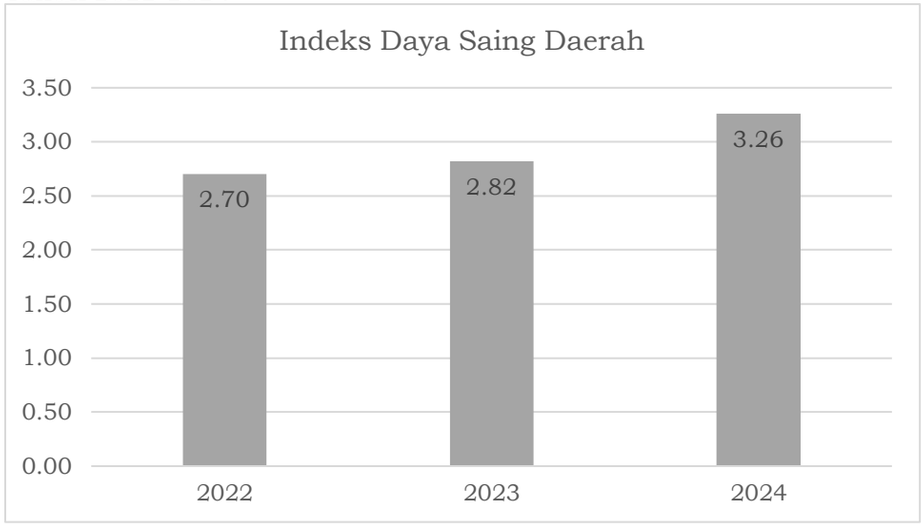
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Pengukuran IDSD untuk level kabupaten/kota baru dilaksanakan mulai tahun 2022. IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.77.**

Grafik 2. 77 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber Data: BRIN, 2025

Beberapa pilar IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 adalah pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro dan pilar ukuran pasar. Peningkatan capaian pilar adopsi TIK disebabkan karena pada tahun 2023, banyak tower BTS yang dibangun di wilayah terpencil dan kepulauan sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati jangkauan layanan telepon selular dan internet. Lebih lanjut bahwa capaian ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi serta PDRB perkapita yang meningkat seiring banyaknya *event-event* yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta beberapa pekerjaan konstruksi yang menyebabkan aktivitas ekonomi semakin menggeliat. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah serta inflasi yang dapat ditekan turut berkontribusi dalam peningkatan capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa pilar IDSD yang masih memiliki capaian dibawah nilai indeks 1 (satu) yaitu pilar sistem keuangan dan pilar kapabilitas inovasi. Rendahnya pilar sistem keuangan disebabkan oleh belum masifnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh masyarakat untuk membuka usaha. Terkhusus untuk pilar kapabilitas inovasi, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki ekosistem riset dan inovasi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan jumlah peneliti serta masih belum optimalnya belanja riset dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.4.3.2. Jumlah Kerjasama antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar

daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kerjasama antar daerah, baik itu kerjasama dengan kabupaten/kota yang lain, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Dari berbagai kerjasama yang dilakukan, kemudian seluruh dari kerjasama dimaksud kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang ada. Jumlah kerjasama serta persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti tertera pada **Tabel 2.37**.

Tabel 2. 37 Jumlah Kerjasama dan Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

NO	JENIS KERJASAMA	JUMLAH KERJASAMA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	2	-	2
2	Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi	3	1	2	2	2
3	Kerjasama dengan Pemerintah Pemerintah Pusat/ Instansi Vertikal/ Lembaga non Kementerian	1	6	5	1	3
4	Kerjasama luar negeri	-	-	-	-	-
JUMLAH		4	7	9	3	7
Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan.

Indikator keberhasilan pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana data yang disajikan berikut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi pada jenjang Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan capaian pada angka 90,02 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 93,14 persen pada tahun 2024, namun capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Selanjutnya, masih rendahnya tingkat partisipasi pada pendidikan PAUD yaitu sebesar 94,44 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 93,78 pada tahun 2024. Yang terakhir adalah semakin

rendahnya tingkat partisipasi pada pendidikan kesetaraan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 52,26 persen dan pada tahun 2024 turun menjadi 44,78 persen. Capaian indikator kinerja Bidang Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.38.**

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	99,0	79,01	65,5	90,02	93,14
2	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	98,2	92,84	78,74	52,26	44,78
3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	98,42	99,6	88,46	94,44	93,78
4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	%	5	5	100	100	100
5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	%	65	66	100	100	100
6	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	20	24	100	100	100
7	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah	%	10	10	100	100	100

Sumbe Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab indikator tersebut di atas belum mencapai target, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.

2.1.4.4.2. Kesehatan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Capaian kinerja Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik pada beberapa indikator khususnya indikator Standar Pelayanan Minimal. Capaian kinerja Bidang Kesehatan dapat dilihat pada **Tabel 2.39**.

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,8	85,66	76,3	78,34	100
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	76,19	76,84	76,4	75,88	98,92
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	79,25	80,9	80,04	79,41	100
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	63,08	57,3	54,08	64,37	90,73
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	19,8	43,9	68,97	85,90	60,28
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87,8	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	43,88	43,88	50,9	100	70,93
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,9	100	100	100	100
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91,9	100	100	100	100
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	60,65	73,87
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,9	100	85,56	70,85	100
13	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,8	85,66	76,3	100	100
14	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	0,028	0,030	0,031	0,036	0,0138
15	Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	%	98,4	99,6	100	100	100
16	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	%	0	0	37,41	30,19	92,95
17	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Salah satu indikator bukan SPM yang menunjukkan capaian cukup baik dapat dilihat pada persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan capaian selama tiga tahun terakhir (tahun 2022-2024) sebesar 100 persen, serta persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat yang meningkat dari 30,19 persen pda tahun 2023 menjadi 92,95 persen di tahun 2024. Namun masih terdapat beberapa indikator yang merupakan unsur paling menunjang dalam peningkatan angka harapan hidup dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya masih rendah yaitu, pelayanan kesehatan terhadap warga negara usia pendidikan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 60,28 persen, persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan dengan capaian 70,93 persen, dan pelayanan kesehatan terhadap Warga Negara terduga tuberulosis dengan capaian

73,87 persen. Masih rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara belum optimalnya pelaksanaan manejemen pelayanan kesehatan warga negara usia pendidikan dasar, masih adanya persalinan yang dilakukan/ ditangani di luar Tenaga Kesehatan (Dukun), serta belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas.

2.1.4.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang urusan pekerjaan umum merupakan penunjang utama dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi. Keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Kepulaun Selayar mencapai 974,3 Km yang terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 824,8 Km (berdasarkan SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 605/XII/Tahun 2018), Jalan Provinsi sepanjang 44,1 Km (berdasarkan SK Gubernur Sulsel Nomor 1159/IV/Tahun 2018) dan jalan Negara sepanjang 105,4 Km (berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 248/ KPTS/M/2015).

Disamping pemenuhan infrastruktur jalan, pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Selanjutnya adalah akses air minum layak dan sanitasi aman yang merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih dan sanitasi, maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan. Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Capaian kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.40**.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	78,72	100	100
2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	0	100	100
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	10,95	11,41	1,78	3,91	3,89
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	48,30	53,79	58,23	58,45	59,01
5	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	%	-	0	0	0	0
6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80	90	0	100	0
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	75	95	55	55	73,13
8	Persentase Infrastruktur Pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis	%	-	-	-	0	0
9	Persentase kepatuhan IMB	%	-	0,5	41	100	100
10	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah	%	67,00	69,00	72,30	73,20	100
11	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	%	68	70	71	75	100
12	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	55,85	58,15	58,24	57,26	54,58
13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	%	0	0	0	0	0
14	Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	%	96,67	96,67	96,0	96,25	79,38
15	Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	22,6	31,3	4,90	15,60	11,50
16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0,45	0
17	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	%	95,0	84,85	86	88,89	88,89

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa kendala dalam pencapaian target Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain tidak adanya data yang akurat terkait total panjang jalan desa karena belum ditetapkannya SK jalan desa, tidak terlaksananya kegiatan akibat keterbatasan anggaran, terbatasnya kewenangan kabupaten terhadap wilayah sungai, banyaknya drainase yang tersumbat karena sedimen dan sampah,

keterbatasan personil, kurangnya tenaga teknis atau operator yang bersertifikat kompetensi.

2.1.4.4.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Penurunan luas kawasan kumuh Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 6,32 persen, penurunan jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 sebesar 4,42 namun masih jauh dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 8,14 persen, serta perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum pada tahun 2024 sebesar 1,84 persen. Data Capaian indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.41**.

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	82,99	98,0	100
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	100
3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	0,01	4,80	6,32	6,32	6,32
4	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	44,48	20,08	3,26	3,48	4,42
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	63,37	0,46	0,56	1,03	1,84
6	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan luas kawasan kumuh, berkurangnya jumlah RTLH serta perumahan sudah dilengkapi PSU merupakan dampak positif dari beberapa intervensi baik dari Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu), Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program Pemerintah Daerah Melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Selain itu, sampai dengan tahun 2024 belum ada rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan disebabkan karena tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan.

2.1.4.4.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Tahun 2020-2024) yaitu 100 persen, waktu tanggap penanganan kebakaran yaitu 85 menit pada tahun 2024 atau lebih lambat dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 11,84 menit. Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 2.42.**

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	89,06	92,68	100	96,67
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,95	9,01	7,58	11,84	85
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	99,90	100	100	100	99,83
6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	93,0	74,52	100	100	99,23
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	75,10	89,99	87,30	100	99,77

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat data di atas, optimalnya penyelesaian gangguan trantibum dan layanan terhadap warga akibat penegakan hukum Perda dan Perkada didukung oleh Intensnya kegiatan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP pada titik-titik yang dianggap rawan sehingga masyarakat merasa terawasi dan sebagai bentuk

pencegahan dini terhadap pelanggaran trantibum serta melakukan pendekatan persuasif sehingga warga yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada pindah secara mandiri tanpa adanya kegiatan penertiban. Sedangkan meningkatnya waktu tanggap penanganan kebakaran dan menurunnya persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2024 diakibatkan oleh wilayah manajemen kebakaran yang tidak dapat di jangkau oleh pos pemadam kebakaran dengan resiko kebakaran yang tinggi serta kurangnya armada pemadam kebakaran untuk wilayah kepulauan.

2.1.4.4.6. Sosial

Bidang pelayanan sosial, beberapa indikator kinerja pemerintah dapat dikatakan masih kurang khususnya pada indikator non pelayanan dasar, antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase pemberdayaan sumber kesejahteraan sosial yaitu sebesar 22,50 persen pada tahun 2024. Capaian Kinerja Bidang Sosial dapat dilihat pada **Tabel 2.43.**

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan	%	18,66	28,79	13,7	12,58	22,50
2	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	18,99	19,6	100	100	100
3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	31,99	100	98,59	100	100
4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	13,35	17,5	98,99	100	100
5	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	25	0	100	100	100
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	77,5	86,6	47,55	40,54	53,50
7	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	%	86,6	86,6	47,55	40,74	73,28
8	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Sosial, Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Rendahnya berapa capaian kinerja bidang sosial di atas diakibatkan karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan peningkatan potensi untuk PPKS sangat terbatas. Disamping itu, beberapa indikator yang capaiannya mengalami peningkatan karena didorong oleh beberapa faktor yaitu peningkatan kinerja kegiatan dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, optimalisasi penanganan bencana baik bencana alam maupun sosial, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.1.4.4.7. Tenaga Kerja

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 meningkat menjadi 52,49 persen dari 27,55 persen pada tahun 2023. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tahun 2023 sebesar 2,63 persen dan meningkat menjadi sebesar 3,01 persen pada tahun 2024. Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan diuraikan pada **Tabel 2.44.**

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (RTK)	%	20,31	85,71	77,70	50,00	50,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,26	0,40	0,48	2,63	3,01
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	12,5	24,04	39,06	27,55	52,49
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0	0,30	0,60	0,90	0,92

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, terdapat satu indikator yang capaiannya belum memenuhi target yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan target sebesar 75,00 persen pada tahun 2024, yang disebabkan karena Rencana Tenaga Kerja yang dilaksanakan masih mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Makro sementara Rencana Tenaga Kerja Mikro baru akan disosialisasikan pada TA. 2025. Selain itu, terdapat pula satu indikator yang target dan capaiannya dibawah 1 persen dari Tahun 2020-2024 yaitu perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, yang disebabkan karena sampai pada tahun 2023 regulasi terkait hal tersebut masih dalam tahap sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, namun dari sisi capaiannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pertambahan usaha yang menerapkan tata kelola yang layak.

2.1.4.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan mendasar dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta masih adanya pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung menunjukkan penurunan pada tahun 2024, dimana pada tahun 2023 sebesar 0,90 persen dan

turun menjadi sebesar 0,26 persen. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten menunjukkan realisasi optimal selama dua tahun terakhir, dimana seluruh korban kekerasan anak yang dilaporkan pada dinas terkait telah ditangani 100 persen. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada **Tabel 2.45.**

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,12	0,15	0,54	0,90	0,26
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0,006	1,28	9,56	1,56	2,00
3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang terstandarisasi	%	0	0	0	0	0
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0,18	0,8	0,80	0,36	0,95
5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (skor indikator KLA)	%	120	125	138,89	65,00	0
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	%	0,07	0,069	0,045	100	100

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, beberapa kendala dalam pelaksanaan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinfungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah tidak adanya penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2024 sehingga capaian pemenuhan hak anak sebesar 0 persen, serta belum pernahnya dilaksanakan standarisasi Puspaga oleh tim standarisasi Puspaga Kementerian PPPA (bekerjasama dengan tim standarisasi Puspaga daerah).

2.1.4.4.9. Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Capaian Kinerja Bidang Pangan dapat dilihat pada **Tabel 2.46.**

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Bidang Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	65,52	4,88	38,71	60,87	41,18
2	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	15,68	12,25	48,33	51,47	53,60
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	44,83	24,39	19,35	34,78	26,09
4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	100	100	80	100

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa persentase desa rawan pangan yang ditangani tahun mengalami penurunan yang disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat 14 desa yang keluar dari desa rawan pangan prioritas 1-3 sementara untuk tahun 2024 hanya terdapat 7 desa. Selaian itu, penanganan kerawanan pangan pada tahun 2023 dapat dilakukan pada 8 desa/kelurahan, sementara untuk tahun 2024 hanya dapat dilakukan pada 6 desa/kelurahan dari 23 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan prioritas 1-3. Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, namun diharapkan kesadaran masyarakat lebih meningkat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif. Keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan diversifikasi pangan adalah menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok selain beras. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan dengan pengujian keamanan pangan segar pada laboratorium UPT balai proteksi tanaman pangan dan hortikultura Makassar.

2.1.4.4.10. Pertanahan

Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan capaian 0 persen yang diakibatkan oleh tidak adanya kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator pertanahan yang dilaksanakan oleh OPD terkait. Capaian Kinerja Bidang Pertanahan dapat dilihat pada **Tabel 2.47.**

Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	0	0	38,68	0
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	n/a	20	20	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	-	1	0	0
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	60	-	0
5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	%	100	20	0	-	0
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	20	100	1,97	0
7	Persentase luas lahan Ulayat yang di tetapkan	%	-	-	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	%	n/a	30	40	0	0
9	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan	%	-	-	100	0	0
10	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah	%	n/a	20	30	-	0

Sumber Data: Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.11. Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

Pertumbuhan kota dan penduduk, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin PPLH berubah menjadi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi dan rincian teknis limbah B3. Izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah untuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Realisasi capaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.48**.

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%	-	37,50	11,25	12,50	23,00
2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point	2,59	2,75	1,76	2,01	3,91
3	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	1,38	1,39	1,40	1,40	1,40
4	Persentase Lembaga/ Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi	%	100	90	100	100	100
5	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/ Atau Kegiatan	%	63,64	4,35	60,0	51,20	47,14
6	Persentase MAH Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui beneradaannya	%	-	0,19	1,42	1,43	-

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan Diklat	%	-	-	28,85	23,08	20,00
8	Persentase Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan yang berprestasi	%	20	20	25	20	33,33
9	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	80	100	100	100	100
10	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	%	1,30	19,67	2,83	1,66	7,90

Sumbe Datar: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat tabel di atas, yang menjadi faktor pendorong terhadap pencapaian kinerja bidang lingkungan hidup sesuai data tersebut antara lain adalah karena pelaksanaan kegiatan mengacu pada kerangka acuan kerja, pelaksanaan kegiatan penanaman dalam rangka atau sebagai upaya penambahan RTH di beberapa lokasi, adanya tindakan proses penanganan pengaduan yang cepat mulai proses penerimaan sampai verifikasi lapangan sehingga kasus pengaduan terkait lingkungan hidup cepat terselesaikan, serta koordinasi yang baik antar Pelaku usaha penghasil limbah B3 dengan tim dari OPD. Sementara yang menjadi penghambat antara lain adalah keterbatasan anggaran, masih kurangnya kesadaran dan ketaatan dari pelaku usaha terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku.

2.1.4.4.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dokumen kependudukan meliputi penerbitan dokumen kependudukan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Penerbitan dokumen kependudukan terdiri atas penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, dan yang termasuk kedalam penerbitan dokumen pencatatan sipil terdiri dari penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian serta surat keterangan terkait lainnya. Capaian kinerja bidang administrasi kependudukan selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.49.**

Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penerbitan KTP-el	%	91	93,7	91,40	92,77	94,07
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	12,67	43,24	50,27	54,08	52,64
3	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	77,04	85,98	96,60	86,96	98,23

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	46,15	53,84	44,44	61,54	62,96
5	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan tabel di atas, persentase penerbitan KTP-el pada Tahun 2024 sebesar 94,07 persen, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya namun capaian tersebut belum mencapai targer yang ditetapkan sebesar 98,00 persen. Hal tersebut disebabkan oleh pelayanan keliling administrasi kependudukan hanya dilaksanakan di 5 Kecamatan Kepulauan sebab ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi untuk menjangkau 11 kecamatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, capaian kinerja untuk OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun 2024 hanya sebesar 62,96 persen dari target sebesar 88,46 persen, dikarenakan adanya perubahan mekanisme dan prosedur dalam permohonan atau pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Dimana mekanisme dan prosedur perolehan hak akses pemanfaatan data kependudukan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Selain itu juga disebabkan karena adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data dimana OPD pengguna data kependudukan harus memiliki sertifikat ISO sementara belum ada satupun OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO.

2.1.4.4.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat serta pembinaan PKK. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi telah mencapai 100 persen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Persentase fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa juga meningkat dari 25 persen pada tahun 2021 menjadi 33,33 persen pada tahun 2022 dan angka ini tetap sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.50.**

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	%	-	25	100	100	0
2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	%	-	25	1,23	8,6	0
3	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	%	80	85	100	100	100
4	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	25	33,33	33,33	33,33

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada beberapa indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah meningkatnya capaian kinerja pada indikator cakupan fasilitasi administrasi pemerintahan desa yang didorong oleh semakin efektifnya Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa serta Lembaga Kerjasama Desa. Selain itu, terdapat indikator yang capaiannya tidak mencapai target (0 persen) disebabkan oleh tidak terlaksananya program tersebut pada tahun 2024 akibat dari keterbatasan anggaran.

2.1.4.4.14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu daerah. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator *Total Fertility Rate (TFR)* atau angka kelahiran total yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya, persentase pemakaian kontrasepsi modern, dan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam peningkatan keluarga sejahtera. Beberapa hambatan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan masyarakat. Capaian kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.51**.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		Point	2,09	2,1	2,17	1,94	2,10
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		%	78,2	77,23	72,54	69,42	59,10
3	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	BKB	%	53,70	15,11	14,38	29,18	25,13
		BKR	%	38,01	12,38	5,74	2,71	10,22
		BKL	%	27,11	9,06	6,00	40,01	10,26
		PIK-R	%	10	3,55	4,30	73,03	5,76
		UPPKS	%	14	4,64	5,09	43,19	90,81

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.15. Bidang Urusan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana dan prasarana. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Realisasi capaian indikator kinerja perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.52.**

Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten	%	30,54	10,37	25,23	26,52	26,83
2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	%	63,63	62,5	41,37	44,07	44,83
3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja lalu lintas pada tahun 2024 sebesar 26,83 persen dari target yang ditetapkan sebesar 30,85 persen. Capaian tersebut tidak mencapai target karena kondisi jalan yang jenuh, yaitu saat volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan yang tidak dapat melayani kebutuhan lalu lintas. Begitupun dengan persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi, dari target sebesar 63,94 persen pada tahun 2024 capaiannya hanya sebesar 44,83 persen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang ada, dan terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada sarana prasarana perhubungan laut. Selain itu, belum adanya investor yang menjadi penggerak sehingga rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter belum bisa diterbitkan.

2.1.4.4.16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya

memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Selain itu, salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan TIK adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sejak beberapa tahun lalu telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat *https://www.kepulauanselayarkab.go.id.* Di dalam website tersebut, masyarakat juga dapat mengakses beberapa informasi melalui sub domain yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada **Tabel 2.53.**

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	%	2,77	13,51	43,24	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	%	13,8	22,72	26,08	100	100
3	Indeks SPBE	Nilai	-	2,05	1,83		

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2024 terdapat 23 Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi, serta terdapat 7 layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas yaitu Youtube (kominfo selayar), Facebook (@kepulauan_selayar), Instagram (@kepulauan selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose).

2.1.4.4.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan peran dan potensinya, keberadaan koperasi memberikan konstribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi daerah, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor pertumbuhan ekonomi rakyat. Dalam bidang pemerintahan, urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi pemberdayaan dan perlindungan Koperasi KSP/USP, dan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM.

Kinerja perkoperasian Kabupaten Kepulauan Selayar diukur dengan beberapa indikator, antara lain Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 adalah sebesar 100 persen dengan koperasi sehat sebesar 16,89 persen dan Koperasi KSP/USP sehat sebesar 100 persen serta koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan sebesar 100 persen. Sedangkan persentase UMKM yang diberdayakan sebesar 83,12 persen

dan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 69,82 persen. Capaian kinerja bidang koperasi dan UMKM dapat dilihat pada **Tabel 2.54.**

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	18,23	18,23	18,23	100	0
2	Persentase koperasi sehat	%	58,62	59	18,37	19,70	16,89
3	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	%	11,11	11,1	11,1	81,82	100
4	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	10,31	10,31	24,15	17,27	20,19
5	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	82,4	100	100	100	100
6	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	51	53,2	54,62	57,43	83,12
7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	32,2	44,73	45,67	52,75	69,82

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian kjinerja bidang koperasi dan UMKM berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak terdapat izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan karena Peraturan Menteri Koperasi menetapkan aturan bahwa modal awal yang harus dimiliki minimal sebesar Rp 500 juta.

2.1.4.4.18. Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan dampak/efek pengganda *(multiplier effect)* yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja atas layanan urusan penanaman modal dilihat pada **Tabel 2.55.**

Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	205	1.527	2.281	1.878	25
3	Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp.	133.236	72.474	12.826	76.286	28.462
5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah investor PMDN/PMA adalah nilai investasi rata-rata tergolong pada capaian investasi UMKM per tahunnya, tidak mencapai skala nasional.

2.1.4.4.19. Kepemudaan dan Olahraga

Belakangan ini problematika pemuda yang terbentang di hadapan kita sangatlah kompleks, mulai dari masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis mental hingga masalah dekadensi moral. Budaya permisif dan pragmatisme yang kian merebak membuat sebagian pemuda terjebak dalam kehidupan serba instant, hedonis, dan terlepas dari idealisme sehingga cenderung menjadi manusia yang anti sosial. Kinerja atas layanan urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada **Tabel 2.56.**

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,2	0,2	4,20	0,13	0,33
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	-	4	42,50	67,00	66,00
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	%	60	70	4,06	4,26	4,51

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, urusan kepemudaan masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain yaitu masih adanya wirausaha muda yang belum terdaftar pada pendataan wirausaha muda.

2.1.4.4.20. Statistik

Informasi data statistik yang akurat secara time series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi Pemerintah dan Organisai Perangkat Daerah dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi mengenai keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial budaya, pertanian, industri, perekonomian dan lain-lain. Kinerja bidang urusan statistik dapat dilihat pada **Tabel 2.57.**

Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2025

Melihat data di atas, capaian kinerja bidang statistik dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang optimal disebabkan karena dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah menggunakan data statistik baik itu yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengolah,

memproduksi dan menyebarluaskan data-data statistik dasar maupun data sektoral yang diproduksi sendiri atau diperoleh dari lembaga lain.

2.1.4.4.21. Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Capaian kinerja bidang persandian dapat dilihat pada **Tabel 2.58.**

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Bidang Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	0,12	13,51	35,13	100	100

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penilaian tingkat keamanan informasi dilaksanakan mulai tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2023 terdapat 26 sistem dari 26 sistem elektronik yang diassesment/audit berdasarkan kualitas dan kuantitas pengamanan informasi pemerintah daerah. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) aspek dan area penilaian yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, teknologi, pengelolaan aset dan kerangka kerja.

2.1.4.4.22. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada program pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya yaitu upaya untuk membina, menggali dan melestarikan budaya lama maupun baru yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan peningkatan potensi budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai baru yang berkembang dimasyarakat. Capaian kinerja bidang kebudayaan, selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.59.**

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	0	100	100	0	0
2	Persentase Pembinaan kesenian Tradisional	%	0	0	0	10	0
3	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	0	0	0	0	0
4	Benda situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	7,96
5	Jumlah pengelolaan museum	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi dan inventarisasi karya budaya serta pembinaan sejarah lokal. Selain itu, benda situs dana cagar budaya yang di intervensi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2024 adalah koleksi museum, kantor disparbud dan gong nekara.

2.1.4.4.23. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mengingat berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada upaya peningkatan minat baca masyarakat. Oleh karena itu perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain dengan penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan seperti mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling. Selain itu, sejak tahun 2017 telah dibuka layanan perpustakaan siang dan malam untuk mengakomodir masyarakat yang tinggal di luar kota atau yang beraktifitas di siang hari seperti pelajar dan pegawai. Adapun kinerja layanan Perpustakaan Daerah Kabuaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.60**.

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	5,13	7,90	9,40	4,50	82,99
2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	0	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat data pada tabel di atas, realisasi capaian untuk indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 4,60 persen. Hal tersebut disebabkan oleh karena hasil penilaian dan kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) tahun 2024 dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Sementara untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tidak terlaksana pada Tahun 2024 dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya Bidang Perpustakaan belum memiliki data dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut.

2.1.4.4.24. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, sehingga perlu di kelola secara terorganisir dan sistematis. Kearsipan merupakan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan, sehingga diperlukan sistem pengelolaan dan pengendalian arsip yang sistematis dan efektif. Kinerja layanan kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.61.**

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	68,25	72,80	52,26	55,68	57,50

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	61,60	66	50	33,33	50,00
3	Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/ Rahasia	%	-	0	10	0	0

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.25. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah maritim, upaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan, maka perlu didukung beberapa program pembangunan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lainnya melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada nelayan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan. Capaian kinerja bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat pada **Tabel 2.62.**

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.729,2	20.883,8	21.223,4	24.962,9	25.610,4
2	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	837,4	522,8	528,66	468,44	507,97
3	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	160,8	299,9	241,84	244,91	247,998
4	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/ Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	0	0	0	10,54	15,84

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, peningkatan produksi perikanan tangkap didominasi oleh kelompok komoditas ikan demersal, sementara produksi ikan pelagis mengalami penurunan. Peningkatan produksi ikan demersal dipengaruhi oleh efektivitas alat tangkap, seperti jaring insang tetap, bubu, pancing ulur, rawai dasar, dan panah, serta diperkuat oleh musim timur yang lebih panjang sehingga memperpanjang masa produksi nelayan. Sebaliknya, penurunan produksi ikan pelagis disebabkan oleh penurunan stok sumber daya yang terjadi secara periodik, umumnya setiap empat tahun. Namun demikian, kinerja produksi tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor pembatas, antara lain ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), akses pasar regional dan lokal, kondisi musim tangkap, serta daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, strategi intervensi ke depan diarahkan pada

penguatan kelembagaan nelayan melalui perluasan jejaring berbasis usaha perikanan dan peningkatan sarana serta alat tangkap yang berfokus pada komoditas ikan pelagis, seperti tuna, cakalang, dan tongkol.

Masih rendahnya volume produksi perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu fenomena El-Nino, tingginya prevalensi penyakit, keterbatasan ketersediaan bibit atau benih berkualitas, serta penggunaan teknologi yang belum optimal. El-Nino menyebabkan peningkatan suhu permukaan air, yang berdampak pada menurunnya ketersediaan bibit serta memperlambat pertumbuhan hingga meningkatkan angka kematian rumput laut. Sementara itu, pada komoditas udang, tingginya prevalensi penyakit mengakibatkan kegagalan panen.

Peningkatan volume produksi olahan hasil perikanan tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) di bidang pengolahan, khususnya Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pada tahun 2024, terdapat 156 UPI di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terdiri atas 5 RTP untuk olahan fermentasi dan peragian (terasi udang), 8 RTP untuk pelumatan daging dan surimi (bakso ikan), 138 RTP untuk penggaraman dan pengeringan (ikan kering), serta 5 RTP untuk jenis pengolahan lainnya (abon ikan). Selain peningkatan jumlah RTP, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi olahan hasil perikanan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengolah hasil perikanan. Peningkatan ini diperoleh melalui bimbingan teknis yang secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga mendukung peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi.

Pada tahun 2023, dari 336 RTP yang terdata, sebanyak 36 RTP (10,56%) telah diawasi. Pada tahun 2024, pengawasan dilakukan terhadap 18 RTP, namun 2 di antaranya belum memperoleh izin usaha akibat kendala administrasi. Dengan demikian, total RTP yang telah diawasi sepanjang 2023–2024 mencapai 54 RTP atau 15,84% dari keseluruhan RTP.

2.1.4.4.26. Pariwisata

Pariwisata dipandang sebagai sektor andalan yang mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Pemerintah Kabupaten Kepualaun Selayar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar dari Sektor pariwisata.

Sisi lain sektor ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai wacana pemerataan melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan

kenyamanan bagi wisatawan. Data Capaian Kinerja Bidang Pariwisata dapat dilihat pada **Tabel 2.63**.

Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,43	4,45	5,61	3,39	3,50
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	0,41	777,27	-16,41	141,72
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	%	33,33	37,5	242,72	-22,85	-13,8
4	Tingkat hunian akomodasi	%	8,5	4,06	3,96	4,20	4,35
5	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	-	0	0	0	0
6	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang mengalami pertumbuhan melampaui 100 persen didorong oleh semakin banyaknya atau mulai tumbuhnya resert-resort yang dikelola asing, sementara itu persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi disebabkan oleh kurangnya event dan destinasi yang terkelola pada tahun 2024. Oleh karena kedua hal tersebut pula sehingga berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat hunian akomodasi.

2.1.4.4.27. Pertanian

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Capaian kinerja bidang pertanian dapat dilihat pada **Tabel 2.64.**

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Sarana pertanian	%	100	100	100	80	83,86
2	Cakupan Prasarana Pertanian	%	100	100	97,37	100	87,50
3	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	%	5,85	5,95	4,23	30,86	32,19
4	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	23,15	8,56	21,85	20,75	19,85
5	Persentase fasiltasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	15,62	19,72	26,95	17,14	4,32

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana pertanian berupa bibit tanaman, bibit dan pakan ternak, pupuk dan alsintan dimanfaatkan oleh kelompok tani/ gabungan kelompok tani secara maksimal dalam upaya peningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya. Pada tahun 2024, sarana pertanian berupa bibit ternak sapi, kambing dan ayam tidak terealisasi disebabkan adanya kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sementara untuk prasarana pertanian, pembangunan jalan usaha tani sebanyak 2 unit pada tahun 2024 belum selesai dikarenakan terkendala pembebasan lahan dan waktu pelaksanaan yang tidak efektif.

Fasilitasi penanggulangan bencana penyakit hewan menular sebesar 339 area pada 1053 area yang terkena bencana atau sekitar 32.19 persen. Hal ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan penyakit hewan. Ketersediaan obat-obatan ternak dan perlengkapan kesehatan hewan sangat mempengaruhi proses pelayanan ternak kepada masyarakat/peternak. Selain itu, SDM peternakan juga sangat perperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan.

Luas areal pengendalian OPT adalah 287,86 Ha pada 1449,97 Ha yang terserang OPT. Serangan OPT terdampak pada semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pengendalian OPT dilakukan pada beberapa komoditi baik komoditi perkebunan, hortikultura maupun tanaman pangan. Pengendalian dilakukan secara mekanis, sanitasi dan kimiawi. Peran serta petani dan petugas pengamat hama juga sangat membantu dalam pengendalian OPT (pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas). Sementara untuk Gapoktan/Poktan/KWT yang menerima pendampingan dan pembinaan dari tim teknis dan Penyuluh Pertanian Lapangan sebanyak 42 unit dari 973 Gapoktan/Poktan/KWT.

2.1.4.4.28. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik. Sebagaimana yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, kotribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 8,08 persen dan meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,02 persen. Sementara itu, kinerja bidang perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.65.**

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	%	21,19	23,28	100	100	100
2	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	90	95	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	20,58	20,58	20,58	68,42	86
4	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	%	20,58	20,58	20,58	20,58	66
5	Persentase alat ukur yang ditera	%	15,16	25,28	0	38,46	75,20
6	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	-	30	30	30	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja bidang perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut: seluruh permohonan izin usaha sektor perdagangan diberikan rekomendasi untuk penerbitan izin usaha sesuai kewenangan Dinas Perdagangan KUKM, sementara untuk izin usaha dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk ketersediaan sarana prasarana perdagangan seperti pasar rakyat yang sumber pendanaannya berasal dari APBD, DAK, APBN sudah memadai. Jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) seperti hasil pertanian dan perikanan yang dipantau tahun 2024 meningkat jumlahnya sehingga persentase realisasi meningkat. Tera/ tera ulang tahun 2024 sudah terlaksana, namun perlu penambahan SDM Penera karena tidak seimbangnya rasio antara Penera dan Alat ukur yang ditera serta cakupan luas wilayah.

2.1.4.4.29. Perindustrian

Sektor Perindustrian memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak ±1.000 IKM, namun jika melihat perkembangan modal usaha dan tenaga kerjanya hanya sebesar 10 persen sampai dengan tahun 2022 dan pada tahun 2024 turun menjadi 4,50 persen. IKM yang memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebesar 9,00 persen pada tahun 2024 dan yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional hanya sebesar 10,79 persen. Capaian Kinerja Bidang Perindustrian dapat dilihat pada **Tabel 2.66.**

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	%	2	8	10	0	4,50
2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	%	-	15	20	4,76	9,00
3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	%	-	0,02	0,02	4,76	10,79

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, kurangnya pelaksanaan pendataan terhadap pelaku IKM pada tahun 2024 sehingga Data yang terupdate tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 18,00 persen. Masih rendahnya persentase izin pelaku

IKM yang telah memiliki PIRT sebabkan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap alur pengajuan permohonan PIRT, sehingga kedepannya diharapkan untuk setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan PIRT terlebih dahulu diarahkan ke Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dinas Perinaker) untuk melakukan pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta membuat rekomendasi pengajuan PIRT, sehingga data yang dimiliki Oleh Dinas Perinaker selaras dengan data pada PTSP dan juga Dinkes. Sementara itu, Aplikasi SIINas mulai aktif dan digunakan pada tahun 2021 dan sampai tahun 2024 masih pada tahap sosialisasi terkait penggunaan SIINas terhadap pelaku usaha dan penerapan nya untuk kegiatan pelaporan produksi perusahaan sehingga data IKM yang terdaftar pada sistem tersebut masih sangat terbatas.

2.1.4.4.30. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah yang mencakup fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2024 menunjukkan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.67.**

Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	90	88	100	100	100
2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	91	97	99,27	100
3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	99	97	100	99,98	100

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian kinerja pada bidang pemerintahan konsisten pada angka 100 persen dalam tiga tahun terakhir, sementara capaian kinerja bidang kesejahteraan rakyat meningkat dari 97 persen tahun 2022 menjadi 99,27 persen tahun 2023 dan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen, serta capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan menurun dari 100 persen menjadi 99,98 persen pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 100 persen.

2.1.4.4.31. Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode 2020-2024 menunjukkan konsistensi sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dengan DPRD yang dibuktikan dengan terlaksananya tiga program kerja DPRD yaitu peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, pengembangan regulasi daerah dan peningkatan kehumasan DPRD. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada **Tabel 2.68**.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

NO	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJM dan RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 persen atau dengan kata lain bahwa seluruh program kerja DPRD terintegrasi kedalam RPJM dan RKPD yang disebabkan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta tingginya komitmen dan kerjasama.

2.1.4.4.32. Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun subtansi. Berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif dan subtansial. Sehingga dalam makna lain, hilangnya mata rantai hasil perencanaan dari bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Dalam konteks ini, proses perencanaan sistem pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis. Komitmen dan niat baik dari seluruh stekholders perencanaan pembangunan mutlak diperlukan.

Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanyan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan, jika diterapkan dalam perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari Pemerintah Daerah dengan perangkat di bawahnya serta Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.69**.

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	75,72	89,47	96,49	100	100
2	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.69**, dapat dijelaskan bahwa dari 285 (dua ratus delapan puluh lima) program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 selaras dengan jumlah program yang termuat dalam RKPD yakni terdapat 236 (dua ratus tiga puluh enam) program. Untuk kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah, dari 72 (tujuh puluh dua) Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024, seluruhnya telah selaras dengan 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran prioritas pembangunan daerah.

2.1.4.4.33. Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 5 tahun secara berturut turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Capaian kinerja bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.70**.

Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,80	7,65	4,07	3,68	4,08
2	Assets Management		ada	ada	ada	Ada	Ada
3	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	%	78,36	45,82	82,00	85,03	71,61

Sumber Data: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Faktor penghambat pencapaian target kinerja bidang keuangan salah satunya disebabkan karena tingginya reslisasi belanja dan menurunnya realisasi pendapatan pada tahun 2024, serta peningkatan target Pajak yang signifikan sementara kesadaran Wajib Pajak masih rendah.

2.1.4.4.34. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah sebesar 96,92 persen, persentase pegawai berkinerja baik sebesar 99,97 persen dan cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis sebesar 95,85 persen. Capaian kinerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.71**.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah	%	87,12	60,0	23,35	82,16	96,92
2	Persentase Pegawai Berkinerja Baik	%	99,70	96,61	96,67	99,78	99,97
3	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis	%	18,96	46,04	150,70	74,16	95,85

Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Persentase pemenuhan ASN tahun 2024 dapat melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 92,60 persen dikarenakan dari 50 formasi CPNS terealisasi sebanyak 45 formasi yang terdiri dari 41 formasi tenaga teknis dan 5 tenaga dokter, serta dari 80 formasi PPPK seluruhnya terelalisasi. Pada tahun 2024, terdapat 1 orang pegawai mendapatkan pembinaan disiplin sehingga berdampak pada pencapaian target persentase pegawai berkinerja baik. Untuk cakupan ASN yang lulus diklat telah melampau target tahun 2024 sebesar 81,50.

2.1.4.4.35. Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan melalui hasil riset dan pengembangan inovasi daerah yang dituangkan kedalam perencanaan berdasarkan urusan dan perangkat daerah masing-masing. Kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan konsistensi dengan capaian 100 persen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.72**.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian di atas merupakan perwujudan dari komitmen dan sinergitas seluruh *stakeholders* dalam mengimplementasikan hasil kelitbangan berdasarkan kewenangan masing-masing untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil kelitbangan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kesalehan Sosial digunakan oleh perangkat daerah terkait untuk mengukur IKU Kepala Daerah, sedangkan inovasi daerah yang dihasilkan pada tahun 2024 juga diterapkan oleh perangkat daerah terkait. Setiap tahun terdapat minimal 2 hasil penelitian dan pengambangan yang dimasukkan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Awal Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD).

2.1.4.4.36. Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk mendukung pencapaian revolusi industri 4.0, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat pada

aspek pelayanan publik. Sejak tahun 2021, dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) masyarakat Selayar sudah dapat mengakses sepuluh layanan pada satu tempat dengan waktu yang singkat dan akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Pada aspek keuangan daerah, di era keterbukaan informasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerapkan aplikasi berbasis online dari Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, seluruh stakeholder dapat mengakses informasi perencanaan dan keuangan daerah. Capaian kinerja transparansi dan partisipasi publik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.73**.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dapat diakses melalui portal kepulauanselayarkab.go.id. Sementara akses publik terhadap informasi keuangan daerah melalui dokumen Perda APBD, Nota Keuangan, LRA seluruh OPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit, Opini atas LKPD dan Dokumen RKA/DPA kabupaten yang telah dipublikasi dan dapat diakses melalui aplikasi PPID dab website Pemerintah Daerah.

2.1.4.4.37. Pengawasan

Capaian kinerja bidang pengawasan menunjukkan hasil yang cukup baik karena dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh 5 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah. Capaian WTP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mencapai level 3 (terdfenisi) dengan nilai 3,002 pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,840. Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menunjukkan penurunan dari level 2+ dengan nilai 2,810 pada tahun 2023 menjadi 2,520 pada tahun 2024. Capaian kinerja bidang Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.74.**

Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,007	3,002	3,002	2,840
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2+	3	2+	2+	2,520

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja tersebut harus menunjang penugasan yang ada, dimana tugas dan tanggung jawab APIP menjadi semakin berat karena selain sebagai auditor, juga dituntut untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai reviuer, evaluator, pemantauan serta melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Salah satu faktor penghambat pencapaian target di atas adalah karena belum terdapat pedoman manajemen resiko Pemerintah Dearah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.4.4.38. Kecamatan

Kinerja bidang kewilayahan difokuskan pada peningkatan pelayanan di wilayah kecamatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dalam sistem perencanaan dikenal dengan istilah pendekatan *bottom-up*. Selain itu, juga mencakup urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan desa yaitu penurunan kasus kriminalitas, konflik sosial dan keagamaan di tingkat kecamatan serta dukungan program pemerintah desa terhadap program pemerintah. Capaian kinerja bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.75**.

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Menit	29	29	25,71	19,09	15,00
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	%	91,60	94,40	97,73	99,00	98,85
3	Penurunan kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	%	1,00	0,50	0,43	0,39	0,59
4	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	%	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
5	Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	%	89,60	93,32	83,77	70,22	70,44

Sumber Data: Seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.39. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup pembinaan karakter masyarakat, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta pembinaan kewaspadaan terhadap terorisme/ radikalisme dan konflik sosial. Capaian kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.76.**

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	%	0,02	0,017	0,016	0,020	0,073
2	Persentase Partai Politik yang Mengikuti Pendidikan Politik	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina	%	38	38	100	100	12,13

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan	%	0	100	100	100	100
5	Persentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/ radikalisme dan konflik sosial	%	54	54	100	100	100

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor penghambat pencapaian persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina melalui pemberian dana Hibah/ Bantuan Keuangan tidak terealisasi disebabkan karena Ormas Penerima Hibah tidak sepakat dengan diberlakukannya sistem pencairan secara bertahap.

2.2. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada akhir periode RPJMD dimaksud, maka ditetapkan program pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dilaksanakan selama lima tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Penjelasan terkait capaian masing-masing indikator kinerja telah diuraikan pada Sub. Bab 2.1. Berikut disajikan matriks pencapaian indikator kinerja tujuan, sasaran Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 (**Tabel 2.77**) dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024, dapat dilihat pada **Tabel 2.78**.

Tabel 2. 77 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
				2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
Tujuan 1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka/Huruf	51,24 (CC)	55,65 (CC)	64,00 (CC)	53,30 (CC)	68,00 (B)	60,55 (B)	Belum Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,22	75,13	72,50	78,00	75,00	80,74	Melampaui
		Nilai Sakip Daerah	Angka/Huruf	60,21 (B)	60,49 (B)	65,00 (B)	61,02 (B)	70,00 (BB)	61,68 (BB)	Belum Tercapai
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka/ Kategori	68,8 (Perlu Perbaikan)	71,196 (Perlu Perbaikan)	72,015 (Perlu Perbaikan)	65,027 (Perlu Perbaikan)	73,943 (Perlu Perbaikan)	72,32 (Perlu Perbaikan)	Belum Tercapai
Tujuan 2	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,354	0,350	0,320	0,345	0,339	0,329	Melampaui
Sasaran 2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6201 (Berkembang)	0,6670 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,6953 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7190 (Maju)	Melampaui
Sasaran 3	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,81	1,49	2,33	1,98	1,83	2,05	Belum Tercapai
		Tingkat Kemiskinan	%	12,45	12,24	10,54	12,27	11,03	10,79	Melampaui
Tujuan 3	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,76	68,35	68,60	69,20	69,44	71,98	Melampaui
Sasaran 4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	62,10	62,16	54,19	63,08	64,19	63,97	Belum Tercapai
		Indeks Kesehatan	Angka	68,52	75,09	68,81	81,95	78,81	82,83	Melampaui
Sasaran 5	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	Rp	9.060.000	9.446.000	9.450.000	9.830.000	9.700.000	10.235.000	Melampaui
Tujuan 4	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,02	3,67	5,27-7,03	3,68	5,19	3,33	Belum Tercapai
		PDRB / Kapita	Rp. Juta	49,54	53,76	53,50	56,57	55,00	58,29	Melampaui
Sasaran 6	Meningkatnya Usaha Perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	25,45	27,09	27,00	27,09	28,00	23,83	Belum Tercapai
Sasaran 7	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	4,45	5,16	5,59	3,39	6,41	3,50	Belum Tercapai
Sasaran 8	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	12,69	15,23	14,00	13,25	16,00	13,57	Belum Tercapai
Tujuan 5	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	48,36	79	44,00	79,00	48,00	50,00	Melampaui

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
				2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
Sasaran 9	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,6993	0,7384	0,7000	0,7592	0,7500	0,7694	Melampaui
Tujuan 6	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	76,68	77,55	65,15	76,87	78,15	77,87	Belum Tercapai
Sasaran 10	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Kasus	185	309	115	367	105	389	Belum Tercapai
Tujuan 7	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka/Huruf	62,27 (Cukup Baik)	64,99 (Cukup Baik)	64,80 (Cukup Baik)	64,25 (Sedang)	66,14 (Cukup Baik)	67,65 (Sedang)	Melampaui
Sasaran 11	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	Angka	50,00	55,56	54,00	51,18	56,00	52,22	Belum Tercapai
		Indeks Kualitas Udara	Angka	87,16	88,73	85,49	90,71	89,49	94,56	Melampaui
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	37,29	37,29	45,06	37,76	47,56	44,39	Belum Tercapai

Sumber Data: BPS dan OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	1		FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	1	1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,02	3,67	5,27	3,68	5,19	3,33	Belum Tercapai
1	1	2	Laju Inflasi	%	2,16	4,12	1,82	2,78	1,82	0,91	Melampaui
1	1	3	PDRB per kapita (ADHB)	Rp / Juta	49,54	53,76	48,33	56,57	55,00	58,29	Melampaui
1	1	4	Gini Ratio	Poin	0,354	0,350	0,336	0,345	0,339	0,329	Melampaui
1	1	5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	12,45	12,24	10,54	12,27	11,03	10,79	Melampaui
1	1	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,76	68,35	68,60	69,20	69,44	71,98	Melampaui
1	1	7	Angka Melek Huruf (AMH)	%	91,62	93,08	93,97	93,06	93,98	93,47	Belum Tercapai
1	1	8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	8,09	10,50	8,35	11,00	8,49	Belum Tercapai
1	1	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,52	68,81	69,23	73,27	69,48	73,48	Melampaui
1	1	10	Persentase Balita Stunting	%	27,7	32,10	18,83	18,00	18,72	25,70	Belum Tercapai
1	1	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,07	69,92	69,08	69,93	70,00	67,19	Belum Tercapai
1	1	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,81	1,49	2,33	2,81	1,83	2,05	Belum Tercapai
1	1	13	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,19	98,51	98,50	99,77	98,67	65,81	Belum Tercapai
1	1	14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	5,36	5,39	0,07	9,01	6,07	0,42	Belum Tercapai
1	1	15	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	1	16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	74,6	76,90	79,90	81,4	79,93	77,50	Belum Tercapai
1	1	17	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	8,24	8,24	8,48	6,96	9,15	4,98	Belum Tercapai
1	1	18	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	Ton	21.407,59	21.752,06	22.117	25.431,34	23.039	26.118,37	Melampaui
1	1	19	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	16,75	16,23	17,16	16,99	17,39	19,23	Melampaui
1	1	20	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	2,83	2,64	3,28	2,5	3,37	2,43	Belum Tercapai
1	1	21	Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,96	0,95	1,04	0,94	1,05	1,00	Belum Tercapai
1	1	22	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	11,86	11,53	11,54	12,18	11,66	14,41	Melampaui
1	1	23	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,10	1,11	1,18	1,09	1,19	1,10	Belum Tercapai
1	1	24	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	25,45	27,09	24,73	27,09	28,00	23,83	Belum Tercapai
1	1	25	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,81	8,02	7,85	8,08	8,85	8,30	Belum Tercapai
1	1	26	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,88	2,78	2,85	2,82	2,87	0,14	Belum Tercapai
1	1	27	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp. 000	9.240.000	17.310.000	14.645.819	18.740.000	17.762.940	20.330.000	Melampaui
2			ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
2	1		PENDIDIKAN								
2	1	1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	79,01	65,5	100,00	90,02	100	93,14	Belum Tercapai
2	1	2	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	92,84	78,74	100,00	52,26	100	44,78	Belum Tercapai
2	1	3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	99,60	88,46	100,00	94,44	100	93,78	Belum Tercapai
2	1	4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	%	5	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	1	5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	%	66	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	1	6	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	24,00	100	100,00	100	-	100	Sesuai
2	1	7	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah	%	100,00	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2		KESEHATAN								
2	2	1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,66	76,3	100,00	78,34	100	100	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
2	2	2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	77,77	76,4	100,00	75,88	100	98,92	Belum Tercapai
2	2	3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,89	80,04	100,00	79,41	100	100	Sesuai
2	2	4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	57,29	54,8	100,00	64,37	100	90,73	Belum Tercapai
2	2	5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	56,73	68,97	100,00	85,90	100	60,28	Belum Tercapai
2	2	6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2	7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	43,88	50,9	100,00	100	100	70,93	Belum Tercapai
2	2	8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2	9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2	10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100,00	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2	11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	100	100,00	60,65	100	73,87	Belum Tercapai
2	2	12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	85,56	100,00	70,85	100	100	Sesuai
2	2	13	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,66	76,3	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2	14	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	30/1000 Penduduk	31/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	13,8/1000 Penduduk	Belum Tercapai
2	2	15	Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	%	99,6	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
2	2	16	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	%	0	37,41	30,00	30,19	20,00	92,95	Melampaui
2	2	17	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	4	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Sesuai
2	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
2	3	1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%		78,72	90,00	100	92,00	100	Melampaui
2	3	2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang	%		0	38,00	100	45,00	100	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
			terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	3	3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	11,41	13,19	1,85	17,10	1,92	3,89	Melampaui
2	3	4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	53,79	58,23	100,00	76	100	59,01	Belum Tercapai
2	3	5	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	%	-	0	100,00	0	100	0	Belum Tercapai
2	3	6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90,00	0	100,00	100	100	0	Sesuai
2	3	7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	95,00	55,00	96,45	55,00	96,88	73,13	Belum Tercapai
2	3	8	Persentase Infrastruktur Pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis	%	-	-	5,00	0	10,00	0	Belum Tercapai
2	3	9	Persentase kepatuhan IMB	%	0,5	41,00	85,00	100	88,00	100	Melampaui
2	3	10	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah	%	69,00	72,30	70,11	73,20	81,61	100	Melampaui
2	3	11	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	%	70,00	71,00	69,84	75,00	82,54	100	Melampaui
2	3	12	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	58,15	58,24	72,31	57,26	73,19	54,58	Belum Tercapai
2	3	13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	%		0	85,00	0	85,00	0	Belum Ada SK
2	3	14	Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	%	96,67	96,00	98,50	96,25	99,00	79,38	Belum Tercapai
2	3	15	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	31,30	36,20	22,02	40,10	22,97	11,50	Belum Tercapai
2	3	16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	10,00	0,45	12,00	0	Belum Tercapai
2	3	17	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	%	84,85	86,00	97,00	0,45	98,00	88,89	Belum Tercapai
2	4		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
2	4	1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	82,99	100,00	98	100	100	Sesuai
2	4	2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	0	100,00	-	100	100	Sesuai
2	4	3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	4,80	6,32	3,16	6,32	4,22	6,32	Melampaui
2	4	4	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	20,08	16,26	5,91	3,48	8,14	4,42	Belum Tercapai
2	4	5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	46,49	0,50	1,41	1,03	3,42	1,84	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
2	4	6	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	-	0	100,00	0	100	0	Tidak ada pengembang yang memenuhi kriteria
2	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
2	5	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	95,00	100	100	Sesuai
2	5	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
2	5	3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	92,19	92,68	100,00	100	100	96,67	Belum Tercapai
2	5	4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	9,01	7,58	10,93	11,84	6,00	85,00	Belum Tercapai
2	5	5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi bencana	%	100,00	100,00	100,00	100	100	99,83	Belum Tercapai
2	5	6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	74,52	100	100,00	100	100	99,23	Belum Tercapai
2	5	7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	89,99	87,30	100,00	100	100	99,77	Belum Tercapai
2	6		SOSIAL								
2	6	1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan	%	28,79	13,70	37,59	12,58	42,40	22,50	Belum Tercapai
6	6	2	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	19,6	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
2	6	3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	98,59	100,00	100	100	100	Sesuai
2	6	4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,5	98,99	100,00	100	100	100	Sesuai
2	6	5	PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	0	100	100,00	100	100	100	Sesuai
2	6	6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	86,6	47,55	21,32	40,54	48,32	53,60	Melampaui
2	6	7	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	%	86,6	47,55	38,12	40,74	50,00	73,28	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
2	6	8	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
2	6	9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1	1	Sesuai
3			NON PELAYANAN DASAR								
3	1		TENAGA KERJA								
3	1	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (RTK)	%	85,71	77,70	73,00	50,00	80,00	50,00	Belum Tercapai
3	1	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,40	0,48	1,17	2,63	2,00	3,01	Melampaui
3	1	3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	24,04	39,06	25,00	27,55	39,69	52,49	Melampaui
3	1	4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0	0,60	0,90	0,94	1,17	0,92	Belum Tercapai
3	2		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
3	2	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,15	0,543	0,25	0,90	0,56	0,26	Belum Tercapai
3	2	2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1.000 penduduk perempuan)	Angka	1,28	9,56	28 / 1000 penduduk perempuan	1,56	23/ 1.000 penduduk perempuan	0,20	Melampaui
3	2	3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang terstandarisasi	%	1	0	0,06	0	0,08	0	Belum Tercapai
3	2	4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0,80	0,80	0,36	0,36	0,86	0,95	Melampaui
3	2	5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (skor indicator KLA)	%	450	138,89	52,50	65,00	139,50	0	Melampaui
3	2	6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	%	0,069	0,045	100,00	100	100	100	Sesuai
3	3		PANGAN								
3	3	1	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	4,88*	38,71	62,50	60,87	75,00	41,18	Belum Tercapai
3	3	2	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	12,25	48,33	36,36	51,47	49,36	51,45	Melampaui
3	3	3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	24,39	19,35	57,50	34,78	62,50	26,09	Belum Tercapai
3	3	4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,00	100,00	80,00	80	100	100	Sesuai
3	4		PERTANAHAN								
3	4	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		0	50,00	35,65	70	0	Belum Tercapai
3	4	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	20,00	20,00	40,00	0	60	0	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
3	4	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%		1	60,00	0	70	0	Belum Tercapai
3	4	4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		60,00	70,00	0	80,00	0	Belum Tercapai
3	4	5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	%	20,00	0	100,00	0	100	0	Belum Tercapai
3	4	6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	20,00	100,00	40,00	1,97	100	0	Belum Tercapai
3	4	7	Persentase luas lahan Ulayat yang di tetapkan	%		0	40,00	0	60,00	0	Belum Tercapai
3	4	8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	%	30,00	40,00	50,00	0	60,00	0	Belum Tercapai
3	4	9	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan	%		100,00	100,00	0	100	0	Belum Tercapai
3	4	10	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah	%	20,00	30,00	40,00	0	60,00	0	Belum Tercapai
3	5		LINGKUNGAN HIDUP								
3	5	1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%	37,50	11,25	12,50	12,50	25,50	23,00	Belum Tercapai
3	5	2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point	2,75	1,76	2,59	2,01	1,59	3,91	Belum Tercapai
3	5	3	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	1,39	1,4	1,38	1,40	1,58	1,40	Melampaui
3	5	4	Persentase Lembaga/ Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi	%	90	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	5	5	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / Atau Kegiatan	%	4,35	60,00	64,00	51,20	66,00	47,14	Belum Tercapai
3	5	6	Persentase MAH Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui beneradaannya	%	0,19	1,42	2,27	1,43	3,41	n.a	Belum Tercapai
3	5	7	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan Diklat	%	-	28,85	23,08	30,00	23,08	20,00	Belum Tercapai
3	5	8	Persentase Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan yang berprestasi	%	20,00	25,00	33,33	20,00	33,33	33,33	Sesuai
3	5	9	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	5	10	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	%	19,67	0,71	1,30	1,66	1,30	7,90	Melampaui
3	6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
3	6	1	Persentase Penerbitan KTP-el	%	93,70	90,26	97,00	92,77	98,00	94,07	Belum Tercapai
3	6	2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	43,24	55,69	35,00	54,08	57,00	52,64	Belum Tercapai
3	6	3	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	85,98	84,10	94,00	86,96	94,50	98,23	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
3	6	4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	53,84	44,54	76,92	61,54	88,46	62,96	Belum Tercapai
3	6	5	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
3	7	1	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	%	25,00	100,00	100,00	100	100	0	Belum Tercapai
3	7	2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	%	25,00	0	3,70	8,6	3,70	0	Belum Tercapai
3	7	3	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	%	85	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	7	4	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	25,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	Sesuai
3	8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
3	8	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Point	2,10	2,17	2,07	1,94	2,06	2,10	Melampaui
3	8	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,23	72,54	78,80	69,42	80,00	59,10	Belum Tercapai
3	8	3	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								
			BKB	%	15,11	14,38	0,74	29,18	0,74	25,13	Melampaui
			BKR	%	12,38	5,74	0,61	2,71	0,61	10,22	Melampaui
			BKL	%	9,06	6,00	0,62	40,01	0,62	10,26	Melampaui
			PIK-R	%	3,55	4,30	0,51	73,03	0,51	5,76	Melampaui
			UPPKS	%	4,64	5,09	0,91	43,19	0,91	90,81	Melampaui
3	9		PERHUBUNGAN								
3	9	1	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten	%	10,37	25,23	30,77	37,92	30,85	26,83	Belum Tercapai
3	9	2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	%	62,5	41,37	60,66	44,07	63,94	44,83	Belum Tercapai
3	9	3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	0	0	0	100	0	Belum Tercapai
3	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
3	10	1	Persentase layanan system informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	%	2,77	43,24	100,00	100	100	100	Sesuai
3	10	2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	%	61,1	26,08	100,00	100	100	100	Sesuai
3	11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
3	11	1	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	18,23	18,23	100,00	100	100	0	Belum Tercapai
3	11	2	Persentase koperasi sehat	%	59	18,37	100,00	19,70	100	16,89	Belum Tercapai
3	11	3	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	%	11,10	11,1	100,00	81,82	100	100	Sesuai
3	11	4	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	10,31	24,15	100,00	17,27	100	20,19	Belum Tercapai
3	11	5	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	100	100	100,00	100	100	100	Sesuai
3	11	6	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	53,2	54,62	100,00	55,00	100	83,12	Belum Tercapai
3	11	7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	44,73	45,67	100,00	46,20	100	69,82	Belum Tercapai
3	12		PENANAMAN MODAL								
3	12	1	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	%	100,00	100,00	50,00	100	100	100	Sesuai
3	12	2	Jumlah Investor PMDN/PMA	%	1.527	2.281	28	1.878	2.300	25	Belum Tercapai
3	12	3	Persentase Izin yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	12	4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	72.474	12.826	59.000	76.286	67.000	28.462	Belum Tercapai
3	12	5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
3	13	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,2	4,20	8,83	0,13	18,55	0,33	Belum Tercapai
3	13	2	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	4,00	42,50	50,00	67,00	60,00	66,00	Melampaui
3	13	3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	%	70	4,06	4,26	4,26	4,51	4,51	Sesuai
3	14		STATISTIK SEKTORAL								
3	14	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	14	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
3	15		PERSANDIAN								
3	15	1	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	0,12	35,13	100	100	100	100	Sesuai
3	16		KEBUDAYAAN								
3	16	1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	100	100	0	Belum Tercapai
3	16	2	Persentase Pembinaan kesenian Tradisional	%	0	0	30,00	10	40	0	Belum Tercapai
3	16	3	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	0	0	100	0	100	0	Belum Tercapai
3	16	4	Benda situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	7,69	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
3	16	5	Jumlah pengelolaan museum	Unit	1	1	1	1	1	1	Sesuai
3	17		PERPUSTAKAAN								
3	17	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	7,9	9,40	4,50	4,50	10,50	82,99	Malampui
3	17	2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	1	0	33,00	0	50,00	0,00	Belum Tercapai
3	18		KEARSIPAN								
3	18	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	72,80	52,26	90,00	55,68	90,00	57,50	Belum Tercapai
3	18	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	122,16	50,00	95,00	33,33	95,00	50,00	Belum Tercapai
3	18	3	Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasiah	%	-	10,00	100,00	0	100	0	Belum Tercapai
4			PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
4	1		KELAUTAN DAN PERIKANAN								
4	1	1	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.883,8	21.223,40	23.593,4	24.962,90	25.480,87	25.610,40	Melampaui
4	1	2	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	522,8	528,66	1.054,86	468,44	1.139,25	507,97	Belum Tercapai
4	1	3	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	299,9	241,84	201,49	244,91	261,49	247,99	Melampaui
4	1	4	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	0	0	10,54	10,54	15,81	15,81	Sesuai
4	2		PARIWISATA								
4	2	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,45	5,16	5,00	3,39	6,00	3,50	Belum Tercapai
4	2	2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,41	777,27	5,00	-16,41	800,00	141,72	Belum Tercapai
4	2	3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	%	37,5	242,72	10,00	-22,85	350,00	-13,8	Belum Tercapai
4	2	4	Tingkat hunian akomodasi	%	4,06	3,97	10,00	4,20	10,00	4,35	Belum Tercapai
4	2	5	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	-	0	33,34	0	66,68	0	Belum Tercapai
4	2	6	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
4	3		PERTANIAN								
4	3	1	Cakupan Sarana pertanian	%	100,00	100,00	100,00	80,00	100	83,86	Belum Tercapai
4	3	2	Cakupan Prasarana Pertanian	%	100,00	97,37	100,00	100	100	87,50	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
4	3	3	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	%	5,95	4,23	5,28	30,86	5,02	32,19	Melampaui
4	3	4	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	8,56	21,85	20,89	20,75	19,85	19,85	Belum Tercapai
4	3	5	Persentase fasiltasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100,00	100,00	5,00	100	100	100	Sesuai
4	3	6	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	19,72	26,95	22,72	17,14	27,72	4,32	Belum Tercapai
4	4		PERDAGANGAN								
4	4	1	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	%	23,28	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
4	4	2	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	95	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
4	4	3	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	20,58	20,58	100,00	68,42	100	86,00	Belum Tercapai
4	4	4	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	%	20,58	20,58	100,00	20,58	100	66,60	Belum Tercapai
4	4	5	Persentase alat ukur yang ditera	%	25,28	-	100,00	38,46	100	75,20	Belum Tercapai
4	4	6	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	30	30	100,00	30,00	100	100	Sesuai
4	5		PERINDUSTRIAN								
4	5	1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	%	2	10,00	15,00	0	18,00	4,50	Belum Tercapai
4	5	2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	%	-	20,00	25,00	4,76	30,00	9,00	Belum Tercapai
4	5	3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	%	100	0,02	40,00	4,76	45,00	10,79	Belum Tercapai
5			PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1		SEKRETARIAT DAERAH								
5	1	1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	88,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
5	1	2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	91,00	97,00	100,00	99,27	100	100	Sesuai
5	1	3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	97,00	100,00	100,00	99,98	100	100	Sesuai
5	2		SEKRETARIAT DPRD								
5	2	1	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJM dan RKPD	%	98,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
6			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1		PERENCANAAN								
6	1	1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	92,22	96,49	85,00	100	85,00	100	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
6	1	2	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	%	100,00	100	85,00	100	90,00	100	Melampaui
6	2		KEUANGAN								
6	2	1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,90	8,09	5,50	3,68	5,00	4,08	Belum Tercapai
6	2	2	Assets Management	Ada/ Tidak ada	ada	ada	ada	Ada	ada	Ada	Sesuai
6	2	3	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	%	45,82	82,00	87,50	85,03	90,00	71,61	Belum Tercapai
6	3		KEPEGAWAIAN								
6	3	1	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah	%	97,59	23,35	90,40	82,16	92,60	96,92	Melampaui
6	3	2	Presentase Pegawai Berkinerja Baik	%	99,61	96,67	100,00	99,78	100	99,97	Belum Tercapai
6	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
6	4	1	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis	%	46,04	150,70	81,00	74,16	160,50	95,85	Belum Tercapai
6	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
6	5	1	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
6	6		TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
6	6	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai
6	6	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai
7			PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
7	1		INSPEKTORAT DAERAH								
7	1	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,002	3	3,002	3+	2,840	Belum Tercapai
7	1	2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2+	3	3,2	2,810	3,3	2,520	Belum Tercapai
8			UNSUR KEWILAYAHAN								
8	1		KECAMATAN								
8	1	1	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	29,00	25,71	20,00	19,09	15,00	15,00	Sesuai
8	1	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	%	94,40	97,73	100,00	99,00	100	98,85	Belum Tercapai
8	1	3	Penurunan kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	%	0,50	0,43	1,00	0,39	1,00	0,59	Melampaui
8	1	4	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	%	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai
8	1	5	program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	%	93,32	83,77	55,00	70,22	80,62	70,44	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi
					2021	2022	Target	Capaian	Target	Capaian	
9			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
9	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
9	1	1	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	%	0,017	0,016	0,026	0,020	0,026	0,073	Melampaui
9	1	2	Persentase Partai Politik yang Mengikuti Pendidikan Politik	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
9	1	3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina	%	38	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
9	1	4	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Dirumuskan	%	100	100,00	100,00	100	100	12,13	Belum Tercapai
9	1	5	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/ radikalismedan konflik sosial	%	54	100,00	100,00	100	100	100	Sesuai
10			ASPEK DAYA SAING DAERAH								
10	1		FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI								
10	1	1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	967.487	996.286	991.247	1.054.071	997.247	1.111.674	Melampaui
10	1	2	Nilai tukar petani	Poin	100,37	101,12	101,37	114,25	102,56	121,01	Melampaui
10	1	3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	10,00	27,16	61,77	38,27	63,15	48,14	Belum Tercapai

Sumber Data: BPS dan OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.78**, terdapat beberapa capaian indikator kinerja kunci tahun 2024 yang tidak terisi disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya pada OPD penanggung jawab serta tidak adanya pejabat yang menangani kegiatan yang bersifat khusus sehingga kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 tidak terlaksana pada OPD terkait.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD

2.3.1.1 Capaian Program RKPD Tahun 2024

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pengukuran hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan terhadap beberapa alat ukur, yaitu kinerja kegiatan (output), realisasi anggaran (Rp), kinerja program (outcome), dan kinerja sasaran (impact). Evaluasi hasil RKPD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD, dan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKPD. Analisis perbandingan juga dilakukan untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021 – 2026. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada **Tabel 2.79**.

Tabel 2. 79 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber Data: Lampiran Permendagri 86 tahun 2017

Hasil Evaluasi RKPD berdasarkan pencapaian kinerja program dan realisasi anggaran masing-masing OPD disajikan pada **Tabel 2.80** berikut:

Tabel 2. 80 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Kabupaten Kepualauan Selayar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			704.603.126.911		678.890.312.235		576.102.320.177		576.102.320.177						
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			300.239.592.131		337.600.158.540		295.719.755.221		295.719.755.221						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	243.451.723.772	70,53	243.743.554.060	100	227.365.957.549	100	227.365.957.549	100,00	93,28	100,00	93,39	Tercapai	Disdikpora
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95		88		87,67		87,67		99,63		92,28		Tidak Tercapai	Disdikpora
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (%)	100	56.328.668.900	100	92.516.757.180	93,14	67.038.735.972	93,14	67.038.735.972	93,14	72,46	93,14	100,00	Tidak Tercapai	Disdikpora
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (%)	100		100		44,78		44,78		44,78		44,78		Tidak Tercapai	
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100		100		93,78		93,78		93,78		93,78		Tidak Tercapai	
3	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar (%)	100	104.580.151	100	575.179.000	100	571.319.900	100	571.319.900	100,00	99,33	100,00	100,00	Tercapai	Disdikpora
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum (%)	100	306.466.140	100	333.228.500	100	316.144.500	100	316.144.500	100,00	94,87	100,00	100,00	Tercapai	Disdikpora
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah (%)	100	48.153.168	100	431.439.800	100	427.597.300	100	427.597.300	100,00	99,11	100,00	100,00	Tercapai	Disdikpora
										Rata-rata Kinerja (%)	91,42	91,81	90,50	98,68		
										Predikat	ST	ST	ST	ST		
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			268.822.222.099		227.921.535.353		188.518.772.877		188.518.772.877						
	Dinas Kesehatan			177.608.515.905		176.846.238.353		141.724.048.650		141.724.048.650						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	57.016.875.177	70,53	70.089.350.465	99,91	57.866.420.292	99,91	57.866.420.292	100,00	82,56	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		80,14		80,14		100,00		84,36		Tercapai	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	100	119.982.929.240	100	96.074.871.888	100	75.433.552.258	100	75.433.552.258	100,00	78,52	100,00	62,87	Tercapai	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		98,92		98,92		98,92		98,92		Tidak Tercapai	
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		90,73		90,73		90,73		90,73		Tidak Tercapai	
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		60,28		60,28		60,28		60,28		Tidak Tercapai	
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		70,93		70,93		70,93		70,93		Tidak Tercapai	
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		73,87		73,87		73,87		73,87		Tidak Tercapai	
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	45/100.000 Penduduk	80.000.000	36/100.000 Penduduk	10418615000	13,8/100000 Penduduk	8.186.914.300	13,8/100000 Penduduk	8.186.914.300	38,00	78,58	68,89	100,00	Tidak Tercapai	Dinkes
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Peersentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (%)	100	528.711.488	100	263.401.000	100	237.161.800	100	237.161.800	100,00	90,04	100,00	44,86	Tercapai	Dinkes
										Rata-rata Kinerja (%)	89,55	82,42	90,50	76,93		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat	T	T	ST	T		
	RSUD KH. Hayyung			91.213.706.194		51.075.297.000		46.794.724.227		46.794.724.227						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	61.398.399.802	70,53	46.211.208.360	100	42.069.814.489	100	42.069.814.489	100,00	91,04	100,00	68,52	Tercapai	RSUD K.H. Hayyung
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		91,62		91,62		100,00		100,00		Tercapai	RSUD K.H. Hayyung
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama	29.815.306.392	Utama	4.864.088.640	Utama	4.724.909.738	Utama	4.724.909.738	100,00	97,14	100,00	15,85	Tercapai	RSUD K.H. Hayyung
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	94,09	100,00	42,18		
										Predikat	ST	ST	ST	SR		
										Rata-rata Kinerja (%)	94,77	88,26	95,25	59,56		
										Predikat	ST	T	ST	R		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			98.672.385.557		83.492.460.082		63.337.632.876		63.337.632.876						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	7.607.071.170	70,53	7.432.576.826	88,82	6.659.426.077	88,82	6.659.426.077	100,00	89,60	100,00	87,54	Tercapai	Dis PUTR
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		75,87		75,87		86,22		100,00		Tidak Tercapai	Dis PUTR
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (%)	99	12.229.371.768	92	7.538.641.244	100	6.518.075.854	100	6.518.075.854	100,00	86,46	100,00	100,00	Tercapai	Dis PUTR
		Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (%)	55		45		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	2,2		1,92		3,89		3,89		100,00		100,00		Tercapai	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100	13.295.474.352	100	4.357.226.001	59,01	3.793.697.076	59,01	3.793.697.076	59,01	87,07	59,01	28,53	Tidak Tercapai	Dis PUTR
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	9.753.438.497	100	100.000.000	0	95.070.000	0	95.070.000	0,00	95,07	0,00	0,97	Tidak Tercapai	Dis PUTR
6	Program Pengelolaan dan	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat (%)	97,43	4.088.703.918	96,88	3.787.432.550	73,13	3.601.620.498	73,13	3.601.620.498	75,49	95,09	75,06	100,00	Tidak Tercapai	Dis PUTR

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengembangan Sistem Drainase															
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan IMB (%)	95	3.450.026.674	88	9.966.466.600	100	9.307.191.478	100	9.307.191.478	100,00	93,39	100,00	100,00	Tercapai	Dis PUTR
		Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah (%)	100		81,61		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya (%)	100	802.020.818	82,54	775.000.000	100	730.597.161	100	730.597.161	100,00	94,27	100,00	100,00	Tercapai	Dis PUTR
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%)	75	45.599.044.298	73,19	48.805.116.861	54,58	32.081.693.735	54,58	32.081.693.735	74,57	65,73	72,77	70,36	Tidak Tercapai	Dis PUTR
		Proporsi panjang jalan desa yang terbangun (%)	95		85		0		0		0,00		0,00		Tidak Tercapai	
		Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten (%)	100		99		79,38		79,38		80,18		79,38		Tidak Tercapai	
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	25	778.555.647	22,97	250.000.000	11,5	115.024.000	11,5	115.024.000	50,07	46,01	46,00	14,77	Tidak Tercapai	Dis PUTR
		Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	15		12		0		0		0,00		0,00		Tidak Tercapai	
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR (%)	100	1.068.678.415	98	480.000.000	88,89	435.236.997	88,89	435.236.997	90,70	90,67	88,89	100,00	Tidak Tercapai	Dis PUTR
										Rata-rata Kinerja (%)	71,54	84,34	71,83	70,22		
										Predikat	S	T	S	S		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			8.466.135.856		6.991.176.000		6.577.355.767		6.577.355.767						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.966.574.872	70,53	3.200.029.000	97,62	3.009.537.967	97,62	3.009.537.967	100,00	94,05	100,00	75,87	Tercapai	DPKP
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,08		94,08		100,00		100,00		Tercapai	DPKP
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	653.625.942	100	109.741.000	100	105.409.700	100	105.409.700	100,00	96,05	100,00	100,00	Tercapai	DPKP
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (%)	6,33	1.024.449.726	4,22	118.640.000	6,32	113.867.600	6,32	113.867.600	100,00	95,98	99,84	11,12	Tercapai	DPKP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	20	2.821.485.316	3,42	3.562.766.000	1,84	3.348.540.500	1,84	3.348.540.500	53,80	93,99	9,20	100,00	Tidak Tercapai	DPKP
										Rata-rata Kinerja (%)	92,30	95,02	84,84	71,75		
										Predikat	ST	ST	T	S		
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			16.067.595.549		15.861.132.260		15.430.297.599		15.430.297.599						
	Satpol PP			11.493.870.570		11.280.070.260		11.009.779.614		11.009.779.614						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	10.809.272.608	70,53	9.780.037.560	100	9.536.659.128	100	9.536.659.128	100,00	97,51	100,00	88,23	Tercapai	Satpol PP, Damkar
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		96,5		96,5		100,00		100,00		Tercapai	Satpol PP, Damkar
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	441.011.909	100	1.055.032.700	100	1.035.747.188	100	1.035.747.188	100,00	98,17	100,00	100,00	Tercapai	Satpol PP, Damkar
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	Satpol PP, Damkar
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (%)	100	243.586.053	100	445.000.000	96,67	437.373.298	96,67	437.373.298	96,67	98,29	96,67	100,00	Tidak Tercapai	Satpol PP, Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10		10,61		85		85		0,00		0,00		Tidak Tercapai	
										Rata-rata Kinerja (%)	82,78	97,99	82,78	96,08		
										Predikat	T	ST	T	ST		
	BPBD			4.573.724.979		4.581.062.000		4.420.517.985		4.420.517.985						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.409.164.540	70,53	3.538.182.700	99,28	3.381.156.937	99,28	3.381.156.937	100,00	95,56	100,00	99,18	Tercapai	BPBD
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,6		97,6		100,00		100,00		Tercapai	BPBD
3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana (%)	100	1.164.560.439	100	1.042.879.300	99,83	1.039.361.048	99,83	1.039.361.048	99,83	99,66	99,83	100,00	Tidak Tercapai	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100		100		99,23		99,23		99,23		99,23		Tidak Tercapai	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100		100		99,77		99,77		99,77		99,77		Tidak Tercapai	BPBD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)														
										Rata-rata Kinerja (%)	99,77	97,61	99,77	99,59		
										Predikat	ST	ST	ST	ST		
										Rata-rata Kinerja (%)	91,27	97,80	91,27	97,83		
										Predikat	ST	ST	ST	ST		
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			12.335.195.720		7.023.850.000		6.518.505.837		6.518.505.837						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.360.959.229	70,53	3.609.250.000	87,23	3.558.145.987	87,23	3.558.145.987	100,00	98,58	100,00	81,59	Tercapai	Dinsos
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		92,81		92,81		100,00		100,00		Tercapai	Dinsos
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan (%)	50	386.728.682	42,4	37.000.000	22,5	36.783.800	22,5	36.783.800	53,07	99,42	45,00	9,51	Tidak Tercapai	Dinsos
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	6.955.669.399	100	2.271.600.000	100	1.830.962.300	100	1.830.962.300	100,00	100,00	100,00	26,32	Tercapai	Dinsos
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	28,22		24,5		53,6		53,6		100,00		100,00		Tercapai	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi (%)	50	283.237.908	42,15	836.000.000	73,28	828.166.200	73,28	828.166.200	100,00	99,06	100,00	100,00	Tercapai	Dinsos
6	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	326.812.971	100	240.000.000	100	236.560.100	100	236.560.100	100,00	98,57	100,00	72,38	Tercapai	Dinsos
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola (unit)	1	21.787.531	1	30.000.000	1	27.887.450	1	27.887.450	100,00	92,96	100,00	100,00	Tercapai	Dinsos
										Rata-rata Kinerja (%)	95,73	98,10	95,00	64,97		
										Predikat	ST	ST	ST	R		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN			76.205.548.815		60.996.402.430		55.664.130.718		55.664.130.718						

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PELAYANAN DASAR															
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			903.939.623		2.100.202.000		2.078.737.194		2.078.737.194						
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5,85	631.838.411	75	857.936.000	50	837.749.794	50	837.749.794	66,67	97,65	100,00	132,59	Tidak Tercapai	Dinas PMPTSPTK
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	50	180.836.511	2	22.266.000	3,01	21.868.000	3,01	21.868.000	100,00	98,21	6,02	100,00	Tercapai	Dinas PMPTSPTK
5	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak (%)	1,8	91.264.701	31,5	1.220.000.000	52,49	1.219.119.400	52,49	1.219.119.400	100,00	99,93	100,00	100,00	Tercapai	Dinas PMPTSPTK
										Rata-rata Kinerja (%)	88,89	98,60	68,67	110,86		
										Predikat	T	ST	S	ST		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6.351.848.664		5.041.034.700		4.721.062.056		4.721.062.056						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	6.005.688.366	70,53	4.637.045.100	95,83	4.376.244.556	95,83	4.376.244.556	100,00	94,38	100,00	72,87	Tercapai	DP3AP2KB
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		76,82		76,82		100,00		100,00		Tercapai	DP3AP2KB
2	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	0,28	147.065.837	0,26	98.110.900	0,26	90.913.400	0,26	90.913.400	100,00	92,66	100,00	61,82	Tercapai	DP3AP2KB
3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12 / 100.000 penduduk perempuan	38.128.180	23 / 100.000 penduduk perempuan	29.999.900	2 / 100000 penduduk perempuan	25.339.300	2 / 100000 penduduk perempuan	25.339.300	100,00	84,46	0,00	66,46	Tercapai	DP3AP2KB
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi (%)	0,1	38.128.180	0,08	22.197.200	0	19.809.400	0	19.809.400	0,00	89,24	0,00	100,00	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak (%)	0,88	21.787.531	0,54	29.999.900	0,95	24.364.300	0,95	24.364.300	100,00	81,21	100,00	100,00	Tercapai	DP3AP2KB
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%)	60	35.687.976	55	78.681.400	0	56.220.700	0	56.220.700	0,00	71,45	100,00	100,00	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100	65.362.594	100	145.000.300	100	128.170.400	100	128.170.400	100,00	88,39	100,00	100,00	Tercapai	DP3AP2KB
										Rata-rata Kinerja (%)	75,00	85,97	75,00	85,88		
										Predikat	S	T	S	T		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			1.127.504.750		217.960.100		46.029.500		46.029.500						

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan (%)	63,64	1.018.567.093	45,45	206.393.100	51,45	36.166.100	51,45	36.166.100	100,00	17,52	80,85	3,55	Tercapai	Distan KP
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	72,5	87.150.126	62,5	4.907.000	26,09	4.454.200	26,09	4.454.200	41,74	90,77	35,99	5,11	Tidak Tercapai	Distan KP
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80	21.787.531	80	6.660.000	100	5.409.200	100	5.409.200	100,00	81,22	100,00	24,83	Tercapai	Distan KP
										Rata-rata Kinerja (%)	80,58	63,17	72,28	11,16		
										Predikat	T	R	S	SR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			2.763.444.099		50.000.000		49.490.600		49.490.600						
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan (%)	100	2.638.165.793	100	19.154.000	0	18.881.200	0	18.881.200	0,00	98,58	0,00	0,72	Tidak Tercapai	Dis PUTR
8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya (%)	80	81.703.243	60	14.700.000	0	14.595.500	0	14.595.500	0,00	99,29	0,00	17,86	Tidak Tercapai	Dis PUTR
10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah (%)	90	43.575.063	60	16.146.000	0	16.013.900	0	16.013.900	0,00	99,18	0,00	36,75	Tidak Tercapai	Dis PUTR
										Rata-rata Kinerja (%)	0,00	99,02	0,00	18,44		
										Predikat	SR	ST	SR	SR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			16.524.061.435		11.277.055.300		11.035.043.316		11.035.043.316						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	8.522.590.529	70,53	4.916.906.100	132,11	4.705.982.867	132,11	4.705.982.867	100,00	95,71	100,00	55,22	Tercapai	DLH
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,85		97,85		100,00		100,00		Tercapai	DLH
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (%)	37,5	381.281.799	25	501.000.000	23	496.713.945	23	496.713.945	92,00	99,14	61,33	130,27	Tidak Tercapai	DLH
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2.156.965.608	2,59	544.643.900	3,91	536.832.870	3,91	536.832.870	100,00	98,57	100,00	100,00	Tercapai	DLH
4	Program Pengelolaan	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,38	1.917.302.763	1,38	1.613.408.700	1,4	1.603.666.065	1,4	1.603.666.065	100,00	99,40	100,00	100,00	Tercapai	DLH

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Keanekaragaman Hayati (Kehati)															
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Lembaga/Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi (%)	100	119.831.423	100	2.014.800	100	1.904.000	100	1.904.000	100,00	94,50	100,00	1,59	Tercapai	DLH
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	70	125.278.306	66	3.000.000	47,14	3.000.000	47,14	3.000.000	71,42	100,00	67,34	100,00	Tidak Tercapai	DLH
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat (%)	23,08	65.362.594	23,08	8.300.000	20	7.786.400	20	7.786.400	86,66	93,81	100,00	100,00	Tidak Tercapai	DLH
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat / Garing Dunia Usaha / Garing Dunia Pendidikan yang Berprestasi (%)	33,33	16.340.649	33,33	31.006.500	33,33	30.155.500	33,33	30.155.500	100,00	97,26	100,00	100,00	Tercapai	DLH
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan (%)	100	38.128.180	100	1.000.000	100	960.000	100	960.000	100,00	96,00	100,00	2,52	Tercapai	DLH
11	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1,3	3.180.979.584	1,3	3.655.775.300	7,9	3.648.041.669	7,9	3.648.041.669	100,00	99,79	100,00	100,00	Tercapai	DLH
										Rata-rata Kinerja (%)	95,46	97,42	93,52	78,96		
										Predikat	ST	ST	ST	T		
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			5.227.992.237		3.867.181.000		3.662.604.950		3.662.604.950						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.672.410.186	70,53	3.514.190.000	99,47	3.310.669.743	99,47	3.310.669.743	100,00	94,21	100,00	70,86	Tercapai	Disdukcapil
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,71		94,71		100,00		100,00		Tercapai	Disdukcapil
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el (%)	100	298.489.180	98	241.522.000	94,07	241.403.420	94,07	241.403.420	95,99	99,95	94,07	100,00	Tidak Tercapai	Disdukcapil
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	40		36		52,64		52,64		100,00		100,00		Tercapai	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (%)	96	152.512.720	94,5	41.640.000	98,23	41.425.400	98,23	41.425.400	100,00	99,48	100,00	100,00	Tercapai	Disdukcapil
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	100	88.239.502	88,46	58.199.000	62,96	57.693.987	62,96	57.693.987	71,17	99,13	62,96	65,38	Tidak Tercapai	Disdukcapil
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan (%)	100	16.340.649	100	11.630.000	100	11.412.400	100	11.412.400	100,00	98,13	100,00	69,84	Tercapai	Disdukcapil
										Rata-rata Kinerja (%)	95,31	98,18	93,86	81,22		
										Predikat	ST	ST	ST	T		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			5.525.746.088		3.831.800.000		3.604.542.416		3.604.542.416						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.886.234.350	70,53	2.401.800.000	100	2.182.577.216	100	2.182.577.216	100,00	90,87	100,00	56,16	Tercapai	DISPMD
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,07		94,07		100,00		100,00		Tercapai	DISPMD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100	757.116.716	100	245.858.300	100	241.965.800	100	241.965.800	100,00	98,42	100,00	31,96	Tercapai	DISPMD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33	882.395.022	33,33	1.184.141.700	33,33	1.179.999.400	33,33	1.179.999.400	100,00	99,65	100,00	100,00	Tercapai	DISPMD
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	96,31	100,00	62,71		
										Predikat	ST	ST	ST	R		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			4.378.946.300		7.913.612.300		5.230.998.218		5.230.998.218						
2	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,04	21.787.531	2,06	113.000.000	2,1	95.540.600	2,1	95.540.600	98,06	84,55	100,00	100,00	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	80,5	3.269.089.451	80	6.782.855.100	59,1	4.257.745.218	59,1	4.257.745.218	100,00	62,77	73,42	130,24	Tercapai	DP3AP2KB
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) (%)		1.088.069.318		1.017.757.200		877.712.400		877.712.400	0,00	86,24		80,67	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
		BKB	0,74		0,74		25,13		25,13		100,00		100,00		Tercapai	
		BKR	0,61		0,61		10,22		10,22		100,00		100,00		Tercapai	
		BKL	0,62		0,62		10,26		10,26		100,00		100,00		Tercapai	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PIK R	0,51		0,51		5,76		5,76		100,00		100,00		Tercapai	
		UPPKS	0,91		0,91		90,81		90,81		100,00		100,00		Tercapai	
										Rata-rata Kinerja (%)	87,26	77,85	96,20	103,64		
										Predikat	T	T	ST	ST		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			11.433.075.066		6.703.547.500		6.517.857.530		6.517.857.530						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	7.985.124.662	70,53	5.653.080.000	100	5.483.220.114	100	5.483.220.114	100,00	97,00	100,00	68,67	Tercapai	Dishub
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,23		97,23		100,00		100,00		Tercapai	Dishub
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten (%)	31	1.824.779.315	30,85	585.000.000	26,83	580.811.100	26,83	580.811.100	86,97	99,28	86,55	31,83	Tidak Tercapai	Dishub
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%)	73,78	1.623.171.089	63,94	465.467.500	44,83	453.826.316	44,83	453.826.316	70,11	97,50	60,76	100,00	Tidak Tercapai	Dishub
										Rata-rata Kinerja (%)	89,27	97,93	86,83	66,83		
										Predikat	T	ST	T	S		
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			8.386.813.543		4.293.353.550		4.093.154.885		4.093.154.885						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.644.385.444	70,53	3.227.240.250	104,33	3.049.919.555	104,33	3.049.919.555	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Diskominfo SP
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		95,29		95,29		100,00		100,00		Tercapai	Diskominfo SP
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas (%)	100	1.089.581.100	100	700.089.000	100	695.998.300	100	695.998.300	100,00	99,42	100,00	100,00	Tercapai	Diskominfo SP
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi (%)	100	3.652.846.999	100	366.024.300	100	347.237.030	100	347.237.030	100,00	94,87	100,00	9,51	Tercapai	Diskominfo SP
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	98,09	100,00	69,84		
										Predikat	ST	ST	ST	S		
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			1.492.593.022		2.736.800.000		2.736.730.950		2.736.730.950						
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	100	130.725.188	100	25.000.000	16,89	25.000.000	16,89	25.000.000	16,89	100,00			Tidak Tercapai	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan (%)	100	201.534.665	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Disperindag KUKM

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)	100	642.879.298	100	1.411.800.000	83,12	1.411.795.000	83,12	1.411.795.000	83,12	100,00	83,12	100,00	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	517.453.871	100	940.000.000	69,82	939.935.950	69,82	939.935.950	69,82	99,99	69,82	100,00	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
										Rata-rata Kinerja (%)	67,46	100,00	84,31	100,00		
										Predikat	S	ST	T	ST		
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			5.694.250.287		4.295.948.000		3.729.470.456		3.729.470.456						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.952.402.392	70,53	3.392.851.000	211,84	3.168.296.648	211,84	3.168.296.648	100,00	93,38	100,00	63,97	Tercapai	Dinas PMPTSPTK
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		86,81		86,81		100,00		100,00		Tercapai	Dinas PMPTSPTK
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah (%)	80	54.468.828	60	85.000.000	100	4.604.200	100	4.604.200	100,00	5,42	100,00	8,45	Tercapai	Dinas PMPTSPTK
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	36	274.360.460	32	70.000.000	25	59.531.500	25	59.531.500	78,13	85,05	100,00	21,70	Tidak Tercapai	Dinas PMPTSPTK
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan(%)	100	40.960.559	100	60.180.000	100	52.279.069	100	52.279.069	100,00	86,87	100,00	100,00	Tercapai	Dinas PMPTSPTK
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	82.000	351.403.468	67.000	668.117.000	28.462	425.673.039	28.462	425.673.039	42,48	63,71	34,71	100,00	Tidak Tercapai	Dinas PMPTSPTK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100	20.654.580	100	19.800.000	100	19.086.000	100	19.086.000	100,00	96,39	100,00	100,00	Tercapai	Dinas PMPTSPTK
										Rata-rata Kinerja (%)	88,66	71,80	90,67	65,69		
										Predikat	T	S	ST	S		
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			505.302.419		3.980.572.800		3.740.458.800		3.740.458.800						
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	82	217.875.314	18,55	71.916.600	0,33	70.627.500	0,33	70.627.500	1,78	98,21	0,40	32,42	Tidak Tercapai	Disdikpora
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	80	179.965.009	60	3.618.940.400	66	3.381.359.500	66	3.381.359.500	100,00	93,44	82,50	100,00	Tercapai	Disdikpora

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Saing Keolahragaan															
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya (%)	5	107.462.096	4,51	289.715.800	4,51	288.471.800	4,51	288.471.800	100,00	99,57	90,20	100,00	Tercapai	Disdikpora
										Rata-rata Kinerja (%)	67,26	97,07	57,70	77,47		
										Predikat	S	ST	R	T		
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			374.013.562		123.815.950		120.727.100		120.727.100						
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	374.013.562	100	123.815.950	100	120.727.100	100	120.727.100	100,00	97,51	100,00	32,28	Tercapai	Diskominfo SP
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	97,51	100,00	32,28		
										Predikat	ST	ST	ST	SR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			374.848.217		186.692.500		172.993.600		172.993.600						
2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase keamanan informasi pemerintah (%)	100	374.848.217	100	186.692.500	100	172.993.600	100	172.993.600	100,00	92,66	100,00	100,00	Tercapai	Diskominfo SP
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	92,66	100,00	100,00		
										Predikat	ST	ST	ST	ST		
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			945.873.106		888.861.800		870.518.082		870.518.082						
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	100	157.959.603	100	130.000.000	0	127.142.900	0	127.142.900	0,00	97,80	0,00	80,49	Tidak Tercapai	Disparbud
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	144.887.084	100	8.861.800	7,69	8.690.000	7,69	8.690.000	7,69	98,06	7,69	6,00	Tidak Tercapai	Disparbud
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola secara terpadu (unit)	1	643.026.419	1	750.000.000	1	734.685.182	1	734.685.182	100,00	97,96	100,00	100,00	Tercapai	Disparbud
										Rata-rata Kinerja (%)	35,90	97,94	35,90	62,16		
										Predikat	SR	ST	SR	R		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			4.112.175.332		3.397.696.130		3.174.340.965		3.174.340.965						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.800.441.784	70,53	3.328.222.030	102	3.106.623.165	102	3.106.623.165	100,00	93,34	100,00	81,74	Tercapai	DPK
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		93,28		93,28		100,00		100,00		Tercapai	DPK

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Daerah Kabupaten															
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	4,7	311.733.548	4,6	69.474.100	82,99	67.717.800	82,99	67.717.800	100,00	97,47	100,00	21,72	Tercapai	DPK
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	95,41	100,00	51,73		
										Predikat	ST	ST	ST	R		
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			83.121.066		90.268.800		79.370.100		79.370.100						
2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	95	46.143.540	90	78.197.000	57,5	67.680.100	57,5	67.680.100	63,89	86,55	60,53	100,00	Tidak Tercapai	DPK
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	100	36.977.526	95	12.071.800	50	11.690.000	50	11.690.000	52,63	96,84	50,00	31,61	Tidak Tercapai	DPK
										Rata-rata Kinerja (%)	58,26	91,69	55,26	65,81		
										Predikat	R	ST	R	S		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			57.518.974.155		43.980.922.750		41.977.974.994		41.977.974.994						
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			14.027.266.691		7.361.300.000		7.090.531.938		7.090.531.938						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	6.756.325.068	70,53	4.194.894.800	104,41	3.974.591.803	104,41	3.974.591.803	100,00	94,75	100,00	58,83	Tercapai	Disper
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		96,32		96,32		100,00		100,00		Tercapai	Disper
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	29.721	4.384.093.713	25.481	1.432.147.300	25.610	1.392.480.238	25.610	1.392.480.238	100,00	97,23	86,17	31,76	Tercapai	Disper
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.328,80	1.503.339.667	1139,25	176.600.200	507,97	175.148.597	507,97	175.148.597	44,59	99,18	38,23	11,65	Tidak Tercapai	Disper
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya dalam kabupaten terhadap peraturan perundang-undangan (%)	26,34	21.787.531	231,34	2.725.000	248,00	2.668.000	248,00	2.668.000	100,00		100,00	12,25	Tercapai	Disper
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	269,82	1.361.720.712	15,81	1.554.932.700	15,84	1.545.643.300	15,84	1.545.643.300	100,00	99,40	5,87	100,00	Tercapai	Disper
										Rata-rata Kinerja (%)	90,76	97,64	71,71	42,90		
										Predikat	ST	ST	S	SR		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			9.256.726.958		5.978.908.200		5.818.967.093		5.818.967.093						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	6.182.541.026	70,53	4.219.645.200	82,35	4.072.367.372	82,35	4.072.367.372	100,00	96,51	100,00	65,87	Tercapai	Disparbud
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,4		97,4		100,00		100,00		Tercapai	Disparbud
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD (%)	9	1.511.390.271	6	717.375.000	3,5	710.769.521	3,5	710.769.521	58,33	99,08	38,89	100,00	Tidak Tercapai	Disparbud
3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5	350.779.256	5	785.000.000	141,72	779.660.200	141,72	779.660.200	100,00	99,32	100,00	100,00	Tercapai	Disparbud
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar (%)	10		10		-13,8		-13,8		0,00		100,00		Tidak Tercapai	
		Tingkat huniaan akomodasi (%)	10		10		4,35		4,35		43,50		43,50		Tidak Tercapai	
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan (%)	100	1.212.016.405	100	256.888.000	100	256.170.000	100	256.170.000	100,00	99,72	100,00	21,14	Tercapai	Disparbud
										Rata-rata Kinerja (%)	71,69	98,66	83,20	71,75		
										Predikat	S	ST	T	S		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			26.371.982.053		16.811.125.429		15.873.273.693		15.873.273.693						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	14.329.534.646	70,53	12.563.458.129	91,73	12.381.473.070	91,73	12.381.473.070	100,00	98,55	100,00	86,41	Tercapai	Distan KP
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		93,48		93,48		100,00		100,00		Tercapai	Distan KP
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Sarana pertanian (%)	100	4.332.370.976	100	1.730.209.900	83,86	1.357.341.775	83,86	1.357.341.775	83,86	78,45	83,86	100,00	Tidak Tercapai	Distan KP
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian (%)	100	6.862.237.697	100	2.291.290.995	87,5	1.917.249.448	87,5	1.917.249.448	87,50	83,68	87,50	27,94	Tidak Tercapai	Distan KP
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular (%)	4,53	457.024.889	5,02	177.741.905	32,19373219	170.536.200	32,19373219	170.536.200	100,00	95,95	100,00	37,31	Tercapai	Distan KP
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian (%)	17,91	156.597.882	19,85	12.700.700	19,85	11.560.800	19,85	11.560.800	100,00	91,02	100,00	7,38	Tercapai	Distan KP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	33,37	234.215.963	26,27	35.723.800	21,46	35.112.400	21,46	35.112.400	81,69	98,29	64,31	14,99	Tidak Tercapai	Distan KP
										Rata-rata Kinerja (%)	93,29	90,99	90,81	45,67		
										Predikat	ST	ST	ST	SR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			1.307.251.883		6.845.231.121		6.661.572.493		6.661.572.493						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	14.329.534.646	70,53	4.651.225.321	82,93	4.498.526.793	82,93	4.498.526.793	100,00	96,72	100,00	31,39	Tercapai	Distan KP
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		98,08		98,08		100,00		100,00		Tercapai	Distan KP
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)	100	163.406.485	100	52.058.200	100	52.058.200	100	52.058.200	100,00	100,00	100,00	31,86	Tercapai	Disperindag KUKM
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	100	490.219.456	100	1.935.516.700	86	1.905.050.000	86	1.905.050.000	86,00	98,43	86,00	100,00	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)	25	196.087.783	100	131.752.900	66,6	131.647.000	66,6	131.647.000	66,60	99,92	100,00	67,14	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera (%)	100	457.538.159	100	74.678.000	75,2	74.290.500	75,2	74.290.500	75,20	99,48	75,20	16,24	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
										Rata-rata Kinerja (%)	81,95	99,46	90,30	53,81		
										Predikat	T	ST	ST	R		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			6.555.746.570		6.984.358.000		6.533.629.777		6.533.629.777						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.127.418.310	70,53	3.320.399.600	100	3.204.151.766	100	3.204.151.766	100,00	96,50	100,00	100,00	Tercapai	Disperindag KUKM
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,8		94,8		100,00		100,00		Tercapai	Disperindag KUKM
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja (%)	22	3.374.595.039	18	3.607.352.400	4,5	3.273.444.011	4,5	3.273.444.011	25,00	90,74	20,45	97,00	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional (%)	70	53.733.221	45	56.606.000	10,79	56.034.000	10,79	56.034.000	23,98		15,41	100,00	Tidak Tercapai	Disperindag KUKM
										Rata-rata Kinerja (%)	62,24	93,62	58,97	99,00		
										Predikat	R	ST	R	ST		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			79.681.672.135		71.924.645.480		70.696.159.666		70.696.159.666						

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sekretariat Daerah			38.266.843.076		42.158.219.480		41.396.791.401		41.396.791.401						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	31.715.960.954	70,53	35.321.624.980	100	34.628.361.820	100	34.628.361.820	100,00	98,04	100,00	100,00	Tercapai	Setda
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		98,19		98,19		100,00		100,00		Tercapai	Setda
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	4.884.697.870	100	4.507.434.000	100	4.457.587.117	100	4.457.587.117	100,00	98,89	100,00	91,26	Tercapai	Setda
		Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100		100		100		100		100,00		100,00		Tercapai	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	1.666.184.252	100	2.329.160.500	100	2.310.842.464	100	2.310.842.464	100,00	99,21	100,00	100,00	Tercapai	Setda
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	98,71	100,00	97,09		
										Predikat	ST	ST	ST	ST		
	Sekretariat DPRD			41.414.829.059		29.766.426.000		29.299.368.265		29.299.368.265						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	22.959.043.489	70,53	17.085.322.700	97,81	16.711.181.997	97,81	16.711.181.997	100,00	97,81	100,00	72,79	Tercapai	Setwan
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		98,43		98,43		100,00		100,00		Tercapai	Setwan
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	100	18.455.785.570	100	12.681.103.300	100	12.588.186.268	100	12.588.186.268	100,00	99,27	100,00	68,21	Tercapai	Setwan
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	98,54	100,00	70,50		
										Predikat	ST	ST	ST	S		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			224.957.657.655		180.345.111.900		169.915.163.655		169.915.163.655						
	Perencanaan			8.431.606.650		5.918.178.000		5.698.591.520		5.698.591.520						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.839.194.606	70,53	4.387.750.900	104,13	4.252.305.591	104,13	4.252.305.591	100,00	96,91	100,00	87,87	Tercapai	Bappelitbangda
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		96,41		96,41		100,00		100,00		Tercapai	Bappelitbangda
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	95	2.173.281.186	90	969.898.700	100	911.448.329	100	911.448.329	100,00	93,97	100,00	41,94	Tercapai	Bappelitbangda
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	95	1.419.130.858	90	560.528.400	100	534.837.600	100	534.837.600	100,00	95,42	100,00	37,69	Tercapai	Bappelitbangda

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembangunan Daerah															
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	95,43	100,00	55,83		
										Predikat	ST	ST	ST	R		
	Keuangan			206.702.241.940		166.993.740.900		157.053.092.431		157.053.092.431						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	28.190.201.986	70,53	12.863.388.814	101,03	12.678.814.240	101,03	12.678.814.240	100,00	98,57	100,00	44,98	Tercapai	BPKPD
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,05		94,05		100,00		100,00		Tercapai	BPKPD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	4	175.663.605.967	5	150.345.731.440	4,08	141.355.014.741	4,08	141.355.014.741	100,00	94,02	1,02	80,47	Tercapai	BPKPD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Assets Management	ada	697.201.005	ada	1.080.000.000	Ada	1.023.722.509	Ada	1.023.722.509	100,00	94,79	100,00	100,00	Tercapai	BPKPD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah (%)	95	2.151.232.982	90	2.704.620.646	71,61	1.995.540.941	71,61	1.995.540.941	100,00	73,78	75,38	92,76	Tercapai	BPKPD
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	90,29	75,28	79,55		
										Predikat	ST	ST	T	T		
	Kepegawaian			6.459.966.021		6.127.449.700		5.894.357.886		5.894.357.886						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	5.216.631.300	70,53	4.648.246.700	98,17	4.470.869.796	98,17	4.470.869.796	100,00	96,18	100,00	85,70	Tercapai	BKPSDM
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		96,27		96,27		100,00		100,00		Tercapai	BKPSDM
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (%)	94	1.243.334.721	92,6	1.479.203.000	96,92	1.423.488.090	96,92	1.423.488.090	100,00	96,23	100,00	100,00	Tercapai	BKPSDM
		Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	100		100		99,97		99,97		99,97		99,97		Tidak Tercapai	
										Rata-rata Kinerja (%)	99,99	96,21	99,99	92,85		
										Predikat	ST	ST	ST	ST		
	Pendidikan dan Pelatihan			1.901.064.516		955.743.300		924.709.143		924.709.143						
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-kultural dan Diklat Teknis (%)	83,75	1.901.064.516	81,5	955.743.300	95,85	924.709.143	95,85	924.709.143	100,00	96,75	100,00	48,64	Tercapai	BKPSDM
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	96,75	100,00	48,64		
										Predikat	ST	ST	ST	SR		
	Penelitian dan Pengembangan			1.462.778.529		350.000.000		344.412.675		344.412.675						
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah (%)	100	1.462.778.529	100	350.000.000	100	344.412.675	100	344.412.675	100,00	98,40	100,00	23,55	Tercapai	Bappelitbangda
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	98,40	100,00	23,55		
										Predikat	ST	ST	ST	SR		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.413.594.410		12.784.100.000		11.376.621.372		11.376.621.372						

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Inspektorat Daerah			11.413.594.410		12.784.100.000		11.376.621.372		11.376.621.372						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	7.330.371.364	70,53	8.047.455.600	101,93	7.416.034.572	101,93	7.416.034.572	100,00	92,15	100,00	100,00	Tercapai	Itda
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		88,99		88,99		100,00		100,00		Tercapai	Itda
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4	3.566.967.490	3	4.062.283.500	2,84	3.507.694.000	2,84	3.507.694.000	94,67	86,35	71,00	98,34	Tidak Tercapai	Itda
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,5	516.255.556	3,3	674.360.900	2,52	452.892.800	2,52	452.892.800	76,36	67,16	72,00	87,73	Tidak Tercapai	Itda
										Rata-rata Kinerja (%)	92,76	81,89	85,75	95,35		
										Predikat	ST	T	T	ST		
	UNSUR KEWILAYAHAN			43.217.411.620		38.671.903.272		36.871.175.769		36.871.175.769						
	Kecamatan			43.217.411.620		38.671.903.272		36.871.175.769		36.871.175.769						
	Kec. Bontomatene			8.286.687.564		6.836.203.200		6.677.464.161		6.677.464.161						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.993.724.453	70,53	4.058.563.900	97,44	3.985.591.411	97,44	3.985.591.411	100,00	98,20	100,00	79,81	Tercapai	Kecamatan Bontomatene
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,68		97,68		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Bontomatene
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	77.552.384	15	27.631.500	15,00	26.794.300	15,00	26.794.300	100,00	96,97	0,00	34,55	Tercapai	Kecamatan Bontomatene
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	2.544.612.104	100	2.262.200.900	98,85	2.182.155.550	98,85	2.182.155.550	98,85	96,46	98,85	85,76	Tidak Tercapai	Kecamatan Bontomatene
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	53.591.713	1	10.200.000	0,59	10.200.000	0,59	10.200.000	100,00	100,00	59,18	19,03	Tercapai	Kecamatan Bontomatene
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	148.915.515	0	98.600.600	0,00	97.534.500	0,00	97.534.500	100,00	98,92	100,00	65,50	Tercapai	Kecamatan Bontomatene
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	468.291.395	60	379.006.300	70,44	375.188.400	70,44	375.188.400	100,00	98,99	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Bontomatene
										Rata-rata Kinerja (%)	99,84	98,26	79,72	64,11		
										Predikat	ST	ST	T	R		
	Kec. Buki			2.120.300.802		2.150.500.000		2.051.315.645		2.051.315.645						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	2.007.005.638	70,53	2.001.990.200	98,92	1.906.876.245	98,92	1.906.876.245	100,00	95,25	100,00	95,01	Tercapai	Kecamatan Buki
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		95,39		95,39		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Buki

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Daerah Kabupaten															
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	13.072.519	15	5.337.500	15,00	5.337.000	15,00	5.337.000	100,00	99,99	0,00	40,83	Tercapai	Kecamatan Buki
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	34.315.362	100	55.996.500	98,85	55.555.500	98,85	55.555.500	98,85	99,21	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Buki
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	8.715.013	1	19.272.800	0,59	18.962.400	0,59	18.962.400	100,00	98,39	59,18	100,00	Tercapai	Kecamatan Buki
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	41.396.310	0	49.953.000	0,00	49.814.600	0,00	49.814.600	100,00	99,72	100,00	120,34	Tercapai	Kecamatan Buki
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	15.795.960	60	17.950.000	70,44	14.769.900	70,44	14.769.900	100,00	82,28	100,00	93,50	Tercapai	Kecamatan Buki
										Rata-rata Kinerja (%)	99,84	95,81	79,72	91,61		
										Predikat	ST	ST	T	ST		
	Kec. Bontomanai			2.557.309.875		2.100.900.000		1.963.316.118		1.963.316.118						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	2.505.019.799	70,53	2.033.544.200	100	1.895.960.318	100	1.895.960.318	100,00	93,23	100,00	75,69	Tercapai	Kecamatan Bontomanai
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		93,45		93,45		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Bontomanai
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	10.893.766	15	4.679.200	15,00	4.679.200	15,00	4.679.200	100,00	100,00	0,00	42,95	Tercapai	Kecamatan Bontomanai
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	10.893.766	100	30.009.100	98,85	30.009.100	98,85	30.009.100	98,85	100,00	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Bontomanai
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	25.055.661	1	15.739.500	0,59	15.739.500	0,59	15.739.500	100,00	100,00	59,18	62,82	Tercapai	Kecamatan Bontomanai
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	5.446.883	0	16.928.000	0,00	16.928.000	0,00	16.928.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Bontomanai
										Rata-rata Kinerja (%)	99,81	98,65	76,34	76,29		
										Predikat	ST	ST	T	T		
	Kec. Benteng			10.362.078.050		9.441.544.032		9.164.317.635		9.164.317.635						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.701.582.725	70,53	5.618.268.788	100	5.610.088.455	100	5.610.088.455	100,00	99,85	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Benteng
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,06		97,06		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Benteng

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Daerah Kabupaten															
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	108.643.414	15	50.386.600	15,00	47.386.600	15,00	47.386.600	100,00	94,05	0,00	43,62	Tercapai	Kecamatan Benteng
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	5.102.231.621	100	3.558.039.344	98,85	3.320.431.980	98,85	3.320.431.980	98,85	93,32	98,85	65,08	Tidak Tercapai	Kecamatan Benteng
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	117.393.254	1	167.553.500	0,59	120.326.100	0,59	120.326.100	100,00	71,81	59,18	100,00	Tercapai	Kecamatan Benteng
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	117.652.670	0	7.955.800	0,00	7.955.800	0,00	7.955.800	100,00	100,00	100,00	6,76	Tercapai	Kecamatan Benteng
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	214.574.366	60	39.340.000	70,44	58.128.700	70,44	58.128.700	100,00	100,00	100,00	27,09	Tercapai	Kecamatan Benteng
										Rata-rata Kinerja (%)	99,84	93,17	79,72	57,09		
										Predikat	ST	ST	T	R		
	Kec. Bontoharu			7.246.829.273		6.782.397.140		6.407.087.055		6.407.087.055						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	4.515.290.051	70,53	4.601.051.124	94,74	4.303.092.089	94,74	4.303.092.089	100,00	93,52	100,00	95,30	Tercapai	Kecamatan Bontoharu
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,47		94,47		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Bontoharu
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	51.451.144	15	39.714.500	15,00	38.364.500	15,00	38.364.500	100,00	96,60	0,00	74,56	Tercapai	Kecamatan Bontoharu
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	1.961.862.105	100	1.881.013.496	98,85	1.829.295.746	98,85	1.829.295.746	98,85	97,25	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Bontoharu
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	483.356.384	1	49.402.600	0,59	44.307.900	0,59	44.307.900	100,00	89,69	59,18	100,00	Tercapai	Kecamatan Bontoharu
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	76.256.360	0	52.769.200	0,00	52.504.300	0,00	52.504.300	100,00	99,50	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Bontoharu
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	158.613.229	60	158.446.220	70,44	139.522.520	70,44	139.522.520	100,00	88,06	100,00	87,96	Tercapai	Kecamatan Bontoharu
										Rata-rata Kinerja (%)	99,84	94,10	79,72	92,97		
										Predikat	ST	ST	T	ST		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kec. Bontosikuyu			2.386.275.162		1.882.300.000		1.746.331.784		1.746.331.784						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	2.253.371.221	70,53	1.785.754.900	105	1.649.820.684	105	1.649.820.684	100,00	92,39	100,00	73,22	Tercapai	Kecamatan Bontosikuyu
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		92,78		92,78		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Bontosikuyu
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	32.681.297	15	15.000.000	15,00	15.000.000	15,00	15.000.000	100,00	100,00	0,00	45,90	Tercapai	Kecamatan Bontosikuyu
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	32.681.297	100	34.045.100	98,85	34.045.100	98,85	34.045.100	98,85	100,00	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Bontosikuyu
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	40.306.933	0	20.000.000	0,00	19.978.000	0,00	19.978.000	100,00	99,89	100,00	49,56	Tercapai	Kecamatan Bontosikuyu
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	27.234.414	60	27.500.000	70,44	27.488.000	70,44	27.488.000	100,00	99,96	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Bontosikuyu
										Rata-rata Kinerja (%)	99,81	98,45	83,14	73,74		
										Predikat	ST	ST	T	S		
	Kec. Takabonerate			2.201.340.195		1.903.050.000		1.720.360.362		1.720.360.362						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	1.907.754.723	70,53	1.806.163.300	297,12	1.656.305.162	297,12	1.656.305.162	100,00	91,70	100,00	86,82	Tercapai	Kecamatan Takabonerate
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		90,4		90,4		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Takabonerate
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	122.130.007	15	20.000.000	15,00	17.307.500	15,00	17.307.500	100,00		0,00	14,17	Tercapai	Kecamatan Takabonerate
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	123.099.552	100	58.059.500	98,85	38.577.700	98,85	38.577.700	98,85	66,45	98,85	31,34	Tidak Tercapai	Kecamatan Takabonerate
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	26.568.382	1	7.457.200	0,59	0	0,59	0	100,00	0,00	59,18	0,00	Tercapai	Kecamatan Takabonerate
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	21.787.531	60	11.370.000	70,44	8.170.000	70,44	8.170.000	100,00	71,86	100,00	37,50	Tercapai	Kecamatan Takabonerate
										Rata-rata Kinerja (%)	99,81	57,50	76,34	33,97		
										Predikat	ST	R	T	SR		
	Kec.Pasimasunggu			2.334.159.370		1.976.600.000		1.872.514.664		1.872.514.664						
1	Program Penunjang	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	2.243.299.073	70,53	1.892.101.000	91,67	1.788.073.164	91,67	1.788.073.164	100,00	94,50	100,00	79,71	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		94,73		94,73		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	10.893.766	100	40.713.700	98,85	40.662.500	98,85	40.662.500	98,85	99,87	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	12.895.973	1	2.607.900	0,59	2.607.000	0,59	2.607.000	100,00		59,18	20,22	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	32.681.297	0	31.476.600	0,00	31.473.000	0,00	31.473.000	100,00	99,99	100,00	96,30	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	34.389.261	60	9.700.800	70,44	9.699.000	70,44	9.699.000	100,00	99,98	100,00	28,20	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu
										Rata-rata Kinerja (%)	99,81	98,59	93,00	64,89		
										Predikat	ST	ST	ST	R		
	Kec.Pasimasunggu Timur			1.956.314.418		1.803.850.000		1.682.730.503		1.682.730.503						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	1.815.581.128	70,53	1.671.210.000	97,62	1.577.344.503	97,62	1.577.344.503	100,00	94,38	100,00	86,88	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu Timur
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		93,29		93,29		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu Timur
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	17.974.713	100	22.000.000	98,85	22.000.000	98,85	22.000.000	98,85		98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu Timur
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	12.486.434	1	10.000.000	0,59	10.000.000	0,59	10.000.000	100,00	100,00	59,18	80,09	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu Timur
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	32.681.297	0	55.890.000	0,00	38.958.000	0,00	38.958.000	100,00	69,70	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu Timur
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70	77.590.846	60	44.750.000	70,44	34.428.000	70,44	34.428.000	100,00	76,93	100,00	44,37	Tercapai	Kecamatan Pasimasunggu Timur
										Rata-rata Kinerja (%)	99,81	85,26	93,00	82,27		
										Predikat	ST	T	ST	T		
	Kec.Pasimarannu			2.028.863.762		1.627.449.900		1.627.449.900		1.627.449.900						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	1.833.708.423	70,53	1.502.129.340	94,44	1.502.129.340	94,44	1.502.129.340	100,00	100,00	100,00	81,92	Tercapai	Kecamatan Pasimarannu
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		100		100		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Pasimarannu

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	32.239.932	15	72174760	15,00	72.174.760	15,00	72.174.760	100,00		0,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Pasimarannu
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	146.795.441	100	31.145.800	98,85	31.145.800	98,85	31.145.800	98,85	100,00	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Pasimarannu
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	16.119.966	1	22.000.000	0,59	22.000.000	0,59	22.000.000	100,00	100,00	59,18	100,00	Tercapai	Kecamatan Pasimarannu
										Rata-rata Kinerja (%)	99,77	100,00	71,61	95,48		
										Predikat	ST	ST	S	ST		
	Kec.Pasilambena			1.737.253.149		2.167.109.000		1.958.287.942		1.958.287.942						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	1.527.846.648	70,53	2.079.598.400	68,97	1.887.128.502	68,97	1.887.128.502	97,79	90,74	100,00	123,52	Tidak Tercapai	Kecamatan Pasilambena
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		90,36		90,36		100,00		100,00		Tercapai	Kecamatan Pasilambena
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 menit	20.698.155	15	4.373.300	15,00	4.373.300	15,00	4.373.300	100,00		0,00	21,13	Tercapai	Kecamatan Pasilambena
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	45.437.897	100	48.189.300	98,85	37.938.140	98,85	37.938.140	98,85	78,73	98,85	100,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Pasilambena
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	17.992.143	1	1.622.500	0,59	1.622.500	0,59	1.622.500	100,00	100,00	59,18	9,02	Tercapai	Kecamatan Pasilambena
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	61.005.088	0	19.243.100	0,00	13.143.100	0,00	13.143.100	100,00	68,30	100,00	21,54	Tercapai	Kecamatan Pasilambena
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	100	64.273.218	60	14.082.400	70,44	14.082.400	70,44	14.082.400	100,00	100,00	70,44	21,91	Tercapai	Kecamatan Pasilambena
										Rata-rata Kinerja (%)	99,52	87,55	75,50	49,52		
										Predikat	ST	T	T	SR		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.044.313.254		34.176.059.167		33.484.641.109		33.484.641.109						
	Kesatuan Bangsa dan Politik			5.044.313.254		34.176.059.167		33.484.641.109		33.484.641.109						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	3.132.059.316	70,53	2.558.807.500	83,83	2.258.670.742	83,83	2.258.670.742	100,00	88,27	100,00	72,11	Tercapai	Semua OPD
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan(%)	95,00		88		97,98		97,98		100,00		100,00		Tercapai	Semua OPD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target capaian program pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022		INTERPRETASI	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	86.073.095	0,026	1.690.000.000	0,073	1.621.884.800	0,073	1.621.884.800	100,00	95,97	100,00	100,00	Tercapai	Badan Kesbangpol
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Politik (%)	100	1.420.895.722	100	29.303.273.667	100	29.256.794.467	100	29.256.794.467	100,00	99,84	100,00	100,00	Tercapai	Badan Kesbangpol
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina (%)	100	31.604.266	100	42.240.000	100	3.741.800	100	3.741.800	100,00	8,86	100,00	100,00	Tercapai	Badan Kesbangpol
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan (%)	100	293.054.643	100	55.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100,00	90,91	100,00	17,06	Tercapai	Badan Kesbangpol
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme / radikalismedan konflik sosial (%)	100	80.626.212	100	526.738.000	100	293.549.300	100	293.549.300	100,00	55,73	100,00	100,00	Tercapai	Badan Kesbangpol
										Rata-rata Kinerja (%)	100,00	73,26	100,00	81,53		
										Predikat	ST	S	ST	T		
		TOTAL		1.202.642.298.954		1.121.769.457.234		996.088.187.460		996.088.187.460	88,68	88,80	82,97	82,82		
										PREDIKAT	T	T	T	T		

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja keuangan tertinggi yaitu Kecamatan Pasimarannu serta capaian kinerja keuangan terendah yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan capaian kinerja fisik tertinggi yaitu Kecamatan Pasimarannu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Disperinaker, dan Dinas PMD serta capaian kinerja fisik terendah yaitu Kecamatan Benteng.
2. Dari 286 indikator program, terdapat 206 indikator program yang telah mencapai target sedangkan 80 indikator belum mencapai target
3. Secara keseluruhan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian kinerja fisik sebesar 88,68 % atau kategori tinggi serta capaian kinerja keuangan sebesar 88,80 % atau kategori tinggi.

2.3.1.2 Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dipengaruhi oleh konsistensinya dalam penganggaran. Semakin banyak kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD, maka semakin kecil pula tingkat capaian RKPD. Memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan realisasi fisik dan keuangan masing-masing Perangkat Daerah, maka capaian kinerja fisik RKPD Tahun 2024 dapat dillihat pada pada **Tabel 2.81.**

Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Fisik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Program							Kegiatan							Sub Kegiatan							Rata-rata capaian	Predikat
		Jumlah Program	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	8			1	1	6	0	23	1	1		7	11	3	282	18	5	2	6	77	174	91,11	ST
2	Dinas Kesehatan	5	1	1		3	0	0	12	1	1	2	4	4	0	61	8	3	1	7	28	14	87,50	T
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	2				2	0	0	9	1	1	1	2	4	0	16	2			2	10	2	91,62	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	19			1		12	6	33	1			1	23	8	192	4		1	2	54	131	95,64	ST
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6				2	2	2	20			2	4	7	7	60	2		1	16	17	24	94,16	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3				2	1	0	16		1	1	4	9	1	102	3		2	12	34	51	99,96	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2					2	0	12					12	0	74					34	40	97,47	ST
8	Dinas Sosial	6					6	0	17				1	15	1	74				5	33	36	97,26	ST
9	Dinas Lingkungan Hidup	11					10	1	22					20	2	79				2	54	23	100,00	ST
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5					5	0	20		1			13	6	74			1	1	32	40	95,17	ST
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5					3	2	12					8	4	101					30	71	100,00	ST
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	10			1	3	6	0	29		1	3	3	16	6	107	5	1	6	4	40	51	89,76	T
13	Dinas Perhubungan	4					3	1	18	1				9	8	53	1			1	20	31	99,38	ST

No	Perangkat Daerah	Program							Kegiatan							Sub Kegiatan							Rata-rata capaian	Predikat
		Jumlah Program	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana		
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	5				1	4	0	11			1	2	8	0	51	2			4	38	7	95,75	ST
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7		1		1	4	1	14	1	1		2	9	1	74	3	1			31	39	98,76	ST
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6					4	2	16					12	4	52					32	20	100,00	ST
17	Dinas Perikanan	5	1			1	3	0	20	1	1		2	13	3	64	2	2	1	5	29	25	96,96	ST
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10	1				6	3	25	1				13	11	127	6			1	27	93	99,43	ST
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11			1	1	7	2	35	2				19	14	153	2			1	32	118	96,59	ST
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15			1	1	7	6	32	1	1	1		15	14	90	3	1	1	3	34	48	98,66	ST
21	Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan	8					6	2	16					13	3	47					30	17	100,00	ST
22	Sekretariat Daerah	3					3	0	20					18	2	71	1				63	7	99,77	ST
23	Sekretariat DPRD	2					2	0	17				1	16	0	71	1				60	10	99,99	ST
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4					4	0	20					17	3	74				1	64	9	99,91	ST
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4					4	0	15			1		12	2	117	1			1	88	27	97,08	ST
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	3					3	0	17					13	4	56			2		39	15	99,98	ST

No	Perangkat Daerah	Program							Kegiatan							Sub Kegiatan							Rata-rata capaian	Predikat
		Jumlah Program	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana		
	Sumberdaya Manusia																							
27	Inspektorat Daerah	3					3	0	10	1			1	8	0	35	1		1		30	3	99,87	ST
28	Kecamatan Bontomatene	6				1	5	0	16		1	1	2	10	2	77	3	2		2	32	38	76,30	T
29	Kecamatan Buki	6					6	0	16				1	14	1	48				1	30	17	91,87	ST
30	Kecamatan Bontomanai	6					5	1	16					10	6	26					17	9	93,45	ST
31	Kecamatan Benteng	6	3		1		2	0	16	6	1	1	2	5	1	80	13	2	1	1	17	46	99,88	ST
32	Kecamatan Bontoharu	6				1	5	0	16				3	12	1	79	1	1		5	31	41	92,78	ST
33	Kecamatan Bontosikuyu	6				1	4	1	16			2		7	7	23	1	1			14	7	99,93	ST
34	Kecamatan Pasimasunggu	6				1	5	0	16	1			1	8	6	34	2			1	21	10	99,63	ST
35	Kecamatan Pasimasunggu Timur	6			1		4	1	16			1	1	6	8	22	1	1			12	8	100,00	ST
36	Kecamatan Pasimarannu	6					4	2	16					9	7	17					15	2	99,64	ST
37	Kecamatan Pasilambena	6				1	5	0	16				1	11	4	32				1	28	3	96,93	ST
38	Kecamatan Takabonerate	6	1		2	2		1	16	3	1	1	5	2	4	27	4	3	3	3	9	5	90,40	ST
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	1	1		3	1	0	13	2	2		3	4	2	56	4	1	1	2	19	29	98,49	ST
		244	8	3	9	28	162	34	700	24	14	18	53	435	156	2878	94	24	24	90	1305	1341	96,44	ST

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh capaian kinerja RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Dari 244 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 210 program dianggarkan pada APBD dan sebanyak 34 program atau sebanyak 13,93 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya, dari 244 program terdapat 162 program atau sebesar 66,39 persen memiliki capaian Sangat Tinggi, 28 program atau sebesar 11,48 persen memiliki capaian Tinggi, 9 program atau sebesar 3,69 persen memiliki capaian Sedang, 3 program atau sebesar 1,23 persen memiliki capaian Rendah, 8 program atau sebesar 3,28 persen memiliki capaian Sangat Rendah.
2. Dari 700 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 540 kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 156 kegiatan atau sebanyak 22,29 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya, dari 700 kegiatan terdapat 435 kegiatan atau sebesar 62,14 persen memiliki capaian Sangat Tinggi, 53 kegiatan atau sebesar 7,57 persen memiliki capaian Tinggi, 18 kegiatan atau sebesar 2,57 persen memiliki capaian Sedang, 14 kegiatan atau sebesar 2 persen memiliki capaian Rendah, 24 kegiatan atau sebesar 3,43 persen memiliki capaian Sangat Rendah.
3. Dari 2878 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 1537 sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1341 sub kegiatan atau sebanyak 46,59 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya, dari 2878 sub kegiatan terdapat 1305 sub kegiatan atau sebesar 45,34 persen memiliki capaian Sangat Tinggi, 90 sub kegiatan atau sebesar 3,13 persen memiliki capaian Tinggi, 24 sub kegiatan atau sebesar 0,83 persen memiliki capaian Sedang, 24 sub kegiatan atau sebesar 0,83 persen memiliki capaian Rendah, 94 sub kegiatan atau sebesar 3,27 persen memiliki capaian Sangat Rendah.
4. Rata-rata capaian kinerja fisik program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 sebesar 96,44 persen dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Selain capaian kinerja fisik, capaian pelaksanaan RKPD tahun 2024 dapat dilihat dari capaian kinerja anggaran. Capaian kinerja anggaran dimaksud, dapat dilihat pada **Tabel 2.82.**

Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar per Bidang Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	Program							Kegiatan							Sub Kegiatan							Rata-rata capaian	Predikat
		Jumlah Program	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	8			1		7	0	23	1	1		5	13	3	282	16	7	1	7	77	174	87,67	T
2	Dinas Kesehatan	5	1			4		0	12	2		1	5	4	0	61	10	3	2	8	24	14	80,14	T
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	2					2	0	9	1	1		2	5	0	16	2			3	9	2	91,62	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	19	1	1		4	7	6	33	3	1	2	9	10	8	192	8	3	8	19	23	131	75,87	T
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6					4	2	20				4	9	7	60	2		1	16	17	24	94,08	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3					3	0	16				1	14	1	102	2		1	13	35	51	96,50	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2					2	0	12				2	10	0	74				2	32	40	97,60	ST
8	Dinas Sosial	6				1	5	0	17				2	14	1	74		1		4	33	36	92,81	ST
9	Dinas Lingkungan Hidup	11					10	1	22				2	18	2	79			1	24	31	23	97,85	ST
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5					5	0	20				1	13	6	74			1	1	32	40	94,71	ST
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5				1	2	2	12			1	2	5	4	101	1	1	1	14	13	71	94,07	ST
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	10		1	1	6	2	0	29	1	2	1	10	9	6	107	4	3	5	17	27	51	76,82	T
13	Dinas Perhubungan	4					3	1	18	1			1	8	8	53	1			4	17	31	97,23	ST
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	5		1			4	0	11	1	1		2	7	0	51	4	1	2	12	25	7	95,29	ST
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	1	1		2	2	1	14	2	1		5	5	1	74	5	1	2	12	15	39	86,81	T
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6				1	3	2	16	1		1	4	6	4	52	1		4	16	11	20	93,28	ST
17	Dinas Perikanan	5					5	0	20	1				16	3	64	1	2	1	5	30	25	96,32	ST
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10					7	3	25	1				13	11	127	7			5	22	93	97,40	ST

No	Perangkat Daerah	Program							Kegiatan							Sub Kegiatan							Rata-rata capaian	Predikat
		Jumlah Program	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana	Jumlah	SR	R	S	T	ST	Tidak terlaksana		
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11	1			4	4	2	35	3	2		5	11	14	153	3	2	1	9	20	118	93,48	ST
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15					9	6	32		1	1	1	15	14	90	2	3	1	4	32	48	98,08	ST
21	Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan	8				1	5	2	16				2	11	3	47				7	23	17	94,80	ST
22	Sekretariat Daerah	3					3	0	20				1	17	2	71	1			1	62	7	98,19	ST
23	Sekretariat DPRD	2					2	0	17				1	16	0	71	1		1	10	49	10	98,43	ST
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4					4	0	20	1			2	14	3	74	1	2	4	14	44	9	96,41	ST
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4			1		3	0	15			1		12	2	117	3	1	3	12	71	27	94,05	ST
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3					3	0	17				5	8	4	56		1		16	24	15	96,27	ST
27	Inspektorat Daerah	3			1	1	1	0	10	1	1	2	4	2	0	35	4	2	2	14	10	3	88,99	T
28	Kecamatan Bontomatene	6					6	0	16		1			13	2	77	3	2		2	32	38	97,06	ST
29	Kecamatan Buki	6				1	5	0	16				3	12	1	48	1			5	25	17	94,47	ST
30	Kecamatan Bontomanai	6					5	1	16					10	6	26					17	9	93,45	ST
31	Kecamatan Benteng	6			1		5	0	16		1	1	1	12	1	80	3	2	1	2	26	46	97,68	ST
32	Kecamatan Bontoharu	6				2	4	0	16			1	2	12	1	79	2	1		4	31	41	92,78	ST
33	Kecamatan Bontosikuyu	6					5	1	16					9	7	23	1	1			14	7	95,39	ST
34	Kecamatan Pasimasunggu	6				1	5	0	16				3	7	6	34	2			3	19	10	90,36	ST
35	Kecamatan Pasimasunggu Timur	6			1	1	3	1	16			1	3	4	8	22	1	1	1	3	8	8	100,00	ST
36	Kecamatan Pasimarannu	6					4	2	16					9	7	17					15	2	94,73	ST
37	Kecamatan Pasilambena	6			1	2	3	0	16			1	3	8	4	32	1		2	3	23	3	93,29	ST
38	Kecamatan Takabonerate	6	1		2	1	1	1	16	2	3	1	3	3	4	27	4	3	3	3	9	5	90,40	ST
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	1	1		2	2	0	13	1	2	2	1	5	2	56	4	2	8	1	12	29	97,98	ST
		244	6	5	9	35	155	34	700	23	18	17	97	389	156	2878	101	45	57	295	1039	1341	88,8	T

Berdasarkan **Tabel 2.82** di atas, diperoleh capaian kinerja RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Dari 244 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 210 program dianggarkan pada APBD dan sebanyak 34 program atau sebanyak 13,93 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya, dari 244 program terdapat 155 program atau sebesar 63,52 persen memiliki capaian Sangat Tinggi, 35 program atau sebesar 14,34 persen memiliki capaian Tinggi, 9 program atau sebesar 3,69 persen memiliki capaian Sedang, 5 program atau sebesar 2,05 persen memiliki capaian Rendah, 6 program atau sebesar 2,46 persen memiliki capaian Sangat Rendah.
2. Dari 700 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 544 kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 156 kegiatan atau sebanyak 22,29 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya, dari 700 kegiatan terdapat 389 kegiatan atau sebesar 55,57 persen memiliki capaian Sangat Tinggi, 97 kegiatan atau sebesar 13,86 persen memiliki capaian Tinggi, 17 kegiatan atau sebesar 2,43 persen memiliki capaian Sedang, 18 kegiatan atau sebesar 2,57 persen memiliki capaian Rendah, 23 kegiatan atau sebesar 3,29 persen memiliki capaian Sangat Rendah.
3. Dari 2878 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 1537 sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1341 sub kegiatan atau sebanyak 46,59 persen yang tidak dianggarkan pada APBD. Selanjutnya, dari 2878 sub kegiatan terdapat 1039 sub kegiatan atau sebesar 36,10 persen memiliki capaian Sangat Tinggi, 295 sub kegiatan atau sebesar 10,25 persen memiliki capaian Tinggi, 57 sub kegiatan atau sebesar 1,98 persen memiliki capaian Sedang, 45 sub kegiatan atau sebesar 1,56 persen memiliki capaian Rendah, 101 sub kegiatan atau sebesar 3,51 persen memiliki capaian Sangat Rendah.
4. Rata-rata capaian kinerja anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 sebesar 88,80 persen dengan predikat kinerja Tinggi.

2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan untuk melihat konsistensi pelaksanaan program RPJMD oleh masing-masing perangkat daerah tahun 2024. Konsistensi dimaksud menunjukkan jumlah program RPJMD, jumlah program RKPD dan APBD, Penjabaran Program RPJMD ke RKPD dan APBD, serta program yang tidak dilaksanakan berdasarkan tahun pelaksanaan RPJMD, RKPD dan APBD yang sama.

2.3.2.1 Konsistensi Program RPJMD dan RKPD, Renja dan APBD

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 83 Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD, Renja dan APBD Tahun 2024

No	Nama OPD	Jumlah Program				Jumlah Program Yang Sama				Jumlah Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA	APBD	RPJMD & RKPD	RKPD & RENJA PD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RPJMD & RKPD	RKPD & RENJA PD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	8	8	8	8	8	8	8	1	0	0	1
2	Dinas Kesehatan	7	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	2
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	20	19	19	13	19	19	13	13	1	0	6	7
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6	6	6	4	6	6	4	4	0	0	2	2
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
8	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
10	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	10	11	11	10	10	0	0	1	1
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	5	5	3	5	5	3	3	0	0	2	2
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
13	Dinas Perhubungan	4	4	4	3	4	4	3	3	0	0	1	1
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	7	7	6	7	7	6	6	0	0	1	1

No	Nama OPD	Jumlah Program				Jumlah Program Yang Sama				Jumlah Program Yang Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	RENJA	APBD	RPJMD & RKPD	RKPD & RENJA PD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RPJMD & RKPD	RKPD & RENJA PD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	6	6	4	6	6	4	4	0	0	2	2
17	Dinas Perikanan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10	10	10	7	10	10	7	7	0	0	3	3
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11	11	11	9	11	11	9	9	0	0	2	2
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15	15	15	9	15	15	9	9	0	0	6	6
21	Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan	8	8	8	6	8	8	6	6	0	0	2	2
22	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
23	Sekretariat Dprd	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
27	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
31	Kecamatan Bontomatene	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
33	Kecamatan Buki	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
30	Kecamatan Bontomanai	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1
28	Kecamatan Benteng	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
29	Kecamatan Bontoharu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
32	Kecamatan Bontosikuyu	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1
36	Kecamatan Pasimasunggu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
37	Kecamatan Pasimasunggu Timur	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1
35	Kecamatan Pasimarannu	6	6	6	4	6	6	4	4	0	0	2	2
34	Kecamatan Pasilambena	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
38	Kecamatan Takabonerate	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
Jumlah		248	244	244	210	244	244	210	210	4	0	34	38

Berdasarkan **Tabel 2.83** di atas, dapat dijelaskan bahwa gambaran konsistensi pelaksanaan Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 248 program, sedangkan jumlah program dalam RKPD Tahun 2024 adalah 244 program. Terdapat 4 program merupakan program yang tidak sama antara RPJMD dan RKPD.
   b. Program yang tidak sama tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD tahun 2024 adalah 244 program sama dengan jumlah program dalam Renja yaitu 244 program.
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD tahun 2024 adalah 244 program, sedangkan jumlah program dalam APBD yaitu 210 program. Terdapat 34 Program yang tidak sama antara RKPD dan APBD
   b. Program yang tidak samai merupakan program RKPD yang tidak dijabarkan APBD Tahun 2024.
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 248 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 210 program. Dengan demikian terdapat 38 program yang tidak sama antara RPJMD dan APBD.
   b. Program yang tidak sama merupakan program RPJMD yang tidak dijabarkan dalam APBD Tahun 2024.

2.3.2.2 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD terhadap Renja dan APBD

Hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-OPD. Kegiatan dalam Renstra-OPD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-OPD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-OPD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Konsistensi dan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan RKPD dapat digambarkan sebagai berikut (**Tabel 2.84**).

Tabel 2. 84 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD terhadap Renja dan APBD Tahun 2024

No	Nama OPD	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Yang Sama			Jumlah Kegiatan Yang Tidak Sama			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan Yang Sama			Jumlah Sub Kegiatan Yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD	RENJA	APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	23	23	20	23	20	20	0	3	3	282	282	108	282	108	108	0	174	174
2	Dinas Kesehatan	12	12	12	12	12	12	0	0	0	61	61	47	61	47	47	0	14	14
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	9	9	9	9	9	9	0	0	0	16	16	14	16	14	14	0	2	2
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	33	33	25	33	25	25	0	8	8	192	192	61	192	61	61	0	131	131
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20	20	13	20	13	13	0	7	7	60	60	36	60	36	36	0	24	24
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	16	16	15	16	15	15	0	1	1	102	102	51	102	51	51	0	51	51
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0	74	74	34	74	34	34	0	40	40
8	Dinas Sosial	17	17	16	17	16	16	0	1	1	74	74	38	74	38	38	0	36	36
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	22	22	20	22	20	20	0	2	2	79	79	56	79	56	56	0	23	23
10	Dinas Lingkungan Hidup	20	20	14	20	14	14	0	6	6	74	74	34	74	34	34	0	40	40
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12	12	8	12	8	8	0	4	4	101	101	30	101	30	30	0	71	71
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	29	29	23	29	23	23	0	6	6	107	107	56	107	56	56	0	51	51
13	Dinas Perhubungan	18	18	10	18	10	10	0	8	8	53	53	22	53	22	22	0	31	31
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	11	11	11	11	11	11	0	0	0	51	51	44	51	44	44	0	7	7

No	Nama OPD	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Yang Sama			Jumlah Kegiatan Yang Tidak Sama			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan Yang Sama			Jumlah Sub Kegiatan Yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD	RENJA	APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	14	13	14	13	13	0	1	1	74	74	35	74	35	35	0	39	39
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	16	16	12	16	12	12	0	4	4	52	52	32	52	32	32	0	20	20
17	Dinas Perikanan	20	20	17	20	17	17	0	3	3	64	64	39	64	39	39	0	25	25
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	25	25	14	25	14	14	0	11	11	127	127	34	127	34	34	0	93	93
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	35	35	21	35	21	21	0	14	14	153	153	35	153	35	35	0	118	118
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	32	32	18	32	18	18	0	14	14	90	90	42	90	42	42	0	48	48
21	Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan	16	16	13	16	13	13	0	3	3	47	47	30	47	30	30	0	17	17
22	Sekretariat Daerah	20	20	18	20	18	18	0	2	2	71	71	64	71	64	64	0	7	7
23	Sekretariat Dprd	17	17	17	17	17	17	0	0	0	71	71	61	71	61	61	0	10	10
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	20	20	17	20	17	17	0	3	3	74	74	65	74	65	65	0	9	9
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	15	15	13	15	13	13	0	2	2	117	117	90	117	90	90	0	27	27
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	17	17	13	17	13	13	0	4	4	56	56	41	56	41	41	0	15	15
27	Inspektorat Daerah	10	10	10	10	10	10	0	0	0	35	35	32	35	32	32	0	3	3
31	Kecamatan Bontomatene	16	16	14	16	14	14	0	2	2	77	77	39	77	39	39	0	38	38
33	Kecamatan Buki	16	16	15	16	15	15	0	1	1	48	48	31	48	31	31	0	17	17
30	Kecamatan Bontomanai	16	16	10	16	10	10	0	6	6	26	26	17	26	17	17	0	9	9
28	Kecamatan Benteng	16	16	15	16	15	15	0	1	1	80	80	34	80	34	34	0	46	46
29	Kecamatan Bontoharu	16	16	15	16	15	15	0	1	1	79	79	38	79	38	38	0	41	41
32	Kecamatan Bontosikuyu	16	16	9	16	9	9	0	7	7	23	23	16	23	16	16	0	7	7

No	Nama OPD	Jumlah Kegiatan			Jumlah Kegiatan Yang Sama			Jumlah Kegiatan Yang Tidak Sama			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan Yang Sama			Jumlah Sub Kegiatan Yang Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD	RENJA	APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD	RKPD & RENJA	RKPD & APBD	RENJA & APBD
36	Kecamatan Pasimasunggu	16	16	10	16	10	10	0	6	6	34	34	24	34	24	24	0	10	10
37	Kecamatan Pasimasunggu Timur	16	16	8	16	8	8	0	8	8	22	22	14	22	14	14	0	8	8
35	Kecamatan Pasimarannu	16	16	9	16	9	9	0	7	7	17	17	15	17	15	15	0	2	2
34	Kecamatan Pasilambena	16	16	12	16	12	12	0	4	4	32	32	29	32	29	29	0	3	3
38	Kecamatan Takabonerate	16	16	12	16	12	12	0	4	4	27	27	22	27	22	22	0	5	5
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13	13	11	13	11	11	0	2	2	56	56	27	56	27	27	0	29	29
Jumlah		700	700	544	700	544	544	0	156	156	2878	2878	1537	2878	1537	1537	0	1341	1341

Berdasarkan **Tabel 2.84** di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD ke dalam Renja dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dan Renja PD
   a. Jumlah rencana kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 700 kegiatan, sama dengan jumlah kegiatan dalam Renja PD Tahun 2022 adalah 700 Kegiatan.
   b. Jumlah rencana sub kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 2878 sub kegiatan, sama dengan jumlah sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2024 adalah 2878 sub kegiatan.
2. Kesesuaian kegiatan dan sub kegiatan RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 700 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan dalam APBD Tahun 2024 adalah 544 kegiatan. Dengan demikian terdapat 156 kegiatan yang tidak sama antara RKPD dan APBD.
   b. Jumlah rencana sub kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 2878 sub kegiatan, sedangkan jumlah sub kegiatan dalam APBD Tahun 2024 adalah 1537 sub kegiatan. Dengan demikian, terdapat 1341 sub kegiatan yang tidak sama antara RKPD dan APBD.
   c. Kegiatan dan/atau sub kegiatan yang tidak sama tersebut merupakan kegiatan dan/atau sub kegiatan RKPD yang tidak dijabarkan dalam APBD.
3. Kesesuaian kegiatan dan sub kegiatan Renja PD dan APBD
   a. Jumlah rencana kegiatan dalam RENJA PD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 700 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan dalam APBD Tahun 2024 adalah 544 kegiatan. Dengan demikian terdapat 156 kegiatan yang tidak sama antara RENJA PD dan APBD.
   b. Jumlah rencana sub kegiatan dalam RENJA PD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 2878 sub kegiatan, sedangkan jumlah sub kegiatan dalam APBD Tahun 2024 adalah 1537 sub kegiatan. Dengan demikian, terdapat 1341 sub kegiatan yang tidak sama antara RENJA PD dan APBD.
   a. Kegiatan dan/atau sub kegiatan yang tidak sama tersebut merupakan kegiatan dan/atau sub kegiatan RENJA PD yang tidak dijabarkan dalam APBD.

2.3.2.3 Kerangka Pendanaan dalam RKPD, Renja PD dan APBD Tahun 2024

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD. APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan

RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.85.**

Tabel 2. 85 Penjabaran Kerangka Pendanaan dalam RKPD, Renja PD dan APBD Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD	PAGU APBD	SELISIH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	281.854.701.071	341.580.731.340	(59.726.030.269)
2	Dinas Kesehatan	154.424.571.307	176.846.238.353	(22.421.667.046)
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	80.950.913.059	51.075.297.000	29.875.616.059
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	95.051.589.822	83.542.460.082	11.509.129.740
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	10.142.066.597	6.991.176.000	3.150.890.597
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.963.015.055	4.581.062.000	6.381.953.055
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.362.483.072	11.280.070.260	(6.917.587.188)
8	Dinas Sosial	11.315.482.790	7.023.850.000	4.291.632.790
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	10.235.182.833	12.954.647.000	(2.719.464.167)
10	Dinas Lingkungan Hidup	12.242.053.575	11.277.055.300	964.998.275
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.986.532.365	3.867.181.000	1.119.351.365
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.566.667.025	3.831.800.000	1.734.867.025
13	Dinas Perhubungan	10.910.152.600	6.703.547.500	4.206.605.100
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	8.713.735.332	4.603.862.000	4.109.873.332
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.431.255.837	4.295.948.000	1.135.307.837
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.047.612.413	3.487.964.930	559.647.483
17	Dinas Perikanan	11.129.403.829	7.361.300.000	3.768.103.829
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9.772.384.324	6.867.770.000	2.904.614.324
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	25.861.232.405	17.029.085.529	8.832.146.876
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8.480.726.982	9.582.031.121	(1.101.304.139)
21	Dinas Perindustrian Dan Ketenagakerjaan	7.230.107.765	9.084.560.000	(1.854.452.235)
22	Sekretariat Daerah	38.499.451.962	42.158.219.480	(3.658.767.518)
23	Sekretariat Dprd	33.502.045.172	29.766.426.000	3.735.619.172
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.428.699.754	6.268.178.000	3.160.521.754
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	192.155.499.218	166.993.740.900	25.161.758.318

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD	PAGU APBD	SELISIH
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.974.868.265	7.083.193.000	891.675.265
27	Inspektorat Daerah	12.886.446.527	12.784.100.000	102.346.527
28	Kecamatan Bontomatene	7.753.958.893	6.836.203.200	917.755.693
31	Kecamatan Buki	2.022.372.660	2.150.500.000	(128.127.340)
32	Kecamatan Bontomanai	2.404.783.988	2.100.900.000	303.883.988
33	Kecamatan Benteng	9.883.495.465	9.441.544.032	441.951.433
37	Kecamatan Bontoharu	7.112.127.462	6.782.397.140	329.730.322
40	Kecamatan Bontosikuyu	2.312.429.932	1.882.300.000	430.129.932
41	Kecamatan Pasimasunggu	2.345.829.535	1.976.600.000	369.229.535
42	Kecamatan Pasimasunggu Timur	1.978.428.899	1.803.850.000	174.578.899
43	Kecamatan Pasimarannu	1.946.660.529	1.627.449.900	319.210.629
44	Kecamatan Pasilambena	1.807.016.434	2.167.109.000	(360.092.566)
45	Kecamatan Takabonerate	2.229.032.474	1.903.050.000	325.982.474
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	46.411.336.773	34.176.059.167	12.235.277.606
Total		1.156.326.354.000	1.121.769.457.234	34.556.896.766

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 37 Perangkat Daerah yang memiliki anggaran pada APBD yang lebih kecil dari anggaran pada RKPD dan terdapat 9 Perangkat Daerah yang memiliki anggaran pada APBD yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pada RKPD. Beberapa Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dari RKPD ke APBD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sekretariat Daerah.

2.3.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.3.3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh SKPD sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan sarana fasilitas pelayanan masyarakat.
2. Koordinasi SKPD yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
3. Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan.
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
5. Sudah adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP.
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.
7. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan schedule dan tepat waktu serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulannya.
8. Anggaran yang disahkan diakhir tahun sebelumnya sehingga waktu

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat.

9. Koordinasi yang baik antara instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut.
11. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan.

2.3.3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja SKPD antara lain sebagai berikut:

1. Data pembangunan yang belum tersedia secara optimal sehingga menyebabkan sulitnya penentuan fokus dan sasaran pembangunan.
2. Kurangnya SDM teknis terutama pada pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keahlian tertentu.
3. Keterbatasan anggaran untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian visi dan misi RPJMD karena sebagian besar anggaran diarahkan untuk pemenuhan belanja mandatori serta SPM.
4. Keterlambatan perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan fisik baik itu pengadaan ataupun kegiatan pembangunan dan rehabilitasi.
5. Kurangnya kepedulian dan perhatian dari sebagian perencana OPD untuk menyusun dokumen perencanaan secara benar dan tepat waktu
6. Kurangnya kepeduliam dan perhatian terhadap penyusunan dokumen evaluasi Pembangunan daerah dari masing-masing perangkat daerah.

2.3.3.3 Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
4. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten di dalam perencanaan.
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten.
6. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan.
7. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf.
8. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

9. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik.
10. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.

2.3.3.4 Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa yang Akan Datang

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang masih berkinerja rendah dan sangat rendah agar dilakukan evaluasi terkait permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga target RPJMD juga dapat tercapai.
2. Kepala Perangkat Daerah agar senantiasa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja masing-masing setiap triwulan.
3. Capaian kinerja RKPD yang disajikan belum optimal sehingga dibutuhkan penelaahan lebih lanjut. Olehnya itu, seluruh stakeholder agar menyajikan capaian program dan kegiatan perangkat daerah.
4. Dalam membuat laporan evaluasi hasil program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah agar meminimalkan peran tenaga honorer/operator dan memaksimalkan peran pejabat yang betul memahami terkait penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
5. Melakukan pengawalan secara ketat terhadap penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sehingga program dan kegiatan yang tidak selaras dengan RPJMD dapat terdeteksi sejak dini.
6. Melakukan penelaahan terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkhusus pada formulasi indikator kinerja, karena masih banyak pernyataan indikator yang tidak tepat pada program, kegiatan, sub kegiatan.
7. Dalam melaksanakan setiap kegiatan fisik harus dengan perencanaan yang matang baik itu dari efisiensi waktu maupun lokasi pekerjaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat guna.
8. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dianalisis apakah dapat berkontribusi pada pencapaian target pada RPJMD Tahun 2025-2029.

2.3.4 Review Capaian Kinerja RPJMD

Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2024 berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, sebagaimana yang termuat dalam **Tabel 2.86.**

Tabel 2. 86 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Prioritas RPJMD Tahun 2024

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10
Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia											
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan											
Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	68		60,55		89,04		belum tercapai		
Sasaran 1: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	75		80,74		107,65		melampaui		
		Nilai Sakip Daerah	70		61,88		88,40		belum tercapai		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,943		72,32		97,81		belum tercapai		
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas (%)	100	1.039.257.745	100	695.998.300	100,00	66,97	Sesuai	Sedang	Diskominfo SP
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	4.659.093.380	100	4.457.587.117	100,00	95,67	Sesuai	Sangat Tinggi	Setda
		Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100		100		100,00		Sesuai		
3	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (%)	99,60	1.185.910.106	96,92	1.423.488.090	97,31	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	BKPSDM
		Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	100		99,97		99,97		belum tercapai		
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	15 menit	479.628.975	15,00	231.417.160	100,00	48,25	Sesuai	SR	Semua Kecamatan
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	90	2.556.229.840	100	911.448.329	100,00	35,66	Sesuai	SR	Bappelitbangda
6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,3	3.402.223.651	2,52	3.507.694.000	76,36	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Itda
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	5	162.550.412.632	4,08	141.355.014.741	81,60	86,96	belum tercapai	Tinggi	BPKPD
8	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el (%)	99	284.703.169	94,07	241.403.420	95,02	84,79	belum tercapai	Tinggi	Disdukcapil
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	36		52,64		100,00		Sesuai		
9	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	420.643.348	100	1.035.747.188	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Satpol PP, Damkar
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (%)	100		100		100,00		Sesuai		

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	0,26	140.273.459	0,26	90.913.400	100,00	64,81	Sesuai	Rendah	DP3AP2KB
11	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi (%)	100	3.484.136.731	100	347.237.630	100,00	9,97	Sesuai	SR	Diskominfo SP
12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	90	1.353.586.928	100	534.837.600	100,00	39,51	Sesuai	SR	Bappelitbangda
13	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah (%)	100	903.191.258	100	344.412.675	100,00	38,13	Sesuai	SR	Bappelitbangda
14	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	100	17.603.387.285	100	12.588.186.268	100,00	71,51	Sesuai	Sedang	Setwan
		Rata-rata capaian kinerja					97,24	67,30			
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi	Sedang			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh predikat WTP selama 6 kali berturut-turut 2. Peningkatan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dan Pelaksanaan SPBE pada aspek perencanaan, penganggaran, monev serta pengadaan barang dan jasa 3. Kewajaran tarif dan biaya layanan pada pelayanan publik oleh OPD sudah optimal yang mendapatakan penilaian tertinggi dari masyarakat 4. Peningkatan kompetensi SDM perencana melalui pelatihan teknis penyusunan SAKIP 5. Penyempurnaan formulasi IKU Perangkat Daerah yang searah dan sinergi dengan IKU daerah melalui perubahan Renstra Perangkat Daerah 6. Pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 7. Penerapan SIPD yang menjamin konsistensi dan integrasi antara perencanaan dan penganggaran 8. Pemenuhan mandatory spending dan penganggaran program dan kegiatan yang berhubungan dengan SDM 9. Ketepatan waktu penetapan APBD sesuai peraturan perundang-undangan									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. 6 Unsur pelayanan yang diperoleh masyarakat masih pada kategori kurang baik yaitu (i) kesesuaian persyaratan pelayanan, (ii) kemudahan prosedur/alur pelayanan, (iii) waktu pelayanan, (iv) kesesuaian jenis layanan, (v) kualitas sarana dan prasarana, dan (vi) penanganan pengaduan pengguna layanan. 2. Penerapan e-government teritegrasi belum optimal 3. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum didasari dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); Belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi; Belum memadainya upaya Pengembangan SDM dalam keikutsertaan pada diklat/bimtek. 4. Dari 318 usulan formasi PPPK ditetapkan 314 formasi dan terealisasi sebanyak 258. karena terdapat formasi yang kurang pendaftarnya dan ada formasi yg tidak ada pendaftarnya (kosong).									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		Optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi birokrasi serta pemantapan infrastruktur dan sistem e-government									
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan											
Tujuan 2 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan		Rasio Gini	0,32		0,329		98,46		belum tercapai		
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan		Indeks Desa Membangun	0,7		0,719		102,71		melampaui		
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%)	73,19	38.608.473.302	54,58	32.081.693.735	74,57	83,09	belum tercapai	Tinggi	Dis PUTR

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Proporsi panjang jalan desa yang terbangun (%)	85		0		0,00		belum tercapai		
		Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten (%)	99		79,38		80,18		belum tercapai		
16	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	3,7	249.375.039	0	241.403.420	0,00	96,80	belum tercapai	Sangat Tinggi	DISPMD
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100	722.148.549	100	241.965.800	100,00	33,51	Sesuai	SR	DISPMD
18	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33	841.640.755	33,33	1.179.999.400	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	DISPMD
19	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian (%)	100	6.385.470.299	87,5	1.917.249.448	87,50	30,03	belum tercapai	SR	Distan KP
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	9.567.515.547	98,85	7.621.817.116	98,85	79,66	belum tercapai	Tinggi	Semua Kecamatan
21	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	4,5	297.335.833	82,99	67.717.800	100,00	22,77	Sesuai	SR	DPK
22	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1,3	3.034.062.969	7,9	3.648.041.669	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	DLH
23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana (%)	100	1.110.774.090	99,83	1.039.361.048	99,83	93,57	belum tercapai	Sangat Tinggi	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100		99,23		99,23		belum tercapai		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100		96,67		96,67		belum tercapai		
24	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	60	171.653.152	66	3.381.359.500	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja							81,20	73,94			
Predikat Kinerja							Tinggi	Sedang			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pelaksanaan program Gerbangsari dengan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar OPD untuk meningkatkan kuaifikasi desa 2. Perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan potensi desa masing-masing serta memperhatikan kriteria-kriteria IDM									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Banyak pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jalan yang tidak selesai karena kurangnya peralatan konstruksi serta keterlambatan distribusi bahan terkhusus di wilayah kepulauan 2. Data Jalan desa yang tidak akurat/ tidak tersedia 3. Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat)									

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		1. Pemerataan infrastruktur di wilayah terpencil dan wilayah kepulauan 2. Penyediaan data kondisi eksisting ketersediaan infrastruktur dasar seperti kondisi jalan, masyarakat yang terlayani air minum, listrik dan sebagainya 3. Penyediaan sarana prasarana tanggap darurat bencana									
Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan		Tingkat Kemiskinan	10		10,79		92,10		belum tercapai		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,2		2,05		106,82		melampaui		
25	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2	602.656.343	3,01	837.749.794	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Disperinaker
26	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	31,5	172.484.402	52,49	21.868.000	100,00	12,68	Sesuai	SR	Disperinaker
27	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)	100	613.187.296	83,12	1.411.795.000	83,12	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Disdagkum
28	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	26,27	223.398.472	21,46	35.112.400	81,69	15,72	belum tercapai	SR	Distan KP
29	Program Kawasan Permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh (%)	4,22	977.134.526	6,32	113.867.600	100,00	11,65	Sesuai	SR	DPKP
30	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) (%)		1.037.815.786		877.712.400		84,57		Tinggi	DP3AP2KB
		BKB	0,7386		25,13		100,00		Sesuai		
		BKR	0,6136		10,22		100,00		Sesuai		
		BKL	0,6156		10,26		100,00		Sesuai		
		PIK R	0,5119		5,76		100,00		Sesuai		
		UPPKS	0,909		90,81		100,00		Sesuai		
		Rata-rata capaian kinerja					96,48	54,10			
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pemberian bantuan peralatan bagi petani, nelayan, dan UMKM. 2. Pelaksanaan proyek-proyek padat karya 3. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan pada masyarakat									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja. 2. Lapangan pekerjaan belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan tenaga kerja 3. Belum optimalnya ketersediaan dan keakuratan data masyarakat miskin by name by adress yang akan menjamin ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial 4. Hilirisasi produk sumber daya alam yang belum optimal									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		1. Memperkuat hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja 2. Mendatangkan investasi terutama pada pengolahan dan pengelolaan sektor unggulan									
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat											

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	69		71,98		104,32		melampaui		
Sasaran 4: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat		Indeks Pendidikan	55,83		63,97		114,58		melampaui		
		Indeks Kesehatan	68,99		82,28		119,26		melampaui		
31	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (%)	100	48.727.074.912	93,14	67.038.735.972	93,14	84,57	belum tercapai	Tinggi	Disdikpora
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (%)	100		44,78		44,78		belum tercapai		
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100		93,78		93,78		belum tercapai		
32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi (%)	42,15	270.156.292	73,28	828.166.200	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Dinsos
33	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100	6.634.415.089	100	1.830.962.300	100,00	27,60	Sesuai	SR	Dinsos
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	21,32		53,6		100,00		Sesuai		
34	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	311.718.798	100	236.560.100	100,00	75,89	Sesuai	Tinggi	Dinsos
35	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	92	11.664.546.419	100	6.518.075.854	100,00	55,88	Sesuai	Rendah	Dis PUTR

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (%)									
		Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (%)	45		100		100,00		Sesuai		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1,92		3,89		100,00		Sesuai		
36	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100	12.681.410.025	59,01	3.793.697.076	59,01	29,92	belum tercapai	SR	Dis PUTR
37	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	9.302.966.518	0	95.070.000	0,00	1,02	belum tercapai	SR	Dis PUTR
38	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	623.437.596	100	105.409.700	100,00	16,91	Sesuai	SR	DPKP
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100		100		100,00		Sesuai		
39	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	3,42	2.691.172.291	1,84	3.348.540.500	53,80	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	DPKP
40	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (%)	100	232.335.796	96,67	437.373.298	96,67	75,89	belum tercapai	Tinggi	Satpol PP, Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,61		85		100,00		Sesuai		
41	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan (%)	45,45	971.523.588	51,45	36.166.100	100,00	3,72	Sesuai	SR	Distan KP
42	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	80	3.118.103.396	59,1	4.257.745.218	73,88	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	36/100.000 Penduduk	80.000.000	13,8/1000 Penduduk	8.186.914.300	38,33	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Dinkes

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
44	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	100	99.436.783.152	100	75.433.552.258	100,00	75,86	Sesuai	Tinggi	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		98,92		98,92		belum tercapai		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan(%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		90,73		90,73		belum tercapai		
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		60,28		60,28		belum tercapai		
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		70,93		70,93		belum tercapai		
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (%)	100		100		100,00		Sesuai		
		Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		73,87		73,87		belum tercapai		
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100		100		100,00		Sesuai		
45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama	22.838.257.664	Utama	4.724.909.738	100,00	20,69	Sesuai	SR	RSUD K.H. Hayyung
				Rata-rata capaian kinerja			87,45	57,86			
				Predikat Kinerja			Tinggi	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pembangunan dua universitas baru di Kepulauan Selayar yang meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 19-24 tahun pada tahun 2022 2. Pemenuhan mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBD 3. Jaminan Kesehatan Gratis bagi seluruh lapisan masyarakat miskin 4. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Jampea,									

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Penurunan angka partisipasi sekolah siswa tingkat SD, SMP, dan SMA pada tahun 2022 2. Tidak tersedianya data anak tidak bersekolah/ Putus sekolah yang rinci berbasis nama dan alamat 3. Kekurangan dokter ahli/spesialis 2. Fasilitas kesehatan belum memiliki peralatan yang lengkap									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		1. Pengentasan anak tidak sekolah serta peningkatan partisipasi sekolah 2. Optimalisasi ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan terkhusus di wilayah terpencil 3. Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara merata									
Sasaran 5 : Maningkatnya Daya Beli Masyarakat		Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	9.700.000		10.235.000		105,52		melampaui		
46	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	100	467.578.197	86,00	1.905.050.000	86,00	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Disdagkum
		Rata-rata capaian kinerja					86,00	100,00			
		Predikat Kinerja					Tinggi	Sangat Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. PDRB per kapita masyarakat meningkat signifikan 2. Berkurangnya masyarakat yang tidak bekerja									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		Kenaikan inflasi									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		Penguatan produksi dan produktivitas bahan makan penyumbang inflasi terbesar									
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman											
Tujuan 4 : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,5-8		3,33		51,23		belum tercapai		
		PDRB / Kapita (Rp. Juta)	55		58,29		105,98		melampaui		
Sasaran 6 : Meningkatnya Usaha Perikanan		Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	28		23,83		85,11		belum tercapai		
47	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	28	261.688.857	25	59.531.500	89,29	22,75	belum tercapai	SR	Dinas PMPTSPTK
48	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	25.481	4.181.610.110	25.610,4	1.392.480.238	100,00	33,30	Sesuai	SR	Disper
49	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.139,30	1.433.906.472	507,97	175.148.597	44,59	12,21	belum tercapai	SR	Disper
50	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100	1.589.229.922	100	2.310.842.464	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Setda
51	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	201,49	1.267.112.500	248,00	1.545.643.300	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Disper
52	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional (%)	45	51.251.500	10,79	56.034.000	23,98	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Disperinaker
		Rata-rata capaian kinerja					76,31	61,38			

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Predikat Kinerja					Tinggi	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap akibat pengadaan peralatan penangkap ikan bagi nelayan. 2. Meningkatnya produk olahan hasil perikanan akibat pemberdayaan UKM dan IKM pengolahan hasil perikanan. 3. Meningkatnya kualitas SDM pengolah hasil perikanan yang telah mendapatkan pengetahuan melalui bimbingan teknis yang rutin dilakukan serta pemberian sarana/prasarana pengolahan ikan									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Belum terciptanya industri perikanan skala besar 2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan perikanan, pabrik es, dsb. 3. Curah hujan yang rendah dan suhu air laut yang tinggi akibat El-Nino menyebabkan kematian massal rumput laut, kegagalan panen udang vaname, dan terhambatnya pertumbuhan ikan bandeng dan udang windu 4. Pelaku IKM tidak memahami cara pendaftran usaha dalam aplikasi SIINAS									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		1. Mendatangkan investasi di sektor perikanan 2. Penguatan kelembagaan nelayan-nelayan kecil 3. Inventarisasi dan pemberdayaan terhadap IKM									
Sasaran 7 : Meningkatnya usaha pariwisata		Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	6,41		3,5		54,60		belum tercapai		
53	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD (%)	7	1.441.585.251	3,5	710.769.521	50,00	49,30	belum tercapai	SR	Disparbud
54	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5	334.578.177	141,72	779.660.200	100,00	100,00	Sesuai	Sangat Tinggi	Disparbud
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar (%)	10		-13,8		0,00		belum tercapai		
		Tingkat huniaan akomodasi (%)	10		4,35		43,50		belum tercapai		
55	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan (%)	100	1.156.038.257	100	256.170.000	100,00	22,16	Sesuai	SR	Disparbud
56	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)	21	187.031.279	66,6	131.647.000	100,00	70,39	Sesuai	Sedang	Disdagkum
57	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)	100	155.859.399	100	52.058.200	100,00	33,40	Sesuai	SR	Disdagkum
58	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja (%)	18	3.218.736.107	4,5	3.273.444.011	25,00	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Disperinaker
		Rata-rata capaian kinerja					64,81	62,54			
		Predikat Kinerja					Rendah	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pelaksanaan beberapa event di Kepulauan Selayar seperti festival Taka Bonerate yang meningkatkan kunjungan wisatawan									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Beberapa daya tarik wisata belum terkelola dengan baik, baik itu dari segi fasilitas mapun pengelolaan keuangan dan pendapatan. 2. Faktor keamanan akibat konflik dunia mempengaruhi jumlah wisatawan dari eropa dan sekitarnya untuk datang. 3. Aksesibilitas udara yang belum optimal dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid 19 mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan									

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		1. Meningkatkan promosi wisata 2. Investasi sektor pariwisata 3, Mempercepat realisasi KEK Bira-Takabonerate									
Sasaran 8 : Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan		Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	15		13,57		90,47		belum tercapai		
59	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	67.000	335.173.560	28.462	425.673.039	42,48	100,00	belum tercapai	Sangat Tinggi	Dinas PMPTSPTK
60	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100	19.700.628	100	19.086.000	100,00	96,88	Sesuai	Sangat Tinggi	Dinas PMPTSPTK
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Lalu lintas Kabupaten (%)	30,85	1.740.500.120	26,83	580.811.100	86,97	33,37	belum tercapai	SR	Dishub
62	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi (%)	63,94	1.548.203.364	44,83	453.826.316	70,11	29,31	belum tercapai	SR	Dishub
		Rata-rata capaian kinerja					74,89	64,89			
		Predikat Kinerja					Sedang	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bantuan peralatan 2. Pelaksanaan beberapa event di Kepulauan Selayar 3. Penambahan rute dan frekuensi penyeberangan dari dan ke Selayar 4. Pelaksanaan promosi potensi penanaman modal melalui pelaksanaan investment forum									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Pelayanan penerbangan bandara aroeppala masih belum berjalan optimal akibat harga tiket yang mahal 2. Terbatasnya anggaran yang ada; dan Terjadinya Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada Tambatan Perahu layak fungsi.									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		1. Penguatan aksesibilitas baik dari jalur darat, laut dan udara 2. Optimalisasi pemberdayaan UMKM									
Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan											
Tujuan 5 : Meningkatkan aktualisasi nilai budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	48				0		belum tercapai		
Sasaran 9 : Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial		Indeks Ketahanan Sosial	0,71		0,7694		108,37		melampaui		
63	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan (%)	100	279.519.631	100	50.000.000	100,00	17,89	Sesuai	SR	Badan Kesbangpol
64	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	100	150.664.086	0	127.142.900	0,00	84,39	belum tercapai	Tinggi	Disparbud

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
65	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0	690.761.343	0,00	328.289.300	100,00	47,53	Sesuai	SR	Semua Kecamatan
		Rata-rata capaian kinerja					66,67	49,93			
		Predikat Kinerja					Sedang	SR			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		1. Pelaksanaan program Gerbangsari dengan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar OPD 2. Perumusan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemukiman pada desa sasaran 3. Kesadaran masyarakat desa dalam menjaga konflik serta toleransi yang baik antar pemeluk agama									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya tidak dianggarkan pada tahun 2023									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		Memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan serta perumahan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat									
Tujuan 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan keagamaan		Indeks Kesalehan Sosial	67,3		77,87		115,71		melampaui		
Sasaran 10 : Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan		Angka Kriminalitas	105		389		0,00		belum tercapai		
66	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan (%)	100	279.519.631	100	50.000.000	100,00	17,89	Sesuai	SR	Badan Kesbangpol
67	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1	774.786.100	0,59	245.765.400	100,00	31,72	Sesuai	SR	Semua Kecamatan
		Rata-rata capaian kinerja					100,00	24,80			
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi	SR			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian		Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, penegak hukum dan tokoh masyarakat									
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban 2. pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku belum optimal									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya		Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan dan ketertiban umum									
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
Tujuan 7 : Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,14		67,65		102,28		melampaui		
Sasaran 11 : Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta		Indeks Kualitas Air	56		52,22		93,25		belum tercapai		
		Indeks Kualitas Udara	85,59		94,56		110,48		melampaui		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,56		44,39		93,33		belum tercapai		

No	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Target capaian Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024		Realisasi Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Tingkat Capaian Target RPJMD tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
meningkatnya mitigasi lingkungan											
68	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2.057.344.068	3,91	536.832.870	100,00	26,09	Sesuai	SR	DLH
69	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,38	1.828.750.283	1,4	1.603.666.065	100,00	87,69	Sesuai	Tinggi	DLH
70	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	66	119.492.206	47,14	3.000.000	71,42	2,51	belum tercapai	SR	DLH
Rata-rata capaian kinerja							90,47	38,77			
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	SR			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian	1. Peran pelaku usaha dalam mengelola limbah 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai 3. Pengelolaan persampahan yang semakin baik ditandai dengan peningkatan volume pengurangan sampah serta peningkatan volume sampah yang ditangani 4. Pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat 5. Pengadaan bibit penghijauan untuk kelompok masyarakat ataupun penghijauan di lokasi hutan rakyat										
Faktor penghambat pencapaian kinerja	1. Kurangnya ruang terbuka hijau baik itu privat maupun publik 2. Peningkatan laju penduduk mengakibatkan kebutuhan pemanfaatan ruang meningkat 3. Beberapa pelaku usaha belum taat dalam menjalankan usaha dengan berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan 4. Pengelolaan persampahan terpusat pada Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pengelolaan persampahan pada dinas PUTR tidak dilaksanakan										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya	1. Peningkatan ketaatan terhadap RTRW untuk menekan alih fungsi lahan 2. Pembangunan Ruang terbuka hijau 3. Pembinaan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha maupun perorangan untuk mengelola sampah dan limbah untuk pencegahan pencemaran air										
Rata-rata capaian kinerja (Total)							83,77	59,59			
Predikat Kinerja							Tinggi	Rendah			

Berikut disajikan hal-hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada **Tabel 2.87.**

Tabel 2. 87 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Kepulauan Selayar

Kondisi Internal Daerah		**Kondisi Eksternal Daerah**	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Faktor fisik Alami : 1. Komoditas andalan sub sektor tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan padi; 2. Masih tersedia lahan untuk perluasan; 3. Komoditas tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah-buahan, dan sayuran; 4. Komoditas yang berpotensi besar untuk sub sektor perkebunan adalah kelapa dalam *(coconut)*, kemiri, pala, cengkeh, dan jambu mete; 5. Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan masih luas; 6. Produk potensial dari sub sektor kehutanan baru berupa rotan; 7. Adanya hutan produksi dan hutan semak belukar memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi komoditas lainnya; 8. Komoditas potensial untuk sub sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik; 9. Selayar dikelilingi laut dalam yang dapat dilayari berbagai ukuran kapal; 10. Adanya kawasan pantai-pantai yang strategis; 11. Ikan laut, budidaya pantai (rumput laut) dan ikan tambak yang tersebar di 7 kecamatan; 12. Luasnya lahan budidaya tambak, sebagian besar di Bontoharu, Bontosikuyu dan Pasimasunggu; 13. Keberadaan taman laut dan terumbu karang di 7 kecamatan; 14. Taman laut di Takabonerate memiliki keunggulan kompetitif berskala international; 15. Adanya pantai laut dan pasir putih di Bontomatene, Bontoharu,	Faktor Fisik : 1. Sebaran batuan permukaan yang relatif besar menyebabkan potensi pengembangan sangat terbatas (khususnya bagian Utara); 2. Kondisi hidrologi sangat terbatas karena kurangnya *catchment area*, luasan DAS sangat sempit dan luasnya sebaran batuan permukaan yang kedap air; dan 3. Terbatasnya areal garapan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan meskipun tingkat kesuburan tanahnya relatif baik khususnya di bagian Utara, Faktor Non Fisik 1. Masih rendahnya kualitas pengelola pembangunan dalam upaya percepatan pembangunan; 2. Potensi tenaga kerja terampil masih relatif kurang; 3. Tingginya biaya transportasi dalam pemasaran hasil produksi; dan 4. Layanan sarana transportasi masih terbatas terhadap wilayah-wilayah permukiman, Faktor Sarana dan Prasarana : 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih sangat rendah 2. Peningkatan Pelayanan transportasi regional seluruh wilayah	Faktor Sumber Daya Alam : 1. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi pengembangan Sumber Daya Alam, dengan ditetapkannya beberapa blok pengembangan migas di Selayar (blok karaeng, blok selayar dan blok kambuna) oleh pemerintah pusat; 2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi Perkebunan, terbukti dengan ditetapkannya Kawasan Strategis pengembangan sentra pertanian dan perkebunan dalam RTRW Provinsi Sulsel (Perda Nomor 3 Tahun 2022); dan 3. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Taman Nasional Takabonerate yang berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata, dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata Takabonerate, 4. Letak strategis Kabuupaten Kepulauan Selayar yang berada diantara ALKI II dan ALKI III 5. Penetapan Selayar sebagai salah satu daerah destinasi	Faktor Pendukung Lainnya: 1. Minimnya dukungan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Minimnya minat investor terhadap pengembangan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Minimnya informasi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada dunia investasi; 4. Belum kuatnya regulasi pendukung untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 5. Minimnya minat Sumber Daya Manusia untuk memberikan dukungan terhadap potensi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar,

Kondisi Internal Daerah		Kondisi Eksternal Daerah	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu; 16. Adanya hutan wisata di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu, dan Pasimasunggu; 17. Adanya air terjun di pegunungan di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu; 18. Adanya taman buru di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Pasimasunggu; Faktor Sarana dan Prasarana : 1. Ada jalan provinsi (42,64 km) yg menghubungkan antara Tanabau-Ngapaloka-Patumbukang; 2. Adanya penyeberangan fery dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira dan yang menghubungkan setiap kecamatan kepulauan; 3. Adanya penyeberangan langsung dari Pelabuhan Bira ke Pelabuhan di Nusa Tenggara Timur transit di Pulau Jampea; 4. Ada tambatan perahu (untuk nelayan) yang tersebear di hampir seluruh desa yang memiliki pantai; 5. Adanya Bandar Udara di Kab, Kepulauan Selayar yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi dengan Kepulauan Selayar; Faktor Pendukung Lainnya: 1. Adanya tempat pelelangan ikan; 2. Adanya tambak ikan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan; 3. Adanya industri rumah tangga untuk pengeringan hasil laut (ikan kering, teripang, cumi kering, rumput laut, sirip ekor hiu; dan 4. Adanya industri kecil dan rumah tangga pengolah hasil pertanian lokal (VCO, minyak goreng, pengupasan/ pembersihan biji-bijian, kopra, krupuk, dan gula merah, 5. Pelaksanaan bantuan kepada masyarakat miskin	Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Perlu perluasan aksesibilitas ke luar Kepulauan Selayar khususnya ke arah selatan (Pulau Nusatenggara, Jawa, dan sekitarnya); 4. Sarana transportasi untuk penangkapan ikan masih tradisional; 5. Perlu aksesibilitas ke arah selatan (ke luar Sulawesi) untuk pemasaran; dan 6. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi, Faktor Sumber Daya Manusia: 1. Perlu upaya peningkatan mutu SDM (penguasaan bahasa, pengetahuan, ketrampilan, dan manajemen pariwisata; 2. Perlu ditekankan dan diupayakan penguatan nilai, norma agama, dan budaya lokal; 3. Tingkat penguasaan IPTEK untuk para nelayan karena masih kurang/ tradisional; dan 4. Perlu upaya pembinaan, pelatihan bidang pertanian (karena umumnya pendidikan SD-SLTP) Faktor Penghambat Lainnya: 1. Perlu penyediaan fasilitas pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, dan pusat pelayanan informasi kepariwisataan; dan 2. Jaringa irigasi yang memadai masih terbatas, sehingga produksi pertanian tidak maksimal	pariwisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan	

2.4 Capaian Indikator Pembangunan

2.4.1. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dengan berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, sehingga data capaian yang disajikan adalah data capaian SPM tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebgai berikut:

2.4.1.1 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 belum maksimal yaitu masing-masing untuk PAUD sebesar 93,78 persen, Pendidikan Dasar sebesar 93,14 persen, dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 44,78 persen, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.88**.

Tabel 2. 88 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	98,42	99,60	88,46	94,44	93,78
2	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	99,00	79,01	65,5	90,02	93,14
3	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	98,2	92,84	78,74	52,26	44,78

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian target SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

- Rendahnya persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) disebabkan karena Meningkatnya Angka putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencapai 1.255 siswa dan kurangnya pemerataan guru, faktor ekonomi keluarga serta faktor

budaya, dimana masih ada orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 12 tahun;

- Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD hanya mencapai 94,44 persen disebabkan karenatenaga pendidik secara formal di PAUD masih terdapat guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan S-1 serta masih kurangnya jumlah sekolah PAUD yang terakreditasi;
- Rendahnya persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan disebabkan oleh masih kurangnya satuan pendidikan kesetaraan serta pencapaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai angka 8,35 Tahun sebagai indikasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- Pengukuran rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional dilaksanakan mulai tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga data tahun 2018-2021 masih kosong.

2.4.1.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

Sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, pembangunan di bidang kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tapi juga Pemerintah Daerah. Namun demikian mengingat kebutuhan kesehatan yang vital dan kompleks, serta perbedaan kemampuan sumber daya pemerintah daerah di seluruh Indonesia, maka peran pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk pelaksanaan SPM tersebut, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Permenkes ini sudah mengakomodir konsep baru SPM sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan dan kinerja Pemerintah Daerah. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Tabel 2.89.**

Tabel 2. 89 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mendapatkan layanan kesehatan	80,8	85,66	76,3	78,34	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan layanan kesehatan	76,19	76,84	76,4	75,88	98,92
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan layanan kesehatan	79,25	80,9	80,04	79,41	100

No.	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Pelayanan Kesehatan Balita mendapatkan layanan kesehatan	63,08	57,3	54,08	64,37	90,73
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19,8	43,9	68,97	85,90	60,28
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	87,8	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	43,88	43,88	50,9	100	70,93
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	92,9	100	100	100	100
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	91,9	100	100	100	100
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	100	100	100
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	60,65	73,87
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	92,9	100	85,56	70,85	100

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data **Tabel 2.89**, secara umum pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 belum mencapai target disebabkan karena pelayanan untuk pemeriksaan spesimen di laboratorium puskesmas atau laboratorium TCM terutama di desa terpencil dan wilayah kepulauan terhambat oleh akses sehingga banyak warga terduga TBC yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebagai populasi kunci sulit untuk dijangkau terutama pada desa terpencil di wilayah kepulauan, *Rapid Diagnostic Test* (RDT) HIV sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk pustu yang ada di desa terpencil, serta keterlambatan pemasukan laporan capaian SPM dari UPT di wilayah kepulauan.

2.4.1.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Target dan pencapain SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan dua indikator kinerja, yaitu: Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2. 90 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	48,30	53,79	58,23	76,00	59,01
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80	90	0	100	0

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dengan memperhatikan data di atas, realisasi kinerja pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum masih rendah dikarenakan belum adanya data konprehensif terkait jumlah rumah tangga yang belum mempunyai sarana air bersih yang baik yang bersumber dari PDAM, sumur gali, sumur bor/ dalam atau sumber air bersih. Terkait data jumlah unit pengolahan setempat komunal belum tersedia. Pengumpulan data real BNBA terkendala masalah anggaran, untuk kegiaan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) yang dibangun dengan belanja modal, belum/tidak tersedia anggaran pemeliharaannya, sinergi yang belum maksimal antara seluruh stakeholder pengelola pelayanan dasar sanitasi dan air minum (perangkat daerah, BUMD, kementerian terkait dan kelompok pengelola) serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait pengelolan sanitasi dan air minum.

2.4.1.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

aksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat dilihat pada **Tabel 2.91.**

Tabel 2. 91 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 (Tidak Ada Variabel)	100 (Tidak Ada Variabel)	86,22	98	100
2.	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	100 (Tidak Ada Variabel)	100 (Tidak Ada Variabel)	Tidak Ada Variabel	100

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi tingkat capaian SPM biang perumahan antara lain adalah pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan dilakukan setelah adanya SK penetapan bencana sehingga pemberian bantuan bisa terlambat, adanya persyaratan bahwa pemberian bantuan

pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), belum adanya kajian resiko bencana dalam bentuk peraturan daerah tentang penentuan lokasi daerah rawan bencana, dan kurangnya/tidak adanya lahan untuk relokasi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

2.4.1.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tugas dan fungsinya, berwenang melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang proses pelaksanaan serta pelaporan capaian hasilnya beradasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
b. Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Sedangkan Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

a. Tingkat waktu tanggap *(response time)* 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi masyarakat yang menjadi korban kebakaran; dan
f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi masyarakat yang terdampak Kebakaran

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dapat dilihat pada **Tabel 2.92.**

Tabel 2. 92 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	89,06	92,68	100	96,67

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data di atas menggambarkan bahwa realisasi kinerja pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2024 sebesar 100 persen karena tidak ada warga yang terdampak akibat penegakan hukum, sedangkan realisasi kinerja pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran tahun 2024 sebesar 96,67 persen untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Faktor penghambat tidak maksimalnya kinerja layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah karena keterbatasan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran khususnya di wilayah kepulauan.

2.4.1.6 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM Bidang Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, meliputi Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penaggulangan Bencana di gambarkan pada **Tabel 2.93.**

Tabel 2. 93 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja SPM	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layananan Informasi Rawan Bencana	99,90	100	100	100	99,83
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	93	74,52	100	100	99,23
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75,10	89,99	87,30	100	99,77

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang trantibum sub urusan bencana daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain masih kurangnya tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dan kompeten

dibidang kebencanaan, belum terwujudnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang seharusnya menjadi prioritas terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, belum akuratnya data penduduk yang berada di wilayah rawan bencana terkait pemenuhan SPM, minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan, belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai, belum terpenuhinya peralatan dasar dan pendukung dalam rangka penguatan kelembagaan/ kesiapsiagaan terhadap bencana, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat bencana) seperti minimnya kendaraan operasional (mobil rescue) yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah terdampak bencana serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang kebenanaan.

2.4.1.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis SPM Bidang Sosial terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dapat dilihat pada **Tabel 2.94.**

Tabel 2. 94 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan (Indikator SPM)	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18,99	19,5	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	31,99	100	98,59	100	100
3	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	13,35	17,5	98,99	100	100
4	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	25	0	100	100	100
5	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa faktor penghambat pencapaian SPM bidang sosial adalah masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendamping khususnya tenaga pendamping di lapangan sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas, belum tersedianya rumah singgah yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan SPM Bidang Sosial serta belum optimalnya pengumpulan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

2.4.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Kinerja pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten Kepulauan Selayar diukur dari capaian indikator program pembangunan tahun 2024 yang mendukung pencapaian TPB. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut (**Tabel 2.95**).

Tabel 2. 95 Capaian Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pilar Pembangunan Sosial							
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	12,48	12,45	12,24	12,27	10,79
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	30,80	43,31	100	89,22	98,81
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	43,31	18,99	100	41,63	36,72
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	12,63	18,99	20	100	23
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	RT	6.597	6.597	7.728	6.692	7.545
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	75,11	75,11	79,62	98,4	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	53,79	69,7	70,3	70,5	88,4
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	79,07	56,65	72,52	59,50	59,2
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	48,3	53,79	58,23	6,85	7,22
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	24,52	74,94	45	59	10

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	18,73	18,73	27,39	24,62	24,58
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	99,29	99,01	98,60	82,38	98,13
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	79,83	80,74	80,15	69,42	82,22
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	71,77	85,98	89,80	91,45	93,25
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana						
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi/Desa	5	5	1	9	11
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	%	82,9	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	9051	4813	100	100	100
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapa pendidikan layanan khusus	Lokasi/Desa	5	5	2	9	13
1.5.1.(e)	Indeks Resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	Poin	155	155	151,12	142,83	133,58
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun						
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%		1,58	1,57		
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	0,09	6,30	5,77	6,24	18,48
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%		39,8	32,45		
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	%		0,85	0,75		
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remajaperempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	45	27,7	32,1	31,3	18,3 (EPPGBM)
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	%		21,9	17,59	14,55	13,8
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%		68,6	18,38	13,3	8,94
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%		58,40	61,40	66,7	72,60
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	%		79,8	76,9	81,40	79,80
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	kematian per 100.000 kelahiran hidup		324	3	6	286,7
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	85,5	75,1	79,60	98,4	100

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	75,1	69,8	75,70	98,4	99,48
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.						
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1000 kelahiran hidup	9	3,7	6,06	14,8	10,3
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	per 1000 Penduduk		0,10	0,08	0,07	0,009
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,05	0,071	0,96	0,0068	0,4
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Per 100.000 penduduk	78	159	158	335	334
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%		16,35	14,4	39,31	16,1
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%		78,2	72,84	65,97	54,27
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	70,39	56,65	72,5	59,50	59,2
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	15,25	15,25	19,73	30,6	32,9
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	1,7	1,58	0,025	1,4	3,75
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	2,09	2,01	2,30	1,9	2,10
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	%	0,3	0,3	0,17	2,8	13,5
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	99,7	99,7	100	83,23	98,81
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua							
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%		63,83	68,31	65,49	66,90
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%		65,38	60,00	60,00	57,89
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	118	106,82	98,22	95,45	98,45
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	118	90,63	79,96	95,45	82,83
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	68	68	100,40	98,36	93,78
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan						

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi						
	(1) SD/MI/ sederajat			99,29	73,66	98,31	85,69
	(2) SMP/MTs/ sederajat			79,83	56,2	74,54	63,04
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	88	91,62	95,21	93,08	93,08
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	94	99,57	97,72	93,08	85,72
Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan							
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	0,013	0,12	0,15	0,0003	0,03
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	100	100
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan						
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Usia		22	21	22,5	23
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Kelahiran	1,7	1,7	0,025	33,25	37,5
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%		24,00	20	20	31,25
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%		63,11	13,79	17	42,71
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	12,22	8,46	0,12	2,80	13,5
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		100	100	100	100	100
5.6.2	Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi		100	100	100	100	100
Pilar Pembangunan Lingkungan							
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua							
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	48,3	53,79	58,23	82,56	83,45
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan						
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	74,94	74,94	45	6,85	6,85
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	88	88	88	59	59
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop	Desa			88		

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Buang Air Besar Sembarangan (SBS)						
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global						
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	%			55,56	55,56	52,22
6.6	Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau						
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Das		1	1	1	1
Pilar Pembangunan Sosial							
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua							
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	%	70	94,31	96,37	96,37	-
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Kwh		27.223	284.187		-
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua							
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	46,73	49,54	53,76	56,57	58,29
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	8,31	9,72	0,05	-3,62	-
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan						
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%		51,10	35,16		52
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp./Jam		29.185	29.760		
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%		20	10,64		8,27
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya						
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Unit	1	1	1		-
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	0,22	0,22	-	2,35	0,24
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	5734	155	193	163	394
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	5.734	5.734	20.769	16.030	13.816
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi							
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Buah	1	1	1	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Buah	2	2	2	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Buah	7	7	7	7	7
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%		179,4	-	3,78	5,43
9.4	Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efiisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses						

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	industri bersh dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing						
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	%		89,1	-		94,56
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra - Dan Antar Negara							
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini.	Angka	0,357	0,354	0,350	0,345	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	12,48	12,45	12,24	12,27	10,79
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Desa	5	9	13	4	2
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	34	25	12	8	6
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	3	14	8
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%		43,31	100	41,63	36,72
Tujuan 11. Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan							
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	14,22	19,67	26,72	22,67	0,97
Tujuan 12. Menjamn Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan							
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun	1,30	5999,26	905,64	4.975,50	14,24
12.6	Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan tradisional untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Unit		2	-	-	-
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional						
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Produk		26	-	-	-
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya							
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Ada	Ada	-	Ada	-
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen	N/A	N/A	-	-	1
Tujuan 14. Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.						
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	19567	20884	-		
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.						
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	%	59,09	59,09	-		
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontriusi terhadap keleihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, mengihilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The World Trade Organization						

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	%	100	100	100	2,98	
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jiwa	N/A	N/A	7824		
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelolah Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai duna yang bebas dari lahan terdegrasi						
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas ahan keseluruhan	Ha	N/A	N/A	-	-	-
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal						
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	100	100	100	100	100
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif priorotas						
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati	Dokumen			-	-	-
15.9	Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	Ada	Ada	-	-	-
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yaang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan						
15.c.1.(a)	Persentase penyesesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	100	100	100	100	100
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola							
Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun keembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan							
16.2	Menghentikan perlakuan kejam,eksploitasi perdagangan,dan segala bentuk kekersan dan penyiksaan terhadap anak						
16.2.1.(b)	Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	%		0,00070	0,00033	0,00029	0,02
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin		3,84	3,93	3,92	3,85
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1.(a)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan KeuanganKementerian/ Lembaga danPemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
16.6.1.(b)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Predikat	CC	B	B	B	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	24	20	20	20	31,25

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%		6,45	0,14	10,34	25
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%		-	94,13	-	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%		2,07	-		90,16
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%		-	43,74		
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional						
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	72,52	100	100
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterlibatan Informasi Publik	Badan Publik	1	1	1	1	1
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	%	100	100	100	100	100
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Orang		100	0	1	1
Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Angka	0,1	0,72	-	2	0,16
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Data	Ada	Ada	Ada		
	Jumlah kelahiran	Jiwa			1180		
	Jumlah kematian	Jiwa			525		

Sumber Data: BPS dan OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025 diolah

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah target/ indikator TPB/SDGs yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 117.
2. Jumlah target/ indikator TPB/SDGs yang telah dilaksanakan dan telah mencapai atau melampaui target adalah sebanyak 52 target atau sebesar 44,44 persen.
3. Jumlah target/ indikator TPB/SDGs yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target adalah sebanyak 42 target atau 35,90 persen.
4. Jumlah target/ indikator TPB/SDGs yang tidak tersedia datanya adalah sebanyak 23 target atau 19,66 persen.

Faktor penghambat tidak tercapainya target TPB/ SDGs antara lain sebagai berikut:

- Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan karena perubahan garis kemiskinan yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, belum optimalnya produktivitas tenaga kerja serta lapangan pekerjaan yang digeluti, belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan angkatan kerja.
- Belum optimalnya capaian imunisasi lanjutan disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi untuk kesehatan anak dimasa yang akan datang.
- Rendahnya capaian angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat disebabkan antara lain karena kemiskinan penduduk sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya selain yang dibiayai melalui program pendidikan gratis, faktor geografis (jarak antara tempat tinggal dengan sekolah) khususnya untuk tingkat SMP/MTs sederajat, serta kurangnya dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya karena rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga kurang memahami pentingnya Pendidikan untuk anak.
- Rendahnya capaian penguatan pengurangan resiko bencana dan capaian jumlah daerah yang mendapatkan pendidikan layanan khusus disebabkan karena terbatasnya sumber daya yang tersedia, baik itu anggaran maupun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait bencana.
- Masih tingginya angka stunting disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola asuh anak dan asupan gizi yang tepat untuk anak.

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan Pembangunan terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, tema pembangunan daerah pada Tahun 2026 yaitu "*Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera"*. Beberapa permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah:

1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana diketahui bahwa IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada dalam kategori tinggi, namun berada pada urutan ke-20 diantara 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Hal tersebut diakibatkan oleh tiga komponen pembentuk IPM belum optimal khususnya pada komponen pendidikan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 12,84 tahun, yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal

pada tahun 2024 hanya memiliki peluang untuk bersekolah selama 12-13 tahun atau setara dengan Diploma I. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 8,49 tahun, dengan demikian rata-rata penduduk Selayar yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama ±8 tahun atau hanya bersekolah sampai kelas 2 SMP. Komponen IPM lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dimana capaian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 untuk komponen ini adalah 10.235.000 rupiah yang berarti kemampuan masyarakat Selayar untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang atau jasa hanya sampai sebesar 10,235 Juta Rupiah.

2. Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diakibatkan oleh penerapan tiga dari enam urusan Standar Pelayanan Miniman belum berjalan maksimal, dimana capaian masing-masing urusan yaitu: bidang pendidikan sebesar 77,23 persen, bidang kesehatan sebesar 91,23 persen, dan bidang pekerjaan umum sebesar 29,50 persen.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan dari 3,68 persen ditahun 2023 menjadi 3,33 persen pada tahun 2024, yang disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan pada sektor-sektor dominan perekonomian daerah, dimana Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang hampir 40 persen PDRB hanya tumbuh 1,38 persen, sementara sektor Konstruksi yang berkontribusi sekitar 18 persen hanya tumbuh 2,11 persen dan keduanya tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Masih tingginya persentase angka kemiskinan, dimana rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka yang hanya 2,05 persen pada tahun 2024, tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi walaupun mengalami penurunan dari 12,27 persen pada tahun 2023 menjadi 10,79 persen pada tahun 2024. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja serta lapangan pekerjaan yang digeluti belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan para angkatan kerja.
5. Masih rendahnya pemberdayaan, lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat perdesaan, serta masih terdapat 6 desa berstatus desa tertinggal pada tahun 2024.
6. Masih lemahnya sistem, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan serta tata Kelola pemerintahan. Digitalisasi birokrasi akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dimaksud. Selain itu, penerapan Satu Data Indonesia (SDI) akan sangat membantu dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penentuan kebijakan, namun pelaksanaannya

belum optimal karena belum tersedianya meta data untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah.

7. Kenektivitas wilayah belum optimal, dengan beberapa akar masalah yaitu: masih banyaknya jalan dalam kondisi rusak dengan persentase tingkat kemantapan jalan tahun 2024 hanya sebesar 54,58 persen, kinerja lalu lintas kabupaten sebesar 26,83 persen, sarana prasaran perhubungan laut layak fungsi hanya sebesar 44,83 persen, jaringan irigasi yang belum memadai, tingginya persentase lingkungan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, belum optimalnya sistem pengelolaan air baku, air bersih dan sanitasi.
8. Tingginya potensi kerusakan lingkungan akibat bencana alam yang tiap tahun terjadi seperti abrasi pantai, angin kencang (cuaca ekstrim) dan banjir.
9. Terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati serta penurunan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh meningkatnya volume sampah khususnya sampah plastik, baik itu sampah lokal maupun sampah kiriman yang dibawa oleh gelombang laut.

2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diuraikan berdasarkan capaian kinerja masing-masing urusan yang datanya telah diuraikan sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya.

1. Pendidikan
   a. Terbatasnya akses dan mutu pendidikan yang disebabkan oleh kondisi geografis Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah kepulauan sehingga sebaran pendidik dan tenaga kependidikan pada beberapa pulau masih terbatas;
   b. Tingginya angka putus sekolah yang disebabkan oleh tantangan pembelajaran, faktor sosial, serta kesadaran dan kondisi ekonomi keluarga;
2. Kesehatan
   a. Rendahnya rasio tenaga kesehatan dan terbatasnya akses, sarana dsan prasarana pelayanan kesehatan khususnya untuk pasien rujukan dari wilayah kepulauan yang disebabkan oleh kondisi geografis Kepulauan Selayar dan kurangnya minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di wilayah kepulauan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten dan belum adanya SK Jalan Desa;
   b. Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi layak;
   c. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi;
   d. Belum optimalnya jaringan irigasi yang terbangun untuk menopang peningkatan produksi pertanian.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh khususnya di wilayah perkotaan;

b. Masih rendahnya cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
c. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. Masih tingginya angka kriminalitas;
   b. Masih tingginya angka penyalagunaan narkoba;
   c. Potensi rawan bencana gempa bumi di beberapa desa wilayah kepulauan serta potensi bencana banjir di beberapa wilayah;
   d. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat dan sistem peringatan dini (EWS);
   e. Terbatasnya sumber daya dan armada untuk penanggulangan bencana.
6. Sosial
   a. Masih tingginya persentase angka kemiskinan;
   b. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   c. Belum tersedianya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sosial.
7. Tenaga Kerja
   a. Masih rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja, dengan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi;
   b. Masih rendahnya daya serap tenaga kerja.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Belum adanya lembaga penyedia layanan keluarga yang terstandarisasi;
   b. Masih rendahnya anggaran responsif gender (ARG) yang dialokasikan pada belanja APBD;
   c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   d. Masih tingginya perkawinan anak dibawah umur.
9. Ketahanan Pangan
   a. Belum terciptanya ekstensifikasi dan diversifikasi konsumsi pangan oleh penduduk;
   b. Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan;
   c. Masih terdapat desa yang berstatus rawan pangan.
10. Pertanahan
   a. Rendahnya persentase lahan/lokasi pemerintah yang bersertifikat;
   b. Belum termanfaatnya lahan milik pemerintah yang termanfaatkan sebagai salah satu sumber penghasil pendapatan daerah.
11. Lingkungan Hidup
   a. Pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   b. Kurang optimalnya sistem penanganan dan pengelolaan sampah;

c. Rusaknya kawasan hutan dan kawasan lindung, serta alih fungsi daerah tangkapan air menjadi lahan terbangun.

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
    a. Belum maksimalnya proses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan;
    b. Masih rendahnya persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    a. Masih terdapat 6 desa dengan kategori tertinggal;
    b. Belum optimalnya kerja sama desa;
    c. Belum maksimalnya fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    a. Rendahnya cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam peningkatan keluarga sejahtera;
    b. Kurangnya petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan;
    c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di kampung KB.
15. Perhubungan
    a. Masih rendahnya persentase kinerja lalu lintas kabupaten yang disebabkan karena kondisi jalan yang jenuh;
    b. Rendahnya persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi.
16. Komunikasi dan Informasi
    a. Belum optimalnya jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet khusunya di wilayah kepulauan;
    b. Pemanfaatan teknologi belum terintegrasi secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    a. Rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi serta UMKM;
    b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kemajuan UMKM pasca pelatihan dan penyaluran bantuan.
18. Penanaman Modal
    a. Masih rendahnya minat investor yang berinvestasi;
    b. Menurunnya nilai investasi baik PMDN maupun PMA.
19. Kepemudaan dan Olahraga
    a. Kurang optimalnya pembinaan olahraga dan pemuda;
    b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.
20. Statistik
    a. Belum tersedianya sistem data sektoral dan statistik dasar yang terintegrasi.
21. Persandian

a. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.

22. Kebudayaan
    a. Masih minim penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai daya tarik meningkatkan kunjungan wisatawan;
    b. Masih kurangnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
23. Perpustakaan
    a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, pojok baca, dan perpustakaan desa sebagai pusat pengembangan literasi;
    b. Menurunnya kunjungan perpustakaan tiap tahunnya.
24. Kearsipan
    a. Belum memadainya sistem pengelolaan arsip secara terpadu;
    b. Kurangnya SDM arsiparis.
25. Kelautan dan Perikanan
    a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
    b. Masih terbatasnya dukungan teknologi terhadap pengolahan produk hasil perikanan;
    c. Belum terealisasinya pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu.
26. Kepariwisataan
    a. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD;
    b. Rendahnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara;
    c. Belum ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
27. Pertanian
    a. Rendahnya tingkat ketersediaan air baku dan jaringan irigasi pertanian;
    b. Belum optimalnya penanggulangan organisme pengganggu tanaman;
    c. Belum optimalnya penanggulangan penyakit hewan;
    d. Masih rendahnya cakupan bina kelompok tani.
28. Perdagangan
    a. Rendahnya produktifitas dan daya saing IKM bidang perdagangan dan jasa;
    b. Belum optimalnya pelaksanaan Tera/ Tera Ulang;
    c. Belum memadainya sarana dan prasarana alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
29. Perindustrian
    a. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing IKM;
    b. Belum terealisasinya pembangunan kawasan pusat distribusi logistik barang dan jasa Kawasan Timur Indonesia (KTI).
30. Pemerintahan Umum, Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengawasan
    a. Belum maksimalnya penerapan e-government;

b. Perlunya penataan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai aturan yang berlaku;
c. Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan mengacu pada data yang lebih akurat;
d. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
e. Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi ASN;
f. Belum optimalnya pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan;
g. Masih adanya pelanggaran disiplin aparatur dan pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa perangkat daerah.

31. Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Perlunya optimalisasi pembinaan karakter masyarakat untuk menekan potensi terjadinya konflik.
b. Perlunya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah, diharapkan dapat mengurai permasalahan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang merupakan permasalahan pembangunan menyangkut pelayanan dasar dan tugas/fungsi Perangkat Daerah.

2.6 Isu Strategis

2.6.1 Isu Global

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDG's)

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDGs, terjadi penutupan sekolah, tempat kerja, pusat-pusat perbelanjaan dan layanan pemerintah. Setelah beberapa decade melakukan pengentasan kemiskinan global secara terus menerus, periode krisis dan guncangan covid-19 mengakibatkan hilang kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan selama sekitar tiga tahun antara (2020-2022). Berdasarkan data World Bank hampir 700 juta orang diseluruh dunia saat ini hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Selain itu Perempuan dan anak Perempuan juga menanggung beban yang berat dalam kemunduran SDGs, dan mendorong dunia untuk semakin jauh dari kesetaraan gender. Menurut data kependudukan PBB, Tahun 2023 lebih dari 40 persen Perempuan di seluruh dunia tidak dapat menggunakan hak mereka dalam pengambilan Keputusan mendasar.

Kemudian krisis iklim pun menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak saat ini, tahun 2023 merupakan tahun terpanas dalam Sejarah yang didorong oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan diperparah oleh fenomena cuaca El Nino. Rekor pemanasan global ini telah memperburuk banyak peristiwa cuaca ekstrem di Sebagian besar dunia pada tahun 2023 seperti

gelombang panas yang hebat dan kebakaran hutan di Kanada dan Amerika Serikat serta kekeringan berkepanjangan dan banjir.

Sebagai upaya penyelamatan pencapaian target TPB/SDGs perlu dibutuhkan komitmen lebih dari para pemimpin yang dilakukan dengan menjadikan target SDG's sebagai prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. *Ketegangan Geopolitik Global*

Perang Rusia dan Ukraina di eropa belum juga mereda, Konflik Hamas dan Israel muncul kembali yang menimbulkan krisis kemanusiaan parah di jalur Gaza. Perang Israel – Hamas kembali menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia pada 7 Oktober 2023 yang telah meningkatkan resiko geopolitik di pasar keuangan dan telah menaikan minyak dunia sebesar 5 persen. Konflik-konflik ini menyebabkan ketegangan antara Amerika Serikat dengan China dan Barat dengan Rusia.

Konflik Israel-Palestina kembali memicu inflasi secara global yang dipicu oleh ketidakstabilan pasokan energi dan pangan yang berujung pada naiknya harga minyak dan komoditas. Selain itu ketidakpastian global juga dipicu oleh ketegangan Amerika dan Cina, dimana IMF melaporkan pada kuartal III 2023 tekanan inflasi masih ada dan pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan atau bahkan. Pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun 2024 di beberapa negara (Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, India dan Amerika Serikat) juga akan mempengaruhi kondisi geopolitik dan perekonomian global utamanya iklim investasi.

Meski demikian, kondisi geopolitik dunia tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia yang cukup stabil, begitu pula Sulawesi Selatan pada awal tahun 2024 berhasil mengendalikan inflasi. Saat ini Sulawesi Selatan untuk Bulan Januari 2024 mencapai 2,38 persen year on year (yoy) atau dibawah rata-rata inflasi nasional 2,57 persen.

3. *Perubahan Iklim*

Konflik, guncangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim yang ekstrem, dan melonjaknya harga pupuk telah menyebabkan krisis pangan dengan skala belum pernah terjadi sebelumnya, sebanyak 783 juta orang menghadapi kelaparan kronis. World Food Programme (WFP) PBB menyatakan lebih dari 333 juta orang menghadapi Tingkat kerawanan pangan yang akut pada tahun 2023, dan tidak tahu dari mana akan mendapatkan makanan berikutnya. Jumlah ini merupakan peningkatan yang mengejutkan yaitu hampir 200juta orang dibandingkan dengan tangkat sebelum pandemi Covid-19.

Mengatasi krisis pangan dunia, Pemerintah Indonesia memiliki strategi agar pangan Indonesia bisa mandiri yaitu melalui kedaulatan pangan. Pemerintah berusaha mengurangi rawan pangan dari 72 daerah pada tahun 2022 menjadi 61 daerah pada tahun 2024. Badan Pangan Nasional (BAPANAS) telah menerbitkan

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, yang berisikan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan kajian kesiapsiagaan krisis pangan dan menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dari wilayah timur, berdasarkan angka sementara BPS pada tahun 2023 luas panen di Sulawesi Selatan sebesar 0,97 juta hekater dengan produksi padi sekitar 4,94 juta ton gabah kering giling (GKG). Dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2023 sebesar 2,84 juta ton.

4. *Perlambatan Ekonomi Global*

Perekonomian dunia pasca pandemi masih menemukan jalan yang sulit untuk naik, sejumlah factor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi global itu diantaranya adalah inflasi inti yang masih relatif tinggi, suku Bunga yang tinggi, beban utang yang tinggi, perdagangan dan investasi global yang melambat imbas fragmentasi geopolitik yang meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju cenderung melambat, bahan terkontraksi oleh inflasi tinggi dan suku bunga, daya beli dan investasi berkurang. Melambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara perekonomian besar diikuti dengan melambatnya komditas global yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomi Indonesia khususnya melalui jalur perdangan.

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2023 menurun 11,33 persen secara tahunan dibandingkan tahun 2022. Harga komoditas unggulan pendulang ekspor mengalami penurunan akibat penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor. Mengutip dari data BPS, total nilai ekspor Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencapai 258,82 miliar dollar AS, turun 1,33 persen dibandingkan ekspor 2022 yang sebesar 275,96 miliar dollar AS. Berdasarkan data BPS, eksport yang dikirim melalui Pelabuhan Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2023 mencapai 210,61 juta dollar AS, lima komoditas utama yang diekspor pada bulan Oktober 2023 yaitu nikel, besi dan baja; ikan dan udang; biji biji berminyak; serta garam, belerang dan kapur dengan distribusi persentasi masing-masing sebesar 55,24 persen, 22,20 persen, 5,84 persen dan 2,51 persen.

2.6.2 Isu Strategis Nasional

1. *Standar Pelayanan Minimal*

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan. dengan dilaksanakannya peraturan ini

maka akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis danmutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaanurusan wajib pemerintah daerah. Penerapan SPM harus menjamin aksesmasyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerahsesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasarterdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya.Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanandasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjukteknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisiawal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukanpenetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

1. Pelayanan pendidikan menengah;
2. Pelayanan pendidikan khusus;
3. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian uar biasa daerah provinsi;
5. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
9. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16hingga 65 tahun, peningkatan ini diikuti dengan menurunnya angkakelahiran serta kematian. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negarauntuk meningkatkan performa ekonomi industri. Pada rentang tahun 2020 sampai tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, dengan puncak peningkatan jumlah penduduk usia produktif diperkirakan saat Indonesia berusia 100 tahun yaitu di tahun 2045 dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Pada tahun 2020, sebanyak lima Provinsi di Inonesia telah berada pada tahap akhir bonus demografi sedangkan lainnya masih berada dalam tahap awal demografi, lima Provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi adalah DKI Jakarta, DI, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia perlu menyiapkan generasi penerus berkualitas dan melakukan pemerataan Pembangunan antarwilayah mengingat karakteristik kepulauan yang dimiliki Indonesia.

Bonus demografi memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Tak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang justru dapat menjadi ancaman bagi negara. Dampak positif dari bonus demografi adalah ketersediaan tenaga kerja, membantu perkembangan ekonomi sebuah negara karena semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, dan Pertumbuhan sektor pemerintah yang lain. Namun demikian momen bonus demografi ini tidak hanya akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah negara. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka fenomena ini akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah yang diantaranya adalah meningkatnya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang, Peningkatan jumlah angka lansia yang drastis dan mendominasi masyarakat suatu negara merupakan yang dinamakan aging population.

Berdasarkan data Tahun 2023 BPS , jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa, dengan 69,13 % penduduk Indonesia berada di jenjang usia produktif (15-64 tahun), 23,89% penduduk berusia 0-14 tahun, dan 6,98 % penduduk berusia 65 tahun ke atas, sehingga Rasio ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 44,65 %. Kemudian Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 9.312.019 jiwa, dengan jumlah usia produktif (15-64 tahun) sebesar 6.439.352 jiwa, sedangkan usia tidak produktif sebesar 2.872.667 jiwa. Untuk mengantisipasi bonus demografi yang terjadi pemerintah perlu sebagai fasilitator utama perlu melakukan langkah-langkah dalam menyediakan segala sarana dan prasarana dengan cukup.

Misalkan dari segi kesehatan, untuk menjaga seorang individu agar tetap bertahan hidup hingga dan selama masa produktifnya maka perlu alat kesehatan yang memadai dan dari segi pendidikan, pemerintah juga bisa menyediakan sekolah atau sarana prasarana lain yang cukup untuk membentuk sumber daya manusia bersaing.*Standar Pelayanan Minimal*

2.6.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. *Optimalisasi Peran Sulawesi Selatan sebagai Gerbang Indonesia Timur*

Sulawesi Selatan dikenal sebagai pintu gerbang Kawasan Indonesia Tumur, dikarenakan terletak ditengah-tengah wilayah kepulauan Indonesia dan sebagai penghubungan antara Kawasan barat dan timur Indonesia, serta berbatasan dengan laut yang menghubungkan benua Asia dan Australia. Dalam memantapkan peran sebagai poros utama pertumbuhan maritim Indonesia, Sulawesi Selatan meningkatkan pembangunan perhubungan laut dilanjutkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut sehingga makin mampu menghubungan seluruh wilayah Tanah Air sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan serta peningkatan daya saing, efisiensi proses produksi dan distribusi dan pemasaran. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis.

Nilai ekspor yang dikirim melalui Pelabuhan Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebesar US$ 2218,47 Juta, dengan eksport terbesar adalah nikel (US$ 1232,26 juta) dan eksport terbesar melalui pelabuhan Malili dengan nilai ekspor sebesar US$ 823,34 Juta, Pelabuhan Makassar sebesar US$ 608,77 Juta, Pelabuhan Biringkassi sebesar US$ 39,73 juta, Pelabuhan Balantang Malili sebesar US$ 18,38 juta, Pelabuhan Hasanuddin sebesar US$ 9,94 juta, Pelabuhan Pare-pare US$ 4,23 juta, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar sebesar US$ 0,82 juta, Pelabuhan Masamba sebesar US$ 0,01 juta dan Palopo sebesar US$ 0. Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan menurut sektor lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 72,73 % sedangkan transportasi hanya sebesar 13,02 %. Dengan demikian peran Pelabuhan masih harus lebih ditingkatkan untuk lebih berperan dalam meningkatan perekonomian di Sulawesi Selatan, regional dan nasional dan meningkatkan integritas dan konektivitas sistem perekonomian.

2. *Sumber Daya Manusia yang berkualitas*

Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Selatan merupakan proses yang tidak akan berakhir yang sesuai dengan amanat UUD Negara 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan SDM yang berkualitas dapat dilakukan melalui investasi bidang Pendidikan dan Kesehatan. Untuk menghadapi bonus demografi, Tingkat Pendidikan dan keahlian Masyarakat Sulawesi Selatan harus ditingkatkan. Saat ini beberapa perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan diiantaranya;

1. Terdapat 3 Universitas Negeri di Sulawesi Selatan, yang masingmasing yaitu Universitas Hasanuddin (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa); Universitas Negeri Makassar (Kota Makassar, Kota Parepare dan Kabupaten Gowa); dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa).
2. Terdapat 6 Institut Negeri di Sulawesi Selatan, yaitu Institut Teknologi Bacharuddin Jusif Habibie (Kota Parepare); Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Mengkendek (Kabupaten Tana Toraja); Institut Agama Islam Negeri Palopo (Kota Palopo); Institut Agama Islam Negeri Parepare (Kota Parepare); Institut Agama Islam Negeri Bone (Kabupaten Bone); dan Institut seni dan Budaya Indonesia
3. Terdapat 1 Sekolah Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN di Kota Makassar
4. Terdapat 10 Politeknik Negeri di Sulawesi Selatan, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Negeri Bone (Kabupaten Bone); Politeknik Negeri Media Kreatif PSDD Makassar (Kota Makassar); Politeknik Negeri Ujung Pandang (Kabupaten Maros); Politeknik Teknologi Negeri Bone; Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa (Kabupaten Gowa); Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene; Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Kota Makassar); Politeknik Pariwisata Makassar; Politeknik ATI (Kementerian Perindustrian) Makassar; Politeknik Kesehatan Makassar

Pembangunan politeknik menjadi prioritas utama dalam memperluas akses Pendidikan tinggi, dikarenakan Sulawesi Selatan ingin menciptkan entrepreneur baru yang berkualitas, menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk meningkatkan produktivitas daerah; lulusan politeknik memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan Pendidikan menengah; kelebihan pendapatan akan menjadi Tabungan daerah yang bermanfaat untuk menopang aging population; dan memberikan akses yang kepada Pendidikan politeknik, secara tidak langsung mencegah Masyarakat Sulawesi Selatan dari pernikahan dini setidak dalam kurun waktu 4-5 tahun agar dapat menurunkan potensi terjadinya ledakan penduduk.

Pembangunan SDM berkualitas juga berkaitan dengan ketersediaan layanan Kesehatan yang berkualitas dan tersebar di seluruh kelompok Masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pemberdayaan Gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Selain pemerataan akses Kesehatan, kualitas layanan Kesehatan juga menjadi perhatian. Layan berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustanable).* Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Masyarakat tidak sulit ditemukan. serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut

lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah membangun Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare dan Tahun 2023 memabangun Rumah Sakit Regional La Mappapening di Kabupaten Bone. Rumah sakit regional dibangun bertujuan agar Masyarakat dapat menjangkau dan mendapatkan pelayanan Kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi menjadi pusat rujukan utama dalam pelayanan kesehatan. Kemudian ketersediaan tenaga dokter (umum dan spesialis) dan perawat perlu ditingkatkan untuk mendukung SDM Sulawesi Selatan yang berkualitas.

3. *Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani*

Kebutuhan terhadap pangan adalah kebutuhan dasar manusia, pentingnya pangan bagi manusia juga diakui oleh negara dengan menjadikan urusan pangan sebagai salah satu urusan wajib. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Ketahanan pangan Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ketahanan pangan di Indonesia dan berperan sebagai lumpung pangan nasional khususnya di kawasan timur Indonesia, dengan produksi gabah kering giling di Sulawesi Selatan sebesar 4,94 juta ton dan jika dikonversi menjadi beras sekisar 2,84 juta ton, dengan kebutuhan Masyarakat Sulawesi Selatan sekisar 1 juta ton lebih, sehingga terdapat kelebihan sekisar hampir 2 juta ton.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam ketahanan pangan adalah terjadinya krisis pangan dunia, laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari laju pertumbuhan pangan, adanya perubahan iklim dan bencana alam, konversi lahan pertanian ke non pertanian dan adanya konflik global seperti Rusia dan Ukraina. Selain itu fenomena El Nino yang terjadi di Tahun 2023 yang memberikan dampak kepada produksi gabah yang turun dikarenakan kekeringan yang cukup Panjang, sehingga harus diantisipasi untuk di perencanaan Pembangunan selanjutnya.

4. *Transformasi Digital*

Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses bisnis. Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang.

Berbagai aspek kehidupan manusia seakan-akan tercerabut dari akarnya akibat loncatan-loncatan teknologi. Loncatan teknologi tersebut terutama dengan berkembangnya teknologi digital, mulai dari massifnya penggunaan internet (internet of things/IoT) hingga Artificial Intelligence (AI). Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan 20 tahun kedepan.

Beberapa manfaat yang dibawa dalam transformasi digital adalah efisiensi operasional yang mempersingkat proses bisnis melalui penggunaan teknologi cerdas dan sistem yang terintegrasi; inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau Masyarakat; peningkatan produktivitas melalui alat-alat kolaborasi online, analisis data real time dan akses terhadap informasi lebih cepat; flesibilitas dan mobilitas yang memungkinkan pegawai untuk bekerja dari mana saja, kapan saja dan dengan perangkat apapun; dukungan keberlanjutan yang dapat mengurangi konsumsi kertas, energi dan limbah fisik dan proses yang lebih ramah lingkungan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobile untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan e-commerce produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industry manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Disrupsi teknologi akan merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya.

5. *Tata Kelola pemerintahan yang efektif*

Kinerja tata Kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan ditandai denganmeningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi sebesar 74,21.perubahan paradigma reformasi birokrasi menuntut tata Kelola pemerintahyang lebih adaptif dan efektif sesuai dengan kebutuhan Masyarakat danperkembangan zaman, melalui penguatan kapasitas dan kemampuan berpikir sumber daya aparatur dengan perubahan pada sistem dan pola kerja, terutamanya pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis resiko, riset dan inovasi di semua tahapan pemerintahan yaitu perencanaan, penganggaran, kepegawian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Selain itu penguatan pada digitalisasi pemerintahan dan penguatan pelayanan publik juga perlu dimaksimalkan. Kolaborasi pentahelix (akademisi, bisnis, Masyarakat, pemerintah dan media) untuk mencipatakan tata keloa pemerintahan yang baik, adaptif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meskipun menghadapi beberapa tantangan, reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan tidak berfokus hanya pada administrasi saja tapi juga harus

berorientasi pada hasil Pembangunan daerah yang berdampak kepada Masyarakat sesuai dengan isu yang berkembang seperti penggunaan produk dalam negeri, penanggulangan kemiskinan, inflasi dan yang lainnya.

2.6.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi jawaban dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, isu strategis dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui Visi, Misi dan Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029. Rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebagai berikut:

1. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*

   Hasil *Long Form* Sensus Penduduk tahun 2020, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dimana pada tahun 2020 sebesar 67,38 dan tahun 2021 menjadi sebesar 69,68, terus meningkat menjadi 71,13 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 71,98. Namun angka tersebut masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke 20 dari 24 kabupaten/kota.

2. *Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim*

   Kemiskinan ekstrem adalah kondisi seseorang hidup dengan kurang dari US$ 1,9 per hari atau setara kurang lebih Rp. 45.000 per hari. Untuk memastikan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Arahan Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang “Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ditetapkan pada 8 Juni 2022 yang selaras dengan SDGs yang menarget penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Inpres No. 4 Tahun 2022 telah menginstruksikan kepada 22 Kementerian dan 6 Lembaga serta seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk bekerja sama antar kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui keterpaduan dan sinergi program kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial; (2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; dan (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman atau infrastruktur dasar lainnya.

3. *Peningkatan kesejahteraan masyarakat*

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui hilirisasi dan peningkatan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar, yang diharapkan akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi dan peningkatan investasi dimaksud meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata. Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka hilirisasi dan peningkatan investasi antara lain meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan jaringan distribusi produk, meningkatkan sarana dan prasarana yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, peningkatan keterampilan pelaku usaha serta pemasaran produk, juga mendorong produk UMKM agar mampu bersaing dipasar lokal maupun global.

4. *Meningkatkan status desa dan pemberdayaan ekonomi perdesaan*
5. *Pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan*
6. *Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan berdaya saing*

Kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diukur dari indeks kepuasan masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 sebesar 80,74 sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 masih pada kategori CC yaitu 53,50 dan nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 61,02 yaitu kategori B. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sakip Daerah adalah dengan meningkatkan efektifitas kelembagaan perangkat daerah melalui implementasi manajemen dan anggaran berbasis kinerja, penguatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi serta peningkatan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah.

7. *Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar*

Kualitas dan kuantitas infrastruktur sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku pada daerah tersebut. Dengan kondisi geografis Selayar yang merupakan kabupaten kepulauan, ketersediaan bahan baku untuk pembangunan sangat terbatas, khusunya di wilayah kecamatan kepulauan dan dibutuhkan biaya besar untuk mobilisasi bahan baku ke daerah tersebut. Selain itu, beberapa desa di wilayah kepulauan tidak memiliki sumber air sehingga ketersediaan air bersih dan air minum layak masih terbatas karena masyarakat masih bertumpu pada air hujan atau harus membeli dari pulau lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih

sehari-hari. Ketersediaan jaringan telekomunikasi, internet dan jaringan listrik juga masih terbatas khususnya di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dibidang pembangunan dan pemerataan infrastruktur dibutuhkan kebijakan yang dapat meningkatkan kulaitas dan ketersediaan infrastruktur perhubungan untuk meningkatatkan konektivitas dan kelancaran arus orang serta barang antar pulau, air bersih, irigasi, jaringan listrik dan telekomunikasi serta penurunan luasan kawasan kumuh.

8. *Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana*

   Memperhatikan karakteristik alam dan sosial yang kompleks menyebabkan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi serta bencana musiman seperti banjir dan angin kencang, memerlukan antisipasi serta pemetaan potensi bencana. Selain itu meningkatnya volume sampah khususnya sampah plastik, baik itu sampah lokal maupun sampah kiriman yang dibawa oleh gelombang laut dapat menyebabkan penurunan fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang wilayahnya merupakan kepulauan sehingga perlu upaya peningkatan sistem mitigasi bencana dan ketersediaan peta rawan bencana yang menjangkau sampai wilayah kepulauan. Selain itu, perlunya penguatan sistem manajemen persampahan dan sistem pengolahan sampah untuk mengantisipasi timbulan sampah akibat sampah kiriman yang dikarenakan wilayah Kepualauan Selayar dikelilingi oleh laut.

2.7 Inovasi Daerah

Secara umum berlakunya otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah kreatif mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adanya kewenangan dalam mengelola sendiri daerahnya, maka Pemerintah Daerah menganggap paling mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Agar daerah itu bisa maju, maka harus berani membuat inovasi yang baru sesuatu yang belum pernah dirasakan masyarakat sebelumnya. Saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhah dasar masyarakat saja, tetapi juga harus mampu menemukan terobosan baru dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu faktor penunjang pencapaian kinerja kepala daerah yaitu melalui inovasi daerah. Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan Pemerintah Pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga dibutuhkan perubahan atau pembaruan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menghasilkan beberapa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.96**

Tabel 2. 96 Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2024

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi	Tahun Pelaksanaan	Ket.
1	Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sistem Informasi Gerakan Efektif dan Efisien Data Pemuda Terpadu (SI GESIT)	2024	
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Penanganan Kumuh Melalui Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah Sepuluh Hektar (SIRUMAHKU SEHAT)	2024	
3	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gerakan Sekolah Tertib dan Aman (GESEKTAMAN)	2024	
4	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Optimalisasi Pembinaan Praja yang Humanis, Profesional dan Berintegritas (OPERASI TAS)	2024	
5	Dinas Lingkungan Hidup	Implementasi Program Kampung Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Tapak sebagai Upaya Membangun Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar	2024	
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa (SIPP Desa)	2024	
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIP OK DEH)	2024	
8	Dinas Perhubungan	Aplikasi Sistem Antrian Kendaraan	2023	
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Geografis *Informatin System* (SIJAGAI)	2023	
10	Dinas Perikanan	Penataan Kelembagaan Pelaku Perikanan Tangkap Berdaya Saing (PEPEKANG BERDASI)	2023	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selesaikan Pendidikan Hasilkan Pendapatan dan Tiba Saatnya Untuk Menikah (GERAKAN SEHATI)	2023	
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	Gerakan Koperasi Pola Penerapan Sistem Pembelajaran Model Assamaturu (GERAI PELANSIN “Assamaturu”)	2023	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Mobile	2022	
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Alam Rumahku “Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Khusus:	2022	
15	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	Sikamaseang	2022	
16	Dinas Sosial	Optimalisasi Penyaluran Bansos Kesra Berbasis Dusun Menuju 6T	2022	
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Gesit “Gerakan Motivasi Pendidik Taman Kanak-Kanak”	2022	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, yang memuat tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah akan menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, yang kemudian akan terbagi kedalam kondisi ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi Nasional dan Sulawesi Selatan tahun 2024 maupun perkiraan Tahun 2026, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perkembangan yang positif sebesar 3,33 % (c to c) pada tahun 2024, namun kondisi ini mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 3,68 % (c to c). Ketegangan geopolitik antarnegara yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta konflik Timur Tengah, telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah, dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan dan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud harus memperhatikan pencapaian perekonomian tahun sebelumnya serta prospek perekonomian daerah tahun mendatang.

Jika memperhatikan fokus dan arah kebijakan pemerintah daerah pada Tahun 2026 yaitu peningkatan produktifitas perekonomian, infrastruktur dasar dan publik, maka Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki beberapa prospek ekonomi yang dapat diandalkan, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan yaitu pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian dan perikanan. Investasi ini akan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produksi pertanian dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang akan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Semakin optimalnya penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada Tahun 2026 adalah:

1. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
2. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
3. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
4. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat;
5. Peningkatan belanja pegawai akibat penambahan gaji dan tunjangan PPPK yang akan meningkatkan kontribusi lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput laut dan peternakan juga belum dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan

harga pasar sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedepan perlu dilakukan perbaikan kualitas terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang ekspor sehingga memiliki daya saing di pasar global. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.2.1. Tantangan Perekonomian Global

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 ditopang aktivitas perdagangan global yang meningkat, tecermin dari kenaikan rata-rata Baltic Dry Index ke level 1.742,66 dari 1.393,56 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kinerja perdagangan di negara berkembang seperti Tiongkok dan India, penguatan perdagangan jasa, serta praktik frontloading, yaitu peningkatan perdagangan sebelum kenaikan tarif impor oleh AS. Namun, kinerja perdagangan global pada tahun 2025 diperkirakan masih akan diliputi dengan ketidakpastian, terutama akibat kebijakan tarif yang diberlakukan secara luas oleh AS terhadap seluruh negara mitra dagang. Kebijakan ini telah memicu berbagai respons dari negara-negara lain, menciptakan dinamika perdagangan yang tidak menentu. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pelemahan permintaan global, termasuk AS dan Tiongkok, yang berdampak pada melambatnya aktivitas perdagangan internasional akibat disrupsi rantai pasok.

Aktivitas manufaktur tahun 2024 membaik dibanding tahun 2023, tecermin dari tren peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur ke zona ekspansif di atas level indeks 50,0. Sementara itu, PMI sektor jasa tetap berada di zona ekspansi sepanjang tahun. Namun demikian, perang dagang akibat kebijakan resiprokal AS sejak April 2025 berisiko menurunkan permintaan global serta aktivitas manufaktur global ke depan. Di sisi lain, pergerakan harga komoditas pada tahun 2024 bervariasi dibanding tahun 2023. Harga batu bara, minyak mentah, dan gandum melanjutkan tren penurunan, sementara harga logam dan Crude Palm Oil (CPO) meningkat. Hingga Maret 2025, harga komoditas batu bara; minyak mentah Brent; gandum; dan CPO masing-masing tercatat sebesar US$103,97 per metric ton (mt); US$72,57 per barrel (bbl); US$255,37 per mt; dan US$1.069,00 per mt.

Pada tahun 2024, inflasi di beberapa negara, seperti AS (3,0 persen), Inggris (2,5 persen), dan Kawasan Eropa (2,4 persen), telah mendekati target inflasi bank sentral sebesar 2,0 persen. Sehingga, bank sentral di negara-negara tersebut sepanjang 2024 telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuannya untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, inflasi di negara berkembang masih di level tinggi bahkan meningkat menjadi 6,6 persen. Secara keseluruhan, inflasi global tahun 2024 melambat tetapi masih relatif tinggi pada level 5,7 persen.

3.1.1.2.2. Tantangan Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US$4.810 pada tahun 2023 menjadi US$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut diikuti oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2024, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti World Water Forum 2024, Aqua Bike Jetski World Champhionship 2024, Bali Internasional Airshow 2024, Moto GP Mandalika, dan konser musik internasional, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik.

Dari sisi kewilayahan, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat meningkat menjadi 5,97 persen dari tahun 2023 yang sebesar 5,74 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan hilirisasi industri, seperti pengolahan nikel, serta peningkatan produksi Liquefied Natural Gas (LNG), sehingga memperkuat kinerja sektor industri pengolahan di wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 4,80 persen, turun dari 4,89 persen pada tahun 2023. Perlambatan ini dipengaruhi oleh moderasi permintaan domestik, tecermin dalam penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta melemahnya kinerja sektor pertambangan.

3.1.1.2.3. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi geostrategis Sulawesi Selatan merupakan potensi besar untuk menjadi hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia sekaligus Nasional. Penguatan integrasi dan keterkaitan ekonomi domestik dengan ekonomi global ditandai dengan kebijakan perdagangan internasional Indonesia terhadap pelabuhan ekspor, namun Pelabuhan Makassar belum ditetapkan sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor-impor Indonesia, khususnya produk-produk unggulan ekspor dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) sehingga potensi ini belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data nilai ekspor Sulawesi Selatan, untuk periode Januari – Desember tahun 2024 justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang hanya mencapai US $ 2.083,97 Juta. Hal ini juga diperkuat dengan penurunan volume ekspor Sulawesi Selatan dimana pada periode Januari – Desember tahun 2024 sebesar 2.013,02 ribu ton atau turun sebesar 15,23 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Dari

sisi nilai investasi yang diukur melalui indikator pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi PMTB terhadap PDRB cenderung menurun dimana pada tahun 2020 nilai kontribusi mencapai angka 39,45 persen, turun 2,8 persen pada tahun 2024 dengan capaian angka 36.65 persen.

Belum optimalnya nilai ekspor produk sektor unggulan daerah di Sulawesi Selatan disebabkan oleh ekspor produk unggulan sulawesi masih berupa bahan mentah serta harga barang ekspor juga masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global baik terkait dengan permintaan dan penawaran barang dan kebijakan perdagangan internasional yang terjadi. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait ekspor impor juga menjadi tantangan dalam peningkatan potensi pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memanfaatkan peluang ekspor dan impor yang ada. Selain itu, rendahnya nilai investasi pada infrastruktur dan modal tetap dapat berdampak signifikan terhadap nilai ekspor suatu daerah. Infrastruktur yang kurang memadai serta kurangnya investasi dalam modal tetap dapat menghambat efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.

Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Sulawesi Selatan, tetapi hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian. Hal ini diindikasikan oleh PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha yang masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Akibatnya, keterlambatan pertumbuhan pada sektor pertanian dan perikanan mempengaruhi produktivitas ekonomi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi produktifitas pada sektor ini, diantaranya adalah masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan sehingga menghambat distribusi hasil pertanian dan perikanan, sarana prasana pertanian dan perikanan belum terdistribusi secara merata terutama didaerah terpencil yang diperparah oleh dampak perubahan iklim sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan. Selain itu kapasitas dan ketrampilan petani dalam budidaya maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengelolaan pasca panen berbasis teknologi yang belum optimal, sertifikasi dan standar mutu hasil pertanian dan perikanan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor, serta fluktuasi harga global hasil perikanan juga menjadi perhatian dalam upaya peningkatan produktifitas ekonomi daerah. Pengembangan komoditas unggulan pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berbasis kawasan, perlu menjadi prioritas dalam mendukung optimalisasi produktifitas ekonomi daerah.

Indikasi lain yang menunjukkan belum optimalnya produktifitas ekonomi adalah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB baru mencapai 13,02 persen, dan kontribusi sektor jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek

wisata dan wisatawan baru mencapai 1,33 persen. Produktifitas ekonomi di sektor industri dipengaruhi oleh belum berkembangnya sentra dan kawasan industri di kabupaten/kota yang mempunyai potensi hasil komoditas unggulan yang relatif besar dan kontinyu. Di sektor pariwisata, lebih dipengaruhi oleh masih terbatasnya amenitas, aksesibilitas dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan, pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang belum berfokus pada kepuasan wisatawan. Dalam konteks ini, perlu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dalam mengelola produk dan jasa layanan wisata, meningkatkan investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan promosi serta mengembangkan konektifitas tujuan wisata antar daerah.

Potensi sumber daya alam yang tersedia dapat menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi sumber daya alam dan komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi serta dukungan pembinaan/permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Sumber daya alam Sulawesi Selatan yang beragam merupakan potensi besar yang dapat memberikan multiplayer effect melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah (added value) sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

3.1.1.2.4. Tantangan Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar

Kondisi ekonomi daerah menjelaskan tentang kondisi pada tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menerbitkan data dan informasi khususnya kondisi ekonomi daerah.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,33 persen dari 3,68 persen tahun 2023 (**Tabel 3.1**).

Tabel 3. 1 Perbandingan Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024 dan Perkiraan tahun 2025 dan Target tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	%	3,33	3,50	4,20
2	Sulawesi Selatan	%	5,02	5,50-6,30	6,12
3	Nasional	%	5,03	5,00-5,20	5,3-5,6

Sumber: BPS, diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir (2020-2024) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha,

diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Konstruksi adalah salah satu kategori yang konsisten mengalami peningkatan nilai PDRB, yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh penduduk dengan lapangan usaha pada sektor tersebut lebih dominan dibanding lapangan usaha lainnya. Sementara untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, maka kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus diupayakan untuk terus ditingkatkan dan didukung oleh sektor lainnya khususnya sektor industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikanannya terlebih dahulu sebelum dijual. Pada **Tabel 3.2** dan **Tabel 3.3** dapat dilihat data PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

Tabel 3. 2 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,44	42,62	43,70	43,89	43,1
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,94	0,95	0,95	0,9
C	Industri Pengolahan	2,81	2,81	2,78	2,82	2,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09
F	Konstruksi	21,93	21,68	21,68	21,69	21,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81	7,80	8,02	8,08	8,3
H	Transportasi dan Pergudangan	1,99	2,08	2,27	2,35	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24
J	Informasi dan Komunikasi	2,51	2,41	2,24	2,24	2,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,36	1,30	1,28	1,26	1,27
L	Real Estat	1,46	1,39	1,29	1,28	1,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,84	7,71	6,93	6,73	7,12
P	Jasa Pendidikan	5,81	5,82	5,62	5,48	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,18	2,31	2,32	2,31	2,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,51	0,51	0,50	0,50	0,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2025

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	1,44	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	-0,20	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,45	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,46	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	2,01	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,42	5,28	7,86	4,90	5,66
H	Transportasi dan Pergudangan	-19,00	9,98	11,67	4,84	2,41

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,85	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	11,33	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,23	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	10,32	1,25	0,73	4,88	3,74
M,N	Jasa Perusahaan	-10,56	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	7,22	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,01	9,41	8,50	5,34	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,95	5,77	3,12	5,21	11,72
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**7,68**	**-1,78**	**4,02**	**3,68**	**3,33**

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 adalah dari lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 11,72 % serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,31 %. Sedangkan beberapa lapangan usaha yang pertumbuhannya mengalami perlambatan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang dominan dipengaruhi oleh perubahan iklim/ cuaca dan hama khususnya pada sektor pertanian, sektor kontruksi yang disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik sehingga berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja sektor konstruksi. Selain itu, terdapat satu sektor yang mengalami kontraksi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yang disebabkan oleh rumitnya penguruhsan izin tambang dan penggalian golongan C yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sehingga banyak usaha tambang dan penggalian golongan C tidak beroperasi lagi.

B. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 58,45 Juta Rupiah, namun masih lebih rendah dari capaian PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional. PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3. 4 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	Juta Rp.	58,45	60,49	63,03
2	Sulawesi Selatan	Juta Rp.	73,57	75,55	107,73
3	Nasional	Juta Rp.	78,62		

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (56,57 juta rupiah). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku seluruh lapangan usaha. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan diatas 10 persen yaitu jasa lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 12,13 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 11,36 persen,

dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan sebesar 10,60 persen. Sementara itu, sektor lain juga mengalami pertumbuhan antara 1-9 persen, Namun terdapat satu sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,50 persen). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,58 persen.

C. Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menekan angka kemiskinan dalam melalui penyaluran program gratis dan bantuan sosial serta program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 10,79 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,27 persen dan capaian ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3. 5 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	%	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77
2	Sulawesi Selatan	%	8,06	7,30-7,89	7,30-7,89
3	Nasional	%	8,57	7,0-8,0	6,5-7,0

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Tingginya angka kemiskinan pada tahun 2024 disebabkan oleh struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) yang cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam, musim dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, sektor sekunder tersebut harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan program dan kegiatan, baik itu berupa pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, maupun pelaksanaan program-program padat karya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebanyak 74.971 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 1,98 persen merupakan pengangguran terbuka. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 1,49 persen namun masih lebih rendah dari capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Selain itu, capaian tersebut telah melampaui target RPJMD sebesar 2,33 persen pada tahun

2023. Tantangan kemudian yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rendahnya TPT dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3. 6 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	%	2,05	1,96	1,87
2	Sulawesi Selatan	%	4,19	3,8-4,1	3,80-4,10
3	Nasional	%	4,91	4,5-5,0	5,0-5,7

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2024 sebesar 73.431 jiwa, didominasi oleh sektor jasa sebesar 50,99 persen kemudian didkuti oleh sektor pertanian sebesar 32,82 persen dan sektor manufaktur sebesar 16,19 persen. Pada tahun 2024, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor jasa dan sektor pertanian mengalami peningkatan dari 49,47 persen dan 19,80 persen pada tahun 2023. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor manufaktur mengalami penurunan dari 19,80 persen tahun 2023. Oleh sebab itu, upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat kembali menurunkan jumlah pengangguran terbuka adalah dengan menumbuh kembangkan sektor pertanian, serta memperluas lapangan usaha sektor manufaktur dengan mengembangkan industri skala kecil dan menengah melalui pengolahan bahan dasar dan produk konsumsi.

E. Gini Rasio

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 0,329, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 0,345. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menuju pemerataan dan diharapkan akan semakin merata pada tahun selanjutnya. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 3.7.**

Tabel 3. 7 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	Koefisien	0,329	0,323	0,316
2	Sulawesi Selatan	Koefisien	0,363	0,360	0,358
3	Nasional	Koefisien	0,381	0,379-0,382	0,382

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, khususnya dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun tahun 2024 tercatat sebesar 71,98 (kategori IPM tinggi) dan meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 71,13. Perbandingan IPM antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3. 8 Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	Angka	71,98	72,38	72,90
2	Sulawesi Selatan	Angka	75,18	75,21	75,23
3	Nasional	Angka	75,02		

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

G. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen internasional untuk secara bersama menahan laju pemanasan global. Progres penurunan emisi tahun 2023 cukup baik (10.626,25 tonCO_2eq) dengan persentase sebesar 61,72 persen dan tahun 2024 sebesar 20,38 persen. Perbandingan persentase penurunan intensitas emisi GRK antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3. 9 Perbandingan Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2024, Perkiraan Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2024	Perkiraan 2025	Target 2026
1	Kepulauan Selayar	Persen	20,38	23,66	28,92
2	Sulawesi Selatan	Persen	n.a	29,70	33,46
3	Nasional	Persen	28,53	26,67	27,35

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bapperida Kab. Kepulauan Selayar, 2025

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada Tahun 2026 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki

potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.

2. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (10,79 persen), sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
4. Rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berbanding terbalik dengan tingginya Angka Kemiskinan. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang digeluti para angkatan kerja belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan;
5. Diperlukan dorongan dan motivasi dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja dan penyediaan modal usaha yang representatif sehingga dapat menjadi alternatif untuk menurunkan tingkat pengangguran;
6. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum dioptimalkan, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
7. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu sektor pelayanan publik masih belum memadai karena terbatasnya sumber pembiayaan, sehingga berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Pelaksanaan program dengan melihat letak strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim belum berjalan optimal sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendatangkan investor guna pengembangan kawasan yang nantinya akan meningkatkan roda perekonomian daerah; dan
9. Stabilitas harga komoditas unggulan terutama kopra dapat berpengaruh terhadap produktivitas petani kopra sehingga berbagai hasil olahan kelapa terutama kopra akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kebijakan Fiskal Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (*collecting more*), peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

   Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,21–14,20 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 10,70–11,20 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50–3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi *core tax system,* penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak, penajaman *tax incentive* tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

2. Belanja Negara

   Pada Tahun 2026, Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66–17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61–12,74 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,05–4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/ Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara (s*pending better*) supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/ konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan regulasi) dalam rangka

akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

   Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi *below the line* sebesar satu persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan baik melalui pembiayaan utang dan non-utang (optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dan *blended finance*). Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian, serta diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development* yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional selama Triwulan I Tahun 2025 lampau rata-rata nasional Nasional yaitu mencapai 5,78 persen. Trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian selama Tahun 2024, maka diperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Tahun 2026. Dari sisi pengeluaran, berlanjutnya pertumbuhan utamanya ditopang oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan tertinggi setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Lebih lanjut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan akan meningkat dengan menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2026, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap

komoditas ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2026 dititik beratkan untuk menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur, dsb)
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan.
7. Mengembangkan ketenagakerjaan.
8. Peningkatan infrastruktur pada daerah terpencil dan yang mempunyai potensi.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat capaian perkonomian pada masa sekarang serta tantangan dan prospek perekonomian Tahun 2026, maka dirumuskan beberapa kebijakan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan hilirisasi dan investasi pada sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi hasil produksi sektor unggulan dimaksud.
2. Peningkatan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi, dan jaminan kepastian hukum bagi investor;
3. Peningkatan akses permodalan yang dapat diintervensi oleh perbankan serta koperasi
4. Peningkatan kualitas produk melalui hilirisasi mulai dari skala rumah tangga sampai dengan industri UMKM
5. Peningkatan akses pemasaran, dilaksanakan melalui promosi di berbagai obyek

wisata, serta mendorong digitalisasi terhadap pemasaran produk.

6. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, dengan terus mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi para angkatan kerja yang didukung oleh pemberian bantuan peralatan untuk para angkatan kerja yang telah dilatih
7. Peningkatan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau, khususnya melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan;
8. Peningkatan minat dan daya tarik wisata melalui pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
9. Peningkatan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahtearaan masyarakat dan peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri perikanan terpadu;
10. Peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik agar Pulau Selayar ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan distribusi logistik Kawasan Timur Indonesia;
11. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
12. Pembangunan sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan;
13. Peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, serta peningkatan ketersediaan air baku dan air bersih;
14. Pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Dokumen Lingkungan;
15. Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Arah kebijakan ini juga diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3. 10 Target Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026		
			RPJMD Kep. Selayar	RKPD Sulsel	RKPD
1.	Angka Kemiskinan	%	9,67-8,77	6,85-7,08	9,67-8,77
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,90	75,23	72,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,87	3,64-4,03	1,87
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20	5,2-6,5	4,20
5.	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	63,03	80,5-84,9	63,03
6.	Gini Rasio	Angka	0,316	0,358	0,316
7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	28,92	33,46	28,92

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi aumber-sumber pendapatan yang sejalan dengan kewenangan serta potensi ekonomi lokal. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan umum dan kemampuan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Prinsip Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dalam setiap periode anggaran meliputi tujuh siklus, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menempuh tujuh siklus tersebut akan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekiutas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
   a. Pajak Daerah;

      Pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah.

   b. Retribusi Daerah;

      Retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan;

1.a. Dana Transfer Umum terdiri dari DBH dan DAU;

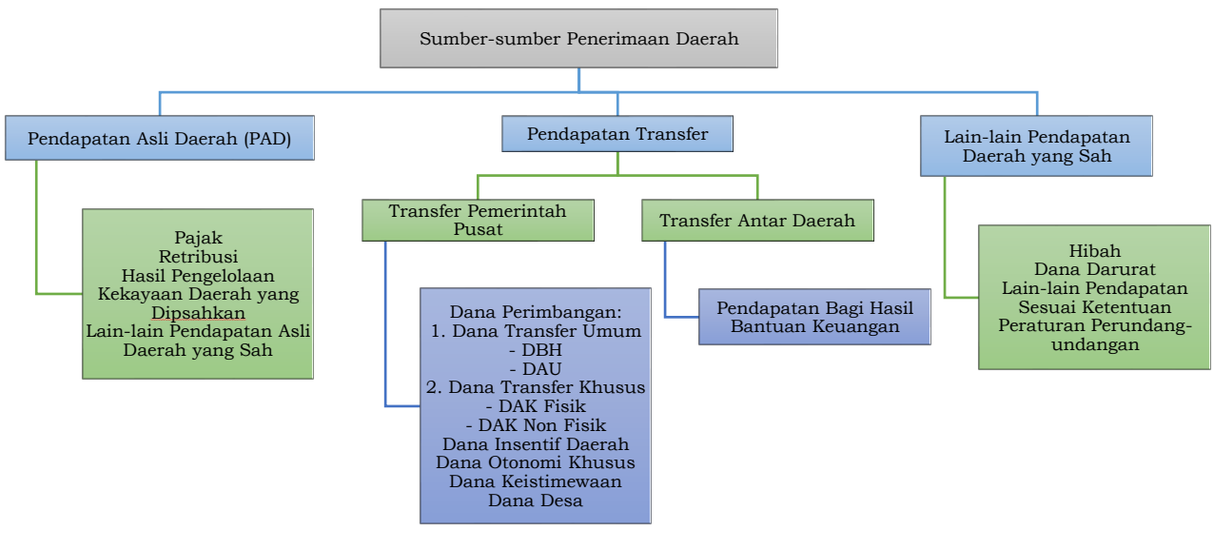
1.b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik

2. Dana Insentif Daerah;
3. Dana Otonomi Khusus;
4. Dana Keistimewaan; dan
5. Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah:

1. Pendapatan Bagi Hasil
2. Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Gambar 3. 1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3. 11 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026

Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Target 2025 (Rp)	Proyeksi 2026 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	**945.693.874.944,08**	**1.000.332.884.417,41**	**1.080.858.748.700,00**	**1.087.054.915.000,00**
Pendapatan Asli Daerah	**79.717.225.613,42**	**75.936.599.688,41**	124.291.055.700,00	115.776.877.000,00
Pajak Daerah	14.270.867.976,30	13.541.050.302,00	23.051.667.100,00	23.051.667.100,00
Retribusi Daerah	4.824.522.956,00	44.562.853.856,00	64.713.963.000,00	56.199.784.300,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.115.146.704,74	12.005.751.676,20	12.778.500.000,00	12.778.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.506.687.976,38	5.826.943.854,21	23.746.925.600,00	23.746.925.600,00
Pendapatan Transfer	**854.591.939.882,66**	**919.409.979.473,00**	**956.567.693.000,00**	**971.278.038.000,00**
Transfer Pemerintah Pusat	**802.727.311.424,00**	**878.900.855.190,00**	**905.444.631.000,00**	**943.995.434.000,00**
Dana Transfer Umum		637.730.403.651,00	641.999.136.000,00	680.549.939.000,00
- DBH	18.290.090.317,00	17.235.143.000,00	14.596.497.000,00	14.596.497.000,00
- DAU	584.338.059.271,00	620.495.260.651,00	627.402.639.000,00	665.953.442.000,00
DAU tidak ditentukan penggunaanya			494.221.532.000,00	532.772.335.000,00
DAU Bidang Pendidikan			50.767.542.000,00	50.767.542.000,00
DAU Bidang Kesehatan			35.201.688.000,00	35.201.688.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum			43.953.367.000,00	43.953.367.000,00
DAU PPPK			1.858.510.000,00	1.858.510.000,00
DAU Kelurahan			1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Dana Transfer Khusus		154.382.816.539,00	191.432.908.000,00	191.432.908.000,00
DAK Fisik	31.419.707.650,00	42.731.502.855,00	46.880.888.000,00	46.880.888.000,00
DAK Non Fisik	100.433.761.186,00	111.651.313.684,00	144.552.020.000,00	144.552.020.000,00
Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal		21.356.548.000,00	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa	68.245.693.000,00	65.431.087.000,00	65.159.887.000,00	65.159.887.000,00
Transfer Antar Daerah	**51.864.628.458,66**	**40.509.124.283,00**	**51.123.062.000,00**	**27.282.604.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil	45.053.940.458,66	34.078.496.283,00	46.290.458.000,00	22.450.000.000,00
Bantuan Keuangan	6.810.688.000,00	6.430.628.000,00	4.832.604.000,00	4.832.604.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	**11.384.709.448,00**	**4.986.305.256,00**		
Hibah				
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	11.384.709.448,00	4.986.305.256,00		

Sumber: BPKPD, Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak.

Untuk meningkatkan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Perangkat Daerah terkait agar semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan IMB dan membayar retribusi IMB. Selain itu, optimalisasi retribusi parkir pada tempat-tempat umum seperti pasar, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Untuk meningkatkan Lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi intensif dengan lembaga perbankan terkait penempatan jasa giro dan pendapatan bunga serta melakukan optimalisasi penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi potongan atau bentuk lain, dan pendapatan BLUD.

Sementara untuk alokasi pendapatan transfer, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan serta sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Struktur belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, serta Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya;
3. Belana Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

   Keadaan darurat dimaksud meliputi:

   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak dimaksud meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah money follow programme. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial;
2. Melaksanakan *mandatory* spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belanja Pegawai Maksimal Sebesar 30 persen dari total belanja APBD diluar tunjangan guru;
4. Pencapaian Visi Misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Program Pembangunan Nasional;
5. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
6. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatilan prioritas pembangunan daerah.

Realisasi dan Proyeksi Belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022-2025 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.12.**

Tabel 3. 12 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026

Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Target 2025 (Rp)	Proyeksi 2026 (Rp)
BELANJA DAERAH	**989.673.418.368,32**	**1.027.475.093.472,10**	**1.135.635.727.300**	**1.083.054.915.000**
Belanja Operasi	**685.812.944.263,32**	**746.613.203.925,10**	**845.220.411.087**	**817.640.117.272**
Belanja Pegawai	372.087.952.604,00	421.856.354.597,00	481.015.846.946	
Belanja Barang dan Jasa	284.967.254.713,32	285.017.989.323,10	351.314.069.934	
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	26.150.268.446,00	37.489.026.005,00	11.312.074.207	
Belanja Bantuan Sosial	2.607.468.500,00	2.249.834.000,00	1.578.420.000	
Belanja Modal	**170.521.857.369,00**	**145.606.619.567,00**	**153.973.898.713**	**136.239.924.728**
Belanja Tanah	352.830.000,00	512.154.500,00	1.886.605.000	
Belanja Peralatan dan Mesin	20.720.049.471,00	18.146.622.784,00	17.686.610.160	
Belanja Bangunan dan Gedung	80.539.478.965,00	71.973.982.522,00	38.317.427.800	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.627.953.933,00	54.397.846.811,00	95.560.755.753	
Belanja Aset Tetap Lainnya	62.910.000,00	334.572.950,00	522.500.000	
Belanja Aset Lainnya	218.635.000,00	241.440.000,00		
Belanja Tidak Terduga	**4.269.780,00**	**5.462.447.500,00**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
Belanja Transfer	**133.334.346.956,00**	**129.792.822.480,00**	**133.441.417.500**	**126.174.873.000**
Belanja Bagi Hasil	1.702.109.807,00	1.641.045.485,00	4.055.928.500	2.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	131.632.237.149,00	128.151.776.995,00	129.385.489.000	124.174.873.000

Sumber: BPKPD, Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

Mengacu pada arah kebijakan belanja, Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 sebesar Rp. 1.083.054.915.000,- yang dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 817.640.117.272,-, Belanja Modal sebesar Rp. 136.239.924.728,-, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dan Belanja Transfer sebesar Rp. 126.174.873.000,-. Belanja tersebut akan digunakan untuk pendanaan seluruh urusan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2026. Proyeksi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar 4,63 persen atau Rp. 52.580.812.300,- dari tahun 2025 dikarenakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp. 56.276.978.600,- telah dialokasikan untuk belanja tahun 2025.

Mengacu pada Pasal 146 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerindah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD dan Pasal 147 Ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau

transfer kepada daerah dan/atau dana desa. Berdasarkan alokasi belanja pada tabel di atas, dalam hal porsi belanja pegawai dan pelayanan publik belum sesuai ketentuan, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya menyesuaikan dengan mengacu pada Ayat (3) Pasal 146 dan Pasal 147 yaitu paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-undang tersebut.

Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah melaksanakan dua urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melaksanakan amanat dari Undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalokasikan anggaran pada 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Proyeksi belanja pada Tahun 2026 untuk masing-masing bidang urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.13** berikut.

Tabel 3. 13 Proyeksi Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No.		Urusan/ Bidang Urusan	Anggaran	OPD Penanggung Jawab
1.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
	1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	345.889.728.000	Disdikpora
	2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	219.631.912.000	Dinkes
	3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.192.568.000	Dinas PUTR
	4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.091.176.000	DPKP
	5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.276.680.000	Satpol PP dan BPBD
	6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	5.972.524.000	Dinas Sosial
2.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
	1.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4.543.499.000	Disperinaker
	2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.795.401.500	DP3AP2KB
	3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	522.970.000	Distan KP
	4.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.192.234.000	Dinas PUTR
	5.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11.110.945.000	DLH
	6.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.000.101.000	Disdukcapil
	7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.717.886.000	Dinas PMD
	8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.134.975.500	DP3AP2KB

No.		Urusan/ Bidang Urusan	Anggaran	OPD Penanggung Jawab
	9.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	9.161.543.000	Dishub
	10.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	4.772.292.000	Diskominfo SP
	11.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	966.826.000	Disdag KUKM
	12.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.617.522.000	Dinas PMPTSP
	13.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.599.839.000	Disdikpora
	14.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	170.000.000	Diskominfo SP
	15.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	200.000.000	Diskominfo SP
	16.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	360.000.000	Disparbud
	17.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.608.172.000	DPK
	18.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	50.345.000	DPK
Total			**750.579.139.000**	

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk membiayai program/ kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Bidang Sosial. Proyeksi Belanja Wajib Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, dapat dilihat pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3. 14 Proyeksi Belanja Wajib Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No	Bidang Urusan	Indikator SPM	Pagu Anggaran (Rp.)		Perangkat Daerah
			2025	Proyeksi 2026	
1	PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	68.866.531.650	70.143.236.400	DISDIKPORA
		Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan			
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	KESEHATAN	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	111.672.922.540	82.303.309.800	DINKES
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			

No	Bidang Urusan	Indikator SPM	Pagu Anggaran (Rp.)		Perangkat Daerah
			2025	Proyeksi 2026	
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			
		Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan			
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	5.221.499.450	4.054.388.983	DINAS PUTR
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	10.600.000.000	200.000.000	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	130.000.000	1.000.000.000	DPKP
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
5	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	619.999.800	482.470.000	SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	330.000.000	302.038.600	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana	1.194.500.000	1.188.319.000	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			

No	Bidang Urusan	Indikator SPM	Pagu Anggaran (Rp.)		Perangkat Daerah
			2025	Proyeksi 2026	
6	SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.271.600.000	1.521.600.000	DINSOS
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
		Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160.000.000	160.000.000	
Total			**200.067.053.440**	**161.355.362.783**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, Diolah

Berdasarkan **Tabel 3.14**, anggaran SPM Bidang Pendidikan dialokasikan pada Program Pengelolaan Pendidikan untuk meningkatkan partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD, meningkatkan partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan sekolah dasar melalui kegiatan pengelolaan Pendidikan sekolah dasar (SD/MI) dan pengelolaan Pendidikan sekolah sekolah menengah pertama (SMP/MTs), serta meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan bagi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah. Anggaran SPM Bidang Kesehatan dialokasikan pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, atau fasilitas Kesehatan lainnya yang dananya bersumber dari APBD, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialokasikan pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam rangka meningkatkan ketersediaan air minum pokok serta sistem pengolahan air limbah yang aman untuk masyarakat. Selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 (**Tabel 3.15)** sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Proyeksi Belanja Sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
8. Penguatan Fiskal daerah						
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	%	40	1.203.722.500	BKPSDM

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	%	50		
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	%	94	843.276.000	BKPSDM
		Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	%	94		
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	95		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	%	94,5	603.736.681.620	Semua OPD
		Persentase Capaian Kinerja OPD	%	89,5		
		Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	%	65,5		
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan	Angka	4	134.559.273.000	BPKAD
		Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu		
		Penetapan LKPD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu		
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	%	82,54	4.397.388.000	Itda
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	%	67,49		
6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%		802.750.000	Bapperida
7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	700.000.000	Bapperida
8	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	15	160.000.000	Disdukcapil
		Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)	%	53		
		Cakupan kepemilikan KTP elektronik	%	95		

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
9	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%		400.000.000	Bapperida
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	13.016.610.600	Setwan
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Penganggaran, Pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada		
		Ketetapan penetapan PERDA APBD Tahun n	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat Waktu		
		Persentase penetapan Ranperda Tahun n	%	100		
11	Progran Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100	60.000.000	Disdukcapil
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,69		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	93,5		
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100		
12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	72	472.000.000	Diskominfo SP
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non	%	85	159.910.300	Semua Kecamatan

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
		Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP				
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT						
14	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM/Prioritas)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase Warga Negara	%	94,81	70.143.236.400	Disdikpora
		Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Warga Negara	%	99,52		
		Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	63,19		
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	60,74		
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,59		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	87,91		
		Indeks Iklim Keamanan SD	Angka	72,55		
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Angka	71,91		
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Angka	68,96		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Angka	68,54		
		Indeks Iklim Inklusivitas SD	Angka	60,43		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Angka	60,04		
		Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi bangunan baik	%	48,3		
		Persentase Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	44,31		
		Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	44,75		
15	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	%	73,75	754.594.000	Disdikpora
		Rasio guru terhadap	%	01.01		

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
		Rombongan Belajar (PAUD dan SD)				
		Rasio guru terhadap Mata Pelajaran tingkat SMP	%	01.01		
16	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	%	86,3	587.515.600	Disdikpora
17	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	14.521	54.239.000	DPK
		Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	%	50,47		
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS						
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	82.303.309.800	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100		
		Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang	%	100		

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
		mendapatkan layanan kesehatan				
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100		
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama		
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas						
19	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	%	30	29.961.000	DP3AP2KB
20	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	%	30	49.828.000	DP3AP2KB
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	30	220.059.000	Disdikpora
8. Penguatan Fiskal daerah						
22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio desentralisasi fiskal	%	11,53	1.410.000.000	BPKAD
		Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	%	0,7		
23	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	%	95	2.330.800.000	SETDA
		Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	%	Level III (Proaktif)		
		Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	%	100		
		Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	%	60		
		Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	%	100		
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM						
24	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.133.648.250	880.000.000	Disperind TK
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi	%	8	121.000.000	Disdag KUKM

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
	Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah				
26	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Jumlah UMKM	%	15	787.000.000	Disdag KUKM
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM						
27	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Ton	269,82	960.142.000	Disper
28	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41.00,9	1.281.511.700	Disper
29	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	06.28,8	715.570.000	Disper
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	Ton	19.138,71	2.000.000.000	Distan KP
		Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	Ton	7.211,15		
		Jumlah Produksi sektor perkebunan	Ton	33.485,89		
		Jumlah Produksi sektor peternakan	Ton	530.516,64		
31	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	%	4,36	3.712.291.000	Distan KP
32	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	4,55	125.000.000	Distan KP
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	5,68		
33	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	%	1	50.000.000	Dinas PMPTSP
34	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Orang/ Lembaga	30	125.000.000	Dinas PMPTSP
		Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	32.000		
35	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	100	125.000.000	Dinas PMPTSP
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal						
36	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	15,33	250.000.000	Disparbud
37	Program Peningkatan Daya	Persentase daya tarik wisata dan	%	11,3	300.000.000	Disparbud

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
	Tarik Destinasi Pariwisata	destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan				
38	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	5	300.000.000	Disparbud
7. Pengentasan kemiskinan						
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH						
39	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	24,7	75.000.000	Dinsos
		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100		
40	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	1.521.600.000	Dinsos
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100		
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		
		PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100		
41	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	78,5	377.163.000	Dinsos
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,74		
42	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan	%	7,2	741.000.000	DPKP

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
		permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani				
43	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	1.000.000.000	DPKP
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100		
44	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	%	0,64	350.000.000	DPKP
		Rasio permukiman layak huni		0,9		
45	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	44,5	4.054.388.983	Dinas PUTR
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah						
46	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	15	25.000.000	Disdag KUKM
47	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	27	115.000.000	Disperind TK
48	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	3,55	350.000.000	Disperind TK
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	58.817.959 ,80		
2. Kemandirian pangan						
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal						
49	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	0,2	457.970.000	Distan KP
50	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan	%	0	0	Distan KP
51	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	%	31,17	260.000.000	Distan KP

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
	Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular	%	31,31		
52	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Angka		14.223.913.343	Dinas PUTR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah sungai dan wilayah pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka (Ha)	0,1171		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka (Ha)	77,11		
		Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah	%	2,50		
53	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	297.000.000	Diskominfo SP
54	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	9,88	495.000.000	Dinas PMD
55	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	%	18,52	35.000.000	Dinas PMD
56	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengelola Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi	%	0	0	Disdag KUKM
57	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0	0	Dinas PMD
1. Membangun desa, menata kota						
58	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	%	56,29	1.500.000.000	Dishub
59	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	49	54.250.000.115	Dinas PUTR
		Tingkat Kemantapan Jembatan pada ruas jalan kabupaten	%	79		
60	Program Peningkatan	Cakupan Lingkungan Yang	%	11,92	3.479.473.000	DPKP

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
	Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU				
61	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	200.000.000	Dinas PUTR
62	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	97,43	5.797.480.000	Dinas PUTR
		Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	%			
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan						
63	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	30	1.063.120.000	Badan Kesbangpol
14.Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan						
64	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	%	60	4.036.829.000	SETDA
		Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	%	100		
		Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	%	100		
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	%	100		
		Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	%	58,44		
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga						
65	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	%	34,8	100.000.000	Disparbud
66	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	Orang	17	2.942.395.000	Disdikpora
		Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	19		
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum						

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
67	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan	%	37,5	5.000.000	Badan Kesbangpol
		Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	%	20		
68	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	482.470.000	Satpol PP, Damkar
		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100		
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	0,63		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	2		
17. Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan.						
69	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	75,49	556.750.000	DLH
		Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	80,05		
70	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	%	1,38	614.713.000	DLH
71	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	%	0	0	DLH
72	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	20	65.374.000	DLH
73	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	2	519.950.000	DLH
		Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	%	3,97		
74	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	1.188.319.000	BPBD

No.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu Anggaran (Rp)	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	%	100		
75	Program Penanganan Bencana (SPM)	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	160.000.000	Dinsos
76	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	75	302.038.600	Satpol PP, Damkar
		Waktu tanggap (Respon time) Penanganan Kebakaran	Menit	15		

Sumber: Bapperida Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

Dalam rangka menunjang pencapian target program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, perlu dukungan pembiayaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari seluruh perangkat daerah. Untuk pembiayaan tersebut, ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah dengan nomenklatur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut (**Tabel 3.16**):

Tabel 3. 16 Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No	Organisasi Perangkat Daerah (Perda Nomor 4 Tahun 2022)	Pagu RKPD Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	349.489.567.000,00
2	Dinas Kesehatan	143.121.447.000,00
2.a	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	44.285.297.000,00
2.b	Rumah Sakit Pratama Jampea	2.632.517.000,00
2.c	Puskesmas Benteng	3.133.630.000,00
2.d	Puskesmas Bontosunggu	1.972.321.000,00
2.e	Puskesmas Polebunging	1.970.500.000,00
2.f	Puskesmas Barugaia	1.993.131.000,00
2.g	Puskesmas Buki	1.781.820.000,00
2.h	Puskesmas Bontomatene	2.280.000.000,00

No	Organisasi Perangkat Daerah (Perda Nomor 4 Tahun 2022)	Pagu RKPD Tahun 2026 (Rp.)
2.i	Puskesmas Parangia	2.011.002.000,00
2.j	Puskesmas Lowa	1.663.839.000,00
2.k	Puskesmas Bontosikuyu	2.064.500.000,00
2.l	Puskesmas Ujung Jampea	1.797.500.000,00
2.m	Puskesmas Pasimasunggu	2.070.500.000,00
2.n	Puskesmas Pasitallu	2.570.596.000,00
2.o	Puskesmas Pasimarannu	2.267.000.000,00
2.p	Puskesmas Pasilambena	2.016.312.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.384.802.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman	9.091.176.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	10.591.936.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.684.744.000,00
7	Dinas Sosial	5.972.524.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	7.930.377.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.110.945.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.000.101.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.717.886.000,00
12	Dinas Perhubungan	9.161.543.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.142.292.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.617.522.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.658.517.000,00
16	Dinas Perikanan	7.301.363.000,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.814.716.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.418.638.000,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	5.649.550.000,00
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.538.499.000,00
21	Sekretariat Daerah	41.102.882.000,00
22	Sekretariat DPRD	30.545.679.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.603.681.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	154.243.741.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.237.696.000,00
26	Inspektorat Daerah	13.171.330.000,00
27	Kecamatan Bontomatene	4.061.082.000,00
27.a	Kelurahan Batangmata	1.604.993.000,00
27.b	Kelurahan Batangmata Sapo	1.579.123.000,00
28	Kecamatan Buki	2.305.023.000,00
29	Kecamatan Bontomanai	2.230.310.000,00
30	Kecamatan Benteng	4.128.373.000,00
30.a	Kelurahan Benteng	1.878.783.000,00
30.b	Kelurahan Benteng Selatan	1.858.956.000,00
30.c	Kelurahan Benteng Utara	1.731.445.000,00
31	Kecamatan Bontoharu	3.361.057.000,00
31.a	Kelurahan Bontobangun	1.942.250.000,00
31.b	Kelurahan Putabangun	1.758.411.000,00
32	Kecamatan Bontosikuyu	2.236.098.000,00
33	Kecamatan Pasimasunggu	2.293.830.000,00
34	Kecamatan Pasimasunggu Timur	2.091.683.000,00
35	Kecamatan Pasimarannu	1.790.880.000,00
36	Kecamatan Pasilambena	2.093.985.000,00
37	Kecamatan Takabonerate	1.922.915.000,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.372.099.000,00
	T O T A L	**1.087.054.915.000,00**

Sumber: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sinergitas dan penyelarasan program pembangunan daerah terhadap pencapaian target 17 tujuan TPB/SDGs dengan alokasi anggaran sebagai berikut (**Tabel 3.17**):

Tabel 3. 17 Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah Terhadap Pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2026 (Rp.)
1	Tujuan 1	1	Program Rehabilitasi Sosial	1.521.600.000
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	2	Program pemberdayaan sosial	75.000.000
		3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	121.000.000
		4	Program Pengembangan UMKM	787.000.000
		5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.712.291.000
		6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000.000.000
		7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.281.511.700
		8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	715.570.000
		9	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	960.142.000
		10	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	25.000.000
		11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	60.984.000
		12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	350.000.000
		13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.094.655.000
		14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	791.000.000
		15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.303.309.800
		16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200.000.000
		17	Program Pengelolaan Pendidikan	70.143.236.400
		18	Program Penanggulangan Bencana	1.188.319.000
		19	Program Penanganan Bencana	160.000.000
		20	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	700.000.000
2	Tujuan 2	1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	457.970.000
	Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000
		3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000
		4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	260.000.000
3	Tujuan 3	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.746.330.200
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	400.000.000

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2026 (Rp.)
	kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	215.816.000
		5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	482.470.000
		6	Program Pengendalian Penduduk	180.512.500
		7	Program Perlindungan Perempuan	108.423.200
4	Tujuan 4	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Pendidikan Berkualitas : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	754.594.000
		3	Program Pengembangan Kurikulum	587.515.600
		4	Program Pembinaan Perpustakaan	54.239.000
5	Tujuan 5	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	29.961.000
	Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	25.290.000
		3	Program Perlindungan Perempuan	Telah dianggarkan pada tujuan 3
		4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	55.943.000
		5	Program Perlindungan Khusus Anak	69.390.000
6	Tujuan 6	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.223.913.343
7	Tujuan 7	1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	802.750.000
	Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin akses energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua;			
8	Tujuan 8	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	55.000.000
		3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000
		4	Program Promosi Penanaman Modal	125.000.000
		5	Program Pelayanan Penanaman Modal	125.000.000
		6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	351.040.000
		7	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000
		8	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.330.800.000
		9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	250.000.000
9	Tujuan 9	1	Program Penyelenggaraan Jalan	54.250.000.115
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	2	Program Pengelolaan Pelayaran	1.500.000.000
		3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.320.000.000
		4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	880.000.000
		5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		6	Program Pengembangan UMKM	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	211.932.500
		8	Program Riset dan Inovasi Daerah	400.000.000
		9	Program Penataan Bangunan Gedung	5.344.554.630
10	Tujuan 10	1	Program Rehabilitasi Sosial	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi	2	Program pemberdayaan sosial	Telah dianggarkan pada tujuan 1

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2026 (Rp.)
	kesenjangan intra dan antar Negara;	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.042.579.356
		5	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	35.000.000
11	Tujuan 11	1	Program Pengembangan Perumahan	1.000.000.000
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	350.000.000
		3	Program Kawasan Permukiman	741.000.000
		4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3.479.473.000
		5	Program Pengembangan Kebudayaan	100.000.000
12	Tujuan 12	1	Program Pengelolaan Persampahan	519.950.000
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	300.000.000
		3	Program Pengembangan Kebudayaan	Telah dianggarkan pada tujuan 11
13	Tujuan 13	1	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	Program Penanganan Bencana	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	302.038.600
14	Tujuan 14	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Ekosistem Lautan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	38.675.000
15	Tujuan 15	1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	614.713.000
	Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaraman hayati	2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	111.759.000
		3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 9
16	Tujuan 16	1	Program Perlindungan Perempuan	Telah dianggarkan pada tujuan 5
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembangaan yang Tangguh : Menguatkan masyarakat yang inkluif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	2	Program Perlindungan Khusus Anak	Telah dianggarkan pada tujuan 5
		3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.397.388.000
		4	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	668.187.884
17	Tujuan 17	1	Program penyelenggaraan statistik sektoral	170.000.000
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Telah dianggarkan pada tujuan 7
		4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Telah dianggarkan pada tujuan 9
		5	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	472.000.000
Total				**291.271.827.828**

Sumber: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bagian Pembiayaan dalam struktur`APBD merupakan bagian yang sama pentingnya dengan bagian pendapatan dan belanja. Apabila terjadi surplus anggaran maka alokasi penggunaannya dilaksanakan melalui pos-pos yang ada dalam pembiayaan. Demikian pula apabila terjadi defisit yang tidak bisa lagi ditutup dengan menaikan pos-pos yang ada dalam struktur pendapatan. maka diupayakan ditutup melalui pos yang terdapat dalam bagian pembiayaan. Seperti halnya proyeksi untuk Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.042.562.717.000,-, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.038.562.717.000,-, terdapat selisih sebesar Rp. 4.000.000.000,- sehingga selisih tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sumber penerimaan pembiayaan berasa dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.18**.

Tabel 3. 18 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026

Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Target 2025 (Rp)	Proyeksi 2026 (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	**89.793.068.500,42**	**45.846.626.145,18**	**56,276.968.600**	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	89.717.404.819,42	45.813.525.076,18	56,276.968.600	
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	75.663.671,00	33.101.069,00		
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undanga				
Pengeluaran Pembiayaan			**1.500.000.000**	**4.000.000.000**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo				
Penyertaan Modal Daerah			1.500.000.000	4.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
Pembiayaan Netto	**89.793.068.500,42**	**45.846.626.145,18**	**54.776.978.600**	**-4.000.000.000**

Sumber: BPKPD, Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

3.2.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dan program perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kemudian dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.19**.

Tabel 3. 19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2026

Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Target 2025 (Rp)	Proyeksi 2026 (Rp)
Pendapatan	945.693.874.944,08	1.000.332.884.417,41	1.080.858.748.700	1.087.054.915.000
Pencairan Dana Cadangan	-			
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	89.717.404.819,42	45.813.525.076,18	56.276.978.600	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	75.663.671,00			
Total Penerimaan	89.793.068.500,42	1.046.146.409.493,59	56.276.978.600	0
Dikurangi				
Pengeluaran Pembiayaan			1.500.000.000	4.000.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.035.846.943.444,50**	**1.046.146.409.493,59**	**1.038.562.717.000**	**1.083.054.915.000**

Sumber: BPKPD, Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

Dengan terbatasnya anggaran, maka pengalokasian rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasi dan belanja modal dalam rangka pendanaan program pembangunan daerah berdasar pada skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158 **(Tabel 3.20**) adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah;
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3. 20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2026

No.	Uraian	Tahun 2024		Proyeksi			
				Tahun 2025		Tahun 2026	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.046.146.409.493,59		1.038.562.717.000	100	1.083.054.915.000	
2	Prioritas I			444.057.734.038	42,76		
3	Prioritas II			260.885.329.115	25,12		
4	Prioritas III			333.619.653.847	32,12		

Sumber: BPKPD, Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025, diolah

3.2.5. Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya

Dilihat dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, sekitar 40 persen dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar yang rata-rata sebesar 1 triliun rupiah pertahun dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Kondisi tersebut menggambarkan kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar masih jauh dari kemandirian. Untuk membiayai pembangunan, Pemerintah Daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung terhadap APBD karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim dan sebagian besar APBD bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil, sehingga pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mengupayakan alternatif sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Beberapa alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan untuk peningkatan/pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang sesuai dengan potensi daerah yaitu pertanian, kelautan dan pariwisata. Terkait dengan hal tersebut, mulai tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah bekerja sama dengan dua lembaga pendidikan yaitu Institut Teknilogi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar (ITSBM Selayar) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) melalui fakultas vokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Peningkatan partisipasi dunia usaha atau perbankan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Potensi pembiayaan pembangunan daerah melalui CSR didukung oleh besarnya potensi pertanian, kelautan dan perikanan Selayar, dimana sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten. Diharapkan pembiayaan untuk pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan yang tidak dibiayai APBD maupun APBN, dapat dibiayai dengan CSR melalui bantuan kepada kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan.
3. Kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta melalui investasi untuk mendukung program strategis daerah khususnya pengembangan sektor pariwisata.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2026, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan serta prioritas dan sasaran pembangunan Nasional.

Lima Fokus Kerja Presiden yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); Pembangunan infrastruktur; Penyederhanaan regulasi; Penyederhanaan birokrasi; dan Transformasi ekonomi. Sedangkan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memuat Lima Program Nyata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan; Pembangunan Infrastruktur yang menjangkau masyarakat Desa Terpencil; Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan Ambulans Siaga; Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani; dan Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka menegah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025-2029, visi pembangunan daerah adalah:

“BERSAMA MEMBANGUN SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu: pokok visi *Maju* adalah Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian, serta hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal; dan pokok visi *Sejahtera* menunjukkan Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif. Dalam arti, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui ”Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital,

dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah;

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Dalam arti, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat" yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah. Dalam arti, membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui "Program Hilirisassi Sumber Daya Alam" atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Selain itu, meningkatkan produk daerah melaui "Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat" dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan. Dalam arti, mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) pada masing-masing desa melalui "Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan", dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah. Mengandung makna, pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui "Program Pengembangan Prasarana Transportasi" dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antarpulau dan kesatuan wilayah kabupaten;
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama. Mengandung makna, menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial; dan
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Mengandung makna, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan melalui program "Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup", dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selanjutnya, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi RPJMD kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sinkronisasi dan keterkaitan visi dan misi RPJPD dengan visi dan misi RPJMD sebagai upaya tetap menjaga kesinambungan apa yang akan dilakukan mulai rencana jangka panjang sampai rencana jangka menengah, dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029

Visi dan Misi RPJPD	**Visi dan Misi RPJMD**
Visi: Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Visi: Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera
Misi:	Misi:
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang Tangguh dan berkualitas	2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan	3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah
	4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perdesaan
3. Mewujudkan pengembangan tata Kelola pemerintahan yang *good governance*	1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif
4. Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan	3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah
	6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya, dan agama
5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi	6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya, dan agama
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah	5. Meningkatkan proporsi infrastruktur wilayah
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	7. Meningkatkan pengelolaan dan pengemndalian lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mewujudkan daya saing daerah yang Tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi	1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif

Dengan merujuk pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, maka tujuan, sasaran dan target kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (**Tabel 4.2)**.

Tabel 4. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Target Kinerja Tahun 2026

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Rencana Capaian 2025**	**Target 2026**
Visi: Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera						
Misi 1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif						
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks reformasi Birokrasi	Angka	60,55	62,54	64,91
S1	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,58	2,71 (C)	6,06
		Nilai SAKIP Daerah	Angka	61,68 (Cukup Baik)	63,56 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Rencana Capaian 2025	Target 2026
		Indeks SPBE	Angka	2,57 (Baik)	2,70 (Baik)	2,81 (Baik)
		Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	59,76	61,91
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat						
Tujuan 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,38	72,90
S2	Meningkatknya mutu dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	63,97	64,76	65,56
S3	Meningkatknya mutu dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,48	73,69	73,90
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	25,7	24,42	23,19
S4	Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	63,58	64,97	66,39
		Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,94	60,47	61,00
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,379	0,367	0,355
		Persentase Wirausaha Muda	%	10,33	12,41	14,52
Misi 3: Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah						
Tujuan 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,33	3,50	4,20
		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,30	3,32
		Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316
S5	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	PDRB / Kapita	Rp. Juta	58,29	60,49	63,03
S6	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,93	3,01	3,08
S7	Percepatan hilirisasi dan industri sumber daya alam berorientasi ekspor	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	45,33	45,47	45,69
		Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	-14,23	-9,72	-9,66
S8	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	-168,03	9,09	10,94
S9	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,24	0,24	0,25
S10	Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Perse	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,05	1,96	1,87
Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan						
Tujuan 4: Meningkatnya Kemandirian Perdesaan		Indeks Desa Membangun	Angka	0,7190 (Maju)	0,7518 (Maju)	0,7530 (Maju)
S11	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,03	77,39	79,15
		Indeks Ekonomi Hijau	Angka	23,3	23,51	24,07
		Indeks Ekonomi Biru	Angka	100,20	106,35	117,75

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Rencana Capaian 2025	Target 2026
S12	Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	%	44,34	46,41	48,75
S13	Meningkatnya status desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	27,16 (22 Desa)	28,40 (23 Desa)	29,63 (24 Desa)
Misi 5: Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah						
Tujuan 5: Meningkatnya konektivitas wilayah		Indeks Infrastruktur	Angka	3,26	3,31	3,33
S14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Jalan Mantap	Angka	54,58	55,03	56,73
		Layanan Infrastruktur Pelabuhan	%	3,37	3,40	3,43
Misi 6: Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama						
Tujuan 6: Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun		Indeks Harmoni	Angka	6,61	6,63	6,66
S15	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah	Persen	5,65	8,70	14,11
S16	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	77,87	78,29	78,74
		Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun perekonomian masyarakat	Persen	2,5	4,5	6,6
S17	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	0,39	0,38	0,36
Misi 7: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan						
Tujuan 7: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65	67,61 (Baik)	68,79 (Baik)
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	18,02	23,66	28,06
S18	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Udara	Angka	72,45	79,75	80,05
		Indeks Kualitas Air	Angka	68,09	75,29	75,49
		Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,02	65,09	65,15
S19	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	Angka	133,58 (Sedang)	132,24 (Sedang)	130,92 (Sedang)

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 merupakan penjabaran dan keberlanjutan logis dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah tahun 2025-2029, yang diharapkan menjadi kunci sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah untuk mencapai visi bersama. Gambaran konsistensi tujuan dan sasaran RPJMD tahun pelaksanan 2026 dan RKPD tahun 2026 sebagai berikut (**Tabel 4.3)**.

Tabel 4. 3 Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dengan RKPD Tahun 2026

RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026					RKPD Tahun 2026				
Tujuan dan Sasaran		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**	**Tujuan dan Sasaran**		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks reformasi Birokrasi	Angka	64,91	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks reformasi Birokrasi	Angka	64,91
S1	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Indeks Pelayanan Publik	Angka	6,06	S1	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Indeks Pelayanan Publik	Angka	6,06
		Nilai SAKIP Daerah	Angka	63,59 (Cukup Baik)			Nilai SAKIP Daerah	Angka	63,59 (Cukup Baik)
		Indeks SPBE	Angka	2,81 (Baik)			Indeks SPBE	Angka	2,81 (Baik)
		Indeks Inovasi Daerah	Angka	61,91			Indeks Inovasi Daerah	Angka	61,91
Tujuan 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,90	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,90
S2	Meningkatknya mutu dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	65,56	S2	Meningkatknya mutu dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	65,56
S3	Meningkatknya mutu dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,90	S3	Meningkatknya mutu dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,90
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,19			Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,19
S4	Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	66,39	S4	Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	66,39
		Indeks Perlindungan Anak	Angka	61,00			Indeks Perlindungan Anak	Angka	61,00
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,355			Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,355
		Persentase Wirausaha Muda	%	14,52			Persentase Wirausaha Muda	%	14,52
Tujuan 3: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,20	Tujuan 3: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,20
		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,32			Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,32
		Indeks Gini	Angka	0,316			Indeks Gini	Angka	0,316
S5	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	PDRB / Kapita	Rp. Juta	63,03	S5	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	PDRB / Kapita	Rp. Juta	63,03
S6	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	3,08	S6	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	3,08
S7	Percepatan hilirisasi dan industri sumber daya alam berorientasi ekspor	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	45,69	S7	Percepatan hilirisasi dan industri sumber daya alam berorientasi ekspor	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	45,69
		Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	-9,66			Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	-9,66

RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026					RKPD Tahun 2026				
Tujuan dan Sasaran		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**	**Tujuan dan Sasaran**		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**
S8	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	10,94	S8	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	10,94
S9	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,25	S9	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,25
S10	Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,67-8,77	S10	Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,67-8,77
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,87			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,87
Tujuan 4: Meningkatnya Kemandirian Perdesaan		Indeks Desa Membangun	Angka	0,7530 (Maju)	Tujuan 4: Meningkatnya Kemandirian Perdesaan		Indeks Desa Membangun	Angka	0,7530 (Maju)
S11	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,15	S11	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,15
		Indeks Ekonomi Hijau	Angka	24,07			Indeks Ekonomi Hijau	Angka	24,07
		Indeks Ekonomi Biru	Angka	117,75			Indeks Ekonomi Biru	Angka	117,75
S12	Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	%	48,75	S12	Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	%	48,75
S13	Meningkatnya status desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	29,63 (24 Desa)	S13	Meningkatnya status desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	29,63 (24 Desa)
Tujuan 5: Meningkatnya konektivitas wilayah		Indeks Infrastruktur	Angka	3,33	Tujuan 5: Meningkatnya konektivitas wilayah		Indeks Infrastruktur	Angka	3,33
S14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Jalan Mantap	Angka	56,73	S14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Jalan Mantap	Angka	56,73
		Layanan Infrastruktur Pelabuhan	%	3,43			Layanan Infrastruktur Pelabuhan	%	3,43
Tujuan 6: Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun		Indeks Harmoni	Angka	6,66	Tujuan 6: Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun		Indeks Harmoni	Angka	6,66
S15	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah	Persen	14,11	S15	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah	Persen	14,11
S16	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	78,74	S16	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	78,74
		Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun	Persen	6,6			Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun	Persen	6,6

RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026					RKPD Tahun 2026				
Tujuan dan Sasaran		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**	**Tujuan dan Sasaran**		**Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**
		perekonomian masyarakat					perekonomian masyarakat		
S17	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	0,36	S17	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	0,36
Tujuan 7: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,79 (Baik)	Tujuan 7: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,79 (Baik)
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	28,06			Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	28,06
S18	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Udara	Angka	80,05	S18	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Udara	Angka	80,05
		Indeks Kualitas Air	Angka	75,49			Indeks Kualitas Air	Angka	75,49
		Indeks Kualitas Lahan	Angka	65,15			Indeks Kualitas Lahan	Angka	65,15
S19	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	Angka	130,92 (Sedang)	S19	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	Angka	130,92 (Sedang)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan RKPD kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya, seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesinambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah prioritas kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kebijakan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah *(middle income trap)* yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**".

Sasaran pembangunan Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Kontribusi PDRB Provinsi, Indeks Modal Manusia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dan menurunkan Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target dan indikator sasaran pembangunan Tahun 2026, dapat dilihat pada **Tabel 4.4**. berikut:

Tabel 4. 4 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2026

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
PDRB per Kapita	Rp. Juta	5.870
Kontribusi PDRB Provinsi		-
Tingkat Kemiskinan	%	6,50 – 7,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
Rasio Gini	Angka	0,377 - 0,380
Indeks Modal Manusia	Angka	0,57
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	37,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2026-2029 dan RKP Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2026 yaitu "**Peningkatan Kualitas SDM yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Target indikator makro pembangunan di Tahun 2026, dapat dilihat pada **Tabel 4.5.** berikut:

Tabel 4. 5 Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2026

Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2026
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-6,5
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,64-4,03
3. Indeks Gini	Angka	0,358
4. Indeks Modal Manusia	Angka	0,53
5. Tingkat Kemiskinan	%	6,85 – 7,08
6. PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	80,5-84,9

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang konsisten dan berkesesuaian dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah diharapkan menjadi arahan dan pedoman (guideline) dalam menetapkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan kedalam tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 yaitu **"Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera"**, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun desa, menata kota;
2. Kemandirian pangan;
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS;
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT;
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penguatan fiskal daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM;
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga;
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Fokus pembangunan untuk mendukung pencapaian setiap prioritas diatas adalah sebagai berikut:

1. Prioritas membangun desa, menata kota, difokuskan pada huluisasi dan hilirisasi SDA, Pemasaran Produk UMKM berbasis teknologi digital, menata kawasan permukiman, menata kegiatan UMKM perkotaan serta menata PSU perkotaan;
2. Prioritas kemandirian pangan, difokuskan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Prioritas pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, difokuskan pada pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis;
4. Prioritas penguatan pendidikan gratis PAUD - PT, difokuskan pada program bantuan gratis kepada peserta didik pada satua PUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa;
5. Prioritas Percepatan penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, difokuskan pada kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan

pendidikan formal setinggi–tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;

6. Prioritas penyehatan lingkungan dan bebas RTLH, difokuskan pada program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan sebagian dari penyebab kemiskinan;
7. Prioritas pengentasan kemiskinan, difokuskan pada program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat;
8. Prioritas penguatan fiskal daerah, difokuskan pada program peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal;
9. Prioritas pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah, difokuskan melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasiskan sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi;
10. Prioritas hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan;
11. Prioritas huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, difokuskan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikutura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi;
12. Prioritas pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM, difokuskan pada pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan;
13. Prioritas penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, difokuskan pada pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antarsuku dan antaragama;
14. Prioritas pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, disfokuskan pada pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
15. Prioritas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, disfokuskan pada penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Prioritas pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, difokuskan pada penggalian dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-

nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni, budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi;

17. Prioritas pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, difokuskan pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2026 pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar difokuskan pada sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Perkiraan 2025	Target RKPD 2026
Membangun Desa, Menata Kota	**Meningkatnya konektivitas wilayah (T5)**	**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**3,26**	**3,31**	**3,33**
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata (S14)	Indeks Jalan Mantap	Angka	54,58	55,03	56,73
		Layanan Infrastruktur Pelabuhan	Persen	3,37	3,40	3,43
Kemandirian Pangan Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	**Meningkatknya Kemandirian Perdesaan (T4)**	**Indeks Desa Membangun**	**Angka**	**0,7190**	**0,7518**	**0,7530**
	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan (S11)	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,03	77,39	79,15
		Indeks Ekonomi Hijau	Angka	23,33	23,51	24,07
		Indeks Ekonomi Biru	Angka	100,20	106,35	117,75
	Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital (S12)	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Persen	44,34	46,56	48,88
	Meningkatnya status desa (S13)	Persentase Desa Mandiri	Persen	27,16 (22 Desa)	28,40 (23 Desa)	29,63 (24 Desa)
Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT	**Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia (T2)**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**71,98**	**72,38**	**72,90**
	Meningkatknya mutu dan akses pendidikan (S2)	Indeks Pendidikan	Angka	63,97	64,76	65,56
Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS	Meningkatknya mutu dan akses kesehatan (S3)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,48	73,69	73,90
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	25,7	24,42	23,19
Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas, generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender (S4)	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	63,58	64,97	66,39
		Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,94	60,47	61,00
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,379	0,367	0,355
		Persentase Wirausaha Muda	Persen	10,33	12,41	14,52
Penguatan Fiskal Daerah	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan (T1)**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**60,55**	**62,54**	**64,91**
	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif (S1)	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,58	2,66	2,75
		Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	61,68 (Cukup Baik)	63,56 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)
		Indeks SPBE	Angka	2,57 (Baik)	2,66 (Baik)	2,74 (Baik)
		Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	59,76	61,91

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Perkiraan 2025	Target RKPD 2026
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing (T3)	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**3,33**	**3,50**	**4,20**
		Indeks Daya Saing Daerah	**Angka**	**3,26**	**3,30**	**3,32**
		Indeks Gini	**Angka**	**0,329**	**0,323**	**0,316**
	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah (S5)	PDRB / Kapita	Rp. Juta	58,29	60,49	63,03
Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan (S6)	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,93	3,01	3,08
Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Percepatan hilirisasi dan industri sumber daya alam berorientasi ekspor (S7)	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	45,33	45,47	45,69
		Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	-14,23	-9,72	-9,66
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah (S8)	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	-168,03	9,09	10,94
Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif (S9)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,24	0,24	0,25
Pengentasan kemiskinan	Menurunya angka pengangguran dan kemiskinan (10)	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77
Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,05	1,96	1,87
Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah						
Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	**Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun (T6)**	**Indeks Harmoni**	**Angka**	**6,61**	**6,63**	**6,66**
	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat (S15)	Persentase penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah	Persen	5,65*	8,70	14,11
Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya (S16)	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	77,87	78,29	78,74
		Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun perekonomian masyarakat	Persen	2,5	4,5	6,6
Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga						
Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial (S17)	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	0,39	0,38	0,36
Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan (T7)**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Angka**	**67,65 (Baik)**	**74,86 (Baik)**	**75,07 (Baik)**
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	**Persen**	**18,02**	**23,66**	**28,06**

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Perkiraan 2025	Target RKPD 2026
	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan (S18)	Indeks Kualitas Udara	Angka	72,45	79,75	80,05
		Indeks Kualitas Air	Angka	68,09	75,29	75,49
		Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,02	65,09	65,16
	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (S19)	Indeks Resiko Bencana	Angka	133,58 (Sedang)	132,24 (Sedang)	130.92 (Sedang)

Dalam mewujudkan ke-7 prioritas tersebut, ditetapkan program-program yang akan menjadi alat pelaksanaan prioritas tersebut. Program-program ini juga akan dikaitkan dengan indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Tujuan, Sasaran dan program prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada **Tabel 4.7.**

Tabel 4. 7 Penjabaran Program Pembangunan Daerah dari Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan				
Sasaran 1: Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif				
8. Penguatan Fiskal daerah				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	%	40	BKPSDM
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	%	50	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	%	94	BKPSDM
	Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	%	94	
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	95	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	%	94,5	Semua OPD
	Persentase Capaian Kinerja OPD	%	89,5	
	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	%	65,5	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan	Angka rasio	4	BPKAD
	Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	
	Penetapan LKPD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	%	82,54	Itda
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	%	67,49	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	Bapperida

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	Bapperida
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	15	Disdukcapil
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)	%	53	
	Cakupan kepemilikan KTP elektronik		95	
Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan	%	100	Bapperida
	Persentase penerapan inovasi daerah	%	50	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Setwan
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Penganggaran, Pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	
	Ketetapan penetapan PERDA APBD Tahun n	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat Waktu	
	Persentase penetapan Ranperda Tahun n	%	100	
Progran Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100	Disdukcapil
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,69	
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	93,5	
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	72	Diskominfo SP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	85	Semua Kecamatan
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia				
Sasaran 2: Meningkatnya mutu dan akses pendidikan				
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT				
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase Warga Negara	%	94,81	Disdikpora
	Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Warga Negara	%	99,52	

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
	Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	63,19	
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	60,74	
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,59	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	87,91	
	Indeks Iklim Keamanan SD	Angka	72,55	
	Indeks Iklim Keamanan SMP	Angka	71,91	
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Angka	68,96	
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Angka	68,54	
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Angka	60,43	
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Angka	60,04	
	Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi bangunan baik	%	48,3	
	Persentase Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	44,31	
	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	44,75	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	%	73,75	Disdikpora
	Rasio guru terhadap Rombongan Belajar (PAUD dan SD)	%	01.01	
	Rasio guru terhadap Mata Pelajaran tingkat SMP	%	01.01	
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	%	86,3	Disdikpora
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	14.521	DPK
	Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	%	50,47	
Sasaran 3: Meningkatnya mutu dan akses kesehatan				
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM/Prioritas)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	Dinkes
	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara usia produktif yang	%	100	

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
	mendapatkan layanan kesehatan			
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	
	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender				
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas				
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	%	30	DP3AP2KB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	%	30	DP3AP2KB
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	30	Disdikpora
Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing				
Sasaran 5 : Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah				
8. Penguatan Fiskal daerah				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio desentralisasi fiskal	%	11,53	BPKAD
	Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	%	0,7	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	%	95	SETDA
	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	%	Level III (Proaktif)	
	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	%	100	
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	%	60	
	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	%	100	
Sasaran 6 : Meningkatknya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM				
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.133.648.250	Disperind TK
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha	%	8	Disdag KUKM

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kecil dan/atau Usaha Menengah			
Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Jumlah UMKM	%	15	Disdag KUKM
Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor				
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM				
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Ton	269,82	Disper
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41.00,9	Disper
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	06.28,8	Disper
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	Ton	19.138,71	Distan KP
	Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	Ton	7.211,15	
	Jumlah Produksi sektor perkebunan	Ton	33.485,89	
	Jumlah Produksi sektor peternakan	Ton	530.516,64	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	%	4,36	Distan KP
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	4,55	Distan KP
	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	5,68	
Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah				
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	%	1	Dinas PMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Orang/ Lembaga	30	Dinas PMPTSP
	Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	32.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	100	Dinas PMPTSP
Sasaran 9 : Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan ekonomi kreatif				
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal				
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	15,33	Disparbud
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan	%	11,3	Disparbud
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	5	Disparbud
Sasaran 10 : Menurunya angka pengangguran dan kemiskinan				
7. Pengentasan kemiskinan				
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	24,7	Dinsos
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	Dinsos

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	78,5	Dinsos
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,74	
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH				
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	7,2	DPKP
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	DPKP
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	%	0,64	DPKP
	Rasio permukiman layak huni		0,9	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	44,5	Dinas PUTR
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah				
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	15	Disdag KUKM
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	27	Disperind TK
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	3,55	Disperind TK
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	58.817.959,80	
Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian perdesaan				
Sasaran 11 : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan				
2. Kemandirian pangan				
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	0,2	Distan KP
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	Persentase cadangan pangan	%	0	Distan KP

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal				
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	%	31,17	Distan KP
	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular	%	31,31	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Angka		Dinas PUTR
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah sungai dan wilayah pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka (Ha)	0,1171	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka (Ha)	77,11	
	Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah	%	2,50	
Sasaran 12 : Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital				
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	Diskominfo SP
Sasaran 13 : Meningkatnya status desa				
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	9,88	Dinas PMD
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	%	18,52	Dinas PMD
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengelola Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi	%	0	Disdag KUKM
Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0	Dinas PMD
Tujuan 5 : Meningkatkan konektivitas wilayah				
Sasaran 14 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata				
1. Membangun desa, menata kota				
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	%	56,29	Dishub
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	49	Dinas PUTR
	Tingkat Kemantapan Jembatan pada ruas jalan kabupaten	%	79	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	11,92	DPKP
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas PUTR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	97,43	Dinas PUTR

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	%		
Tujuan 6 : Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan Masyarakat yang rukun				
Sasaran 15 : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat				
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan				
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	30	Badan Kesbangpol
Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya				
14.Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan				
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	%	60	SETDA
	Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	%	100	
	Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	%	100	
	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	%	100	
	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	%	58,44	
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga				
Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	%	34,8	Disparbud
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	Orang	17	Disdikpora
	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	19	
Sasaran 17: Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial				
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum				
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan	%	37,5	Badan Kesbangpol
	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	%	20	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	Satpol PP, Damkar
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	0,63	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	2	
Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan				
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas udara, udara dan tanah				
17. Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan				
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	75,49	DLH
	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	80,05	

Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Target Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	%	1,38	DLH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	%	0	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	20	DLH
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	2	DLH
	Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	%	3,97	
Sasaran 19 : Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	%	100	
Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinsos
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	75	Satpol PP, Damkar
	Waktu tanggap (Respon time) Penanganan Kebakaran		15	

Prioritas Pembangunan Tahun 2026 tersebut, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun sebelumnya serta isu strategis daerah yang timbul akibat permasalahan tersebut. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis daerah terhadap prioritas pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut **(Tabel 4.8)**.

Tabel 4. 8 Hubungan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS DAERAH	Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja
Masih lemahnya sistem, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan berdaya saing	Penguatan Fiskal Daerah	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan (T1)**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan			Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif (S1)	Indeks Pelayanan Publik
				Nilai SAKIP Kabupaten
				Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
Masih rendahnya pemberdayaan, lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat perdesaan	Meningkatkan status desa dan pemberdayaan ekonomi perdesaan	Kemandirian Pangan	**Meningkatnya Kemandirian Perdesaan (T4)**	**Indeks Desa Membangun**
		Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan (S11)	Indeks Ketahanan Pangan
				Indeks Ekonomi Hijau
				Indeks Ekonomi Biru
Masih terdapat 6 desa berstatus desa tertinggal (tahun 2024)			Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital (S12)	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
			Meningkatnya status desa (S13)	Persentase Desa Mandiri
Masih rendahnya kualitas SDM	peningkatan kualitas SDM	Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT	**Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia (T2)**	**Indeks Pembangunan Manusia**
Kemiskinan masih tinggi	Penurunan Kemiskinan Ekstrim		Meningkatknya mutu dan akses pendidikan (S2)	Indeks Pendidikan
TPT meningkat	Peningkatan kesejahteraan	Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS	Meningkatknya mutu dan akses kesehatan (S3)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Indeks Gini				Prevalensi Stunting pada Balita
Indeks Pembangunan Gender		Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas generasi muda keluarga dan kesetaraan gender (S5)	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
Stunting				Indeks Perlindungan Anak
				Indeks Ketimpangan Gender
				Persentase Wirausaha Muda
SPM belum memenuhi target	ketersedian dan kualitas infrstruktur dasar	Membangun desa, menata kota	**Meningkatnya konektivitas wilayah (T5)**	**Indeks Infrastruktur**
konektivitas wilayah			Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata (S14)	Indeks Jalan Mantap
				Layanan Infrastruktur Pelabuhan
Masih rendahnya infrastruktur perekonomian dan akses permodalan	Pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan	Penguatan Fiskal daerah	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing (T3)**	**Pertumbuhan Ekonomi**
				Indeks Daya Saing Daerah
				Indeks Gini
			Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah (S5)	PDRB / Kapita
		Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan (S6)	Rasio PDRB Industri Pengolahan
				Pembentukan Modal Tetap Bruto

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS DAERAH	Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja
		Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Percepatan hilirisasi dan industri sumber daya alam berorientasi ekspor (S7)	Net Ekspor Barang dan Jasa
			Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah (S8)	Pertumbuhan Investasi Daerah
		Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif (S9)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
		Pengentasan kemiskinan	Menurunya angka pengangguran dan kemiskinan (S10)	Tingkat Kemiskinan
		Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah		
Terjadinya pergesaran nilai budaya dan agama	Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	**Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun (T6)**	**Indeks Harmoni**
			Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat (S15)	Persentase penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah
		Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya (S16)	Indeks Kesalehan Sosial
		Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga		Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun perekonomian masyarakat
		Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial (S17)	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
Terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan (T7)**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**
				Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan
kerusakan lingkungan (lahan kritis) dan bencanan alam	Pelestarian alam dan mitigasi bencana		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan (S18)	Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Air
Pengelolaan persampahan				Indeks Kualitas Lahan
GRK			Meningkatnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (S19)	Indeks Resiko Bencana

4.3. Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana target kinerja sasaran akan dicapai secara optimal dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Terwujudnya Visi RPJMD, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah sesuai strategi dan arah kebijakan yang tepat setiap tahunnya. Untuk mendapatkan program prioritas, maka program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan mengacu pada strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah direncanakan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.9** berikut.

Tabel 4. 9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
Misi 1 :Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif					
Tujuan 1 : Meningkatnya **kualitas tata kelola pemerintahan**	**Sasaran 1 : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif**	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi	Penguatan Fiskal daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	Peningkatan kualitas, tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP Kabupaten
			Peningkatan tata kelola kinerja pemerintahan daerah dan penatausahaan kinerja keuangan		Indeks SPBE
			Pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah		Indeks Inovasi Daerah
			Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
		Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang kmprehensip, integratif dan aplikatif		
		Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN		
			Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur		
		Meningkatkan dan menata kerjasama daerah	Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global		
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	**Sasaran 2 : Meningkatnya mutu dan akses pendidikan**	Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pemerataan layanan guna mencapai wajib belajar 13 tahun	Peningkatan kualitas pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non formal	Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT	Indeks Pembangunan Manusia
					Indeks Pendidikan
			Pengembangan kurikulum pendidikan karakter		
			Penataan distribusi guru yang merata dan berkesesuaian antar sekolah		
			Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dengan pelatihan yang berkesinambungan		
			Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan		
	Sasaran 3 : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan melalui pemerataan layanan	Peningkatan pencapaian terget SPM kesehatan	Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS	Usia Harapan Hidup (UHH)

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
		serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
			Peningkatan dan pemantapan BLUD RS dan Puskesmas		
			Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis		
			Peningkatan kualitas penyelenggarakan pelayanan jamianan kesehatan bagi masyarakat miskin secara berata dan berkeadilan		
			Peningkatan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan		
			Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah kepulauan		
			Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).		
			Pemberdayaan masyarakat peningkatan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat		
			Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyalit tidak menular dan penyakit menular		
			Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melaui pendidikan dan pelatihan berkesinambunagan dan berkelanjutan		
			Peningkatan pelatihan dan distribusi tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil		
			Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dalam upaya pencegahan dan penangnan stunting		

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan program peningkatan gizi anak melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah dan fasilitas kesehatan		
			Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil		
		Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan	Peningkatan rehabilitasi RTLH		
			Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaran SPAM; Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air bersih		
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas SDM produktif	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda	Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
			Peningkatan pembinaan prestasi dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif		Indeks Perlindungan Anak
			Pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif; Mendukung pelaksanaan event-event olahraga prestasi dan oleharaga masyarakat		Indeks Ketimpangan Gender
					Persentase Wirausaha Muda
Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah					
Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	**Sasaran 5 : Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah**	Meningkatkan stabilitas fiskal yang adaptif dan menjaga stabilitas sektor keuangan; Meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan; dan Penataan tata kelola fiskal dan pendanaan pembangunan non pemerintah.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD).	Penguatan Fiskal daerah	Pertumbuhan Ekonomi
					Indeks Daya Saing Daerah
					Indeks Gini
					PDRB / Kapita
	Sasaran 6 : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pembangunan pusat pertumbuhan baru	Peningkatan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, peternakan	Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM	Rasio PDRB Industri Pengolahan
	Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri	Hilirisasi sumber daya alam unggulan; Meningkatkan kapasitas riset inovasi	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan	Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Pembentukan Modal Tetap Bruto

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
	sumberdaya alam berorientasi ekspor		dan pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya		Net Ekspor Barang dan Jasa
	Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Menciptakan iklim usaha untuk menarik investasi	Peningkatan investasi melalui promosi potensi daerah, dukungan regulasi kemudahan investasi di daerah		Pertumbuhan Investasi Daerah
	Sasaran 9 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata pada kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pariwisata daerah	Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
			Pengembangan daya tarik ekonomi kretif		
	Sasaran 10 : Menurunya angka pengangguran dan kemiskinan	Meningkatkan pelayanan pelindungan sosial melalui peningkatan upaya pemutakhiran data dan pemenuhan standar pelayanan minimal sosial	Peningkatan pemberdayaan keluarga	Pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah		Tingkat Pengangguran Terbuka
				Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH	
			Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya	Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah	
			Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, ekonomi, sosial, politik dan lapangan kerja formal		
			Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat		
			Peningkatkan keberdayaan masyarakat		
			Pelaksanaan program Keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya yang efektif		
			Penataan akses dan inforrmasi angkatan kerja termasuk bagi Kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
			Pengembangan kegiatan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja		
			Penataan dan peningkatan produktivitas koperasi dan usaha kecil mikro		

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan					
Tujuan 4 : Meningkatnya **kemandirian perdesaan**	**Sasaran 11 : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan**	Meningkatkan kemandirian pangan secara berkelanjutan	Pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersedian air baku dan irigasi menunjang peningkatan produktivitas pertanian	Kemandirian pangan	Indeks Desa Membangun
				Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Indeks Ketahanan Pangan
					Indeks Ekonomi Hijau
					Indeks Ekonomi Biru
	Sasaran 12 : Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam menciptakan SDM yang mandiri, kreatif dan inovatif	Peningkatan akses internet dan literasi digital untuk mendorong ekonomi digital		Indeks Masyarakat Digital Indonesia
	Sasaran 13 : Meningkatnya status desa	Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa mandiri	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa		Persentase Desa Mandiri
			Peningkatan peran kecamatan		
Misi 5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah					
Tujuan 5 : Meningkatnya **konektivitas wilayah**	**Sasaran 14 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata**	Meningkatkan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/ transportasi	Membangun desa, menata kota	Indeks Infrastruktur
		Meningkatkan pembangunan konktivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik dan konektivitas udara, darat dan digital	Pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas		Indeks Jalan Mantap
			Peningkatan akses ke kawasan strategis melalui peningkatan sarana dan parasarana jalan lingkar, jalan alternatif dan jembatan		Layanan Infrastruktur Pelabuhan
		Meningkatkan pemanfataan ALKI II dan ALKI III untuk menghubungkan rantai pasok barang dan jasa	Peningkatkan sistem jariangan distribusi barang dan jasa		
Misi 6 : Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama					
Tujuan 6 : Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun	**Sasaran 15 : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat**	Meningkatkan penguatan stabilitas hukum, politik; lembaga demokrasi yang kuat; parlemen modern, parpol yang berbasis nilai; dan penataan pendidikan politik masyarakat	Peningkatan pemehaman wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Indeks Harmoni
			Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi		Persentase penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia	Peningkatan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamanaan aparatur dan masyarakat	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan	Indeks Kesalehan Sosial
			Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat, warisan budaya dan kearifan lokal	Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga	Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun perekonomian masyarakat
	Sasaran 17 : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;	Pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
			Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif		
Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan					
Tujuan 7 **:** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	**Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan**	Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi baru terbarukan; Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan
			Mengimplementasikan pembangunan rendah karbon		Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Air
			Pengembangan infrastruktur daur ulang sampah dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah		Indeks Kualitas Lahan
			Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah		
	Sasaran 19 : Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim	Meningkatkan ketangguhan manusia masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana	Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi		Indeks Risiko Bencana
			Peningkatan kapasitas manajemen penaggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi)		

Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target makro pembangunan Tahun 2026 yang dapat dilihat pada **Tabel 4.10**.

Tabel 4. 10 Target Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	
			RKPD	RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20	4,20
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	63,03	63,03
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	1,22	1,22
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,67-8,77	9,67-8,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,87	1,87
6	Gini Rasio	Angka	0,316	0,316
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,33	73,33
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	28,92	28,92
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,07 (Baik)	75,07 (Baik)

4.4. Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Keselarasan kesepakatan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan dengan RKPD tahun 2026 disajikan pada Tabel **4.11**, Keselarasan target daerah dengan target makro pada level nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Tabel **4.12** serta Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada **Tabel 4.13**.

Tabel 4. 11 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 .0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		1.00	
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 .0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	52	52.00	
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 .0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	104	1.00	
4	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 .0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
5	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 .0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	141	141.00	
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 .0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	2	1.00	
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 .0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	1.00	
8	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 .0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
9	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00	
10	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	0.00	
11	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	15		
12	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.410	0	
13	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.410	0	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
14	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0.5	0	
15	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0.5	0	
16	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		0.00	
17	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		0.00	
18	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		0.00	
19	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	pangan, energi, dan air									
20	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	
21	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	
22	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		0.00	
23	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		0.00	
24	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	10	5.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
25	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	4	5.00	
26	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	8	10.00	
27	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	11	20.00	
28	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00	
29	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00	
30	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				kebakaran sesuai standar									
31	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1.00	
32	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	24.00	
33	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	24.00	
34	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	18.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
35	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	18.00	
36	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	0.00	
37	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	0.00	
38	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
								Kewenangan Kabupaten/Kota					
39	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			
40	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	11	11.00	
41	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	11	11.00	
42	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00	
43	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
44	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 .0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	6000.00	
45	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 .0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	6000.00	
46	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 .0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	50	50.00	
47	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 .0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	50	50.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
48	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	5	10.00	
49	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	5	10.00	
50	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	8000	8000.00	
51	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	8000	8000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
52	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	27		
53	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	100		
54	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1		
55	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30		
56	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	250	10.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
57	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	2	1.00	
58	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0.00	
59	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	0.00	
60	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen		0.00	
61	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	356,00 - Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
62	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	12	0.00	
63	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	12	0.00	
64	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket		0.00	
65	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket		0.00	
66	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton		0.00	
67	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
68	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase		0.00	
69	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase		0.00	
70	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		0.00	
71	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		0.00	
72	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	6000	6000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
73	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	6000	6000.00	
74	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan			
75	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	1.00	
76	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan	Laporan	1		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
77	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1		
78	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit		0.00	
79	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit		0.00	
80	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1.00	
81	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	347,00 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
				untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa									
82	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 .0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	17	17.00	
83	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 .0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	88	88.00	
84	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 .0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	11		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
85	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok	130		
86	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	20	20.00	
87	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	20	20.00	
88	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
89	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.00	
90	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			
91	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			
92	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
93	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 .0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			
94	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	1.00	
95	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	1.00	
96	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	10	1.00	
97	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	10	1.00	
98	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	100	3.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
99	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	100	3.00	
100	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	32	24.00	
101	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	32	24.00	
102	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	1.00	
103	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	1.00	
104	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	5	5.00	
105	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	5	5.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
106	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	69	38.00	
107	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	69	38.00	
108	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1.00	
109	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1.00	
110	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	88		
111	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
112	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	1500	3.00	
113	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	500		
114	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	7	7.00	
115	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	13	13.00	
116	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	40	0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
117	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	20	0.00	
118	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	200	0.00	
119	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	150	0.00	
120	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
121	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	70	100.00	
122	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	50	100.00	
123	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	39	38.00	
124	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	39	38.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
125	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	1	1.00	
126	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	1	1.00	
127	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	3.00	
128	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	4	3.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
129	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	17	0.00	
130	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	17	0.00	
131	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	1	0.00	
132	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	1	0.00	
133	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
134	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	0.00	
135	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	31		
136	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	31		
137	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	500		
138	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	500		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
139	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	12		
140	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	12		
141	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1		
142	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1		
143	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
144	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penggun a	10	1.00	
145	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	50.00	
146	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompo k	15	15.00	
147	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	40	40.00	
148	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	65	30.00	
149	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	70	40.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
150	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		30.00	
151	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2	1.00	
152	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi		0.00	
153	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen		0.00	
154	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
155	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi		0.00	
156	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		0.00	
157	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		0.00	
158	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
159	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		0.00	
160	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen		0.00	
161	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga		0.00	
162	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen		0.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
163	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	4	10.00	
164	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1.00	
165	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	12.500	0.00	
166	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	0.00	
167	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	2200	0.00	
168	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
169	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen			
170	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	10	2.00	
171	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1	2.00	
172	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1.00	
173	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	1.00	
174	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	2	1.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
175	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	2		
176	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang			
177	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi			
178	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	327,00 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga			

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
179	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang		18.00	
180	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang		18.00	
181	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang		18.00	
182	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		20.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
183	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		20.00	
184	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		20.00	

Tabel 4. 12 Keselarasan Target Makro Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET NASIONAL	TARGET PROVINSI	TARGET KABUPATEN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3	5,2-6,5	4,20
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	5.870 (US$)	80,5-84,9	63,03
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	-	3,21	1,22
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,50-7,50	6,85-7,08	9,67-8,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44-4,96	3,64-4,03	1,87
6	Gini Rasio	Angka	0,377-0,380	0,358	0,316
7	Indeks Pembangunan Manusia*	Angka	0,57	0,53	73,33
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	37,14	33,46	28,92
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,67	77,82	75,07 (Baik)

*Nasional dan Provinsi menggunakan Indikator Indeks Modal Manusia

Tabel 4. 13 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT		PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah		
Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan		PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga		
Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas		
Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM		PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM		

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
Penguatan Fiskal daerah	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal Pengentasan kemiskinan	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
Membangun desa, menata kota Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan, arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP Tahun 2026 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembanguan daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 4.14.**

Tabel 4. 14 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulsel dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

NO.	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	PN
1.	Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif (S1)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah (S13)	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	PN 7
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S14)		
		Meningkatnya inovasi pembangunan daerah (S15)		
2.	Meningkatknya mutu dan akses pendidikan (S2)	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif (S2)	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	PN 4
3.	Meningkatknya mutu dan akses kesehatan (S3)	Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata (S1)	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	PN 4
4.	Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender (S4)	Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender (S5)	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	PN 4
5.	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah (S5)	Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah (S8)	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	PN 3
6.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan (S6)	Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global (S7)	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	PN 5
7.	Percepatan hilirisasi dan industri sumber daya alam berorientasi ekspor (S7)		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	PN 5
8.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah (S8)	Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah (S8)	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	PN 3
9.	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif (S9)		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	PN 3
10.	Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan (S10)	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran (S10)	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan	PN 6
11.	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan (S11)	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan (S6)	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air	PN 2
12.	Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital (S12)	Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat (S12)	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PN 3
		Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (S11)		
13.	Meningkatnya status desa (S13)	Meningkatnya pembangunan perdesaan (S9)	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	PN 6
14.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata (S14)	Meningkatnya kualitas infrastruktur (S16)	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PN 3
16.	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat (S15)	Meningkatnya kualitas demokrasi (S3)	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	PN 1
17.	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat dan ketahanan ekonomi sosial budaya (S16)	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	PN 8

NO.	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	PN
18.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial (S17)		Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba	PN 7.
19.	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan (S18)	Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim (S17)	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	PN 2
20.	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (S19)		Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	PN 8

Sumber: PMDN Nomor 10 Tahun 2025, RPJMD Prov. Sulawesi Selatan, Bapperida 2025

Sebagai dukungan terhadap Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program daerah yang mendukung program prioritas tersebut sebagai berikut (**Tabel 4.15**):

Tabel 4. 15 Keselarasan Program Pembangunan Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	100
			Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	100
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100
			Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100
			Nilai akreditasi Rumah Sakit	Utama
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase posyandu aktif	38,75
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	0,7
			Rasio tenaga kesehatan per 1.000 satuan penduduk	13,5

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	94,81
			Persentase Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,52
			Persentase warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	63,19
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	60,74
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	57,59
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	73,75
			Rasio guru terhadap Rombongan Belajar (PAUD dan SD)	1:1
			Rasio guru terhadap Mata Pelajaran tingkat SMP	1:1
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	86,3
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	14.521
			Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	50,47
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	30
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan EtikaSerta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Pendidikan Politik	40
10	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80
			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	0,63
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	2
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan	37,5
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	60
			Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
			Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	100
			Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	100
			Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	58,44
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	34,80
15	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	50,00
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Usia 0-18 Tahun	92,45
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak	0,009
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi kabupaten	100
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	30
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	17
			Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	19
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	30
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai Produksi Industri Pengolahan	1.133.648.250
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM binaan yang naik kelas	8
			Persentase UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pasca panen	64
			Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya	3
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal	2
			Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital	2
24	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial koperasi	0
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	15,3
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan	11,30
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	109,8
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/ Kelurahan Rentan Rawan Pangan	15,9
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang	4,36

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
			memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	19.138,71
			Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	7.211,15
			Jumlah Produksi sektor perkebunan	33.485,89
			Jumlah Produksi sektor peternakan	530.516,64
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	31,17
			Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular	31,31
32	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	4,55
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	5,68
33	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	31,17
			Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular	31,31
34	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	29.720,89
35	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.328,82
36	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	26,34
37	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	269,82
38	Progam Pengembangan Ekspor	Progam pengembangan ekspor	Nilai ekspor perdagangan	25
39	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25
40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	35
41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	27
42	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	0
43	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	25
44	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1
45	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	95
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level III (Proaktif)
			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	60
			Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	100
46	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio desentralisasi fiskal	11,53
			Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	70
47	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	9,88
48	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	55,5
			Persentase Desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan 380emba yang baik	100
49	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	78,5
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	1,74
50	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	24,7
			Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100
51	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
			Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
			Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
			Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	58,6
52	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100
53	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3,55
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	58.817.960
54	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten	12,47
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	74

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
55	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
56	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	72
57	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100
58	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	100
59	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	82,54
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	67,49
60	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
61	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Manajemen Aset	ada
62	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan	4
			Penetapan APBD	Tepat waktu
			Penetapan LKPD	Tepat waktu
63	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	60
			Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	100
			Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	100
			Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	100
			Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	58,44
64	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	95
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level III (Proaktif)
			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	60
			Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	100
65	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	60
			Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	100
			Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	100
			Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
			Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	58,44
66	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	94
			Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	94
			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	90
67	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	40
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	50
68	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	15
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	53
			Cakupan kepemilikan KTP elektronik	95
69	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	100
			Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	99,69
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	93,50
			Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100
70	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah melaksanakan Perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	63
71	Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan	100
			Persentase penerapan inovasi daerah	50
72	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	52,06
73	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	49,00
			Tingkat Kemantapan Jembatan pada ruas jalan kabupaten	79,00
74	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	95
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level III (Proaktif)
			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	60

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
			Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	100
75	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	52,1
			Kinerja lalu lintas (VC Ratio)	0,37
76	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	56,9
77	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
			Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100
78	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	11,92
79	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tidak Ada Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Sesuai Kepmendagri 900.1.2850 Tahun 2025)		
80	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Proporsi bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) kewenangan Pemerintah Kabupaten yang laik fungsi	35,00
81	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100
82	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah sungai dan wilayah pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	0,1171
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	77,11
			Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah	2,50
83	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	44,50
84	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	26,34
85	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	95
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level III (Proaktif)
			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	60

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
			Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	100
86	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	7,20
87	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	1,38
88	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	1,38
89	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	2
			Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	3,97
90	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	75,49
			Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	80,05
91	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	100

Adapun sebagai dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Tahun 2026, maka Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program dan sub kegiatan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis tahun 2025, sebagaimana disajikan pada **Tabel 4.16.**

Tabel 4. 16 Dukungan Program dan Sub Kegiatan Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Tahun 2026

No	Nasional	Kegiatan Prioritas Utama		Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Dalam RKPD 2026	Ket.
1.	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)		
2.	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,	1	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest		
		2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Pengawasan Penggunaan Sarana	

No	Nasional	Kegiatan Prioritas Utama		Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Dalam RKPD 2026	Ket.
	Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		3	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
		4	Pembangunan pangan hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih	
		5	Pembangunan pangan lokal dan nabati	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Pengembangan Prasarana Pertanian/ Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
		6	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan		
		7	Peningkatan penyediaan energi		
		8	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		
		9	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
		10	Konservasi sumberdaya air		
		11	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota/ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		12	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS		
		13	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		
		14	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
		15	Pengelolaan susut dan sisa pangan		
		16	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan		

No	Nasional	Kegiatan Prioritas Utama		Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Dalam RKPD 2026	Ket.
			pembagian keuntungan sumber daya genetik		
		17	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		
		18	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan		
		19	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
		20	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
3.	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
		2	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		
		3	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim		
4.	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini		
		2	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas		
		3	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
		4	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		
		5	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		
		6	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi		
		7	Penurunan kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	

No	Nasional	Kegiatan Prioritas Utama		Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Dalam RKPD 2026	Ket.
		8	Pencegahan dan penurunan stunting	Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		9	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		
		10	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		11	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
		12	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi		
		13	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		14	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		15	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengembangan Rumah Sakit	
		16	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan/ Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

No	Nasional	Kegiatan Prioritas Utama		Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Dalam RKPD 2026	Ket.
				untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota/ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
5.	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	Pengembangan hilirisasi Kelapa		
		2	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		
6.	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		
		2	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		
		3	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif		
		4	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)/ Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan/ Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		5	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa		
7.	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	Pencegahan tindak pidana korupsi		
		2	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN		
		3	Transformasi digital layanan publik prioritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik/ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
		4	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan		
		5	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
8.	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam	1	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik/ Perumusan	

No	Nasional	Kegiatan Prioritas Utama		Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Dalam RKPD 2026	Ket.
	dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik/ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		2	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota/ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
		3	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut		

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan lokasi prioritas yang disertai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan. keselarasan dukungan dimaksud disajikan sebagai berikut (**Tabel 4.17).**

Tabel 4. 17 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026

Kode	RKP 2026		RKPD 2026		Ket.
	Lokasi Prioritas	Highlight Interversi	Lokasi Prioritas	Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	
D5	Kabupaten Kepulauan Selayar	Pemenuhan infrastruktur dan Pelayanan dasar di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar), dengan output:	Kabupaten Kepulauan Selayar		
		Pembangunan/peningkatan/ perluasan SPAM	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

Kode	RKP 2026		RKPD 2026		Ket.
	Lokasi Prioritas	Highlight Interversi	Lokasi Prioritas	Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				(SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota/ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah/ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota/ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
		Sarana dan prasarana bidang kesehatan,	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pembangunan Puskesmas/ Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya/ Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan/ Pengembangan Puskesmas/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya/ Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan,	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan/ Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota/ Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta Implementasi layanan telemedicine,	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

Kode	RKP 2026		RKPD 2026		Ket.
	Lokasi Prioritas	Highlight Interversi	Lokasi Prioritas	Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	
		Bantuan Operasional RS Kapal Kepulauan Selayar.	Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengembangan Rumah Sakit	

4.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Selain mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 juga dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal juga dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs ini merupakan paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi dunia yang disepakati negara-negara peserta. Semua negara yang hadir sebagai peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya untuk menangani isu-isu mendasar terkait pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

SDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Sebagai upaya dalam pencapaian target-target SDGs, maka pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, telah mengintegrasikan prioritas SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Berdasarkan tujuan dan target SDGs, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk mensinergikan dan mengintegrasikannya dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian SDGs dapat dilihat pada **Tabel 4.17**.

Tabel 4. 18 Sinergitas dan Sinkronisasi Tujuan SDGs dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0,93	0,73
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	10,79	10,21
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	98,81	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	%	36,72	46,42
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	23	72,708
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	RT	7.545	8446
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	%	10	16
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi lanjutan	%	88,4	89,43
1.4.1.(c)	Prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	59,2	60,09
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan .	%	7,22	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	10	16
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	24,58	29
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	98,13	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	82,22	85,93
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	93,25	95,7
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.			
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi/Desa	11	15
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	%	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	%	100	30,76
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapa pendidikan layanan khusus	Lokasi/Desa	13	18
1.5.2.(e)	Indeks Resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	Poin	133,58	120,24
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.			
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	18,48	16,15
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	18,3	16,55
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	13,8	12,39
2.2.2*	Prevalensi Wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	11,7	9,0

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	8,94	8,12
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	72,6	75,78
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Angka; gram/kap/hari	77,5	79,5
2.2.2*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	%	8,94	8,12
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.			
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	287	117
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	100	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	99,48	100
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.			
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	10,3	9,32
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.			
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Per 1000 penduduk	334	159
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Per 1000 penduduk	0,009	0,1
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,4	0,07
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/DOTS)	334	159
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.			
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	16,1	15
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.			
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	54,27	60,29
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	59,2	60,09
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	32,9	46,96
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	3,75	4,45
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	2,1	2,13
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.			
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	%	13,5	18,97
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	98,81	99,63
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA				
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.			

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
4.1.1*	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun	Orang	1656	1256
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	66,9	68,369
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	57,89	58,95
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	98,45	98,6
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	%	82,83	83,66
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	93,78	94,53
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.			
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.			
	(1) SD/MI/ sederajat	%	85,69	83,36
	(2) SMP/MTs/ sederajat	%	63,04	54,98
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.			
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	93,08	94,04
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	85,72	87,86
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun			
5.1.1*	Ketesediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau keseteraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Jumlah Regulasi	1	1
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.			
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,03	0
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.			
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	%	10,03	9,90
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Usia	23	24
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	37,5	35
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.			
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	20	20
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	42,71	43,76
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.			
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	13,5	12,45

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	100	100
5.6.2*	Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	%	100	100
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.			
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	%	83,45	87,00
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan denga air dan sabun	%	65,10	65,31
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa	59	61
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.			
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	52,22	53,7
6.6	Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau			
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DAS	1	1
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA				
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.			
7.7.1*	Rasio elektrifikasi	%	96,4	98,31
7.7.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Kwh	284.187	295.554
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang			
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Juta/Jiwa	58,29	64,73
8.2	Mencapai tingkat produktifitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya			
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	%	-	1,10
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.			
8.3.1	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	%	12,16	13,68
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	52	57,2
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.			
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	8,27	8,69
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya.			
8.8.1 (a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	%	5,32	5,93

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.			
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	0,24	1,55
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Org	394	573
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Org	13.816	20.653
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI				
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.			
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Unit	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Unit	7	7
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.			
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri Pengolahan	%	0,08	0,18
9.4	Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efiisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersh dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing			
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	%	94,56	91,65
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA				
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			
10.1.1*	Koefisien Gini.	Poin	0,329	0,316
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	10,79	10,21
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	2	0
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	6	4
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Desa	22	37
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar			
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	%	36,72	45,38
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	17,74	38,74
Tujuan SDGs 12 : MENJAMN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.			
12.5..1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun	14,24	2897,51
12.6	Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan tradisional untuk mengdopsi praktek-[raktek erkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka			
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Unit	2	2
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional			
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Produk	26	26
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA				
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara			
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	-	1
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	1	1

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional			
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen	1	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontriusi terhadap keleihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, mengihilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The World Trade Organization.			
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	%	15,84	18,28
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				
15.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara			
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan	%	13,73	13,87
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai duna yang bebas dari lahan terdegrasi.			
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas ahan keseluruhan	Ha		
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.			
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	100	100
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif priorotas.			
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati	Dokumen	-	N/A
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.			
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	-	N/A
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yaang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan			
15.c.1.(a)	Persentase penyesesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KEEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN				
16.2	Menghentikan perlakuan kejam,eksploitasi perdagangan,dan segala bentuk kekersan dan penyiksaan terhadap anak			
16.2.1.(b)	Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	%	0,02	0
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya			
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin	3,85	4,02
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel,dan transparan disemua tingkat			
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.			
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakian Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)	%	31,25	32,75
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	25	26,53

Kode Indikator	Target / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.			
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%	90,16	
16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.			
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	%	100	100
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterlibatan Informasi Publik	Badan Publik	1	1
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	%	100	100
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang	1	1
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,16	0,18

4.6. Rumusan Usulan Program/ Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut (**Tabel 4.18**)

Tabel 4. 19 Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan	Outcome	Volume	Lokasi	OPD Terkait
1	2	3	4	5	6
1	Pengolahan dan pemasaran Hasil perikanan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Paket	Tersebar	DISPER
2	Pengelolaan perikanan Budidaya	Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan perikanan budidaya	2 Paket	Kec. Pastim dan Takabonerate	DISPER
3	Pengelolaan perikanan Tangkap	Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan nelayan kecil	21 Paket	Tersebar	DISPER
4	Pengembangan kapasitas daya Saing keolahragaan	Meningkatnya kapasitas dan sarana prasarana keolahragaan	5 Paket	Tersebar	DISDIKPORA
5	Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan	2 Paket	Kec. Benteng dan Bontoharu	KESBANGPOL
6	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	6 Paket	Kec. Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, dan Bontosikuyu	DINKES
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	57 Paket	Tersebar	DINKES
8	Pengembangan UMKM	Meningkatnya kapasitas usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	34 Paket	Tersebar	DISDAG KUKM
9	Pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengelolaam persampahan	1 Paket	Tersebar	DLH
10	Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya pengelolaan kebun raya, ruang terbuka hijau dan taman	11 Paket	Tersebar	DLH

No	Program/ Kegiatan	Outcome	Volume	Lokasi	OPD Terkait
		keanekaragaman hayati lainnya			
11	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Terbangunnya sarana prasarana dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1 Paket	Kec. Bontoharu	DISPARBUD
12	Pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3 Paket	Tersebar	DISPARBUD
13	Penataan bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya	3 Paket	Kec. Bontoharu dan Bontomanai	DISPUTR
14	Penataan bangunan gedung	Meningkatnya penataan bangunan pemerintah	2 Paket	Kec. Benteng	DISPUTR
15	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan air baku, bangunan pengaman pantai, sungai dan jaringan irigasi	32 Paket	Tersebar	DISPUTR
16	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Meningkatnya ketersediaan air minum	12 Paket	Tersebar	DISPUTR
17	Gelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Terbangun dan terpeliharanya sistem drainase	14 Paket	Tersebar	DISPUTR
18	Penyelenggaraan jalan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	36 Paket	Tersebar	DISPUTR
19	Pengelolaan pendidikan	Meningkatnbya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	5 Paket	Tersebar	DISDIKPORA
20	Pengelolaan pelayaran	Meningkatnya kualitas pelabuhan pengumpan lokal	2 Paket	Desa Nyiur Indah dan Sambali	DISHUB
21	Penyelenggaraan lalu lintas Dan angkutan jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan perlengkapan jalan	12 Paket	Tersebar	DISHUB
22	Perencanaan dan pembangunan Industri	Terbangunnya sarana dan prasarana industri	9 Paket	Tersebar	DISPERINAKER
23	Penyuluhan pertanian	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani/ peternak	1 Paket	Kec. Benteng	DISTAN KP
24	Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan prasarana pertanian/ peternakan	26 Paket	Tersebar	DISTAN KP
25	Penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana pertanian/ peternakan	53 Paket	Tersebar	DISTAN KP
26	Kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni	5 Paket	Kec. Benteng dan Bontomatene	DPKP
27	Peningkatan prasarana, sarana Dan utilitas umum (PSU)	Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di perumahan	42 Paket	Tersebar	DPKP
28	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan lembaga keagamaan	8 Paket	Tersebar	BAG. KESRA SETDA
29	Pemberdayaan sosial	Meningkatnya kapasitas pekerja/ lembaga kesejahteraan sosial	3 Paket	Tersebar	DINSOS
30	Rehabilitasi sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis	9 Paket	Tersebar	DINSOS
31	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	3 Paket	Tersebar	DISPERINAKER

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada RKPD disesuaikan dengan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2026 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar 1.087.054.915.000,-, Belanja Daerah sebesar 1.083.054.915.000,-, dan Pembiayaan Daerah sebesar 4.000.000.000,-. Rincian Belanja Daerah tersebut terdiri dari: (1) Belanja Operasi sebesar 79.986.769.081,-, (2) Belanja Modal sebesar 151.409.105.000,-, (3) Belanja Tidak Terduga sebesar 3.000.000.000, dan (4) Belanja Transfer sebesar 137.270.809.500,-. Penerimaan Pembiayaan sebesar 0,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 4.000.000.000,-. Besaran anggaran tersebut diperuntukkan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan sesuai dengan urusan serta tugas dan fungsi masing-masing. Rincian kerangka pendanaan Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2026

No.	Uraian	Proyeksi 2026
04	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.087.054.915.000,00**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**115.776.877.000,00**
04.01.01	Pajak Daerah	23.051.667.100,00
04.01.02	Retribusi Daerah	56.199.784.300,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.746.925.600,00
04.02	**Pendapatan Transfer**	**971.278.038.000,00**
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	943.995.434.000,00
04.02.01.01	Dana Perimbangan	871.982.847.000,00
04.02.01.01.01	Dana Transfer Umum	680.549.939.000,00
	- DBH	14.596.497.000,00
	- DAU	665.953.442.000,00
04.02.01.01.02	Dana Transfer Khusus	191.432.908.000,00
	- DAK Fisik	46.880.888.000,00
	- DAK Non Fisik	144.552.020.000,00
04.02.01.02	Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal	6.852.700.000,00
04.02.01.03	Dana Otonomi Khusus	
04.02.01.04	Dana Keistimewaan	
04.02.01.05	Dana Desa	65.159.887.000,00
04.02.02	Transfer Antar Daerah	27.282.604.000,00
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.450.000.000,00
04.02.02.02	Bantuan Keuangan	4.832.604.000,00
04.03	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	
04.03.01	Hibah	
04.03.02	Dana Darurat	
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
05	**BELANJA DAERAH**	**1.083.054.915.000,00**
05.01	**Belanja Operasi**	**817.640117.272,00**
05.01.01	Belanja Pegawai	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	
05.01.03	Belanja Bunga	
05.01.04	Belanja Subsidi	
05.01.05	Belanja Hibah	
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	

No.	Uraian	Proyeksi 2026
05.02	**Belanja Modal**	**136.239.924.728,00**
5.02.01	Belanja Tanah	
5.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	
5.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	
5.02.04	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	
5.02.06	Belanja Aset Lainnya	
05.03	**Belanja Tidak Terduga**	**3.000.000.000,00**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	
05.04	**Belanja Transfer**	**126.174.873.000,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	
06	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-4.000.000.000,00**
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undanga	
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**4.000.000.000,00**
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, wajib diperhatikan dalam pengalokasian belanja daerah yang terdiri dari 6 prioritas pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2026 yang mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan							
Sasaran 1: Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif							
8. Penguatan Fiskal daerah							
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	%	66	40	1.203.722.500	BKPSDM
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	%	49,79	50		
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	%	93,33	94	843.276.000	BKPSDM
		Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	%	93,2	94		
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100	95		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	%	92,01	94,5	613.154.531.289	Semua OPD
		Persentase Capaian Kinerja OPD	%	85,68	89,5		
		Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	%	56,07	65,5		
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan	Angka rasio	3,89	4	134.559.273.000	BPKPD
		Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		
		Penetapan LKPD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	%	81,29	82,54	4.397.388.000	Itda
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	%	60,67	67,49		
6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100		802.750.000	Bapperida
7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	700.000.000	Bapperida
8	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	4,43	15	160.000.000	Disdukcapil

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)	%	52,64	53		
		Cakupan kepemilikan KTP elektronik		94,31	95		
9	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100		400.000.000	Bapperida
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	13.016.610.600	SETWAN
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Penganggaran, Pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada		
		Ketetapan penetapan PERDA APBD Tahun n	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Persentase penetapan Ranperda Tahun n	%	100	100		
11	Progran Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	60.000.000	Disdukcapil
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,66	99,69		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	93,25	93,5		
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100		
12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	68,9	72	472.000.000	Diskominfo SP
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	85	85	159.909.900	Semua Kecamatan
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia							
Sasaran 2: Meningkatnya mutu dan akses pendidikan							
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT							
14	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM/Prioritas)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase Warga Negara	%	89,3	94,81	70.143.236.400	Disdikpora

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Warga Negara	%	98,25	99,52		
		Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	48,49	63,19		
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,12	60,74		
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,78	57,59		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	75,57	87,91		
		Indeks Iklim Keamanan SD	Angka	70,75	72,55		
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Angka	68,91	71,91		
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Angka	66,96	68,96		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Angka	66,54	68,54		
		Indeks Iklim Inklusivitas SD	Angka	55,43	60,43		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Angka	55,24	60,04		
		Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi bangunan baik	%		48,3		
		Persentase Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	43,76	44,31		
		Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	42,22	44,75		
15	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	%	77,36	73,75	754.594.000	Disdikpora
		Rasio guru terhadap Rombongan Belajar (PAUD dan SD)	%	0	01.01		
		Rasio guru terhadap Mata Pelajaran tingkat SMP	%	0	01.01		
16	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	%	100	86,3	587.515.600	Disdikpora
17	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	14.421	14.521	54.239.000	DPK
		Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	%	40,7	50,47		
Sasaran 3: Meningkatnya mutu dan akses kesehatan							
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS							

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM/Prioritas)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	82.303.309.800	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,48	100		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	94,03	100		
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,23	100		
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100		
		Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100		
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama		
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender							
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas							
19	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	%	26	30	29.961.000	DP3AP2KB
20	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	%	10	30	49.828.000	DP3AP2KB

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	30	30	220.059.000	Disdikpora
Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing							
Sasaran 6 : Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
8. Penguatan Fiskal daerah							
22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio desentralisasi fiskal	%	10,19	11,53	1.410.000.000	BPKPD
		Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	%	0,74	0,7		
23	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	%	94	95	2.330.800.000	SETDA
		Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	%	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)		
		Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	%	100	100		
		Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	%	60	60		
		Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	%	100	100		
Sasaran 6 : Meningkatknya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan							
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM							
24	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.079.665.000	1.133.648.250	880.000.000	Disperinnaker
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah	%	6	8	121.000.000	Disdag KUKM
26	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Jumlah UMKM	%	14	15	787.000.000	Disdag KUKM
Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor							
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM							
27	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Ton	248,00	269,82	960.142.000	Disper
28	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.610,40	41.00,9	1.281.511.700	Disper
29	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	507,97	06.28,8	715.570.000	Disper
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	Ton	18.949,22	19.138,71	2.000.000.000	Distan KP
		Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	Ton	7.139,75	7.211,15		

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Produksi sektor perkebunan	Ton	33.154,35	33.485,89		
		Jumlah Produksi sektor peternakan	Ton	525.264,00	530.516,64		
31	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	%	4,32	4,36	3.712.291.000	Distan KP
32	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	1,52	4,55	125.000.000	Distan KP
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	0	5,68		
Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah							
33	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	%	0	1	50.000.000	Dinas PMPTSP
34	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Orang/ Lembaga	25	30	125.000.000	Dinas PMPTSP
		Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	28.461	32.000		
35	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	100	100	125.000.000	Dinas PMPTSP
Sasaran 9 : Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan ekonomi kreatif							
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal							
36	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	7,66	15,33	250.000.000	Disparbud
37	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan	%	9,04	11,3	300.000.000	Disparbud
38	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	4,34	5	300.000.000	Disparbud
Sasaran 10 : Menurunya angka pengangguran dan kemiskinan							
7. Pengentasan kemiskinan							
39	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	22,5	24,7	75.000.000	Dinsos
		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	0	100		
40	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	1.521.600.000	Dinsos
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100		
		PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	53,6	100		
41	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	73,28	78,5	377.163.000	Dinsos
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0,63	1,74		
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH							
42	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	6,32	7,2	741.000.000	DPKP
43	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	1.000.000.000	DPKP
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100		
44	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	%	0,86	0,64	350.000.000	DPKP
		Rasio permukiman layak huni		0,9	0,9		
45	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	43,2	44,5	4.054.388.983	Dinas PUTR
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah							
46	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	15	15	25.000.000	Disdag KUKM
47	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	24	27	115.000.000	Disperinnaker
48	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	3,01	3,55	350.000.000	Disperinnaker
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	56.955.917,80	58.817.959,80		

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian perdesaan							
Sasaran 11 : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan							
2. Kemandirian pangan							
49	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	0,19	0,2	457.970.000	Distan KP
50	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan	%	111,1	0	0	Distan KP
51	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	%	30,86	31,17	260.000.000	Distan KP
		Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular	%	30,86	31,31		
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal							
52	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Angka	20		14.223.913.343	Dinas PUTR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah sungai dan wilayah pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka (Ha)	0,113	0,1171		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka (Ha)	74,14	77,11		
		Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah	%	2,27	2,50		
Sasaran 12 : Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital							
53	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	297.000.000	Diskominfo SP
Sasaran 13 : Meningkatnya status desa							
54	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	4,93	9,88	495.000.000	Dinas PMD
55	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	%	18,52	18,52	35.000.000	Dinas PMD
56	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengelola Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi	%	17	0	0	Disdag KUKM

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0	0	0	Dinas PMD
Tujuan 5 : Meningkatkan konektivitas wilayah							
Sasaran 14 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata							
1. Membangun desa, menata kota							
58	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	%	44,83	56,29	1.500.000.000	Dishub
59	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	47,20	49	54.250.000.115	Dinas PUTR
		Tingkat Kemantapan Jembatan pada ruas jalan kabupaten	%	78	79		
60	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	2,26	11,92	3.479.473.000	DPKP
61	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	200.000.000	Dinas PUTR
62	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	97,22	97,43	5.797.480.000	Dinas PUTR
		Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	%	27			
Tujuan 6 : Meningkatnya Kehidupan Sosial, budaya dan keagamaan Masyarakat yang rukun							
Sasaran 15 : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat							
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan							
63	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	30	30	1.063.120.000	Badan Kesbangpol
Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya							
14.Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan							
64	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	%	57,14	60	4.036.829.000	SETDA
		Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	%	83,33	100		
		Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100		
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	%	100	100		
		Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	%	55,02	58,44		

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga							
65	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	%	33,7	34,8	100.000.000	Disparbud
66	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	Orang	17	17	2.942.395.000	Disdikpora
		Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	19	19		
Sasaran 17: Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial							
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum							
67	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan	%	37,5	37,5	5.000.000	Badan Kesbangpol
		Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	%	20	20		
68	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	80	482.470.000	Satpol PP, Damkar
		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	97	100		
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	0,63	0,63		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	2	2		
Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan							
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas udara, udara dan tanah							
17. Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan							
69	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	n/a	75,49	556.750.000	DLH
		Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	n/a	80,05		
70	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	%	1,4	1,38	614.713.000	DLH
71	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	%	100	0	0	DLH
72	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	20	20	65.374.000	DLH

No.	Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
73	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	n/a	2	519.950.000	DLH
		Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	%	n/a	3,97		
Sasaran 19 : Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
74	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	99,83	100	1.188.319.000	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	99,23	100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	99,23	100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	%	99,93	100		
75	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	160.000.000	Dinsos
76	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	85	75	302.038.600	Satpol PP, Damkar
		Waktu tanggap (Respon time) Penanganan Kebakaran	Menit	8,35	15		
TOTAL						**1.029.310.427.830**	

5.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program merupakan rencana teknis dari prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam beberapa sasaran. Program ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi alat utama dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Rencana program beserta kegiatannya ini berasal dari mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan pendekatan *top down* berupa usulan dari OPD terkait, *bottom up* berupa partisipasi masyarakat, serta pendekatan teknokratik. Pendekatan *bottom up* berasal dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Pendekatan top down berasal dari SKPD dengan melihat pada persoalan sektoral yang ditangani. Sementara pendekatan teknokratik berasal dari pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan. Berdasarkan usulan dari tahapan Musyawarah tersebut kemudian dijabarkan kedalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dibagi menjadi 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini juga meliputi target pencapaian beserta indikatornya dan penganggaran yang akan dibebankan pada APBD kabupaten. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			690.054.588.000					735.840.504.963
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			345.889.728.000					356.016.742.783
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	274.055.872.000				-	276.543.010.000
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	705.520.799				-	570.010.000
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	202.445.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen Dokumen	70.000.000
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	71.101.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	20.000.000
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.485.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	20.000.000
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.914.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.929.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.711.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	100.000.000
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Laporan	251.298.799	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Laporan	100.000.000
1	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen Dokumen	128.134.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Dokumen	10.000
1	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	11 Data	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Data	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	13.503.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Berita Acara	20.000.000
1	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Dokumen	20.000.000
1	01	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Substansi	20.000.000
1	01	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	0
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	271.214.391.201				-	275.486.000.000
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2245 Orang/bulan	270.886.391.201	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2245 Orang/bulan	275.000.000.000
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Dokumen	100.000.000
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen Dokumen	52.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		4 Dokumen Dokumen	27.000.000
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	216.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	222.000.000
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	32.000.000
1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen Dokumen	32.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen Dokumen	35.000.000
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Bulan Laporan	14.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Bulan Laporan	40.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	14.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0				-	0
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	32.455.000				-	487.000.000
1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	130.000.000
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	100.000.000
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan Dokumen	20.455.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Bulan Dokumen	32.000.000
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	225.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	381.510.000				-	0
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Paket	0
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	381.510.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	332.833.000				-	0
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	160.093.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	172.740.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	704.902.000				-	0
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	390.080.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.400.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	288.421.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	684.260.000				-	0
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	184.260.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ha	0
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	70.143.236.400				-	76.898.732.783
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	43.604.761.900				-	41.795.734.750
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	133.805.000
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.574.855.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Ruang	0
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	744.798.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Ruang	220.000.000
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	433.715.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Ruang	0
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	8.173.258.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	1.970.575.000
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.754.537.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	1.370.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	785.660.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Ruang	350.000.000
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	363.487.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Ruang	510.000.000
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1.272.601.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Ruang	210.000.000
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	767.875.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	210.000.000
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	500.000.000
1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	210.000.000
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Paket	3.500.000.000
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	120.000.000
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	65 Peserta Didik	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		65 Peserta Didik	0
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	347 Orang	3.658.800.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		347 Orang	1.100.000.000
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	202.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	150.000.000
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 Satuan Pendidikan	218.864.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Satuan Pendidikan	110.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	141 Satuan Pendidikan	14.193.817.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOSP-BOS		141 Satuan Pendidikan	85.000.000
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	141 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		141 Orang	85.000.000
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7 Ruang	1.994.543.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Ruang	0
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	82.753.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	510.000.000
1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	75.000.000
1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	2 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	25.000.000
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	102.480.350
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Konten Digital	76.366.000
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	105.259.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Orang	117.617.400
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	54.970.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	15.000.000
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	46.865.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	89.394.000
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	50.118.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Komunitas	150.000.000
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	25.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	161.946.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Kegiatan	155.763.450
1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	20.000.000
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Buku	15.000.000
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	20.000.000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	567.468.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Ruang	1.920.400.000
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	420.000.000
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	327.546.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	271.083.550
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	141 Satuan Pendidikan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		141 Satuan Pendidikan	6.180.000.000
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	5.020.826.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Ruang	2.412.750.000
1	01	02	2.01	0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.01	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	141 Peserta Didik	1.047.900.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		141 Peserta Didik	18.160.000.000
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	200.000.000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	12.649.470.500				-	23.858.105.683

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	180.000.000
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	266.800.000
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	360.000.000
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	110.000.000
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	822.000.000
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	920.000.000
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	1.026.650.000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Ruang	964.400.000
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	292.820.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Ruang	620.000.000
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	673.500.000
1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	310.000.000
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	510.000.000
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	310.000.000
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	528.000.000
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1853 Peserta Didik	1.687.398.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1853 Peserta Didik	9.447.173.356
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		500 Peserta Didik	95.825.000
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	169 Orang	1.881.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		169 Orang	800.000.000
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	60 Orang	202.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		60 Orang	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	52 Satuan Pendidikan	183.503.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		52 Satuan Pendidikan	179.238.550
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	8.191.308.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOSP-BOS		1 Satuan Pendidikan	40.000.000
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		52 Orang	40.000.000
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	74.662.450
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	59.511.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Orang	78.365.050
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	210.000.000
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	82.714.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	76.936.900
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	52 Komunitas	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		52 Komunitas	130.000.000
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	72.922.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	250.000.000
1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	57 Satuan Pendidikan	70.189.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		57 Satuan Pendidikan	181.500.000
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Ruang	1.178.475.000
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	218.624.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	149.752.350
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Buku	275.000.000
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	52 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		52 Paket	1.820.000.000
1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	500.000.000
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Ruang	387.007.027
1	01	02	2.02	0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.02	0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	6.439.342.000				-	7.663.590.650
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	600.000.000
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2233 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2233 Paket	50.000.000
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3579 Peserta Didik	283.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3579 Peserta Didik	500.000.000
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	146 Orang	1.698.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		146 Orang	700.000.000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	202.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	606.341.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		167 Satuan Pendidikan	450.000.000
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	3.083.975.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOSP-BOP PAUD		167 Satuan Pendidikan	3.250.000.000
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	138.773.750
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Konten Digital	160.365.450
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	117.866.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	168.429.150

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	89.831.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	165.536.300
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	150.000.000
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Komunitas	0
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	361.000.000
1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta didik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Peserta didik	0
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Buku	0
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	11 Kegiatan	119.567.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Kegiatan	40.000.000
1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	55 Orang	237.961.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		55 Orang	462.080.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		-	0
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		500 Paket	60.000.000
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.03	0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.03	0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	327.406.000
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Satuan Pendidikan	80.000.000
1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	7.449.662.000				-	3.581.301.700
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	141 Peserta Didik	32.850.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		141 Peserta Didik	58.041.400
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi	1 Orang	807.560.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	141 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		141 Orang	68.408.650
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	64.159.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Satuan Pendidikan	300.000.000
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Lembaga Orang	4.913.380.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOSP-BOP KESET		4 Lembaga Orang	2.050.000.000
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	141 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		141 Orang	159.824.600
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Konten Digital	93.052.850
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	29.612.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	62.788.150
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	677.454.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	350.000.000
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	20.514.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	150.998.400
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	54.780.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Komunitas	30.243.100

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	57.944.550
1	01	02	2.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Peserta Didik	0
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Buku	0
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ruang	0
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	200.000.000
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	49.353.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Peserta Didik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Peserta Didik	0
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	800.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 unit	0
1	01	02	2.04	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	01	02	2.04	0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Ruang	0
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	587.515.600				-	200.000.000
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	422.986.600				-	50.000.000
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	44.709.600	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	50.000.000
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Buku	0
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	129.732.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	0 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Buku	0
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	0 Dokumen	120.195.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	128.350.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	164.529.000				-	150.000.000
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	0 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Buku	0
1	01	03	2.02	0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	0 Buku	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Buku	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	164.529.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	150.000.000
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	754.594.000				-	2.375.000.000
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	754.594.000				-	2.375.000.000
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Dokumen	249.423.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Dokumen	150.000.000
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	505.171.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.225.000.000
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	0				-	0
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0				-	0
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Diselenggarakan oleh Masyarakat								
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	348.510.000				-	0
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	348.510.000				-	0
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	0 Bahasa	326.998.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Bahasa	0
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	0 Orang	21.512.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			219.631.912.000					233.330.225.590
					DINAS KESEHATAN			144.834.114.000					148.020.600.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Kinerja Presentase Capaian Kinerja Keuangan	72.31 % 95 %	68.494.395.000				72.31 % 95 %	81.202.000.000
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	140.276.000				10 dokumen	385.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.750.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	53.850.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Laporan	55.000.000
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	63.926.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Laporan	55.000.000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	65.307.900.000				-	79.013.000.000
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	740 Orang/bulan	65.207.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		740 Orang/bulan	78.903.000.000
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.850.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Laporan	55.000.000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	55.000.000				-	55.000.000
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	27.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	27.500.000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.421.150.000				-	55.000.000
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.150.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	1.400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	450.000.000				-	495.000.000
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	165.000.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	55.000.000
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	55.000.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	220.000.000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0				-	0
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	0
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	737.098.000				-	792.000.000
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	715.680.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	770.000.000
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.418.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	22.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	382.971.000				-	407.000.000
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	314.550.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Unit	330.000.000
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.951.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	55.000.000
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	18.470.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	22.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Presentase	100 % undefined undefined	61.077.269.000				100 % undefined undefined	61.373.600.000
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100 % 100 %	28.506.064.050				100 % 100 %	14.705.000.000
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BID. KES DAN KB		0 Unit	0
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK FISIK-BID. KES DAN KB		0 Unit	0
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	2.450.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK FISIK-BID. KES DAN KB		1 Unit	0
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar,	DAU		2 Unit	1.100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Benteng, Semua Kel/Desa				
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	550.000.000
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	550.000.000
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2.556.064.050	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	550.000.000
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BID. KES DAN KB		2 Unit	1.100.000.000
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit	2.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	1.100.000.000
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BID. KES DAN KB		1 Unit	3.100.000.000
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	5.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	55.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	3.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Paket	6.600.000.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.571.204.950				-	46.668.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.038 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2.038 Orang	22.000.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.766 Orang	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1.766 Orang	16.500.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.744 Orang	153.960.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1.744 Orang	77.000.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.608 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7.608 Orang	55.000.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.235 Orang	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4.235 Orang	6.600.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70.346 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		70.346 Orang	55.000.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.463 Orang	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		18.463 Orang	16.500.000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.158 Orang	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20.158 Orang	49.500.000
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.449 Orang	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1.449 Orang	49.500.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	196 Orang	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		196 Orang	49.500.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.750 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3.750 Orang	110.000.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.500 Orang	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2.500 Orang	49.500.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	200.753.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	3.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.000.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	227.070.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	22.000.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	22.700.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	28.270.000.000
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	0 Dokumen	242.931.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	5.110.490.950	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Dokumen	14.300.000.000
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	14.713.200.000				-	4.950.000.000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP	-	-	14.713.200.000				-	4.950.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	14.713.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.950.000.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	400.000.000				-	440.000.000
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	400.000.000				-	440.000.000
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		1 Dokumen	440.000.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	149.250.000				-	55.000.000
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	36.000.000				-	0
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	36.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	113.250.000				-	0
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	0 Keluarga	113.250.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	-	-	0				-	55.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG			44.285.297.000					57.303.599.110
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	38.579.365.000				-	42.437.060.170
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.986.000				-	22.000.000
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.994.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	5.500.000
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.994.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	5.500.000
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.994.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	5.500.000
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.004.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Laporan	5.500.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	302.692.000				-	332.970.000
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	152.700.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		6 Paket	167.970.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Paket	55.000.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.992.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		12 Laporan	110.000.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.256.687.000				-	9.082.090.170

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	447.973.500	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Laporan	492.317.760
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.808.713.500	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		12 Laporan	8.589.772.410
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	30.000.000.000				-	33.000.000.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	30.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	PENDAPATAN DARI BLUD		1 Unit Kerja	33.000.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	5.680.932.000				-	14.839.038.940
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.631.070.000				-	14.783.960.400
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	5.581.080.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	14.728.960.400
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	49.990.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Unit	55.000.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	49.862.000				-	55.078.540
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	49.862.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	55.078.540
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	25.000.000				-	27.500.000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000				-	27.500.000
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		10 Orang	27.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RUMAH SAKIT PRATAMA JAMPEA			919.850.000					1.616.835.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	919.850.000				-	1.011.835.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0				-	0
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	-		0 Laporan	0
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	919.850.000				-	1.011.835.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	919.850.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	1.011.835.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	0				-	605.000.000
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	605.000.000
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	550.000.000
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	55.000.000
					PUSKESMAS BENTENG			3.133.630.000					3.446.993.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.143.630.000				-	2.357.993.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.143.630.000				-	2.357.993.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.143.630.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	2.357.993.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	968.536.000				-	1.065.389.820
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	968.536.000				-	1.065.389.820
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465 Orang	27.930.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		465 Orang	30.723.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3073 Orang	39.750.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		3073 Orang	43.725.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1827 Orang	32.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1827 Orang	35.640.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	213 Orang	43.200.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		213 Orang	47.520.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	283.740.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	312.114.000
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	27.450.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		-	30.195.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	36.961.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	40.657.650
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.661.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	17.227.650
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	175.950.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	193.545.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	237.793.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	261.572.520
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	46.200.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	50.820.000
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	1.650.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	21.464.000				-	23.610.180
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.464.000				-	23.610.180
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	21.464.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	23.610.180
					PUSKESMAS BONTOSUNGGU			1.972.321.000					2.169.553.100

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Kinerja Presentase Capaian Kinerja Keuangan	72.31 % 95 %	1.425.000.000				72.31 % 95 %	1.567.500.000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.425.000.000				1 Unit Kerja	1.567.500.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.425.000.000	-	DAU		1 Unit Kerja	1.567.500.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Ibu Hamil Yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	547.321.000				100 %	602.053.100
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Bidang Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100 %	547.321.000				100 %	602.053.100
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153 Orang	49.140.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		153 Orang	54.054.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	15.381.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		155 Orang	16.919.100
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	16.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		155 Orang	17.820.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	103.740.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		510 Orang	114.114.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1241 Orang	64.650.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1241 Orang	71.115.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4889 Orang	30.750.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4889 Orang	33.825.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	47.250.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		55 Orang	51.975.000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	11.250.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		40 Orang	12.375.000
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	11.250.000	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		-	12.375.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	17.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Orang	18.810.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	24.750.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		20 Orang	27.225.000
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4889 Dokumen	43.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4889 Dokumen	47.520.000
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	2.640.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	31.350.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	34.485.000
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang	10.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		80 Orang	11.880.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	14.410.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	15.851.000
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	53.700.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	59.070.000
					PUSKESMAS POLEBUNGING			1.970.500.000					1.635.850.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0				-	0
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0				-	0
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.970.500.000				-	1.635.850.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.970.500.000				-	1.635.850.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	53.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		40 Orang	34.500.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Orang	19.000.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Orang	9.900.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	15.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA		4 Orang	10.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOK-BOK PUSK			
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340 Orang	34.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		340 Orang	37.500.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	31.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Orang	13.500.000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	24.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Polebunging	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		15 Orang	13.000.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8 Orang	46.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		8 Orang	23.000.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	11.700.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Orang	0
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	151.878.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA		4 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOK-BOK PUSK			
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	9.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Dokumen	10.500.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	27.900.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	32.250.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	154.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	144.450.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	1.320.000.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	146.872.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		5 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Orang	0
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4 Dokumen	19.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Dokumen	0
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	0				-	0
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	0				-	0
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Dokumen	0
					PUSKESMAS BARUGAIA			1.993.131.000					1.492.010.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.212.000.000				-	1.333.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.212.000.000				-	1.333.200.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.212.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	1.333.200.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	747.309.000				-	158.810.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	747.309.000				-	158.810.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	38.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		48 Orang	41.000.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	-		-	0
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	79.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	87.120.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	27.900.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	30.690.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	255.810.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	26.100.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	27.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	15.071.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	109.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	134.650.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang	21.150.000	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		70 Orang	0
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.428.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	33.822.000				-	0
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	33.822.000				-	0
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	33.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/DesaKab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
					PUSKESMAS BUKI			1.781.820.000					796.526.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.057.705.000				-	0
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.057.705.000				-	0
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.057.705.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Kerja	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	724.115.000				-	796.526.500
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	724.115.000				-	796.526.500
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	25.200.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		40 Orang	27.720.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	18.900.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		40 Orang	20.790.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	12.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		40 Orang	13.860.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320 Orang	18.900.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		320 Orang	66.957.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	65.400.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		600 Orang	84.942.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	24.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100 Orang	27.225.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	19.200.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		400 Orang	44.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	28.200.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		20 Orang	31.020.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	21.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		250 Orang	23.100.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		10 Orang	5.500.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	140.085.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		12 Dokumen	165.000.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	40.950.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		12 Dokumen	55.000.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.900.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan Dokumen	128.700.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		12 Bulan Dokumen	231.412.500
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	153.480.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		25 Orang	0
					PUSKESMAS BONTOMATENE			2.280.000.000					2.977.393.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.468.500.000				-	1.615.350.000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.468.500.000				-	1.615.350.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.468.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	1.615.350.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	811.500.000				-	1.362.043.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	811.500.000				-	1.362.043.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76 Orang	9.450.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		76 Orang	13.650.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Orang	1.350.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		72 Orang	1.800.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Orang	8.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		72 Orang	12.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	8.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		640 Orang	69.300.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	54.900.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		552 Orang	83.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata				
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4176 Orang	31.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		4176 Orang	31.500.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3360 Orang	40.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		3360 Orang	43.200.000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	105 Orang	6.300.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Onto Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona Saluk Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat Lambongan Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Maharaya Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Tamalanrea Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		105 Orang	12.600.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	93 Orang	27.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		93 Orang	46.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	255.850.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	304.344.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	32.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		3 Dokumen	54.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, BatangmataKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Onto				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	36.750.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	77.700.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	109.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	262.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									LambonganKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	152.950.000	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	297.049.000
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	3.150.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		17 Orang	12.600.000
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Orang	1.800.000
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	31.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, MaharayaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, TamalanreaKab. Kep. Selayar, Bontomatene, OntoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Bontona SalukKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Barat LambonganKab. Kep. Selayar,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		1 Dokumen	37.800.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Bontomatene, Batangmata SapoKab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata				
					PUSKESMAS PARANGIA			2.011.002.000					0
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0				-	0
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0				-	0
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.999.722.000				-	0
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.999.722.000				-	0
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	32.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		52 Orang	0
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	32.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		52 Orang	0
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	32.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		52 Orang	0
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	1.250.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		52 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	38.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		450 Orang	0
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	9.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		149 Orang	0
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	12 0	22.500.000	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 0	0
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	9 Orang	12.900.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		9 Orang	0
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	21.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Orang	0
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		2 Orang	0
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	228.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	9.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	18.450.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA		12 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOK-BOK PUSK			
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	28.152.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9 Orang	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		9 Orang	0
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	105.300.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6.870.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	11.280.000				-	0
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.280.000				-	0
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	11.280.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		12 Dokumen	0
X					NON URUSAN			0					0
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0					0
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0				-	0
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0				-	0
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Unit Kerja	0
					PUSKESMAS LOWA			1.663.839.000					95.835.300
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.109.300.000				-	0
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.109.300.000				-	0
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.109.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	-	-	554.539.000				-	95.835.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	554.539.000				-	95.835.300
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	66.975.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	95.835.300
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Orang	0
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	68.925.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOKKB-BOK			
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	16.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	149.162.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	153.277.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Dokumen	0
					PUSKESMAS BONTOSIKUYU			2.064.500.000					1.995.950.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.381.500.000				-	0
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.381.500.000				-	0
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.381.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	683.000.000				-	1.995.950.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	683.000.000				-	1.995.950.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139 Orang	34.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu,	DAK NON FISIK-		139 Orang	37.510.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									HarapanKab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, PatikaryaKab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, PatilerengKab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Laiyolo BaruKab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Laiyolo	BOKKB-BOK			
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	38.625.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Orang	42.487.500
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Orang	34.650.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOKKB-BOK			
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0 0	18.450.000	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 0	20.295.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Orang	6.600.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100% Dokumen	227.072.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Dokumen	249.779.200
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100% Dokumen	28.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Dokumen	31.680.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100% Dokumen	36.153.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Dokumen	39.768.300
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100% Dokumen	115.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Laiyolo Baru Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Laiyolo	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100% Dokumen	126.720.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100% Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		100% Dokumen	1.243.000.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	148.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Dokumen	163.460.000
					PUSKESMAS UJUNG JAMPEA			1.797.500.000					1.977.142.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	661.500.000				-	727.542.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	661.500.000				-	727.542.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	158 Orang	50.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		158 Orang	55.440.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	158 0	28.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		158 0	31.350.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	159 0	44.100.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		159 0	48.510.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1592 Orang	28.800.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1592 Orang	31.681.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	5.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Bontobulaeng	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		8 Orang	5.940.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	9.900.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		10 Orang	10.891.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Bontobulaeng	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		4 Orang	3.960.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	187.149.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		10 Dokumen	205.863.900
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	32.100.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		5 Dokumen	35.310.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	18.600.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		5 Dokumen	20.350.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	140.100.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		13 Dokumen	154.110.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	112.851.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		6 Dokumen	124.136.100
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.136.000.000				-	1.249.600.000
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.136.000.000				-	1.249.600.000
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.136.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	1.249.600.000
					PUSKESMAS PASIMASUNGGU			2.070.500.000					2.262.640.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.334.250.000				-	1.452.000.000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.334.250.000				-	1.452.000.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.334.250.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Unit Kerja	1.452.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	736.250.000				-	810.640.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	736.250.000				-	810.640.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	140.850.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		40 Orang	155.700.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	17.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		40 Orang	19.140.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOKKB-BOK			
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 Orang	28.800.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		900 Orang	31.680.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	52.200.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		60 Orang	57.420.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Orang	0
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4 Orang	22.200.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		4 Orang	24.420.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		20 Orang	33.000.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	10.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		5 Orang	11.550.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	420 Dokumen	141.850.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		420 Dokumen	156.035.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	18.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-		20 Dokumen	20.240.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOKKB-BOK			
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	21.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		15 Dokumen	23.100.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen	152.250.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		20 Dokumen	167.475.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	100.800.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		15 Dokumen	110.880.000
					PUSKESMAS PASITALLU			2.570.596.000					2.827.655.600
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.704.961.000				-	1.875.456.000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.704.961.000				-	1.875.456.000
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.704.961.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit Kerja	1.875.456.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	865.635.000				-	952.199.600
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	865.635.000				-	952.199.600
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410 Orang	23.400.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		410 Orang	25.740.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2569 Orang	48.000.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		2569 Orang	52.800.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1482 Orang	51.300.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA		1482 Orang	56.430.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOK-BOK PUSK			
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang	76.200.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		482 Orang	83.820.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	27 Orang	15.300.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		27 Orang	16.830.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	261 Orang	24.900.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		261 Orang	27.390.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	6.300.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		-	6.930.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	264.300.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		7 Dokumen	290.730.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	19.500.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		8 Dokumen	21.450.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	20.700.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		8 Dokumen	22.770.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32 Dokumen	167.850.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		32 Dokumen	184.635.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	-		12 Dokumen	0
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	144.735.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		5 Dokumen	159.209.600
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	39 Laporan	3.150.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSK		39 Laporan	3.465.000
					PUSKESMAS PASIMARANNU			2.267.000.000					2.493.700.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.260.670.000				-	2.486.737.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.260.670.000				-	2.486.737.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	26.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		20 Orang	29.040.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	36.900.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		40 Orang	40.590.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	39.900.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100 Orang	43.890.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	17.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		100 Orang	19.140.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	9 Orang	14.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		9 Orang	15.840.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	8.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-		24 Orang	9.240.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOKKB-BOK			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	14.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		6 Orang	15.840.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	218.946.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		13 Dokumen	240.840.600
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	64.350.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		7 Dokumen	70.785.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	13.350.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		8 Dokumen	14.685.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	151.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		25 Dokumen	166.650.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.507.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.657.700.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	145.324.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		7 Dokumen	159.856.400
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Laporan	2.640.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	6.330.000				-	6.963.000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	6.330.000				-	6.963.000
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	6.330.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-		1 Dokumen	6.963.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										BOKKB-BOK			
					PUSKESMAS PASILAMBENA			2.016.312.000					2.217.942.980
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.014.511.800				-	2.215.962.980
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.014.511.800				-	2.215.962.980
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	58.200.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		30 Orang	64.020.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	19.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		25 Orang	21.450.000
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	908 Orang	30.300.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		908 Orang	33.330.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	987 Orang	15.300.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		987 Orang	15.180.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	23 Orang	14.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		23 Orang	15.840.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	235 Orang	27.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		235 Orang	29.700.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Orang	4.950.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.165.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		12 Dokumen	177.281.500
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen	62.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/DesaKab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		9 Dokumen	68.310.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	14.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		8 Dokumen	15.840.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	221.400.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		25 Dokumen	243.540.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	1.228.066.800	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	1.352.523.480
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	155.480.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		6 Dokumen	171.028.000
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2.700.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Laporan	2.970.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk (Prioritas)	45/100.000 Penduduk - 45/100.000 Penduduk KH	1.800.200				45/100.000 Penduduk - 45/100.000 Penduduk KH	1.980.000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan Dan Kebutuhan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	100 % 100 %	1.800.200				100 % 100 %	1.980.000
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.800.200	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Dokumen	1.980.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			94.192.568.000					109.981.264.341
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.789.245.429				-	7.906.071.170
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	302.014.000				-	502.000.000
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	120.000.000
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.267.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	60.000.000
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28.274.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	43.000.000
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.254.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	43.000.000
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	13.525.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Dokumen	43.000.000
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.804.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	43.000.000
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	98.890.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Laporan	150.000.000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.750.448.429				-	6.295.296.848
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5.087.365.429	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		60 Orang/bulan	5.112.365.429
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan Dokumen	648.083.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 bulan Dokumen	1.164.931.419

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Laporan	18.000.000
1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000				-	15.000.000
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	15.000.000
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	150.000.000				-	180.000.000
1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	180.000.000
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	380.139.000				-	400.175.653
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 Laporan	380.139.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1050 Laporan	400.175.653
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	238.748.000				-	220.000.000
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	120.000.000
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	40.000.000
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4.326.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	134.422.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	30.000.000
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	30.000.000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	353.406.000				-	0
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	339.150.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	14.256.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	604.490.000				-	293.598.669
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	448.750.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		52 Unit	172.858.669
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	55.740.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		17 Unit	60.740.000
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	60.000.000
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	14.223.913.343				-	20.259.515.343
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.999.725.343				-	11.206.765.343
1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0069	Revitalisasi Situ	Jumlah Situ yang Direvitalisasi	0 SITU	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 SITU	0
1	03	02	2.01	0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
1	03	02	2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	120.000.000
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0084	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	0 Danau	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Danau	0
1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0090	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendungan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Bendungan	60.000.000
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Titik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Titik	0
1	03	02	2.01	0096	Peningkatan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.01	0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0099	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	1 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 KM	60.000.000
1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	4 KM	4.579.848.343	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 KM	1.881.365.343
1	03	02	2.01	0106	Rehabilitasi Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	1.350.000.000
1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	1 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 KM	60.000.000
1	03	02	2.01	0111	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Bendungan	210.000.000
1	03	02	2.01	0112	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Bendungan	60.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,200 KM	2.350.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0,200 KM	1.500.000.000
1	03	02	2.01	0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	0 Titik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Titik	0
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Titik	0
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	1.400.000.000
1	03	02	2.01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.01	0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Unit	0
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1 KM	1.669.877.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 KM	60.000.000
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	5 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	900.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	1.400.000.000
1	03	02	2.01	0129	Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		1 Unit	250.000.000
1	03	02	2.01	0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		2 Dokumen	100.000.000
1	03	02	2.01	0131	Pemeliharaan situ dan tampungan air alami lainnya	Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang dipelihara	1 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		1 UNIT	200.000.000
1	03	02	2.01	0132	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	1.535.400.000
1	03	02	2.01	0133	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	0,5 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0,5 KM	60.000.000
1	03	02	2.01	0134	Pemeliharaan danau	Jumlah danau yang dipelihara	0 Danau	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Danau	0
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.224.188.000				-	9.052.750.000
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	1.531.150.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 KM	2.450.000.000
1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,410 KM	711.220.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0,410 KM	1.450.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,5 KM	778.035.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0,5 KM	1.677.190.000
1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	361.395.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 KM	1.775.560.000
1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	0 Lembaga	374.353.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
1	03	02	2.02	0042	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0
1	03	02	2.02	0043	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
1	03	02	2.02	0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
1	03	02	2.02	0046	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0
1	03	02	2.02	0047	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Rekomendasi	0
1	03	02	2.02	0048	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	4 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 UNIT	1.350.000.000
1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
1	03	02	2.02	0051	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 UNIT	330.570.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 UNIT	350.000.000
1	03	02	2.02	0052	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0
1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 UNIT	737.465.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0
1	03	02	2.02	0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	4.054.388.983				-	4.200.000.000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.054.388.983				-	4.200.000.000
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	10 Unit	2.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	2.100.000.000
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Liter/Detik	0
1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 Desa	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa	0
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3,5 Liter/Detik	2.054.388.983	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3,5 Liter/Detik	2.100.000.000
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 SR	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 SR	0
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Lembaga	0
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	0				-	0
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	0 Ton/hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton/hari	0
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	04	2.01	0018	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Orang	0
1	03	04	2.01	0019	Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Pengelola	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Pengelola	0
1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Ton/hari	0
1	03	04	2.01	0021	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	200.000.000				-	700.000.000
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000				-	700.000.000
1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		-	0
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	05	2.01	0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	11 Rumah Tangga	200.000.000	-	DAU		11 Rumah Tangga	300.000.000
1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Desa	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa	0
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	20 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	400.000.000
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	0	-	-		-	0
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
1	03	05	2.01	0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	0 Sambungan Rumah (SR)	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Sambungan Rumah (SR)	0
1	03	05	2.01	0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Penyelenggara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Penyelenggara	0
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Rumah Tangga	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.							
1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		-	0
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	5.797.480.000				-	10.847.078.900
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.797.480.000				-	10.847.078.900
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M	1.860.800.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2000 M	1.558.374.982
1	03	06	2.01	0017	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Penyelenggara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Penyelenggara	0
1	03	06	2.01	0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Orang	0
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Meter	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Meter	0
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	0 M	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 M	0
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Sistem Drainase Lingkungan	0
1	03	06	2.01	0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Sistem Drainase Perkotaan	0
1	03	06	2.01	0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	0 Sistem Drainase Perkotaan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Sistem Drainase Perkotaan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	0 Kawasan Genangan	0	-	DAU		0 Kawasan Genangan	0
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	30 Sistem Drainase Perkotaan	1.800.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Sistem Drainase Perkotaan	2.100.000.000
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12 Sistem Drainase Perkotaan	2.136.680.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Sistem Drainase Perkotaan	2.100.000.000
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	5.088.703.918
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Sistem Drainase Perkotaan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Sistem Drainase Perkotaan	0
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	0				-	0
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
1	03	07	2.01	0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rumah Tangga	0
1	03	07	2.01	0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 UNIT	0
1	03	07	2.01	0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	07	2.01	0011	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0 UNIT	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 UNIT	0
1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Ton/hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton/hari	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	07	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Unit	0
1	03	07	2.01	0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0 SR	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 SR	0
1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Liter/Detik	0
1	03	07	2.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Liter/Detik	0
1	03	07	2.01	0025	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	07	2.01	0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 M^3/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 M^3/Hari	0
1	03	07	2.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	07	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 M^3/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 M^3/Hari	0
1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rumah Tangga	0
1	03	07	2.01	0034	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 M^3/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M^3/Hari	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	07	2.01	0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	03	07	2.01	0037	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M³/Hari	0
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	5.344.554.630				-	4.744.554.630
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	5.344.554.630				-	4.744.554.630
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	0 Bangunan Gedung Negara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Bangunan Gedung Negara	0
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	0 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0
1	03	08	2.01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	0 Bangunan Gedung	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Bangunan Gedung	0
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Bangunan Gedung	0
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	0 Bantuan Teknis	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Bantuan Teknis	0
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.044.554.630	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	4.344.554.630
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dokumen	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	400.000.000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	1.500.000.000				-	1.200.000.000
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.500.000.000				-	1.200.000.000
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	1.500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Kawasan	1.200.000.000
1	03	09	2.01	0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Orang	0
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	54.250.000.115				-	58.849.044.298
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	54.250.000.115				-	58.849.044.298

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	1.500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	50 KM	500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 KM	150.000.000
1	03	10	2.01	0049	Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	0 Meter	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Meter	0
1	03	10	2.01	0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	1.400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 KM	1.600.000.000
1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	12,33 KM	2.650.955.817	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12,33 KM	16.000.000.000
1	03	10	2.01	0054	Pembangunan Terowongan/Tunnel	-	-	0	-	DAU		-	0
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10,86 KM	2.999.044.298	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10,86 KM	10.099.044.298
1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	7.850.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 KM	1.600.000.000
1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	24 Meter	1.950.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		24 Meter	2.000.000.000
1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	20 Meter	350.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Meter	400.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,98 KM	30.850.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		13,98 KM	18.000.000.000
1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1,64 Meter	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1,64 Meter	2.100.000.000
1	03	10	2.01	0066	Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	0 Flyover	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Flyover	0
1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Jembatan	2.600.000.000
1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 KM	0
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	20 Meter	4.200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Meter	4.300.000.000
1	03	10	2.01	0070	Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang Dibangun	0 Meter	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Meter	0
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	325.000.000				-	455.000.000
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	170.000.000				-	180.000.000
1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Orang	0
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan							
1	03	1 1	2.0 1	001 3	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
1	03	1 1	2.0 1	001 4	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
1	03	1 1	2.0 1	001 5	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
1	03	1 1	2.0 1	001 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	170.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		40 Orang	180.000.000
1	03	1 1	2.0 2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	115.000.000				-	145.000.000
1	03	1 1	2.0 2	001 2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0 Perangkat Pendukung	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Perangkat Pendukung	0
1	03	1 1	2.0 2	001 3	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	55.000.000
1	03	1 1	2.0 2	001 4	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Orang	30.000.000
1	03	1 1	2.0 2	001 5	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Layanan Informasi	60.000.000
1	03	1 1	2.0 4		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	40.000.000				-	130.000.000
1	03	1 1	2.0 4	000 4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 Paket Pekerjaan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Paket Pekerjaan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	25 Bangunan Konstruksi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Bangunan Konstruksi	60.000.000
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	8 Lembaga	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Lembaga	50.000.000
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Badan Usaha	20.000.000
1	03	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	707.985.500				-	820.000.000
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	173.993.000				-	185.000.000
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen Dokumen	173.993.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen Dokumen	125.000.000
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0 Publikasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Publikasi	0
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	60.000.000
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	1 2	2.0 1	001 3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
1	03	1 2	2.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	121.660.000				-	181.660.326
1	03	1 2	2.0 2	000 4	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Peta	50.000.000
1	03	1 2	2.0 2	000 5	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
1	03	1 2	2.0 2	000 6	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 Orang	61.660.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	71.660.326
1	03	1 2	2.0 2	000 7	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	1 2	2.0 2	000 8	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	30.000.000
1	03	1 2	2.0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000				-	145.000.000
1	03	1 2	2.0 3	000 3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	12 Dokumen Dokumen	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen Dokumen	85.000.000
1	03	1 2	2.0 3	000 4	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Layanan	0
1	03	1 2	2.0 3	000 5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	1 2	2.0 3	000 7	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Sistem Informasi	60.000.000
1	03	1 2	2.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	287.332.500				-	308.339.674
1	03	1 2	2.0 4	000 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Kasus	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Kasus	60.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	120 Dokumen	237.332.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		120 Dokumen	188.339.674
1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	0 Kasus	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kasus	0
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	0 Kasus	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kasus	0
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	120 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		120 Dokumen	60.000.000
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.04	0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9.091.176.000					10.000.293.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD	100 Persen	3.490.703.000				100 Persen	3.839.773.300
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	29.500.000				100 Persen	32.450.000
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	16.500.000
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.100.000
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 0	500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 0	550.000
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.200.000
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.100.000
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.500.000
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	5.500.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	2.439.155.000				100 Persen	2.683.070.500
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.428.155.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		26 Orang/bulan	2.670.970.500
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	2.200.000
1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	2.200.000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.000.000				100 Persen	5.500.000
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.200.000
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	3.300.000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100 Persen	56.000.000				100 Persen	61.600.000
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		26 Paket	27.500.000
1	04	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.100.000
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000	-	DAU		6 Orang	33.000.000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 Persen	355.000.000				100 Persen	390.500.000
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	1 0	5.000.000	-	DAU		1 0	5.500.000
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	1 0	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 0	27.500.000
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	22.000.000
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	11.000.000
1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		-	49.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	275.000.000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100 Persen	50.000.000				100 Persen	55.000.000
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Unit	55.000.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	359.448.000				100 Persen	395.392.800
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	22.000.000
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	132.448.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	145.692.800
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	227.700.000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 Persen	196.600.000				100 Persen	216.260.000
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	144.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		20 Unit	158.840.000
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Unit	5.500.000
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.200.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Unit	18.920.000
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	33.000.000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 Persen	1.000.000.000				100 Persen	1.100.000.000
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data Rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yang akan direhabilitasi Jumlah Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pemerintah Yang akan direhabilitasi	1 Dokumen 1 Dokumen	230.000.000				1 Dokumen 1 Dokumen	253.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	33.000.000
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000				1 Dokumen	110.000.000
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	-	0	-	DAU		-	0
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	27.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Orang	27.500.000
1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	27.500.000
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun dan diperbaiki	35 Unit Rumah	500.000.000				35 Unit Rumah	550.000.000
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit Rumah	220.000.000
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit Rumah	275.000.000
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0 Unit Rumah	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Rumah	0
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	25 Rumah Tangga	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Rumah Tangga	27.500.000
1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	25 Rumah Tangga	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Rumah Tangga	27.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Rumah	0
1	04	02	2.03	0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0 Unit Rumah	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Rumah	0
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Rumah	0
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Rumah	0
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Dokumen	75.000.000				1 Dokumen	82.500.000
1	04	02	2.04	0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rumah Tangga	0
1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000
1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	15 Rumah Tangga	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Rumah Tangga	27.500.000
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan / atau rumah khusus yang dikelola	50 Unit Rumah	25.000.000				50 Unit Rumah	27.500.000
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	27.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang tersedia	1 Dokumen	70.000.000				1 Dokumen	77.000.000
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	55.000.000
1	04	02	2.06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	0 Sistem Informasi	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Sistem Informasi	0
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	22.000.000
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang tersedia	1 Dokumen	0				1 Dokumen	0
1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	741.000.000				-	815.100.000
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1 Dokumen	55.000.000				1 Dokumen	60.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	55.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	60.500.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	0,25 Ha	141.000.000				0,25 Ha	155.100.000
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	33.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	36.300.000
1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rumah Tangga	0
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	3 Kelompok Masyarakat	28.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Kelompok Masyarakat	30.800.000
1	04	03	2.02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	88.000.000
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rumah Tangga	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	7,32 Persen	545.000.000				7,32 Persen	599.500.000
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	230.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit Rumah	253.000.000
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	33.000.000
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	38.500.000
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
1	04	03	2.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Rumah Tangga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rumah Tangga	0
1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4 Unit	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	220.000.000
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	350.000.000				-	385.000.000
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kawasan kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7,2 Persen	350.000.000				7,2 Persen	385.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit Rumah	110.000.000
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	275.000.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	3.479.473.000				-	3.827.420.300
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan	100 Persen	3.479.473.000				100 Persen	3.827.420.300
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	110.000.000
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	110.000.000
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kelompok	0
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	7 Lokasi	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		7 Lokasi	275.000.000
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	20 Lokasi	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Lokasi	1.100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	30 Lokasi	2.029.473.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Lokasi	2.232.420.300
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	30.000.000				-	33.000.000
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (%)	3 Rekomendasi	30.000.000				3 Rekomendasi	33.000.000
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Laporan	33.000.000
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.276.680.000					17.863.541.600
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			10.591.936.000					12.710.323.200
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.807.427.400				-	11.768.912.880
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 %	54.703.000				100 %	65.643.360
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.367.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	12.000.000
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.034.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.380.000
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.852.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.877.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.954.000
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.888.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.600.000
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.534.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.172.000
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.150.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	32.937.360
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	5.010.413.440				100 %	6.012.495.516
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	4.998.707.440	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		54 Orang/bulan	5.998.446.996
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.846.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	3.415.440
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.860.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.232.000
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.400.000
1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	6.001.080

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	38.292.500				100 %	45.951.480
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	34.460.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.832.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.599.480
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	41.352.000
1	05	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100 %	46.575.000				100 %	55.773.120
1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	12.122.640
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	36.375.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	43.650.480
1	05	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	562.423.500				100 %	674.848.680
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	19.948.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Paket	23.937.600
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	19.312.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Paket	23.175.600
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.878.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	23.791.200
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	5.040.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	499.085.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	598.904.280
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100 %	50.625.000				100 %	58.978.800
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	28.491.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	33.778.800
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	22.134.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	25.200.000
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.483.784.960				100 %	4.181.577.924
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.001.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	12.000.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.577.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	210.692.400
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.298.206.960	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	3.958.885.524
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	560.610.000				100 %	673.644.000
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.270.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	47.124.000
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	449.180.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		27 Unit	539.016.000
1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.020.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	59.736.000
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	23.140.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		51 Unit	27.768.000
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	482.470.000				-	578.964.000
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani	100 %	90.000.500				100 %	108.000.600
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	5.001.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.001.200

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	02	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	24 laporan	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		24 laporan	96.000.000
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 Laporan	4.999.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	5.999.400

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	100 %	323.719.500				100 %	374.963.400
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 laporan	0
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 dokumen	0
1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	30.208.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 unit	39.468.000
1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	17.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	12.000.000
1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	19.830.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 laporan	12.000.000
1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	8.793.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	11.495.400
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	18 Laporan	122.462.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		18 Laporan	120.000.000
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	36 Laporan	125.126.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		36 Laporan	180.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik	100 %	68.750.000				100 %	96.000.000
1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	46.605.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	24.000.000
1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	48.000.000
1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	22.145.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	24.000.000
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	302.038.600				-	362.446.320
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan	80 %	214.736.950				80 %	233.684.340
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	24.000.000
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	90.049.800	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	108.059.760
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	57.213.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	68.655.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	18.574.150	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0 Desa/Kelurahan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa/Kelurahan	0
1	05	04	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.01	0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0 laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 laporan	0
1	05	04	2.01	0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.01	0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2.01	0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	28.900.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	32.968.980
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan	100 %	0				100 %	0
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan	100 %	13.591.900				100 %	16.310.280
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	13.591.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	16.310.280
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase kegiatan Pemberdayaan dalam pencegahan Kebakaran	100 %	73.709.750				100 %	88.451.700
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	300 Orang	73.709.750	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		300 Orang	88.451.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 Desa/Kelurahan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa/Kelurahan	0
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	100 %	0				100 %	24.000.000
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	4 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	24.000.000
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			4.684.744.000					5.153.218.400
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	3.496.425.000				100 %	3.846.067.500
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	21.648.000				100 %	21.781.100

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.427.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	7.676.900
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.530.000
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.530.000
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.530.000
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.530.000
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.755.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.426.700
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.557.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	2.557.500
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.709.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	0
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresntase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.065.057.200				100 %	2.222.220.000
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.044.857.200	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		19 Orang/bulan	2.200.000.000
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	12.100.000
1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.400.000
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.720.000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	3.570.000				100 %	3.927.000
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.570.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	3.927.000
1	05	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	84.088.000				100 %	95.024.600
1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	84.088.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	95.024.600
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	279.811.000				100 %	260.827.600
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.239.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	3.566.200
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.990.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	10.995.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.100.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	3.300.000
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	262.482.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	242.965.800
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	20.690.000				100 %	22.000.000
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	10.386.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Unit	11.000.000
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.304.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	11.000.000
1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	786.660.800				100 %	959.323.200

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120.820.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	230.296.000
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	665.840.800	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	729.027.200
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	234.900.000				100 %	260.964.000
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.630.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	46.343.000
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	158.430.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	172.997.000
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	18.840.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		14 Unit	20.724.000
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	20.900.000
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi bencana	100 %	1.188.319.000				100 %	1.307.150.900
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi	100 Orang	54.613.000				100 Orang	58.974.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	54.613.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	58.974.300
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	577.581.000				100 %	648.676.600
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	58.698.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	46.557.500
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	175 Unit	143.940.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		175 Unit	145.827.000
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	87 Orang	73.401.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		87 Orang	110.000.000
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	38.045.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Kawasan	41.849.500
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki	30 Orang	43.313.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	44.608.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana							
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	130.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	143.000.000
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	20.643.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 laporan	55.000.000
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	69.541.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Kawasan	61.834.300
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	355.000.000				100 %	396.000.000
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	11.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	12.100.000
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	34.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	37.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	3 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Orang	27.500.000
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	195.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	220.000.000
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	90.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	99.000.000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5 Sistem 100 %	201.125.000				5 Sistem 100 %	203.500.000
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	26.125.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	38.500.000
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)							
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	165.000.000
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga	0
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.972.524.000					8.648.437.049

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.588.761.000				-	3.948.183.849
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	115.000.000				-	80.000.000
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	20.000.000
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	10.000.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.270.212.000				-	2.347.122.919
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.229.412.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		22 Orang/bulan	2.327.122.919
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37.800.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.000.000				-	10.000.000
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	13.000.000				-	70.000.000
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	60.000.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	431.879.000				-	360.000.000
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	10.000.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.211.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	15.000.000
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	411.668.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	325.000.000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	89.440.000				-	225.000.000
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	14.414.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	25.000.000
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	75.026.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	200.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	425.010.000				-	586.060.930
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	8.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.974.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	100.000.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	305.036.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	478.060.930
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	239.220.000				-	270.000.000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	129.450.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		37 Unit	150.000.000
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.950.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	10.000.000
1	06	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.880.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	10.000.000
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.940.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	100.000.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	75.000.000				-	134.203.200
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	0				-	0
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
1	06	02	2.01	0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
1	06	02	2.01	0005	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lokasi	0
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
1	06	02	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000				-	134.203.200
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	5.000.000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga	10.000.000
1	06	02	2.03	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	9 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		9 Orang	30.000.000
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	15.000.000
1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	10.000.000
1	06	02	2.03	0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	5.000.000
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	11 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Orang	44.203.200
1	06	02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	5.000.000
1	06	02	2.03	0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	0 orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 orang	5.000.000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	0				-	0
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	0				-	0
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	1.521.600.000				-	3.670.000.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	346.000.000				-	2.820.000.000
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	2.360.000.000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Orang	150.000.000
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	130.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	10.000.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	5.000.000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	10.000.000
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	5.000.000
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	10.000.000
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	70.000.000
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Orang	10.000.000
1	06	04	2.01	0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	5.000.000
1	06	04	2.01	0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	04	2.01	0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	5.000.000
1	06	04	2.01	0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.175.600.000				-	850.000.000
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	5.000.000
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	5.000.000
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	221 Orang	975.600.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		221 Orang	600.000.000
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		17 Orang	200.000.000
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	10.000.000
1	06	04	2.02	0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	04	2.02	0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0 Aduan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Aduan	0
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	377.163.000				-	475.000.000
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	10.000.000				-	80.000.000
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	80.000.000
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	05	2.01	0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	367.163.000				-	395.000.000
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	275.844.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	200.000.000
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6000 Orang	20.000.000
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4 Usulan	71.319.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Usulan	175.000.000
1	06	05	2.02	0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	05	2.02	0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	160.000.000				-	355.000.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	60.000.000				-	160.000.000
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	15.000.000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	25.000.000
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	20.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000				-	195.000.000
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kampung	50.000.000
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		22 Orang	100.000.000
1	06	06	2.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	20.000.000
1	06	06	2.02	0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	06	2.02	0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0 Desa/Kelurahan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa/Kelurahan	25.000.000
1	06	06	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	250.000.000				-	66.050.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000				-	66.050.000
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	36.050.000
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	28 Makam	250.000.000	-	DAU		28 Makam	20.000.000
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
1	06	07	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	10.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.524.551.000					86.338.514.416
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.543.499.000					26.456.575.941
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Realisasi Anggaran	72.31 % 95 %	3.058.082.500				72.31 % 95 %	24.419.950.000
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	42.189.000				100 %	43.000.000
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	21.189.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		8 Dokumen	22.000.000
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.000.000
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.000.000
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.000.000
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	3.000.000
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	6.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.355.899.300				100 %	23.388.300.000
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2.305.899.300	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		35 Orang/bulan	2.356.300.000
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	16.000.000
2	07	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	16.000.000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	21.000.000.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0				-	8.000.000
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Orang	8.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	212.764.000				100 %	295.650.000
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		16 Paket	60.000.000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.650.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Paket	15.650.000
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Dokumen	5.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	147.114.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	210.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		1 Dokumen	5.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20.000.000				100 %	171.000.000
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		1 Unit	0
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Unit	107.000.000
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58 Unit	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		58 Unit	24.000.000
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		3 Unit	40.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	351.690.200				100 %	352.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	150.000.800	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Laporan	150.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	201.689.400	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	202.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	75.540.000				100 %	162.000.000
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	49.540.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Unit	50.000.000
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit	8.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		28 Unit	15.000.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	18.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		26 Unit	20.000.000
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		3 Unit	77.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	21.279.500				100 %	31.787.530
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %	21.279.500				100 %	31.787.530
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		1 Dokumen	10.000.000
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	35 Orang	21.279.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		35 Orang	21.787.530
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3.55 %	350.000.000				3.55 %	683.838.411
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 %	300.000.000				100 %	581.838.411
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		50 Orang	110.000.000
2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		1 Lembaga	20.000.000
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 Kesepakatan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Kesepakatan	451.838.411
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	0				-	15.000.000
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		2 Lembaga	15.000.000
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	30.000.000				100 %	32.000.000
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Perusahaan	32.000.000
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	20.000.000				100 %	55.000.000
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	55.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	12.46 % 74 %	55.000.000				12.46 % 74 %	58.000.000
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	30.000.000				100 %	32.000.000
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		0 Orang	0
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		150 Orang	32.000.000
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		0 Orang	0
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	0				-	0
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		0 Orang	0
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	25.000.000				100 %	26.000.000
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		0 Orang	0
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	25 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		25 Orang	26.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	37.72 %	1.059.137.000				37.72 %	1.263.000.000
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	59.137.000				100 %	63.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Perusahaan	27.000.000
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	34.137.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	36.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksanya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.000.000.000				100 %	1.200.000.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8000 Orang	1.200.000.000
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.795.401.500					5.323.100.000
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	100 Persen	4.456.566.300				100 Persen	4.888.100.000
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	40.000.000				100 Persen	48.600.000
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	25.500.000
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	3.300.000
2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	7.250.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	2.250.000
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	7.000.000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100 Persen	3.567.561.300				100 Persen	3.809.000.000
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	3.487.061.300	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		44 Orang/bulan	3.700.000.000
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	87.500.000
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	7.500.000
2	08	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	7.000.000
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	7.000.000
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75 Persen	13.602.000				75 Persen	21.500.000
2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.035.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	14.000.000
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.567.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	7.500.000
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000				100 Persen	22.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Dokumen	22.000.000
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	210.490.000				100 Persen	260.000.000
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Paket	10.000.000
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.490.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	0
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		355 Laporan	250.000.000
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	75 Persen	14.911.000				75 Persen	20.000.000
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.911.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	20.000.000
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	75 Persen	357.892.000				75 Persen	430.000.000
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.980.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	150.000.000
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	252.912.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	280.000.000
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	75 Persen	232.110.000				75 Persen	277.000.000
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.130.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	50.000.000
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	166.090.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		83 Unit	200.000.000
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.890.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	27.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	30 Persen	29.961.000				30 Persen	70.000.000
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14,05 Persen	29.961.000				14,05 Persen	35.000.000
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	29.961.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	35.000.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan pada Lembaga Legislatif Daerah	28 Persen	0				28 Persen	35.000.000
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	0 orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 orang	35.000.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 1.000 Penduduk Perempuan)	0,02 Angka	108.423.200				0,02 Angka	110.000.000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani	7,9 Persen	48.530.000				7,9 Persen	25.000.000
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2 Lembaga	48.530.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Lembaga	25.000.000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Dirujuk	7,9 Persen	39.950.000				7,9 Persen	60.000.000
2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	30.000.000
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	19.950.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 orang	30.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan	100 Persen	19.943.200				100 Persen	25.000.000
2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	19.943.200	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Lembaga	25.000.000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	30 Persen	49.828.000				30 Persen	60.000.000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	30 Persen	24.975.000				30 Persen	30.000.000
2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	24.975.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24.853.000				1 Dokumen	30.000.000
2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	24.853.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga	30.000.000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	25.290.000				100 Persen	65.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota	100 Persen	25.290.000				100 Persen	65.000.000
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25.290.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	08	05	2.01	0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	35.000.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0 -18 Tahun	92,45 Persen	55.943.000				92,45 Persen	70.000.000
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	55.943.000				100 Persen	70.000.000
2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Lembaga	30.089.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		29 Lembaga	35.000.000
2	08	06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.854.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	35.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Kabupaten	100 Persen	69.390.000				100 Persen	60.000.000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 Persen	69.390.000				100 Persen	60.000.000
2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	49.390.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	25.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota							
2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	35.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			522.970.000					10.000.000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	0				-	0
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0 unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 unit	0
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	457.970.000				-	10.000.000
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	122.970.000				-	10.000.000
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	42.970.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Keluarga	0
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 laporan	0
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000				-	0
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38 Ton	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		38 Ton	0
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-	-	0				-	0
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	85.000.000				-	0
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	30.000.000				-	0
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	15.000.000				-	0
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	15.000.000				-	0
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	35.000.000				-	0
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000				-	0
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.192.234.000					5.379.285.760
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	0				-	0
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	10	04	2.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Berita Acara	0
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	1.175.680.000				-	5.338.165.794
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.175.680.000				-	5.338.165.794
2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	6 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Dokumen	1.238.165.794
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Dokumen	1.600.000.000
2	10	05	2.01	0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	10	05	2.01	0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	1.175.680.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	2.500.000.000
2	10	05	2.01	0006	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
2	10	05	2.01	0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	-	-	5.888.000				-	7.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.888.000				-	7.000.000
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	5.888.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	7.000.000
2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	10	06	2.01	0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0
2	10	06	2.01	0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0
2	10	06	2.01	0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2	10	06	2.02	0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	06	2.02	0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	0				-	19.119.966
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	19.119.966
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	7.119.966
2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen Dokumen	6.000.000
2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	2 Dokumen Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen Dokumen	6.000.000
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	10.666.000				-	15.000.000
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	0				-	0
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	10.666.000				-	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	10.666.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Berita Acara	15.000.000
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-	0				-	0
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	0				-	0
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	0				-	0
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	10	2.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
2	10	10	2.01	0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.110.945.000					11.198.945.000
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD Persentase Capaian Kinerja OPD Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	33.67 % 72.31 % 95.00 %	8.943.010.500				33.67 % 72.31 % 95.00 %	8.821.153.974
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 %	75.000.000				100 %	121.000.000
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		3 Dokumen	25.000.000
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	8.000.000
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	8.000.000
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		4 Laporan	25.000.000
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		13 Laporan	45.000.000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.238.713.500				100 %	3.658.563.445
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.203.713.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		39 Orang/bulan	3.608.563.445

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		12 Laporan	25.000.000
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		12 Dokumen	15.000.000
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	30.000.000				100 %	40.000.000
2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		4 Laporan	25.000.000
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		4 Laporan	15.000.000
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu	85.71 %	219.901.600				85.71 %	222.000.000
2	11	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	204.901.600	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	205.000.000
2	11	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		12 Dokumen	12.000.000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100 %	65.000.000				100 %	160.000.000
2	11	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Paket	60.000.000
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		4 Dokumen	15.000.000
2	11	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Dokumen	20.000.000
2	11	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Dokumen	15.000.000
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		6 Orang	30.000.000
2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Orang	20.000.000
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Orang	0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	274.862.000				100 %	275.000.000
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		20 Paket	15.000.000
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.945.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Paket	10.000.000
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Dokumen	10.000.000
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		20 Laporan	30.000.000
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136 Laporan	209.917.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		136 Laporan	210.000.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	43.59 %	135.602.000				43.59 %	202.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	120.000.000
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	33.892.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Unit	0
2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0
2	11	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	40.558.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		6 Unit	40.000.000
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	61.152.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		6 Unit	42.000.000
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.777.141.400				100 %	2.942.590.529
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		350 Laporan	30.000.000
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	94.999.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		3 Laporan	95.000.000
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Laporan	0
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.652.142.400	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Laporan	2.817.590.529
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	17.73 %	1.126.790.000				17.73 %	1.200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.130.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Unit	65.000.000
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	802.560.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		40 Unit	800.000.000
2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Unit	200.000.000
2	11	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33.700.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		50 Unit	85.000.000
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	49.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		5 Unit	50.000.000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	Terintegrasi	211.932.500				Terintegrasi	145.000.000
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	37.50 %	185.806.500				37.50 %	120.000.000
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	131.298.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	20.000.000
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	24.238.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	0
2	11	02	2.01	0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi							
2	11	02	2.01	0007	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	1 Dokumen	30.270.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	32 %	26.126.000				32 %	25.000.000
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	26.126.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	0
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	25.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	75.49 Persen 80.05 Persen	556.750.000				75.49 Persen 80.05 Persen	590.000.000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	10 %	340.000.000				10 %	340.000.000
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		16 Dokumen	40.000.000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks	0 Lokasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lokasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)							
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		20 Dokumen	300.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	25 %	50.000.000				25 %	50.000.000
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	50.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.047 %	166.750.000				0.047 %	200.000.000
2	11	03	2.03	0006	Pelaksanaan remediasi	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	50.000.000
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Ha	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Ha	100.000.000
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 M2	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 M2	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2 Kegiatan	66.750.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Kegiatan	50.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	1.38 Persen	614.713.000				1.38 Persen	722.000.000
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola	2.31 %	614.713.000				2.31 %	722.000.000
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	304.789.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Bontomarannu	DAU		5 Ha	382.000.000
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Ha	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Ha	200.000.000
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Orang	0
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	48.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		5 Unit	50.000.000
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	11.924.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	50.000.000
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	40.000.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	100 Persen	0				100 Persen	0
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara	9.25 %	0				9.25 %	0
2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)								
2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Usaha	0
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang di kumpulkan oleh Pelaku Usaha	9.25 Persen	0				9.25 Persen	0
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	0
2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	11 Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Usaha	0
2	11	05	2.02	0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Usaha	0
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	48 Persen	111.759.000				48 Persen	125.278.306
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	23.33	111.759.000				23.33	125.278.306
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	161 Dokumen	39.629.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		161 Dokumen	38.278.306
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	34.738.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		4 Orang	56.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	45 Badan Usaha	37.392.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		45 Badan Usaha	31.000.000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA dan Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang difasilitasi	1.14 Persen	32.682.000				1.14 Persen	32.681.297
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	11.36 %	32.682.000				11.36 %	32.681.297
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	32.682.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	32.681.297
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	0				-	0
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	20 Persen	65.374.000				20 Persen	65.362.594
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	100 %	65.374.000				100 %	65.362.594

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	65.374.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	65.362.594
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	33.33 Persen	16.646.000				33.33 Persen	16.340.649
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	15.00 %	16.646.000				15.00 %	16.340.649
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	16.646.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Entitas	16.340.649
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	100 Persen	38.128.000				100 Persen	38.128.180
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	100 %	38.128.000				100 %	38.128.180
2	11	10	2.01	0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	0 Perkara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Perkara	0
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Perkara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Perkara	0
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	25.914.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Pengaduan	16.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi	12.214.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Sanksi	21.628.180
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	2 Persen 3.97 Persen	519.950.000				2 Persen 3.97 Persen	643.000.000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	14.46 %	519.950.000				14.46 %	643.000.000
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Kelompok	35.000.000
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	58.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	58.000.000
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	222.258.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	300.000.000
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah								
2	11	1 1	2.0 1	001 6	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0 Persentase	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Persentase	0
2	11	1 1	2.0 1	001 7	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
2	11	1 1	2.0 1	001 8	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	63.072.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	100.000.000
2	11	1 1	2.0 1	002 0	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6000 Ton	91.620.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Kaburu	DAU		6000 Ton	100.000.000
2	11	1 1	2.0 1	002 3	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		3 Dokumen	20.000.000
2	11	1 1	2.0 1	002 4	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
2	11	1 1	2.0 1	002 8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	11	1 1	2.0 1	003 0	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
2	11	1 1	2.0 2		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang mempunyai izin	9.09 %	0				9.09 %	0
2	11	1 1	2.0 2	000 1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Rekomendasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang taat	18.18 %	0				18.18 %	0
2	11	11	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Unit	0
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.000.101.000					4.245.361.000
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.697.101.000				-	3.796.361.000
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	90.292.000				-	68.195.000
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.292.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	24.695.000
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	5.500.000
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	16.000.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.612.646.000				-	2.602.146.000
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.557.646.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		26 Orang/bulan	2.557.646.000
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	15.000.000
2	12	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	22.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	13.000.000
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.431.000				-	4.400.000
2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.431.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Laporan	4.400.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.000.000				-	5.500.000
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	371.000.000				-	367.000.000
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	4.400.000
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	125.000.000
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	`1 Paket	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		`1 Paket	4.400.000
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	7.700.000
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	5.500.000
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 Laporan	220.000.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	185.272.000				-	245.000.000
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	33.000.000
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.272.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	12.000.000
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Unit	200.000.000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	287.500.000				-	308.800.000
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	8.800.000
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	100.000.000
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	200.000.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	140.960.000				-	195.320.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	29.460.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Unit	58.920.000
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	68.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	70.000.000
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Unit	12.000.000
2	12	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	4.400.000
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	50.000.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	160.000.000				-	269.000.000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	40.000.000				-	44.000.000
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	44.000.000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	120.000.000				-	225.000.000
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Dokumen	200.000.000
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	25.000.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	60.000.000				-	80.000.000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	60.000.000				-	80.000.000
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	50.000.000
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Layanan	30.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	72.000.000				-	85.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	25.000.000				-	30.000.000
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	30.000.000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	47.000.000				-	55.000.000
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	17.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	20.000.000
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	35.000.000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	11.000.000				-	15.000.000
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	11.000.000				-	15.000.000
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	15.000.000
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.717.886.000					4.022.000.000
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	100 %	2.592.886.000				100 %	2.708.000.000
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17.500.000				100 %	20.000.000
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	3.000.000
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		-	3.000.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Kualitas, tata Kelola Aparatur Daerah	100 %	1.943.143.000				100 %	2.006.000.000
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.938.143.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/bulan	2.000.000.000
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.000.000
2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata Kelola Aparatur Daerah	100 %	10.000.000				100 %	15.000.000
2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0 0	10.000.000	-	DAU		0 0	15.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	246.432.200				100 %	300.000.000
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		-	0
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.533.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	30.000.000
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.085.800	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	5.000.000
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Paket	0
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.812.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	8.000.000
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		-	0
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	-	DAU		1 Laporan	7.000.000
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	250.000.000
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas Aparatur dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	85.000.000				100 %	52.000.000
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	50.000.000
2	13	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	200.380.800				100 %	215.000.000
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	65.000.000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	140.380.800	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	150.000.000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %	90.430.000				100 %	100.000.000
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.630.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	50.000.000
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0 0	36.460.000	-	DAU		0 0	40.000.000
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.340.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Unit	10.000.000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	0 %	0				0 %	57.000.000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	0 %	0				0 %	57.000.000
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	8 Desa	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Desa	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa	20.000.000
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Desa	17.000.000
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	81 Desa	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		81 Desa	0
2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	20.000.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	18.52 %	35.000.000				18.52 %	80.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	35.000.000				-	80.000.000
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	40.000.000
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	-	0	-	-		-	20.000.000
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	20.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	595.000.000				100 %	590.000.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Pemerintahan Desa	100 %	595.000.000				100 %	590.000.000
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	60.000.000
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	50.000.000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	45.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		-	40.000.000
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	0	-	-		0 Laporan	30.000.000
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	10.000.000
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	50.000.000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	181.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	36 Orang	44.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		36 Orang	50.000.000
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Desa	25.000.000
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	20.000.000
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	90.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	150.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	9.88 %	495.000.000				9.88 %	587.000.000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan taraf hidup Masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	9.88 %	495.000.000				9.88 %	587.000.000
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	40.000.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		40 Lembaga	45.000.000
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	57.000.000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	60.000.000
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	35.000.000
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	350.000.000
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3.134.975.500					3.581.000.000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,1 Persen	180.512.500				2,1 Persen	745.000.000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	75 Persen	75.000.000				75 Persen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang Dipetakan	100 Persen	105.512.500				100 Persen	745.000.000
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	11 Laporan	52.800.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		11 Laporan	675.000.000
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	11 Laporan	52.712.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		11 Laporan	70.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	22,0 Persen	2.094.655.000				22,0 Persen	2.530.000.000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 Persen	597.778.000				100 Persen	900.000.000
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	355.298.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		11 Laporan	420.000.000
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	75.900.000	-	DAK NON FISIK-BOP KB		11 Laporan	180.000.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		11 Dokumen	180.000.000
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	11 Organisasi	66.580.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		11 Organisasi	120.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Persen	1.129.888.000				100 Persen	750.000.000
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474 Orang	1.129.888.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOP KB		474 Orang	750.000.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	185.994.000				100 Persen	395.000.000
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Laporan	29.996.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		17 Laporan	35.000.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3690 Orang	108.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		3690 Orang	150.000.000
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA		0 Unit	150.000.000
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Laporan	27.998.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		17 Laporan	35.000.000
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Laporan	25.000.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam	90 Persen	180.995.000				90 Persen	485.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB							
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	88 Unit	112.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		88 Unit	275.000.000
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	88 Kampung	68.495.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		88 Kampung	210.000.000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA	42 Persen	791.000.000				42 Persen	150.000.000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK- R,BKL,UPPKA) yang Dibina	67,77 Persen	130.000.000				67,77 Persen	150.000.000
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		10 Unit	150.000.000
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP KB		0 Orang	0
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7 Ormas	661.000.000				7 Ormas	0
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	661.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOP KB		11 laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	100 Persen	68.808.000				100 Persen	156.000.000
X	X	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000				100 Persen	22.000.000
X	X	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	22.000.000
X	X	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	24.288.000				100 Persen	107.000.000
X	X	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
X	X	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12.702.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Paket	22.000.000
X	X	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	70.000.000
X	X	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.486.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	15.000.000
X	X	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	75 Persen	24.520.000				75 Persen	27.000.000
X	X	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	24.520.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		37 Unit	27.000.000
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			9.161.543.000					10.315.736.400
2	15	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.336.543.000				-	6.978.236.400
2	15	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	32.500.000				-	38.849.500
2	15	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	4.250.000
2	15	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.875.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.362.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.375.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.812.500
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.875.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.362.000
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.375.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.812.500
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	3.250.000
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	21.000.000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.776.096.400				-	5.255.455.600
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	4.768.596.400	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		61 Orang/bulan	5.245.455.600
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.500.000
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	3.250.000
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	3.250.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	15.000.000				-	20.000.000
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	20.000.000
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	0
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	432.819.000				-	455.175.000
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65 Paket	2.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		65 Paket	5.500.000
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	127.056.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		21 Paket	115.500.000
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	610 Paket	20.213.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		610 Paket	21.800.000
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	140 Paket	8.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		140 Paket	8.800.000
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.250.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	16.775.000
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	11.800.000
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Laporan	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		175 Laporan	275.000.000
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	0
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0				-	0
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	0
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	629.497.600				-	711.626.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	137.500.000
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	529.497.600	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	574.126.300
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	450.630.000				-	497.130.000
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.630.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	42.130.000
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		18 Unit	275.000.000
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	15.000.000
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	165.000.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	31.00 %	1.325.000.000				31.00 %	1.567.500.000
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	52 %	0				52 %	0
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	52 %	1.150.000.000				52 %	1.365.000.000
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	1.200.000.000
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN		150 Unit	165.000.000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89 %	20.000.000				89 %	22.000.000
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		1 Dokumen	22.000.000
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD, DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	0				-	0
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	0				-	0
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000				-	148.000.000
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	28.000.000
2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.06	0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.06	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.06	0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.06	0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	12 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	120.000.000
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	15	02	2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	0				-	0
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota							
2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	0
2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000				-	32.500.000
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	32.500.000
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	15	02	2.13	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.13	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.13	0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	1.500.000.000				-	1.770.000.000
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	03	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	-	-	0				-	0
2	15	03	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	15	03	2.09	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.09	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2	15	03	2.09	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	15	03	2.10	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.10	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	1.500.000.000				-	1.770.000.000
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2 Unit	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	560.000.000
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	1.100.000.000
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	110.000.000
2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.15	0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.17	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.17	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.18	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.18	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal							
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0				-	0
2	15	03	2.19	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
2	15	03	2.19	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	-	-	0				-	0
2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	-	-	0				-	0
2	15	04	2.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.772.292.000					5.060.000.000
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.003.292.000				-	4.192.000.000
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.292.000				-	77.000.000
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.292.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	10.000.000
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	85 Data	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		85 Data	5.000.000
2	16	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	15.000.000
2	16	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Substansi	2.000.000
2	16	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.070.000.000				-	3.087.000.000
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.044.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		35 Orang/bulan	3.050.000.000
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.000.000				-	21.000.000
2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.000.000
2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000				-	34.000.000
2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	10.000.000
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	10.000.000
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	10.000.000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.000.000				-	342.000.000
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	10.000.000
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	10.000.000
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	32.000.000
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	15.000.000
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	250.000.000
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	54.000.000				-	79.000.000
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	50.000.000
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	5.000.000
2	16	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	327.000.000				-	360.000.000
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	75.000.000
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	275.000.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	160.000.000				-	192.000.000
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	60.000.000
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Unit	100.000.000
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	10.000.000
2	16	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	10.000.000
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	472.000.000				-	552.000.000
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	472.000.000				-	552.000.000
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	170.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	250.000.000
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	13 Komunitas	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		13 Komunitas	15.000.000
2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Permohonan	10.000.000
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	70 Persentase	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		70 Persentase	10.000.000
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Rekomendasi	10.000.000
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	70 Persentase	110.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		70 Persentase	120.000.000
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	24 Media	62.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		24 Media	32.000.000
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	500 Konten	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		500 Konten	55.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	0	0 0	50.000.000	-	DAU		0 0	30.000.000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	297.000.000				-	316.000.000
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000				-	32.000.000
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	32.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	267.000.000				-	284.000.000
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	27 Aplikasi	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		27 Aplikasi	32.000.000
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	38 Perangkat Daerah	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		38 Perangkat Daerah	120.000.000
2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Layanan	10.000.000
2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	32.000.000
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Aplikasi	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Aplikasi	10.000.000
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	38 Perangkat Daerah	52.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		38 Perangkat Daerah	10.000.000
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			966.826.000					414.199.432
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	5.378.500				-	10.746.644
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.378.500				-	5.373.322
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	5.378.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit Usaha	5.373.322

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	5.373.322
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		1 Unit Usaha	5.373.322
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	28.447.500				-	28.452.788
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	28.447.500				-	28.452.788
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	168 Unit Usaha	28.447.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		168 Unit Usaha	28.452.788
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		30 Unit Usaha	0
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	0				-	0
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit Usaha	0
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	62 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		62 Orang	0
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	25.000.000				-	26.000.000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000				-	26.000.000
2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6 Keluarga	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Keluarga	26.000.000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	121.000.000				-	253.000.000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	121.000.000				-	253.000.000
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		30 Unit Usaha	50.000.000
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		200 Unit Usaha	25.000.000
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Unit Usaha	61.000.000
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		150 Orang	71.000.000
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	46.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		30 Unit Usaha	46.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	787.000.000				-	96.000.000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	787.000.000				-	96.000.000
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	37 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		37 Unit Usaha	50.000.000
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	37 Unit Usaha	787.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		37 Unit Usaha	46.000.000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.617.522.000					5.624.250.287
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.941.482.000				-	4.882.402.392
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 persen	18.000.000				100 persen	58.000.000
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	7.500.000
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	7.500.000
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	7.500.000
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	7.500.000
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	7.500.000
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Laporan	7.500.000
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Laporan	13.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik undefined	100 % undefined undefined	2.952.395.000				100 % undefined undefined	2.809.402.392
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.942.395.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		26 Orang/bulan	2.787.402.392
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	7.000.000
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	7.000.000
2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	8.000.000
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tepat	100 %	15.000.000				100 %	20.000.000
2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	5.000.000
2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Laporan	10.000.000
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Laporan	5.000.000
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 %	0				100 %	0
2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Paket	0
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Orang	0
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Orang	0
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD undefined	100 persen undefined undefined	212.360.000				100 persen undefined undefined	480.000.000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.590.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Paket	50.000.000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	8.100.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	30.000.000
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	183.670.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		200 Laporan	400.000.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 persen	169.026.000				100 persen	320.000.000
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	63.054.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	70.000.000
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	50.000.000
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	105.972.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Unit	100.000.000
2	18	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	100.000.000
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 persen	462.781.000				100 persen	925.000.000
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	149.999.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	150.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	312.781.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	775.000.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 persen	111.920.000				100 persen	270.000.000
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.630.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	75.000.000
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	33.120.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		20 Unit	60.000.000
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	35.170.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Unit	35.000.000
2	18	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	25.000.000
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	75.000.000
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	50.000.000				-	54.468.828
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	25 Perusahaan	50.000.000				25 Perusahaan	54.468.828
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	54.468.828

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	100 %	0				100 %	0
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		0 Dokumen	0
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Daerah	0
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	125.000.000				-	274.360.460
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor (PMDN/PMA)	381 Investor	125.000.000				381 Investor	274.360.460
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	274.360.460
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	125.000.000				-	40.960.559
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	100 %	125.000.000				100 %	40.960.559
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	1600 Pelaku Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1600 Pelaku Usaha	40.960.559

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Pelaku Usaha	0
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0 Kegiatan Usaha	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Kegiatan Usaha	0
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	351.040.000				-	351.403.468
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	38,10 %	351.040.000				38,10 %	351.403.468
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha.	85.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Kegiatan Usaha.	85.000.000
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	204 Pelaku Usaha	71.040.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		204 Pelaku Usaha	71.403.468
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	195.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/DesaKab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		13 Kegiatan Usaha	195.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	25.000.000				-	20.654.580
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	25.000.000				100 %	20.654.580

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	20.654.580
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.599.839.000					532.462.096
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	220.059.000				-	425.000.000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	220.059.000				-	425.000.000
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	84.328.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	175.000.000
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Orang	0
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	135.731.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	250.000.000
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	0 Organisasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Organisasi	0
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.942.395.000				-	0
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.688.924.500				-	0
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	1.688.924.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kegiatan	0
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	0 Kegiatan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kegiatan	0
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.113.170.500				-	0
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0 Orang	450.792.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	0 Pelatda	562.378.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Pelatda	0
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	0 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	140.300.000				-	0
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Lembaga	140.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	437.385.000				-	107.462.096
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	437.385.000				-	107.462.096
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	0 Organisasi	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Organisasi	0
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	6 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Orang	107.462.096

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0 Laporan	237.385.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	0 Organisasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Organisasi	0
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			170.000.000					236.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	170.000.000				-	236.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	170.000.000				-	236.000.000
2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 %	25.000.000
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 %	32.000.000
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 %	32.000.000
2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	38 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		38 Orang	90.000.000
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 %	25.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	32.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			200.000.000					227.000.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	200.000.000				-	227.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000				-	147.000.000
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	50.000.000
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	50.000.000
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	38 Perangkat Daerah	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		38 Perangkat Daerah	32.000.000
2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	15.000.000
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000				-	80.000.000
2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	80.000.000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			360.000.000					0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	34,80 persen	100.000.000				34,80 persen	0
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya kebudayaan yang masyarakat pelakunya di dalam daerah kabupaten kepulauan selayar	1 pengelolaan	100.000.000				1 pengelolaan	0
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Objek	0
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	22	02	2.01	0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	-	-	0	-	-		-	0
2	22	02	2.01	0004	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	0	0 0	0	-	DAU		0 0	0
2	22	02	2.01	0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlestarikannya kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya di Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	0				1 Kegiatan	0
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Sertifikat	0
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Pembinaan	0				1 Pembinaan	0
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya setiap tahun	5 event	100.000.000				5 event	0
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang dilaksanakan	1 paket	100.000.000				1 paket	0
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	0
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Sertifikat	0
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	25 persen	0				25 persen	0
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal	1 pembinaan	0				1 pembinaan	0
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	50 persen	100.000.000				50 persen	0
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan cagar budaya peringkat kabupaten	1 penetapan	0				1 penetapan	0
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	05	2.01	0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang terkelola	2 Objek	100.000.000				2 Objek	0
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Objek	0
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	05	2.02	0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin membawa cagar budaya ke Luar Daerah kabupaten dalam satu daerah kabupaten	0 persen	0				0 persen	0
2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Objek	0
2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum	5500 Orang	60.000.000				5500 Orang	0
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	tersedianya kegiatan yang dapat meningkatkan kunjungan ke Museum	6 Kegiatan	60.000.000				6 Kegiatan	0
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM		1 Unit	0
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	22	06	2.01	0013	Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
2	22	06	2.01	0014	Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	0 Layanan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Layanan	0
2	22	06	2.01	0015	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3.608.172.000					3.625.100.000
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan	73 % 92 %	3.553.933.000				73 % 92 %	3.573.200.000
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 %	16.900.000				100 %	17.600.000
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.700.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.800.000
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.900.000
2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.700.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.800.000
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.700.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.800.000
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Laporan	2.500.000
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	3.800.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		13 Laporan	3.900.000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	2.544.437.370				100 %	2.545.200.000
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.531.437.370	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		21 Orang/bulan	2.532.000.000
2	23	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	10.600.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Dokumen	10.700.000
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	2.500.000
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	13.617.000				100 %	14.000.000
2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.617.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	14.000.000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kerja sangat baik	100 %	36.626.000				100 %	38.000.000
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	36.626.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Orang	38.000.000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	300.146.200				100 %	309.000.000
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.561.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	10.000.000
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.605.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	6.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.086.700	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Paket	14.000.000
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	47 Dokumen Dokumen	11.741.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		47 Dokumen Dokumen	12.000.000
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	232.144.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		150 Laporan	240.000.000
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	29.008.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	27.000.000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100 %	45.381.000				100 %	47.000.000
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	45.381.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Unit	47.000.000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	357.571.500				100 %	357.400.000
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	1.400.000
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	161.493.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	162.000.000
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194.678.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	194.000.000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %	239.253.930				100 %	245.000.000
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	175.030.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		14 Unit	194.000.000
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.750.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		27 Unit	19.000.000
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45.473.930	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	32.000.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	14621 Orang Pengunjung 61,51 %	54.239.000				14621 Orang Pengunjung 61,51 %	51.900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100 %	43.309.000				100 %	49.000.000
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	16.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Perpustakaan	27.000.000
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	23.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Perpustakaan	13.000.000
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		300 Eksemplar	3.000.000
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4 Perpustakaan	2.309.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Perpustakaan	6.000.000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pembudayaan gemar membaca yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota	100 %	10.930.000				100 %	2.900.000
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	5.930.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Perpustakaan	0
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Orang	0
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Lokus	2.900.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			50.345.000					87.498.500
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	42,1 %	30.345.000				42,1 %	59.498.500
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang tertata sesuai klasifikasi dan jadwal retensi arsip (JRA)	100 %	20.000.000				100 %	34.498.500
2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	10 Lembaga	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Lembaga	34.498.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip hasil alih media yang diautentikasi	100 %	10.345.000				100 %	0
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	35 Arsip	10.345.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		35 Arsip	0
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase data kearsipan daerah yang telah diintegrasikan ke dalam SJIKN	100 %	0				100 %	25.000.000
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Pengguna	0
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	25.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	40 %	20.000.000				40 %	28.000.000
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip hasil alih media yang diautentikasi	100 %	20.000.000				100 %	28.000.000
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 Arsip	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		25 Arsip	28.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			38.329.471.000					19.932.257.606
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.301.363.000					7.674.870.010
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.305.464.300				-	4.446.995.155
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	108.656.900				-	108.517.500
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	33.829.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	39.900.000
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.625.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.100.000
3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.155.000
3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.312.500
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.570.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	3.675.000
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	29.991.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	33.600.000
3	25	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	25	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Data	0
3	25	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	15.058.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	15.750.000
3	25	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	8.400.000
3	25	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0 Substansi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Substansi	0
3	25	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	19.358.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.354.846.900				-	3.566.656.695
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.343.433.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		33 Orang/bulan	3.554.672.100
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	7.875.000
3	25	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.400.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.520.000
3	25	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	499.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	524.895
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.014.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	1.064.700
3	25	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.215.000				-	8.352.750
3	25	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.215.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	8.352.750
3	25	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	0				-	0
3	25	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.926.000				-	26.250.000
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	28.806.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Orang	26.250.000
3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	22.120.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	201.409.000				-	204.290.090
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	583.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	615.090
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	525.000
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	-	DAU		0 Paket	0
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	3.150.000
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	197.326.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	23.487.000				-	15.750.000
3	25	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	-	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.487.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	15.750.000
3	25	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	487.483.500				-	442.483.120
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.432.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.800.000
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	203.912.300	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	130.330.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	282.139.200	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	310.353.120
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	74.440.000				-	74.695.000
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	27.000.000
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	36.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		29 Unit	36.500.000
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.940.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	6.195.000
3	25	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.000.000
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	1.281.511.700				-	893.843.400
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	31.535.000				-	34.500.000
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	31.535.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	34.500.000
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Unit	0
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.248.596.700				-	854.878.800
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	39.798.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	68.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	15 Kelompok	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Kelompok	34.524.000
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	150 Unit Usaha	27.023.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		150 Unit Usaha	38.354.800
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	40 Unit	1.174.275.700	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, INSENTIF FISKAL		40 Unit	714.000.000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	1.380.000				-	4.464.600
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1.380.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Layanan	4.464.600
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Dokumen	0
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Rekomendasi	0
3	25	03	2.04	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	03	2.04	0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Rekomendasi	0
3	25	03	2.04	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0				-	0
3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Dokumen	0
3	25	03	2.05	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
3	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Dokumen	0
3	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	715.570.000				-	706.531.455
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.243.500				-	7.875.000
3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing							
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	9 Rekomendasi	8.243.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		9 Rekomendasi	7.875.000
3	25	04	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	04	2.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya	0 rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 rekomendasi	0
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	45.280.000				-	53.025.000
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	24.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Kelompok	28.350.000
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kelompok	0
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kelompok	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 Kelompok	21.280.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Kelompok	24.675.000
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
3	25	04	2.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	04	2.03	0003	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	662.046.500				-	645.631.455
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	23.394.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	27.300.000
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	210.000.000
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	399.449.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU, INSENTIF FISKAL		10 Unit	210.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1 Unit	8.885.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	16.800.000
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	230.318.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	181.531.455
3	25	04	2.04	0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	38.675.000				-	52.500.000
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	38.675.000				-	52.500.000
3	25	05	2.01	0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan	0 Hari Operasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Hari Operasi	0
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 Pelaku Usaha	12.608.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Pelaku Usaha	15.750.000
3	25	05	2.01	0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	40 Pelaku Usaha	8.272.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		40 Pelaku Usaha	21.000.000
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 Pelaku Usaha	16.595.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Pelaku Usaha	15.750.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	25	05	2.01	0010	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	0 Perkara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Perkara	0
3	25	05	2.01	0011	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	25	05	2.01	0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	1 Pelaku Usaha	1.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Pelaku Usaha	0
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	960.142.000				-	1.575.000.000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	25.000.000				-	26.250.000
3	25	06	2.01	0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	25	06	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Rekomendasi	0
3	25	06	2.01	0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	0 Rekomendasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Rekomendasi	0
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	26.250.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	-	-	24.000.000				-	25.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	8 Unit Usaha	24.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Unit Usaha	25.200.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	911.142.000				-	1.523.550.000
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	765.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	1.471.050.000
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	146.142.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Pelaku Usaha	52.500.000
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			6.454.716.000					0
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100 persen	5.504.716.000				100 persen	0
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100 persen	60.000.000				100 persen	0
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	27.184.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.646.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.713.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.445.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	0
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.763.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.024.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Data	0
3	26	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	4.225.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	0
3	26	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0 Substansi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Substansi	0
3	26	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Berita Acara	0
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.734.716.000				-	0
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.714.716.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		34 Orang/bulan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		-	0
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000				-	0
3	26	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	0				-	0
3	26	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0				-	0
3	26	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	26	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	625.000.000				-	0
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	0
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	70.000.000				-	0
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	26	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	555.000.000				-	0
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	455.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	450.000.000				-	0
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		36 Unit	0
3	26	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								
3	26	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	0
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit Unit	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 unit Unit	0
3	26	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	220.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan	11 persen	300.000.000				11 persen	0
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dilakukan pengelolaan	1 Lokasi	100.000.000				1 Lokasi	0
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Lokasi	0
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lokasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Umlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten kepulauan selayar	1 Lokasi	0				1 Lokasi	0
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lokasi	0
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Orang	0
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Lokasi	100.000.000				1 Lokasi	0
3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Lokasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lokasi	0
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	0 Lokasi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lokasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Lokasi	0
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	02	2.03	0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Dokumen	0
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar yang ditetapkan	20 Tanda Daftar	100.000.000				20 Tanda Daftar	0
3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	0 Usaha Pariwisata	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Usaha Pariwisata	0
3	26	02	2.04	0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	0 Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Usaha	0
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	0 Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Usaha	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	02	2.04	0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	0 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Unit Usaha	0
3	26	02	2.04	0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	0 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		0 Pelaku Usaha	0
3	26	02	2.04	0016	Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	5 Badan Usaha	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Badan Usaha	0
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat Hunian Akomodasi	5 persen	300.000.000				5 persen	0
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	1 Paket	300.000.000				1 Paket	0
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kegiatan	0
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Promosi	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Promosi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	2 persen	100.000.000				2 persen	0
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana zona kreatif	1 Paket	0				1 Paket	0
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Paket	100.000.000				1 Paket	0
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	0 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Pelaku Usaha	0
3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0 Kegiatan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kegiatan	0
3	26	04	2.02	0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	0 Promosi	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Promosi	0
3	26	04	2.02	0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	04	2.02	0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	0 Kebijakan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kebijakan	0
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Produk	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Produk	0
3	26	04	2.02	0023	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)	Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP)	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	15 persen	250.000.000				15 persen	0
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan ekraf	1 Paket	150.000.000				1 Paket	0
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	0
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	30 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	0
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tersedianya kegiatan pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif	1 Paket	100.000.000				1 Paket	0
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	0
3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	26	05	2.02	0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	0 Lembaga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga	0
3	26	05	2.02	0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	05	2.02	0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			18.895.668.000					5.945.788.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.737.687.000				-	34.728.750
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.892.000				-	34.728.750

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	34.728.750
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.103.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.788.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	0
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.994.016.500				-	0
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	10.966.072.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		120 Orang/bulan	0
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	0
3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	6.078.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	-	DAU		1 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0 0	5.788.500	-	DAU		0 0	0
3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	1 0	6.078.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 0	0
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	17.655.000				-	0
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.788.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.078.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.788.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	140.935.000				-	0
3	27	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.078.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	86.605.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	0
3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	25.613.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	0
3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	22.639.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	0
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	286.502.000				-	0
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.756.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	0
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	22.381.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Paket	0
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	0
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	0
3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.364.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	227.487.000				-	0
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	37.082.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	27	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	43.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	0
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	147.405.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	0
3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	0
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	0
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	809.692.000				-	0
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	702.192.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	227.507.500				-	0
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	70.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		70 Unit	0
3	27	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.788.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	0
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23.152.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	0
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	83.566.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	3.712.291.000				-	4.361.059.250
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	2.319.720.500				-	1.472.725.000
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	300.000.000
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.122.725.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.122.725.000
3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0 Ton	626.995.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
3	27	02	2.01	0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	0 Setek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Setek	0
3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	50.000.000
3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	02	2.01	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	8000 Batang	240.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8000 Batang	0
3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0 Batang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Batang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	0 Mata	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Mata	0
3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	0 Gram	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Gram	0
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	0 Setek	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Setek	0
3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0 Ton	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ton	0
3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	0 Anakan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Anakan	0
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	562.570.500				-	1.872.762.250
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	350.905.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.200.491.500
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	138.900.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	79.980.750
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	72.765.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Varietas Unggul Baru (VUB)	592.290.000
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 laporan	0
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	-	-	80.000.000				-	140.603.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	84.391.500
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	56.211.500
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	0				-	0
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	02	2.04	0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	0 Kasus	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kasus	0
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000				-	180.373.000
3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	10 Ton	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Ton	100.000.000
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	80.373.000
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Laporan	0
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	650.000.000				-	694.596.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10 Ton	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Ton	167.136.000
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3500 Ekor	500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3500 Ekor	527.460.000
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Dosis	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dosis	0
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	2.000.000.000				-	1.550.000.000
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	400.000.000				-	100.000.000
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	350.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	100.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	1.600.000.000				-	1.450.000.000
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	400.000.000
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	0
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	100.000.000
3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	100.000.000
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	200.000.000
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	150.000.000
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.02	0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		1 Unit	0
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0				-	0
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-	-	0				-	0
3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	-	-	260.000.000				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000				-	0
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	0 Wilayah	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Wilayah	0
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	1 Kasus	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Kasus	0
3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		1 Laporan	0
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0 laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 laporan	0
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM								
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000				-	0
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	10.000.000				-	0
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	0 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Usaha	0
3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	0 Produk	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Produk	0
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit Usaha	0
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	0				-	0
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	0 Kasus	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kasus	0
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	60.690.000				-	0
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	60.690.000				-	0
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	60.690.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Ha	0
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0 laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 laporan	0
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	0				-	0
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	0				-	0
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	0				-	0
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	125.000.000				-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	125.000.000				-	0
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	0
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	0
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4.682.724.000					5.231.599.596
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.885.740.000				-	4.379.399.596
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000				-	50.000.000
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	10.000.000
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.000.000
3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	7.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.000.000
3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.000.000
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	7.500.000
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		13 Laporan	10.000.000
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.901.160.000				-	3.371.109.507
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.901.160.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		39 Orang/bulan	3.318.409.507
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	21.700.000
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	16.000.000
3	30	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	15.000.000
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0				-	16.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Laporan	0
3	30	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Laporan	16.000.000
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Laporan	0
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	75.000.000				-	76.000.000
3	30	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Laporan	26.000.000
3	30	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	7 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Dokumen	50.000.000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0				-	116.914.383
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Paket	0
3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Dokumen	23.914.383
3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	16.000.000
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Orang	41.000.000
3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Orang	36.000.000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.900.000				-	206.500.000
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		70 Paket	70.000.000
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	94 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		94 Paket	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	15.500.000
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	510 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		510 Laporan	36.000.000
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Laporan	35.900.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		282 Laporan	35.000.000
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		Rp 0 Dokumen	0
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0				-	227.000.000
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	40.000.000
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Unit	50.000.000
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Unit	44.000.000
3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	60.000.000
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	33.000.000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	823.680.000				-	191.000.000
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		100 Laporan	15.000.000
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	96.000.000
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	823.680.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		52 Laporan	80.000.000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0				-	124.875.706

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	40.000.000
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Unit	25.000.000
3	30	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
3	30	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	59.875.706
3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	0
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	0				-	0
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	0				-	0
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	0				-	0
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-	0				-	0
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik							
3	30	02	2.03	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Dokumen	0
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	60.984.000				-	107.200.000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	40.000.000				-	40.000.000
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	20.000.000
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	20.000.000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	20.984.000				-	67.200.000
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10.934.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	37.000.000
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10.050.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	30.200.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	435.500.000				-	443.500.000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	160.500.000				-	161.500.000
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	53.900.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	53.900.000
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11 Laporan	53.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		11 Laporan	53.000.000
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan	1 Laporan	53.600.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	54.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	244.000.000				-	249.000.000
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	105.000.000
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	90.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	90.000.000
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	54.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	54.000.000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31.000.000				-	33.000.000
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	7 Dokumen	19.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Dokumen	20.000.000
3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	13.000.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	159.500.000				-	160.500.000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	159.500.000				-	160.500.000
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Pelaku Usaha	36.000.000
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	37.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Pelaku Usaha	37.000.000
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Pelaku Usaha	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	37.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Produk	37.500.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	141.000.000				-	141.000.000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	141.000.000				-	141.000.000
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650 Unit	86.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		650 Unit	50.000.000
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	231 Orang	55.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		231 Orang	20.000.000
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1500 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1500 Unit	71.000.000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	0				-	0
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	0				-	0
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		100 Orang	0
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		100 UMKM	0
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		100 UMKM	0
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			995.000.000					1.080.000.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai Produksi Industri Pengolahan	1133648250 Juta Rupiah	880.000.000				1133648250 Juta Rupiah	1.035.000.000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana	100 %	880.000.000				100 %	1.035.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	-		1 Dokumen	15.000.000
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	20.000.000
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	95.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	100.000.000
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	350.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	500.000.000
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	400.000.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	0				-	15.000.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0				-	15.000.000
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	-		1 Dokumen	15.000.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	27 %	115.000.000				27 %	30.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	115.000.000				100 %	30.000.000
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	15.000.000
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	15.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			71.648.561.000					78.583.751.097
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			41.102.882.000					44.491.430.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	96 %	34.735.253.000				96 %	37.142.900.000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	12.700.541.522				100 %	14.081.000.000
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	12.657.535.522	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		130 Orang/bulan	13.900.000.000
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	43.006.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	181.000.000
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	16.017.000				100 %	16.400.000
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.400.000
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.017.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	14.000.000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja baik	100 %	145.000.000				100 %	54.500.000
4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	5.500.000
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	36.000.000
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	0
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	6.000.000
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	7.000.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	6.429.225.000				100 %	5.984.000.000
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	14.000.000
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	279.246.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	290.000.000
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	301.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	290.000.000
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.150.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	650.000.000
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.474.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	77.000.000
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	92.960.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	54.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	127.360.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	109.000.000
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.827.535.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.500.000.000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100 %	3.548.367.000				100 %	2.167.000.000
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.581.883.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	670.000.000
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.027.700.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	340.000.000
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	377.118.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		9 Unit	387.000.000
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	292.806.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Unit	460.000.000
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	268.860.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	310.000.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.423.419.500				-	4.236.000.000
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	36.000.000
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.459.999.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	1.600.000.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	863.420.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Laporan	2.600.000.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %	4.299.630.798				100 %	4.641.000.000
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.763.510.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Unit	2.146.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	130.253.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		48 Unit	240.000.000
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	75.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	20.000.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	130.180.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	137.000.000
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	65.860.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	422.000.000
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.002.826.898	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	1.260.000.000
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	48.800.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		25 Unit	66.000.000
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	83.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Unit	350.000.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1.031.764.680				100 %	1.090.000.000
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	181.885.480	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang/Bulan	200.000.000
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	379.950.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	390.000.000
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	69.929.200	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Orang	80.000.000
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang/Bulan	420.000.000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	840.000.000				100 %	1.220.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	850.000.000
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	360.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	370.000.000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 %	284.950.000				100 %	343.000.000
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	70.000.000
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	178.920.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	190.000.000
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	60.000.000
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	15.000.000
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	6.030.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	8.000.000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	3.016.337.500				100 %	3.310.000.000
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	2.582.902.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.600.000.000
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	309.036.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	560.000.000
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	124.399.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	150.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjutiPersentase rumah ibadah dalam kondisi baik	100 %72,31 %	4.036.829.000				100 %72,31 %	4.680.930.000
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	430.300.000				100 %	472.930.000
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	146.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	160.930.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	104.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	114.000.000
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	180.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	198.000.000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtera an Rakyat	100 %	3.068.000.000				100 %	3.435.000.000
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	1.480.280.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Dokumen	1.400.000.000
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	324.415.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	735.000.000
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	1.263.305.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		-	1.300.000.000
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	428.529.000				100 %	652.000.000
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	274.191.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	302.000.000
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	93.202.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Kasus	102.000.000
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150 Dokumen	61.135.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		150 Dokumen	248.000.000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	110.000.000				100 %	121.000.000
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	110.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	121.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100 %	2.330.800.000				100 %	2.667.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 %	589.300.000				100 %	757.000.000
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	157.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	283.000.000
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	77.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	84.000.000
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	355.300.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	390.000.000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	478.500.000				100 %	525.700.000
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	30.966.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.200.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	402.953.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Laporan	407.000.000
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	44.581.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	88.500.000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	1.019.000.000				100 %	1.122.000.000
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1796 Dokumen	512.771.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1796 Dokumen	346.000.000
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1796 Dokumen	344.481.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1796 Dokumen	571.000.000
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	11 Orang	161.747.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Orang	205.000.000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	244.000.000				100 %	262.900.000
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	70.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	80.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	44.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	47.900.000
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12 Dokumen	130.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	135.000.000
4	02				SEKRETARIAT DPRD			30.545.679.000					34.092.321.097
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	17.529.068.400				-	20.106.009.601
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	56.691.000				-	124.009.050
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12.672.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	62.282.660
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.616.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	8.228.000
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	8.332.390
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.433.000
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.433.000
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	16.403.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	19.800.000
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	16.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.439.731.250				-	2.811.202.240
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.332.831.250	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		26 Orang/bulan	2.715.186.100
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	5.500.000
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.530.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	27.060.000
4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	19.656.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	19.800.000
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.876.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	8.372.540
4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	17.076.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	18.783.600
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.762.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	16.500.000
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.009.000				-	11.000.000
4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.009.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	3.300.000
4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	2.200.000
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	5.500.000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	351.541.500				-	308.224.771
4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3.024.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	3.314.520
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Orang	20.158.531

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	348.517.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		29 Orang	284.751.720
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	532.504.500				-	911.867.000
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	16.126.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		20 Paket	16.841.000
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Paket	110.000.000
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	65.012.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		200 Paket	68.750.000
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	34.208.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		40 Paket	37.402.200
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	58.309.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	44.209.000
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	358.849.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		36 Laporan	469.664.800
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	165.000.000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	118.900.000				-	433.446.269
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	61.534.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	0
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	57.366.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		13 Unit	259.628.875
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		35 Unit	173.817.394
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	793.970.500				-	343.212.145
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.084.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	12.439.845
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	359.880.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	278.718.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423.006.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	52.054.300
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	385.209.000				-	577.192.171
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	182.530.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Unit	216.117.000
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	81.530.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		38 Unit	107.648.750
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	31.279.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		50 Unit	33.426.421
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	89.870.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Unit	220.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	11.911.988.650				-	13.572.129.615
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	11.540.508.650	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		25 Orang/Bulan	12.679.319.070
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 Paket	371.480.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		125 Paket	339.625.000
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		25 Orang	553.185.545
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	928.523.000				-	1.013.726.340
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	10.428.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	11.022.550
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12.333.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	5.539.600
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14 Laporan	17.762.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		14 Laporan	20.364.190
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0 Paket	888.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Paket	976.800.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	13.016.610.600				-	13.986.311.496
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	1.851.167.600				-	2.874.771.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	144.465.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	165.000.000
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dokumen	1.706.702.600	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		30 Dokumen	2.087.253.000
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	243.018.600
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	379.500.000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	734.832.500				-	762.148.530
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dokumen	26.064.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Dokumen	27.500.330
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dokumen	26.064.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Dokumen	27.496.480
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dokumen	227.518.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		11 Dokumen	235.716.800
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dokumen	226.845.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		11 Dokumen	235.717.460
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dokumen	228.341.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Dokumen	235.717.460
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	3.571.735.500				-	4.354.444.045
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	999.905.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Laporan	1.753.158.010
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	1.071.009.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Laporan	1.634.386.730
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	986.552.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Laporan	443.040.475
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	162.962.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Laporan	163.502.350
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Laporan	174.835.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		15 Laporan	180.594.700
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	5 Dokumen	162.835.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	163.502.460

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	2.512.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	2.948.440
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	11.125.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Dokumen	13.310.880
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	2.841.710.500				-	2.187.489.051
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	78 Dokumen	1.517.611.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		78 Dokumen	1.669.388.611
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 Orang	65.175.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		21 Orang	33.000.440
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	180.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		60 Orang	204.600.000
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25 Dokumen	824.024.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		25 Dokumen	0
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	254.900.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		60 Dokumen	280.500.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.450.911.000				-	2.701.499.790
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	290.911.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	325.499.790
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	2.160.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		75 Dokumen	2.376.000.000
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	64.224.000				-	72.871.150
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan	64.224.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Laporan	72.871.150
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	1.502.029.500				-	1.033.087.330
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dokumen	843.580.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		33 Dokumen	359.077.400
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	209.005.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Dokumen	244.965.380
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	449.444.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		50 Dokumen	429.044.550

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			168.085.118.000					177.555.615.101
5	01				PERENCANAAN			6.203.681.000					6.367.500.000
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	undefined undefined	4.700.931.000				undefined undefined	4.807.000.000
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	61.000.000				-	83.000.000
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	23.000.000
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.000.000
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	2.000.000
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.500.000
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	1.500.000
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	4.000.000
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Laporan	3.000.000
5	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
5	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	20.000.000
5	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara	19.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Berita Acara	20.000.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.391.108.800				-	3.350.000.000
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.371.108.800	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		32 Orang/bulan	3.330.000.000
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		24 Dokumen	12.000.000
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Laporan	5.000.000
5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.000.000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000				-	8.000.000
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		4 Laporan	3.000.000
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Laporan	3.000.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	53.000.000				-	65.000.000
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Paket	25.000.000
5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		7 Orang	40.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	443.772.000				-	479.000.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.082.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Paket	31.000.000
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		-	25.000.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	349.890.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		60 Laporan	350.000.000
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	46.800.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Dokumen	73.000.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	21.168.000				-	65.000.000
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21.168.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	30.000.000
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		0 Unit	35.000.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	524.632.200				-	492.000.000
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.930.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	42.000.000
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	482.702.200	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	450.000.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	200.250.000				-	265.000.000
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	166.140.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		17 Unit	200.000.000
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	4.000.000
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	16.350.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		17 Unit	17.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	4.000.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	30.000.000
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	9.760.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Unit	10.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	802.750.000				100 %	810.000.000
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	573.919.000				-	575.000.000
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	35.000.000
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	40.000.000
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	28.353.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	40.000.000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	55.206.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Berita Acara	60.000.000
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	440 Usulan	77.612.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		440 Usulan	40.000.000
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	337.748.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	360.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	51.289.000				-	55.000.000
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	15.118.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	25.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)							
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 Orang	11.232.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		28 Orang	15.000.000
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	24.939.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Buku	15.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	177.542.000				-	180.000.000
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	27.542.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	30.000.000
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	150.000.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	100 %	700.000.000				100 %	750.500.000
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	350.000.000				-	345.000.000
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Dokumen	15.000.000
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	16.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	9.000.000
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	37.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	38.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	24.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	25.000.000
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	145.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	145.000.000
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	92.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	93.000.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	148.412.000				-	199.500.000
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	15.000.000
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.500.000
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	35.000.000
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	40.000.000
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	20.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	3.722.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	5.000.000
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	30.000.000
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	15.690.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	50.000.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	201.588.000				-	206.000.000
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	14.970.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	25.000.000
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.000.000
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	65.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	25.000.000
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	38.872.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	35.000.000
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	17.246.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Dokumen	20.000.000
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	45.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	17.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	47.000.000
5	02				KEUANGAN			154.243.741.000					169.668.115.101
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	17.874.468.000				-	19.661.914.801
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	105.000.000				-	115.500.000
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		6 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Laporan	16.500.000
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		2 Laporan	16.500.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.038.339.476				-	8.842.173.424
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	7.963.339.476	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		59 Orang/bulan	8.759.673.424
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	16.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	16.500.000
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Laporan	16.500.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	240.000.000				-	264.000.000
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		120 Paket	66.000.000
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		2 Orang	33.000.000
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		30 Orang	165.000.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	745.000.000				-	819.500.000
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		10 Paket	220.000.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Paket	110.000.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Paket	88.000.000
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	16.500.000
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	165.000.000
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		100 Laporan	220.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	240.000.000				-	264.000.000
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	90.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		5 Unit	99.000.000
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		9 Unit	165.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.856.128.524				-	8.641.741.377
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.081.315.645	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Laporan	5.589.447.210
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.774.812.879	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	3.052.294.167
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	650.000.000				-	715.000.000
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	88 Unit	350.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		88 Unit	385.000.000
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		36 Unit	55.000.000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Unit	275.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	134.559.273.000				-	148.015.200.300
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	569.400.000				-	626.340.000
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		2 Dokumen	55.000.000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		2 Dokumen	55.000.000
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		46 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		46 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		46 Dokumen	22.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		46 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	154.700.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Dokumen	170.170.000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	154.700.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Dokumen	170.170.000
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	33.000.000
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	33.000.000
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	400.000.000				-	440.000.000
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	66.000.000
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	11.000.000
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	55.000.000
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	55.000.000
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	33.000.000
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	33.000.000
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	12 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Laporan	55.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		2 Dokumen	55.000.000
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		150 Orang	55.000.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	415.000.000				-	456.500.000
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Laporan	33.000.000
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		330 Dokumen	33.000.000
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108 Laporan	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		108 Laporan	49.500.000
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	58 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		58 Laporan	22.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Dokumen	165.000.000
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		4 Dokumen	22.000.000
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	220 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		220 Orang	22.000.000
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		16 Lembaga	22.000.000
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Laporan	22.000.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	133.174.873.000				-	146.492.360.300
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	81 Laporan	128.174.873.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		81 Laporan	140.992.360.300
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	3.300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	81 Laporan	2.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		81 Laporan	2.200.000.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	400.000.000				-	440.000.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	400.000.000				-	440.000.000
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		4 Dokumen	44.000.000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	11.000.000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	16.500.000
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	55.000.000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	175.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Laporan	192.500.000
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	33.000.000
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		50 Dokumen	33.000.000
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	11.000.000
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Laporan	16.500.000
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		46 Orang	27.500.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	1.410.000.000				-	1.551.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1.410.000.000				-	1.551.000.000
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	360.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	396.000.000
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		5 Dokumen	110.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Laporan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		11 Laporan	33.000.000
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	80.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Unit	88.000.000
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Laporan	110.000.000
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		3 Laporan	55.000.000
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1500 Obyek Pajak	40.000.000	-	PAD		1500 Obyek Pajak	44.000.000
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	-	PAD		1 Dokumen	110.000.000
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		9 Layanan	44.000.000
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		12 Dokumen	33.000.000
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		4 Dokumen	110.000.000
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	44.000.000
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		1 Dokumen	44.000.000
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	300.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	PAD		9 Laporan	330.000.000
5	03				KEPEGAWAIAN			6.033.973.500					6.396.600.000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.190.697.500				-	5.318.600.000
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	29.469.400				-	38.900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.015.900	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	16.000.000
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.097.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.700.000
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.079.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.500.000
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.094.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.700.000
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.039.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.500.000
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	4.000.000
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.144.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	4.500.000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.301.050.000				-	4.352.500.000
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4.050.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		44 Orang/bulan	4.250.000.000
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	229.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	80.000.000
5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	13.000.000
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.150.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.300.000
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.900.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	6.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.800.000				-	13.500.000
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.800.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	13.500.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.972.500				-	11.800.000
5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.972.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	11.800.000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	582.706.000				-	633.800.000
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.709.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	9.000.000
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	44.565.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Paket	70.000.000
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	23.576.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	22.000.000
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.620.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	6.300.000
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	377.236.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	396.000.000
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.500.000
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	115.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	120.000.000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	116.568.600				-	131.100.000
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	14.000.000
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.338.600	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	96.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10.030.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	11.100.000
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	151.131.000				-	137.000.000
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	101.180.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		27 Unit	105.000.000
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.951.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	32.000.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	843.276.000				-	1.078.000.000
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	255.852.000				-	334.000.000
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	24.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	25.000.000
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	130.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	155.000.000
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	45.818.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	55.000.000
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	12.094.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	25.000.000
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	15.940.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga	25.000.000
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	24.500.000
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	22.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	24.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	242.291.000				-	343.000.000
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	66.446.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	79.000.000
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	111.415.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		700 Dokumen	124.000.000
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	64.430.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	140.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	284.532.000				-	304.000.000
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	246.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Orang	265.000.000
5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	38.532.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	39.000.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	60.601.000				-	97.000.000
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	15.960.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	29.000.000
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	24.121.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	46.000.000
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	38 Orang	20.520.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		38 Orang	22.000.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.203.722.500					1.120.000.000
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	0				-	0
5	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0				-	0
5	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	1.203.722.500				-	1.120.000.000
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	179.704.500				-	220.000.000
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	105 Orang	179.704.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		105 Orang	220.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	1.024.018.000				-	900.000.000
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1.024.018.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	900.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			400.000.000					400.000.000
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan Persentase penerapan inovasi daerah	100 % 50 %	400.000.000				100 % 50 %	400.000.000
5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-	245.000.000				-	235.000.000
5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	25.000.000
5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	160.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Naskah	50.000.000
5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5 Laporan	85.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	80.000.000
5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	80.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	-	-	155.000.000				-	165.000.000
5	05	03	2.02	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan	45.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	25.000.000
5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	50.000.000
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	110.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	90.000.000
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			13.171.330.000					13.281.756.601
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			13.171.330.000					13.281.756.601
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.105.754.116				-	8.267.869.198
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	35.200.000				-	35.904.000
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.200.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Dokumen	7.344.000
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.590.000
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.590.000
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.590.000
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	4.590.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	5.100.000
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Laporan	5.100.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.863.880.516				-	5.981.157.300
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	5.859.880.516	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		56 Orang/bulan	5.977.077.300
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	4.080.000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	551.260.000				-	562.538.676
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		50 Paket	51.000.000
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	399.974.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		56 Orang	408.000.000
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	101.286.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		56 Orang	103.538.676
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	497.860.000				-	580.186.200
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	169.460.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Unit	308.764.200
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	55.971.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Unit	81.600.000
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	272.429.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		10 Unit	189.822.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	863.953.600				-	808.299.300
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	139.897.000	-	DAU		3 Laporan	153.302.940
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	724.056.600	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	654.996.360

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	293.600.000				-	299.783.722
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	156.150.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		20 Unit	159.504.023
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	42.590.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		35 Unit	43.522.499
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	94.860.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Unit	96.757.200
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	4.397.388.000				-	4.487.306.735
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	3.469.562.500				-	3.748.041.285
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan	920.226.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		100 Laporan	939.260.310
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	236 Laporan	870.140.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		236 Laporan	931.205.940
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	29 Laporan	189.763.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		29 Laporan	201.520.380
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	44.102.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	37.855.260
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	243 Laporan	1.203.078.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		243 Laporan	1.214.899.395
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	56.783.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Kesepakatan	102.000.000
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	185.470.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		15 Dokumen	321.300.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	927.825.500				-	739.265.450
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	50.814.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	204.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	877.011.500	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		40 Laporan	535.265.450
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	668.187.884				-	526.580.668
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	56.836.000				-	56.100.000
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	56.836.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		5 Rekomendasi	56.100.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	611.351.884				-	470.480.668
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 perangkat daerah	264.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		45 perangkat daerah	116.280.000
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	37.428.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		-	38.176.560
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	183.923.884	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Kegiatan	187.504.108
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah	126.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		45 perangkat daerah	128.520.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN			40.869.197.000					38.481.552.395
7	01				KECAMATAN BONTOMATENE			4.061.082.000					4.170.435.309
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD	undefined undefined	3.921.386.000				undefined undefined	3.988.935.309
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined undefined	20.244.000				undefined undefined	23.250.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	3.450.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.300.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.300.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.334.157.600				undefined undefined	3.339.935.309
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.301.013.600	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		36 Orang/bulan	3.300.335.309
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	27.360.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	30.000.000
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.000.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.300.000
7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.892.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	3.300.000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	undefined undefined	7.200.000				undefined undefined	8.800.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	5.500.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	3.300.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	52.920.000				undefined undefined	54.500.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		28 Paket	22.000.000
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.700.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.230.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	15.000.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	9.990.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Orang	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	194.810.000				undefined undefined	142.000.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.415.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	3.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	16.148.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	16.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	34.820.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		5 Paket	28.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.450.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		3 Paket	9.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		10 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	3.500.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.377.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	80.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di adakan	undefined undefined	38.121.000				undefined undefined	59.000.000
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	38.121.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	44.000.000
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	5.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	10.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	164.223.400				undefined undefined	225.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.665.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	25.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.558.400	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	200.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	undefined undefined	109.710.000				undefined undefined	136.450.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.130.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	36.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	27.050.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	19.950.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	38.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	60.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.530.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	16.500.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	2.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	588 %-#3<	13.020.000				588 %-#3<	24.500.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	undefined Ke Laporan Jumlah	4.020.000				undefined Ke Laporan Jumlah	4.500.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	4.020.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	4.500.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja yang ada di Kecamatan	undefined undefined	9.000.000				undefined undefined	12.000.000
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	5.000.000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan prasarana pelayanan umum	undefined undefined	0				undefined undefined	2.000.000
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat	undefined undefined	0				undefined undefined	6.000.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	2.000.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	2.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	291 undefined	45.207.000				291 undefined	64.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di wilayah Kecamatan	undefined undefined	19.950.000				undefined undefined	24.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.950.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	22.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang di Berdayakan	undefined undefined	25.257.000				undefined undefined	36.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	18.027.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	2.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	7.230.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	12.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan yang di berdayakan	undefined undefined	0				undefined undefined	4.000.000
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		10 Keluarga	2.000.000
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		10 Keluarga	2.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1000 penduduk	undefined undefined	8.925.000				undefined undefined	12.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined	3.270.000				undefined undefined	6.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.270.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	6.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	undefined undefined	5.655.000				undefined undefined	6.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	5.655.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	6.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah konflik berlatarbelakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	undefined undefined	45.484.000				undefined undefined	46.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	undefined undefined	45.484.000				undefined undefined	46.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	275 Orang	39.054.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		275 Orang	35.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45 Orang	6.430.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		45 Orang	11.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Anggaran Desa yang mendukung program pemerintah	undefined undefined	27.060.000				undefined undefined	35.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	undefined undefined	27.060.000				undefined undefined	35.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	4.890.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		10 Dokumen	4.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	4.800.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	11.070.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	13.000.000
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.300.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	7.000.000
7	01				KELURAHAN BATANGMATA			1.604.993.000					1.732.871.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	309.950.100				-	332.511.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.000.000				-	9.900.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	107.950.000				-	117.005.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Paket	36.300.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Paket	11.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	7.050.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		5 Paket	7.705.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325 Laporan	57.900.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		325 Laporan	62.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	44.456.000				-	46.200.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	44.456.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		2 Unit	46.200.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	114.784.100				-	119.900.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.132.900	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Laporan	18.700.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	97.651.200	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		2 Laporan	101.200.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.760.000				-	39.506.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	9.280.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		4 Unit	11.506.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.480.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		5 Unit	6.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		2 Unit	22.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.000.000				-	15.400.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	14.000.000				-	15.400.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1 Laporan	14.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Laporan	15.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	930.042.900				-	1.001.500.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	920.042.900				-	990.500.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	568.042.900	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		4 Unit	600.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	337.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		3 Pokmas / Ormas	374.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	10.000.000				-	11.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	9.600.000				-	10.560.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	9.600.000				-	10.560.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		12 Laporan	10.560.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	341.400.000				-	372.900.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	341.400.000				-	372.900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	341.400.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata	DAU		12 Dokumen	372.900.000
7	01				KELURAHAN BATANGMATA SAPO			1.579.123.000					1.639.250.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95 %	307.513.400				95 %	296.250.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,31 %	7.500.000				72,31 %	8.750.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		1 Dokumen	1.750.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		1 Dokumen	1.750.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		1 Dokumen	1.750.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		1 Dokumen	1.750.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		1 Dokumen	1.750.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	3.500.000				95 %	3.500.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		4 Laporan	3.500.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %	37.350.000				95 %	30.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	37.350.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		225 Laporan	30.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	95 %	24.748.000				95 %	30.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.748.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		2 Unit	30.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	200.705.400				95 %	186.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.956.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		12 Laporan	9.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192.749.400	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		12 Laporan	177.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	33.710.000				90 %	38.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30.870.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		6 Unit	35.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.840.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		4 Unit	3.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100 %	1.175.604.600				100 %	1.246.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persenatse Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	95 %	871.191.600				95 %	886.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		14 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	410.176.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		4 Unit	440.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	455.015.600	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		1 Pokmas / Ormas	440.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	85 %	304.413.000				85 %	360.000.000
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan	294.413.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		11 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		1 Laporan	10.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di Tingkat Kelurahan	0 %	96.005.000				0 %	97.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Diselenggarakan	95 %	96.005.000				95 %	97.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36 Orang	96.005.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomatene, Batangmata Sapo	DAU		36 Orang	97.000.000
7	01				KECAMATAN BUKI			2.305.023.000					616.535.223
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD Persentase Capaian Kinerja OPD	80 % 95,39 % 98,98 %	2.143.251.000				80 % 95,39 % 98,98 %	483.265.223
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	81 %	15.300.000				81 %	15.300.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.400.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	2.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.700.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.700.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.100.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.100.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	81 %	1.717.923.800				81 %	4.435.223
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.715.223.800	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		15 Orang/bulan	1.735.223
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	900.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	900.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	1.800.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	81 %	2.550.000				81 %	2.550.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.550.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	2.550.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	81 %	1.800.000				81 %	1.800.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.800.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	81 %	145.397.000				81 %	118.075.100
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.417.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		4 Paket	28.529.100
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.350.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	8.273.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.320.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	5.700.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	8.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371 Laporan	82.710.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		371 Laporan	67.573.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	81 %	70.074.000				81 %	106.314.900
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	13.250.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		4 Unit	30.261.800
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	56.824.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	76.053.100
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	81 %	119.491.200				81 %	143.040.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.040.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	13.620.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	105.451.200	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	129.420.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81 %	70.715.000				81 %	91.750.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	56.830.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	77.140.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.100.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	5.110.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.785.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	9.500.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kewenanagan Kecamatan yang tepat waktu	97,25 %	2.250.000				97,25 %	9.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelengaraan pemerintahan yang dikoordinasikan	81 %	2.250.000				81 %	4.500.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.250.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.500.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	81 %	0				81 %	4.500.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	3,51 % 63 % 70 % 91,35 %	69.090.000				3,51 % 63 % 70 % 91,35 %	40.750.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	81 %	51.090.000				81 %	14.750.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		7 Lembaga Kemasyarakatan	2.100.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	48.990.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	12.650.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	80 %	18.000.000				80 %	26.000.000
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		50 Keluarga	5.500.000
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50 Keluarga	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		50 Keluarga	5.500.000
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		50 Keluarga	5.000.000
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		50 Keluarga	5.000.000
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	3.600.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		50 Keluarga	5.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 Penduduk	0,9 %	8.100.000				0,9 %	9.100.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	82 %	4.050.000				82 %	4.550.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.050.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	4.550.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan	82 %	4.050.000				82 %	4.550.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	4.050.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	4.550.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Konflik berlatar belakang Sosial dan Keagamaan di wilayah kecamatan	4 kali	67.332.000				4 kali	57.520.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan	83 %	67.332.000				83 %	57.520.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	59.892.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		300 Orang	50.080.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	7.440.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		25 Orang	7.440.000
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	47,68 %	15.000.000				47,68 %	16.900.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	83 %	15.000.000				83 %	16.900.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.300.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	9.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.300.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Buki, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.300.000
7	01				KECAMATAN BONTOMANAI			2.230.310.000					2.328.679.500
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.140.282.000				-	2.239.186.300
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.398.000				-	26.493.200
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.398.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	13.993.200
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	3 0	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		3 0	2.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.772.674.000				-	1.697.710.400
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.751.696.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		16 Orang/bulan	1.683.110.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.318.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	6.428.100
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.660.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	8.172.300
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.388.000				-	8.472.700
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.388.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	8.472.700
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0				-	3.000.000
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	77.653.000				-	137.180.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.781.500	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		10 Paket	60.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.461.500	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	2.500.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	4.680.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	52.310.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		450 Laporan	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	18.466.000				-	70.000.000
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	35.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	14.140.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	20.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.326.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	15.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	184.013.000				-	224.500.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.450.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	5.500.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	175.563.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		9 Laporan	219.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	64.690.000				-	71.830.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.630.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	36.770.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	18.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	19.640.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		3 Unit	2.500.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.360.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	2.920.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.941.000				-	7.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	1.941.000				-	2.000.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1.941.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	2.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	0				-	5.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	6.555.000				-	15.993.200
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	6.555.000				-	15.993.200
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		10 Lembaga Kemasyarakatan	13.993.200
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.455.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	8.105.000				-	10.500.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	8.105.000				-	10.500.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.105.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	8.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		10 Laporan	2.500.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	55.518.000				-	46.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	55.518.000				-	46.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	48.468.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		300 Orang	40.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Orang	7.050.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	6.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	17.909.000				-	10.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	17.909.000				-	10.000.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	2.000.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10 Dokumen	17.909.000	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		10 Dokumen	8.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontomanai, Semua Kel/Desa	DAU		10 Laporan	0
7	01				KECAMATAN BENTENG			4.128.373.000					4.109.782.213
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.025.490.600				-	4.011.582.725
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ sesuai Juknis Tersusunnya Dokumen Perencanaan sesuai Juknis Tersusunnya Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tersusunnya Dokumen RKA	100 % 100 % 100 % 100 %	16.000.000				100 % 100 % 100 % 100 %	40.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		5 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	3.530.573.568				100 %	3.156.618.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.528.073.568	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		40 Orang/bulan	3.136.618.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	20.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.500.000				4 Laporan	15.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.000.000				-	60.000.000
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	60.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	42.870.000				-	165.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Dokumen	15.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.770.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	150.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	85.199.000				-	30.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	85.199.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	30.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244.010.032				-	444.964.725
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.119.132	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	35.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.890.900	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	409.964.725
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.338.000				-	100.000.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	55.470.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	70.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.920.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		12 Unit	10.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.948.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	20.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	22.757.900				-	31.919.693

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	9.826.000				-	20.000.000
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.426.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.400.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	10.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	12.931.900				100 %	11.919.693
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	12.931.900	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.919.693
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	52.124.500				-	21.279.795
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersingkronisasinya Pemberdayaan Masyarakat (Pembinaan Kampung KB dan Karang Taruna)	100 %	35.249.000				100 %	18.000.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	15.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	15.249.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	3.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	undefined	undefined undefined	16.875.500				undefined undefined	3.279.795
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.875.500	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	3.279.795
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	28.000.000				-	35.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Kriminalitas di Kecamatan	100 %	28.000.000				100 %	35.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	28.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	35.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	0				-	10.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Asistensi dan Pembinaan Kelurahan	100 %	0				100 %	10.000.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	-		4 Dokumen	10.000.000
7	01				KELURAHAN BENTENG			1.878.783.000					0
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	389.436.300				-	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	367.596.300				-	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.689.300	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	334.907.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Bulan Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.840.000				-	0
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	21.840.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		6 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.362.241.700				-	0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	515.701.700				-	0
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	12 Bulan Lembaga	6.535.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Bulan Lembaga	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan					Kemasyarakatan	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan Pokmas / Ormas	509.166.700	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Bulan Pokmas / Ormas	0
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	846.540.000				-	0
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	846.540.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	127.105.000				-	0
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Persentase Penurunan Kasus Kriminalitas di Kecamatan	100 % 100 %	127.105.000				100 % 100 %	0
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 % Laporan	127.105.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		100 % Laporan	0
7	01				KELURAHAN BENTENG SELATAN			1.858.956.000					1.146.000.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.032.853.000				-	254.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	78.026.000				-	95.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53.830.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		3 Paket	65.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.196.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Laporan	30.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.023.000				-	55.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.023.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		3 Unit	55.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	856.448.000				-	30.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.168.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		12 Laporan	30.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	823.280.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		12 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.356.000				-	74.000.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	25.220.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		7 Unit	28.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.880.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Unit	35.000.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.256.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		2 Unit	11.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	44.100.000				-	55.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	44.100.000				-	55.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	44.100.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		3 Laporan	55.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	773.363.000				-	810.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	637.794.416				-	720.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	23.530.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		3 Lembaga Kemasyarakatan	0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	204.677.416	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		3 Unit	320.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	409.587.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		3 Pokmas / Ormas	400.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	135.568.584				-	90.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	85.243.584	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		2 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.325.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN		1 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										PENDANAAN KELURAHAN			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	8.640.000				-	27.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	8.640.000				-	27.000.000
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	8.640.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Selatan	DAU		12 Dokumen	27.000.000
7	01				KELURAHAN BENTENG UTARA			1.731.445.000					1.791.500.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	294.445.000				-	306.500.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.000.000				-	17.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Laporan	6.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	25.000.000				-	25.500.000
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		12 Dokumen	7.500.000
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		12 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Laporan	6.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		4 Laporan	6.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.000.000				-	5.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		4 Laporan	5.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.000.000				-	15.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		12 Laporan	15.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0				-	1.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		- Unit	1.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	215.000.000				-	215.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		0 Laporan	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Laporan	15.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Laporan	200.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.445.000				-	28.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.445.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		3 Unit	6.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		5 Unit	4.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		3 Unit	12.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Unit	6.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.437.000.000				-	1.475.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	792.000.000				-	830.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	262.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		4 Unit	300.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	500.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Pokmas / Ormas	500.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	645.000.000				-	645.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	620.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	620.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	DAU		1 Laporan	25.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	0				-	10.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0				-	10.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng Utara	-		0 Laporan	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01				KECAMATAN BONTOHARU			3.361.057.000					3.865.215.550
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang)	95.00 %	3.237.639.000				95.00 %	3.723.284.850
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	15.000.000				100 Persen	17.250.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	3.450.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.450.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.300.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.450.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.300.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Laporan	2.300.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang tersedia	100 Persen	2.826.555.800				100 Persen	3.250.538.250
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.821.555.800	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang/bulan	3.244.788.250
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.450.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	2.300.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 Persen	2.500.000				100 Persen	2.875.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Laporan	2.875.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 Persen	13.360.000				100 Persen	13.052.500
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	6.360.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	7.302.500
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	5.750.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	100 Persen	90.066.000				100 Persen	103.500.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	4.600.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	6.900.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322 Laporan	80.066.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		322 Laporan	92.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketersediaan BMD	100 Persen	41.387.000				100 Persen	46.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	41.387.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		10 Unit	46.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.748.200				-	199.046.600
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.999.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	18.400.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153.749.200	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	180.646.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharan BMD	100 Persen	79.022.000				100 Persen	91.022.500
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	60.970.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	70.150.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	8.312.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	9.660.000
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.660.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		6 Unit	4.140.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.080.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	7.072.500
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Prioritas)	8 Menit	8.500.000				8 Menit	9.775.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	100 Persen	3.000.000				100 Persen	3.450.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.450.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase rusan pemerintahan yang diselenggaran	100 Persen	2.500.000				100 Persen	2.875.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.875.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	100 Persen	3.000.000				100 Persen	3.450.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.450.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Prioritas)	100 %	41.418.000				100 %	47.630.700
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	38.418.000				100 Persen	44.180.700
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	18.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	20.700.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.418.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	23.480.700
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan	100 Persen	3.000.000				100 Persen	3.450.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	3.450.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (Prioritas)	1.00 %	11.500.000				1.00 %	13.225.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7.500.000				100 Persen	8.625.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	8.625.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan perda dan perkada	100 Persen	4.000.000				100 Persen	4.600.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	4.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.600.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (Prioritas)	0 %	39.500.000				0 %	45.425.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan	2 Kegiatan	39.500.000				2 Kegiatan	45.425.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	23.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		250 Orang	28.175.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	16.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		200 Orang	17.250.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (Penunjang)	70.00 %	22.500.000				70.00 %	25.875.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	100 Persen	22.500.000				100 Persen	25.875.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.025.000
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.450.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	9.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	10.350.000
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	8.050.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01				KELURAHAN BONTOBANGUN			1.942.250.000					1.996.750.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang)	100 %	974.347.200				100 %	1.071.860.544
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	3.397.000				100 Persen	10.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.397.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		2 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang tersedia	100 Persen	64.101.000				100 Persen	146.020.074
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	61.258.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		12 Dokumen	138.520.074
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.843.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		5 Laporan	7.500.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	100 Persen	95.911.000				100 Persen	100.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.641.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		3 Paket	20.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	72.270.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		300 Laporan	80.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	100 Persen	680.472.200				100 Persen	678.640.470
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.920.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		12 Laporan	28.640.470
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	100 % 0	664.552.200	-	DAU		100 % 0	650.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharan BMD	100 Persen	130.466.000				100 Persen	137.200.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	20.700.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		6 Unit	28.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	11.040.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		6 Unit	9.200.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98.726.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Unit	100.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Prioritas)	100 %	950.178.800				100 %	895.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	40.000.000				100 Persen	105.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		3 Laporan	105.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	910.178.800				-	790.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.381.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	791.281.800	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		10 Unit	650.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	108.516.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU TAMBAHAN		2 Pokmas / Ormas	130.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (Prioritas)	1.00 %	11.658.000				1.00 %	20.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	11.658.000				100 Persen	20.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.658.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Laporan	20.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (Penunjang)	100 %	6.066.000				100 %	9.889.456
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	100 Persen	6.066.000				100 Persen	9.889.456
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	6.066.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Bontobangung	DAU		1 Dokumen	9.889.456
7	01				KELURAHAN PUTABANGUN			1.758.411.000					1.947.852.100
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	765.248.844				-	786.802.100
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	61.330.200				-	64.142.100
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	61.330.200	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Dokumen	64.142.100
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0				-	2.200.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Orang	2.200.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	84.328.000				-	123.930.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Paket	1.100.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.488.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		5 Paket	15.500.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.490.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		2 Paket	2.750.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.100.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Dokumen	1.980.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580 Laporan	59.250.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		580 Laporan	102.600.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	475.860.644				-	421.740.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.360.644	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		12 Laporan	13.200.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	459.500.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		12 Laporan	408.540.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	143.730.000				-	174.790.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	66.200.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		8 Unit	8.690.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.380.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Unit	1.100.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73.150.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Unit	165.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	21.430.000				-	16.500.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	-	-	21.430.000				-	16.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	21.430.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		4 Laporan	16.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	871.263.656				-	1.039.350.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	6.336.000				-	5.500.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.336.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Laporan	5.500.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	864.927.656				-	1.033.850.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.489.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	13.200.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	855.438.656	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		10 Unit	915.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	0	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		2 Pokmas / Ormas	105.000.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		1 Laporan	650.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	16.473.000				-	19.700.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	12.000.000				-	13.200.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		12 Laporan	13.200.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	4.473.000				-	6.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	4.473.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		12 Laporan	6.500.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	21.375.500				-	15.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	21.375.500				-	15.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	12.943.500	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		50 Orang	5.500.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	8.432.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		100 Orang	9.500.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	62.620.000				-	70.500.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	62.620.000				-	70.500.000
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	57.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		2 Dokumen	65.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.020.000	Kab. Kep. Selayar, Bontoharu, Putabangung	DAU		12 Laporan	5.500.000
7	01				KECAMATAN BONTOSIKUYU			2.236.098.000					2.294.008.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.050.142.800				-	2.088.948.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.501.682.000				-	1.554.948.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.501.682.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		14 Orang/bulan	1.554.948.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	180.890.000				-	202.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.330.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	80.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.680.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	9.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	112.880.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	113.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	259.970.800				-	223.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.323.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	20.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	238.647.800	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	203.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	107.600.000				-	109.000.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	97.600.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	98.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	11.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.512.000				-	6.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	5.512.000				-	6.000.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.512.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	32.697.200				-	28.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	2.697.200				-	3.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.697.200	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	30.000.000				-	25.000.000
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	30.000.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		100 Keluarga	25.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	49.616.000				-	69.060.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	17.060.000				-	17.060.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	17.060.000	-	DAU		1 Laporan	17.060.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	32.556.000				-	52.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	32.556.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	52.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	78.450.000				-	82.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	78.450.000				-	82.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	78.450.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	82.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	19.680.000				-	20.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	19.680.000				-	20.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	19.680.000	Kab. Kep. Selayar, Bontosikuyu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	20.000.000
7	01				KECAMATAN PASIMASUNGGU			2.293.830.000					2.347.890.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95 %	2.144.830.000				95 %	2.193.390.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase dokumen Perencanaan,Peng anggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	14.550.000				100 %	14.550.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Dokumen	3.450.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.450.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Dokumen	3.450.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.825.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Dokumen	3.825.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.825.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Dokumen	3.825.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.706.340.000				100 %	1.710.340.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.706.340.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		12 Orang/bulan	1.706.340.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0				-	3.500.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.500.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi kepegawaian	100 %	15.000.000				100 %	26.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Paket	5.000.000
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		3 Orang	15.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran	100 %	215.500.000				100 %	222.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Paket	29.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Paket	3.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		2 Dokumen	3.500.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	32.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	33.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	152.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD	100 %	59.940.000				100 %	63.000.000
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	15.090.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Unit	17.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	31.350.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		50 Unit	32.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Unit	14.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran	undefined undefined	68.000.000				undefined undefined	83.500.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Laporan	13.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	68.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		1 Laporan	70.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	65.500.000				-	70.000.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	52.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Kembang Ragi	DAU		5 Unit	52.500.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	2.500.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Labuang Pamajang	DAU		1 Unit	11.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Labuang Pamajang	DAU		5 Unit	4.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100 %	52.500.000				100 %	54.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100 %	52.500.000				100 %	54.000.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	46.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	47.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	7.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (Prioritas)	1.00 %	9.500.000				1.00 %	10.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75 %	9.500.000				75 %	10.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan	9.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Laporan	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0 %	68.500.000				0 %	71.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan	100 %	68.500.000				100 %	71.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	60.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		300 Orang	62.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	8.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	9.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	70 %	18.500.000				70 %	19.500.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	100 %	18.500.000				100 %	19.500.000
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	6.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	7.000.000
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	12.500.000
7	01				KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR			2.091.683.000					2.128.883.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	525.000.000				-	552.200.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.500.000				-	7.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.000				-	9.000.000
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	5.000.000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000	-	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	11.000.000				-	14.000.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
7	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	17.500.000				-	25.000.000
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	2.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	PAD		1 Dokumen	2.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	10.000.000
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		13 Orang	2.000.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang	2.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	221.000.000				-	231.200.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	700.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	1.400.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	14.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	1.800.000
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	41.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		1 Laporan	41.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Timur, Semua Kel/Desa				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	160.000.000
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.000.000				-	60.000.000
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	40.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	40.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	20.000.000
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Timur, Semua Kel/Desa				
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	-		0 Unit	0
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	153.000.000				-	156.000.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	63.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	63.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	12.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	78.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	81.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.000.000				-	50.000.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		5 Unit	50.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Ha	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	12.000.000				-	14.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	12.000.000				-	14.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	14.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	0				-	0
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	0				-	0
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	0				-	0
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.000.000				-	6.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	5.000.000				-	6.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0				-	0
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga Kemasyarakatan	0
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga Kemasyarakatan	0
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		0 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Timur, Semua Kel/Desa				
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	0				-	0
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		0 Keluarga	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Timur, Semua Kel/Desa				
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	13.000.000				-	15.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	10.000.000				-	11.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	3.000.000				-	4.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	37.000.000				-	38.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	37.000.000				-	38.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	34.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	35.000.000
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0 Lembaga Masyarakat	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Lembaga Masyarakat	0
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Timur, Semua Kel/Desa				
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	30.500.000				-	29.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	30.500.000				-	29.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Timur, Semua Kel/Desa				
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	25.000.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	5.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	4.000.000
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.469.183.000				-	1.474.683.000
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.500.000				-	12.000.000
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.000.000
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.000.000
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	2.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu	DAU		1 Laporan	3.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Timur, Semua Kel/Desa				
X	X X	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
X	X X	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.460.683.000				-	1.462.683.000
X	X X	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	1.454.683.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Orang/bulan	1.454.683.000
X	X X	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
X	X X	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
X	X X	0 1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	2.000.000
X	X X	0 1	2.0 2	000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimasunggu Timur, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01				KECAMATAN PASIMARANNU			1.790.880.000					1.905.194.000
7	01	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.619.424.000				-	1.697.194.000
7	01	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.412.000				-	31.955.000
7	01	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	9.955.000
7	01	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.706.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	11.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.706.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	11.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.161.680.800				-	1.171.635.800
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.161.680.800	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		12 Orang/bulan	1.161.680.800
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	9.955.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.912.000				-	8.000.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.912.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	8.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	316.776.000				-	325.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.446.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	60.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.775.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	10.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.880.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	242.675.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	250.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0				-	15.000.000
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	15.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	87.863.200				-	110.603.200
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	6.460.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	7.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	81.403.200	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	103.603.200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.780.000				-	35.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	21.780.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	15.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Majapahit	DAU		2 Unit	20.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		2 Unit	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0				-	0
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	0				-	0
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	0				-	0
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	151.693.000				-	195.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	151.693.000				-	195.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	31.050.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		8 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	120.643.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	160.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	12.000.000				-	13.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	12.000.000				-	13.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	13.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	0				-	0
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	7.763.000				-	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.763.000				-	0
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	100 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	7.763.000	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		100 Orang	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	0				-	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	0				-	0
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasimarannu, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	0
7	01				KECAMATAN PASILAMBENA			2.093.985.000					2.345.500.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	2.034.097.500				1 Dokumen Dokumen	2.236.500.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Ketersediaan dokumen kinerja % Ketersediaan Dokumen Kinerja	100 % 100 %	32.643.000				100 % 100 %	54.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Dokumen	20.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 Dokumen 0	13.683.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen 0	8.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	4.198.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen Dokumen	8.000.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.363.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.399.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	12.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Ketersediaan administrasi keuangan % Ketersediaan administrasi umum perkantoran % Ketersediaan Dokumen Keuangan	100 % 100 % 100 %	1.575.666.900				100 % 100 % 100 %	1.661.000.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.565.993.900	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		14 Orang/bulan	1.650.000.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.673.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	11.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.047.000				-	8.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan 0	7.047.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan 0	8.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	221.439.000				100 %	281.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	12 bulan 0	1.060.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		12 bulan 0	2.500.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.504.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	23.500.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	7.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.500.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.500.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	66.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	151.875.000	-	DAU		1 Laporan	176.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100% %	159.541.600				100% %	131.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.980.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	25.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	67.784.000	-	DAU		1 Laporan	49.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71.777.600	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	57.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemelihraan Barang Milik Daerah	90 %	37.760.000				90 %	101.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	21.800.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		16 Unit	83.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	15.960.000	-	DAU		-	18.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0				-	18.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	0				-	18.000.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	1 Laporan 0	0	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan 0	18.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	1 Dokumen Dokumen	36.289.000				1 Dokumen Dokumen	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen Dokumen	36.289.000				1 Dokumen Dokumen	44.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	1 Laporan 0	11.289.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan 0	11.000.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	33.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan Laporan	0				1 Laporan Laporan	6.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	6.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	8.593.500				-	7.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Penurunan Jumlah Kriminal dalam Masyarakat % Penurunan Jumlah Kriminal Dalam Masyarakat	6.20 - 6.20 -	8.593.500				6.20 - 6.20 -	7.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	8.593.500	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	7.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	15.005.000				-	34.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Pembinaan dan Pengawasan yagn difasilitasi, direkomendasikan, dikoordinasikan % Pembinaan dan Pengawasan yang Difasilitasi, Direkomendasi, Dikoordinasikan % Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	6 desa 6 desa 6 desa	15.005.000				6 desa 6 desa 6 desa	34.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3.612.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.000.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.098.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.000.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	4.639.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	7.000.000
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.000.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1.656.000	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	6.000.000
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Pasilambena, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	5.000.000
7	01				KECAMATAN TAKABONERATE			1.922.915.000					2.115.206.500
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.842.838.500				-	2.027.120.150
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.288.000				-	36.617.790
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18.561.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	20.417.210
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.169.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	6.786.230
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.852.500	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	3.137.970
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.705.500	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		2 Laporan	6.276.380
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.538.351.600				-	1.692.184.230

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.412.915.300	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		14 Orang/bulan	1.554.206.500
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	112.646.800	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		25 Dokumen	123.911.480
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	6.058.500	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	6.664.350
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	6.731.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		4 Dokumen	7.401.900
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.845.500				-	4.945.050
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.845.500	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	4.945.050
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	185.105.000				-	203.923.500
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	53.700.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		15 Laporan	59.070.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	131.405.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		50 Laporan	144.853.500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.998.400				-	16.497.580
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	14.998.400	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		24 Laporan	16.497.580
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	66.250.000				-	72.952.000
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	66.250.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		7 Unit	72.952.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.399.000				-	15.839.340
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	-	-	14.399.000				-	15.839.340

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	14.399.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		5 Dokumen	15.839.340
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	50.311.000				-	55.343.200
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	35.566.000				-	39.123.590
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.163.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.679.630
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	10.403.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	11.443.960
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	22.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	14.745.000				-	16.219.610
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	45 Keluarga	14.745.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		45 Keluarga	16.219.610
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	6.385.500				-	7.024.380
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	6.385.500				-	7.024.380
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.385.500	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	7.024.380
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	8.981.000				-	9.879.430
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-	8.981.000				-	9.879.430

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	8.981.000	Kab. Kep. Selayar, Taka Bonerate, Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	9.879.430
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			4.372.099.000					4.372.099.000
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.372.099.000					4.372.099.000
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,53 %	2.510.799.600				70,53 %	2.520.000.000
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100 %	17.500.000				100 %	17.500.000
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Dokumen	3.500.000
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.500.000
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	0
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	3.500.000
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Dokumen	0
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	3.500.000
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	3.500.000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keauangan Tepat Waktu	100 %	1.821.999.600				100 %	1.830.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.818.499.600	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Orang/bulan	1.826.700.000
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	PAD		0 Dokumen	0
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Laporan	3.500.000
8	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Prosentase Penataan barang milik daerah yang tertib, teratur dan efektif "	100 %	3.500.000				100 %	3.500.000
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.500.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	3.500.000
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Tingkat kepuasaan Layanan administrasi kepegawaian SKPD "	100 %	0				100 %	0
8	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Semua Kel/Desa	DAU		45 Paket	0
8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		5 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		4 Orang	0
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"% pemenuhan Administrasi Umum Kantor "	100 %	250.140.000				100 %	250.800.000
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Paket	6.000.000
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.340.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Paket	25.000.000
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Paket	0
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		2 Paket	12.000.000
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.800.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Dokumen	7.800.000
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	0
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	200.000.000
8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Prosentase barang milik SKPD yang menunjang pelaksanaan pemerintahan "	100 %	0				100 %	0
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	0
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Unit	0
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "	100 %	228.620.000				100 %	229.000.000
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.999.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	46.000.000
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182.621.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		12 Laporan	183.000.000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik "	100 %	189.040.000				100 %	189.000.000
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	84.030.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		20 Unit	84.000.000
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.880.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		3 Unit	5.000.000
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.130.000	Kab. Kep. Selayar, Benteng, Benteng	DAU		1 Unit	100.000.000
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Unit	0
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0,026 %	1.063.120.000				0,026 %	1.042.000.000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	"Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam keberagaman "	1 dokumen	1.063.120.000				1 dokumen	1.042.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	5.400.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	57.720.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		50 Orang	42.000.000
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	61 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		61 Orang	0
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Keluarga	0
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	73 Orang	1.000.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		73 Orang	1.000.000.000
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	"Persentase pendidikan politik pada kader partai politik "	100 %	717.720.400				100 %	715.577.400
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	"Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami dan menerima perbedaan, serta menjaga keutuhan bangsa dalam berkehidupan yang demokrasi "	1 dokumen	717.720.400				1 dokumen	715.577.400
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	8 Dokumen	717.720.400	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		8 Dokumen	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun							
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		18 Orang	715.577.400
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Kegiatan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Kegiatan	0
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Terdaftar yang mendapat pembinaan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100 % 44,44 %	15.000.000				100 % 44,44 %	15.000.000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	"Meningkatnya kebebasan berkumpul dan berkelompok dalam kehidupan	1 dokumen	15.000.000				1 dokumen	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	bermasyarakat berbangsa, dan bernegara "							
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		3 Dokumen	0
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	15.000.000
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Orang	0
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan Persentase kelompok sasaran pencegahan yang dibin	100 % undefined undefined	5.000.000				100 % undefined undefined	5.000.000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	"Meningkatnya kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya dengan ekonomi kegotongroyongan, serta bebas dari pengaruh narkotika dan	1 dokumen	5.000.000				1 dokumen	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengaruh kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing "							
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		2 Dokumen	0
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		150 Orang	5.000.000
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	26 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		26 Orang	0
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Laporan	0
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	60.459.000				100 %	74.521.600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	"Meningkatnya peran koordinasi pimpinan daerah dalam rangka mencegah dan menangkal ATHG untuk menjaga stabilitas daerah dari konflik sosial dalam kehidupan masyarakat "	1 dokumen	60.459.000				1 dokumen	74.521.600
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		0 Dokumen	0
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	60.459.000	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		30 Orang	74.521.600
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		20 Orang	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		1 Laporan	0
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar, Semua Kec., Semua Kel/Desa	DAU		11 Dokumen	0
TOTAL								**1.087.054.915.000**					**1.160.782.651.179**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten. Dalam menyelenggaran Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai di Tahun 2026.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs.

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada **Tabel 6.1.**

Tabel 6. 1 Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
				2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	3,50	4,20
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	58,29	60,49	63,03
3	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	%	1,20	1,22	1,22
4	Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,26-9,67	9,67 – 8,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,05	1,96	1,87
6	Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	71,98	72,38	72,90
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	20,38	23,66	28,92
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,65	74,86	75,07

Sumber: BPS Kepulauan Selayar dan RPJMD Kab. Kepulauan Selayar 2025-2029

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama daerah memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disajikan pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6. 2 Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
				2025	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,55	62,54	64,91
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,38	72,90
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	3,50	4,20
4.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,30	3,32
5.	Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316
6.	Indeks Desa Membangun	Angka	0,7190	0,7518	0,7530
7.	Indeks Infrastruktur	Angka	3,26	3,31	3,33
8.	Indeks Harmoni	Angka	6,61	6,63	6,66
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)
10.	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	18,02*	23,66	28,06

Sumber: BPS Kepulauan Selayar dan RPJMD Kab. Kepulauan Selayar 2025-2029

6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penyajian indikator kinerja daerah meliputi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum sebagaimana disajikan pada **Tabel 6.3**.

Tabel 6. 3 Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2026

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
1				ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOKRAFI				
1	1			Indeks Ketahanan pangan	Angka	72,03	77,39	79,15
1	2			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,08*	7,91	
1	3			Skor Pola Pangan Harapan	Angka	77,50	88,51	89,64
1	4			Kapasitas Air Baku	m^3/detik	63,72	64,62	64,71
1	5			Konsumsi Listrik Per kapita	kWh/ Kapita	311,14	327,62	340,63
1	6			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	41,88	42,05	43,75
1	7			Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	280,87*	293,37	305,88
1	8			Indeks Pertanaman (IP) Padi	Angka	200	200	200
1	9			Proporsi Sawah Irigasi	%	42,28*	43,57	43,76
1	10			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	507,97	612,99	1.328,82
1	11			Angka Konsumsi Ikan	Ton	70,72*	70,78	70,98
1	12			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)
1	13			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,16	3,68	3,73
1	14			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	2,60	5,23	6,39

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
1	15			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	17,74*	20,00	38,74
1	16			Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	20,38*	23,66	28,92
1	17			Indeks Resiko Bencana	Angka	140,18 (Sedang)	140,07 (Sedang)	140,18 (Sedang)
1	19			Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,86	1,43	1,50
1	20			Rasio Penduduk	%	97	97	97
1	21			Kepadatan Penduduk	Orang/Km^2	105	107	108
2				ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
2	1			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	3,50	4,20
2	2			Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77
2	3			PDRB per kapita	Rp / Juta	58,29	60,49	63,03
2	4			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,05	1,96	1,87
2	5			Indeks Gini	%	0,329	0,323	0,316
2	6			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,98	72,38	72,90
2	7			Usia Harapan Hidup	Tahun	73,48	73,64	72,98
2	8			Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	95,13	77,86	78,96
2	9			Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	5	4	4
2	10			Prevalensi Stunting	%	25,70	22,31	21,86
2	11			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	96,78	97,30	97,71
2	12			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	77,75	78,57	78,74
2	13			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100,00	100,00	100,00
2	14			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun	Tahun	8,49	8,73	8,91
2	15			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,88	12,94
2	16			Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk Literasi Membaca	%	41,75	45,00	47,24
2	17			Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk Numerasi	%	29,90	35,00	37,56
2	18			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	15,15	20,27	21,26
2	19			Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	%	19,38	23,28	23,74
2	20			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	36,72	53,45	53,97
2	21			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,008	0,17	0,20
2	22			Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100
2	23			Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar	%	79,49	82,05	82,05

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
				Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi				
2	24			Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,94*	60,47	61,00
2	25			Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	63,58	63,95 (cukup responsif)	64,74
2	26			Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,38	0,95	0,92
2	27			Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,64	92,78	92,94
3				ASPEK DAYA SAING DAERAH				
3	1			Angka Ketergantungan	%	0,45	0,44	0,44
3	2			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,93	2,89	3.08
3	3			Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,24	0,24	0,25
3	4			Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara	orang	14.210	21.441	23.525
3	5			Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Industri	1.048*	1069	1108
3	6			Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Industri	1.405*	1.480	1.495
3	7			Persentase Koperasi Sehat	%	16,89	17,00	18,00
3	8			Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,33	0,65	0,71
3	9			Produktivitas padi	kw/ha	119,18	113,39	123,68
3	10			Jumlah produksi perikanan	Ton	26.118,37	28.584,04	31.049,71
3	11			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,26	61,34	62,53
3	12			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,19	74,19	75,29
3	13			Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	1,80	1,92	2,35
3	14			Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	59,76	61,91
3	15			Indeks Ekonomi Hijau	Angka	23,33*	23,51	24,07
3	16			Indeks Ekonomi Biru	Angka	100,20*	106,35	117,75
3	17			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	36,44	36,63	38,66
3	18			Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	%	0,88	0,46	0,44
3	19			Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	45,33	45,47	45,69
3	20			Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-14,23	-9,72	-9,66
3	21			Indeks Infrastruktur	Angka	3,26	3,30	3,44
3	22			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%	1,20	1,22	1,22
3	23			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,76	78,41	82,55
3	24			Persentase Desa Mandiri	~~%~~	27,16 (22 Desa)	28,40 (23 Desa)	29,63 (24 Desa)
3	25			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,564	0,614	0,629
3	26			Tingkat Inflasi Gabungan	%	0,91	2,84	2,77
3	27			Pertumbuhan Investasi Daerah	%	-168,03	9,09	10,94
3	28			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	72,320	72,736	73,187
3	29			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka			
4				ASPEK PELAYANAN UMUM				
4	1			Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,92	80,36 (Baik)	82,80 (Baik)
4	2			Indeks SPBE	Angka	2,57 (Baik)	2,70 (Baik)	2,81 (Baik)
4	3			Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,58	2,51 (C)	6,06
4	4			Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	71,95	72,24	72,35
4	5			Nilai MCP KPK	Angka	67,07	72,22	73,11
4	6			Indeks Maturitas SPIP	Angka	2,84	3,1 (terdefinisi)	3,2 (terdefinisi)
4	7			Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
4	8			Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	%	20	20	20
4	9			Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD	Perda	0	0	1
4	11			Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	38,66	38,66	38,66
4	12			Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	11,05	14,53	15,21
4	13			Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	Kerjasama	4*	4	4
4	15			Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,49	3,77
5				INDIKATOR KINERJA KUNCI				
5	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
5	1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
5	1	1	1	Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	89,3	92,27	94,81
5	1	1	2	Persentase Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,25	98,88	99,52
5	1	1	3	Persentase warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	48,49	56,7	63,19
5	1	1	4	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,12	58,94	60,74
5	1	1	5	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,78	55,39	57,59
5	1	1	6	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	75,57	82,11	87,91
5	1	1	7	Indeks Iklim Keamanan SD	Angka	70,75	71,65	72,55
5	1	1	8	Indeks Iklim Keamanan SMP	Angka	68,91	70,41	71,91
5	1	1	9	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Angka	66,96	67,96	68,96
5	1	1	10	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	66,54	67,54	68,54
5	1	1	11	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Indeks	55,43	57,93	60,43
5	1	1	12	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Indeks	55,24	57,64	60,04
5	1	1	13	Persentase Ruang Kelas PAUD kondisi bangunan baik	%	47,75	47,75	48,3
5	1	1	14	Persentase Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	43,76	43,76	44,31
5	1	1	15	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	42,22	44,2	44,75
5	1	1	16	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	%	100	85,73	86,3
5	1	1	17	Persentase Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	%	77,36	73,18	73,75
5	1	1	18	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar (PAUD dan SD)	Angka	0	1:1	1:1
5	1	1	19	Rasio Guru terhadap Mata Pelajaran tingkat SMP	Angka	0	1:1	1:1
5	1	1	20	Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi	%	100	100	100
5	1	1	21	Persentase sekolah yang mengajarkan bahasa daerah dalam kurikulum	%	100	100	100

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
5	1	2	1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
5	1	2	2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,48	100	100
5	1	2	3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
5	1	2	4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,03	100	100
5	1	2	5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	92,23	100	100
5	1	2	6	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
5	1	2	7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
5	1	2	8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
5	1	2	9	Persentase penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
5	1	2	10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100
5	1	2	11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	73,87	100	100
5	1	2	12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
5	1	2	13	Nilai akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama
5	1	2	14	Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,66	0,68	0,70
5	1	2	15	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 satuan penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	13,29	13,40	13,50
5	1	2	16	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	75	77	80
5	1	2	17	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	27,24	32,24	42,24
5	1	2	18	Persentase Industri Makanan Rumah Tangga yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	64,80	70,00	75,00
5	1	2	19	Persentase posyandu aktif	%		30,00	38,75
5	1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
5	1	3	1	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	20	25	30

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	1	3	2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah sungai dan wilayah pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka (Ha)	0,113	0,1171	0,1171
5	1	3	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka (Ha)	74,14	75,00	77,11
5	1	3	4	Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah	%	2,27	2,40	2,50
5	1	3	5	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	43,20	44,50	44,50
5	1	3	6	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100
5	1	3	7	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	97,22	97,33	97,43
5	1	3	8	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	%	27	30	33
5	1	3	9	Proporsi bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) kewenangan Pemerintah Kabupaten yang laik fungsi	%	34,29	34,80	35,00
5	1	3	10	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Angka	51,06	51,66	52,06
5	1	3	11	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	47,20	48,00	49,00
5	1	3	12	Tingkat Kemantapan Jembatan pada ruas jalan kabupaten	%	78,00	78,50	79,00
5	1	3	13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	10 : 1	10 : 1	10 : 1
5	1	3	14	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	10 : 0	10 : 0	10 : 0
5	1	3	15	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	%	89,61	90,00	91,13
5	1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
5	1	4	1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
5	1	4	2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100
5	1	4	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	6,32	7,20	7,20
5	1	4	4	Rasio rumah layak huni	Angka	0,86	0,64	0,64
5	1	4	5	Rasio permukiman layak huni	Angka	0,90	0,90	0,90
5	1	4	6	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	2,26	11,92	11,92
5	1	4	7	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi,	%	100	100	100

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
				kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan				
5	1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5	1	5	1	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	99,83	100	100
5	1	5	2	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	99,23	100	100
5	1	5	3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	99,23	100	100
5	1	5	4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	%	99,93	100	100
5	1	5	5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	75	80
5	1	5	6	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	97	75	100
5	1	5	7	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	0,63	0,63	0,63
5	1	5	8	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	2	2	2
5	1	5	9	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	85	75	75
5	1	5	10	Waktu tanggap (Respon time) Penanganan Kebakaran	Menit	8,35	15	15
5	1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
5	1	6	1	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	22,5	23,6	24,7
5	1	6	2	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	0	100	100
5	1	6	3	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	%	0	0	0
5	1	6	4	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
5	1	6	5	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
5	1	6	6	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
5	1	6	7	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
5	1	6	8	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	53,6	56,1	58,6
5	1	6	10	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	73,28	76,4	78,5

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	1	6	11	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0,63	1,16	1,74
5	1	6	12	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100
5	1	6	13	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1	1	1
5	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
5	2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
5	2	1	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100
5	2	1	3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	3,01	3,20	3,55
5	2	1	4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	56.955.917,80	57.750.000	58.817.959,80
5	2	1	5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	11,57	12,00	12,46
5	2	1	6	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	72,5	73,0	74,0
5	2	1	7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	36,72	36,92	37,72
5	2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
5	2	2	1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	Persen	26	27	30
5	2	2	2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1.000 penduduk perempuan)	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,023	0,018	0,02
5	2	2	3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100
5	2	2	4	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	%	10	10	30
5	2	2	5	Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	%	96	97	91,95
5	2	2	6	Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	%	85	90	70,31
5	2	2	7	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	100	100	100
5	2	2	8	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Usia 0-18 Tahun	%	91,45	92	92,45
5	2	2	9	Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,009	0,009	0,009

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	2	2	10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi kabupaten	%	100	100	100
5	2	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
5	2	3	1	Persentase cadangan pangan	%	0,19	0,19	0,2
5	2	3	2	Persentase ketersediaan pangan	%	111,1	111,1	109,8
5	2	3	3	Persentase Desa/ Kelurahan Rentan Rawan Pangan	%	19,32	17,04	15,9
5	2	3	4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100
5	2	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
5	2	4	1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	40	50
5	2	4	2	Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	67,00	68,50	70,00
5	2	4	3	Luas Tanah Obyek Land reform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Hektar	0	2,0	2,5
5	2	4	4	Persentase luas lahan Ulayat yang di tetapkan	%	0	0	1
5	2	4	5	Persentase Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Disertifikatkan	%	0	10	12
5	2	4	6	Persentase tanah kosong yang dikelola		68,00	69,50	71,00
5	2	4	7	Persentase penyelesaian dan penerbitan izin membuka tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	%	0	50	55
5	2	4	8	Persentase luas Lokasi konsolidasi tanah	%	71,00	72,00	74,00
5	2	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
5	2	5	1	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	Terintegrasi/ tidak terintegrasi	n/a	terintegrasi	terintegrasi
5	2	5	2	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	n/a	75,49	75,49
5	2	5	3	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	n/a	80,05	80,05
5	2	5	4	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	%	1,4	1,38	1,38
5	2	5	5	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	%	100	100	100
5	2	5	6	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	47,14	48	48
5	2	5	7	Persentase MHA dan Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang difasilitasi	%	n/a	n/a	1,14
5	2	5	8	Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah	%	20	20	20

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
				melakukan gerakan peduli lingkungan hidup				
5	2	5	9	Persentase Masyarakat/ Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	%	33,33	33,33	33,33
5	2	5	10	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	%	100	100	100
5	2	5	11	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	n/a	2	2
5	2	5	12	Persentase Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	%	n/a	3,97	3,97
5	2	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
5	2	6	1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Angka	4,43	9,5	15
5	2	6	2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	52,64	52,70	53
5	2	6	3	Cakupan kepemilikan KTP elektronik		94,31	94,50	95
5	2	6	4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100
5	2	6	5	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,66	99,66	99,69
5	2	6	6	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	93,25	93,25	93,50
5	2	6	7	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100
5	2	6	8	Persentase OPD yang telah melaksanakan Perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	62,96	63	63
5	2	6	9	Persentase data profil kependudukan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100
5	2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
5	2	7	1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0	100	100
5	2	7	2	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	%	18,52	18,52	18,52
5	2	7	3	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	55,5	55,5
5	2	7	4	Persentase Desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	%	97,75	100	100
5	2	7	5	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	Unit	4,93	9,88	9,88

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
5	2	8	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	27,3	26,0	26,1
5	2	8	2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,1	2,05	2,1
5	2	8	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	27,7	24,0	22,0
5	2	8	4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	74,60	73,86	40
5	2	8	5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%	61,98	61,36	35
5	2	8	6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%	52,16	61,56	10
5	2	8	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Yang Ber-KB Mandiri	%	51,70	90,9	100
5	2	8	8	Cakupan kelompok Pik-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)	%	91,81	51,19	25
5	2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
5	2	9	1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	%	0	51,41	52,1
5	2	9	2	Kinerja lalu lintas (VC Ratio)	Angka	0,28	0,32	0,37
5	2	9	3	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	%	44,83	52,29	56,9
5	2	9	4	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	100	100
5	2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
5	2	10	1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	68,9	70	72
5	2	10	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100
5	2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
5	2	11	1	Persentase koperasi yang telah memperoleh Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	%	46	100	100
5	2	11	2	Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dibanding tahun sebelumnya	%	47	50	50
5	2	11	3	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi	%	24	25	30
5	2	11	4	Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat	%	17	20	25

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
				kompetensi manajerial koperasi				
5	2	11	5	Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	%	2	5	10
5	2	11	6	Persentase UMKM binaan yang naik kelas	%	6	7	8
5	2	11	7	Persentase UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pasca panen	%	63	63	64
5	2	11	8	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya	%	1	2	3
5	2	11	9	Persentase UMKM yang mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal	%	0,5	1	2
5	2	11	10	Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital	%	0,5	1,5	2
5	2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
5	2	12	1	Persen penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	%	0	1	1
5	2	12	2	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Orang/ Lembaga	25	27	30
5	2	12	3	Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	28.461	31.000	32.000
5	2	12	4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	100	100	100
5	2	12	5	Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	50	55	55
5	2	12	6	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100
5	2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
5	2	13	1	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	30	29,8	30
5	2	13	2	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	Orang	17	16	17
5	2	13	3	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	19	18	19
5	2	13	4	Cakupan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	%	33,33	33,49	33,84
5	2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
5	2	14	1	Persentase pemenuhan data statistik yang memenuhi Kaidah Satu Data	%	21,39	45	50
5	2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
5	2	15	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	TINGKAT II/ 684	TINGKAT II/ 678	TINGKAT II/ 678
5	2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
5	2	16	1	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	%	33,70	34,50	34,80

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	2	16	2	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Kali	4	4	5
5	2	16	3	Persentase Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	%	16,7	20,0	25,0
5	2	16	4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	44,74	46,00	50,00
5	2	16	5	Jumlah kunjungan museum	Kunjungan	5367	5400	5500
5	2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
5	2	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang pengunjung	14.421	14.471	14.521
5	2	17	2	Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	%	40,69	50,22	50,47
5	2	17	3	Persentase Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	0	0	20
5	2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
5	2	18	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	26,3	15,7	39,4
5	2	18	2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	0	0	20
5	2	18	3	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten	%	0	0	0
5	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
5	3	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN				
5	3	1	1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.610,40	27.519,34	29.720,89
5	3	1	2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	507,97	538,89	555,06
5	3	1	3	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	15,84	17,06	18,28
5	3	1	4	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Ton	248,00	249,84	252,33
5	3	2		PARIWISATA				
5	3	2	1	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan	%	9,04	10,00	11,30
5	3	2	2	Tingkat hunian akomodasi	%	4,34	4,50	5,00
5	3	2	3	Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	%	0	1	2
5	3	2	4	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	7,66	11,00	15,33
5	3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
5	3	3	1	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	%	4,32	4,32	4,36
5	3	3	2	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	Ton	18.949,22	18.949,22	19.138,71
5	3	3	3	Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	Ton	7.139,75	7.139,75	7.211,15
5	3	3	4	Jumlah Produksi sektor perkebunan	Ton	33.154,35	33.154,35	33.485,89

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	3	3	5	Jumlah Produksi sektor peternakan	kg	525.264,00	525.264,00	530.516,64
5	3	3	6	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	%	30,86	30,86	31,17
5	3	3	7	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular		30,86	31,00	31,31
5	3	3	8	Persentase penanganan bencana pertanian	%	59,69	59,69	59,95
5	3	3	9	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	59,69	59,69	60,29
5	3	3	10	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00
5	3	3	11	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	1,52	3,03	4,55
5	3	3	12	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		0,00	1,14	5,68
5	3	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
5	3	4	1	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	25	25
5	3	4	2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	100	25	25
5	3	4	3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	25	25
5	3	4	4	Nilai ekspor perdagangan	Juta Rupiah	75	25	25
5	3	4	5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75,2	25	25
5	3	4	6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	%	25	25	25
5	3	4	7	Persentase produk lokal UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran melalui kemitraan	%	25	25	25
5	3	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
5	3	5	1	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Rupiah	1.079.665.000	1.100.000.000	1.133.648.250
5	3	5	2	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	%	2,5	3,0	3,5
5	3	5	3	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	24	25	27
5	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	4	1		SEKRETARIAT DAERAH				
5	4	1	1	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	%	57,14	58,00	60,00
5	4	1	2	Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	%	83,33	100	100
5	4	1	3	Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
5	4	1	4	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	%	100	100	100

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	4	1	5	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	%	55,02	56,00	58,44
5	4	1	6	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	%	94	95	95
5	4	1	7	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	%	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)
5	4	1	8	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	%	100	100	100
5	4	1	9	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	%	60	60	60
5	4	1	10	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	%	100	100	100
5	4	2		SEKRETARIAT DPRD				
5	4	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
5	4	2	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Penganggaran, Pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
5	4	2	3	Ketetapan penetapan PERDA APBD Tahun n	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	4	2	4	Persentase penetapan Ranperda Tahun n	%	100	100	100
5	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	5	1		PERENCANAAN				
5	5	1	1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
5	5	1	2	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	100
5	5	2		KEUANGAN				
5	5	2	1	Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan	Angka rasio	0,0389	0,04	0,04
5	5	2	2	Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
5	5	2	3	Penetapan LKPD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
5	5	2	4	Manajemen aset	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada
5	5	2	5	Rasio desentralisasi fiskal	%	0,1019	0,1153	0,1151
5	5	2	6	Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan	%	0,74	0,7	0,72
5	5	3		KEPEGAWAIAN				
5	5	3	1	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	%	93,33	94	94
5	5	3	2	Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	%	93,2	93,5	94
5	5	3	3	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100	90	95
5	5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5	5	4	1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	%	66	35	40
5	5	4	2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	%	49,79	45	50

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	5	5	1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100
5	5	5	2	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan	%	100	100	100
5	5	5	3	Persentase penerapan inovasi daerah	%	50	50	50
5	6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
5	6	1		INSPEKTORAT DAERAH				
5	6	1	1	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	%	81,29	82,00	82,54
5	6	1	2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	%	60,67	66,00	67,49
5	6	1	3	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	2,52	3,0	3,1
					Level	2	3	3
5	7			UNSUR KEWILAYAHAN				
5	7	1		KECAMATAN BENTENG				
5	7	1	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	95	95
5	7	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	95	97	100
5	7	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80
5	7	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
5	7	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80
5	7	1	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,49	0,45	0,41
5	7	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0
5	7	2		KECAMATAN BONTOHARU				
5	7	2	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	95	96	96
5	7	2	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	66,6	70,0	77,7
5	7	2	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80
5	7	2	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	98	100	100
5	7	2	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	75	80	80
5	7	2	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	1,10	0,80	0,75
5	7	2	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan	Kali	2	2	2

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
				keagamaan di wilayah Kecamatan				
5	7	2	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	60	62	65
5	7	3		KECAMATAN BONTOMATENE				
5	7	3	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	85	85	85
5	7	3	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	91,33	91,50	92,00
5	7	3	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	85	85	85
5	7	3	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	85	85	85
5	7	3	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	85	85	85
5	7	3	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	2,3	2,1	2,0
5	7	3	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	1	1
5	7	3	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	80	80	80
5	7	4		KECAMATAN BONTOMANAI				
5	7	4	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	n/a	60	70
5	7	4	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	99,98	99,98	99,98
5	7	4	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	n/a	40	50
5	7	4	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	60	62	65
5	7	4	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	4,55	4,56	4,56
5	7	4	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,10	0,08	0,07
5	7	4	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	n/a	1	1
5	7	4	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	n/a	50	50
5	7	5		KECAMATAN BONTOSIKUYU				
5	7	5	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	90	91	92

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	7	5	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	67	68	70
5	7	5	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80	83	85
5	7	5	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	96	97	97
5	7	5	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	77	78	78
5	7	5	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	n/a	0,50	0,75
5	7	5	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0
5	7	5	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	63	75	96
5	7	6		KECAMATAN PASIMASUNGGU				
5	7	6	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	95	95
5	7	6	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	95	95	100
5	7	6	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80
5	7	6	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
5	7	6	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80
5	7	6	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,49	0,45	0,41
5	7	6	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0
5	7	6	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,67	47,68	47,68
5	7	7		KECAMATAN PASIMARANNU				
5	7	7	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	92,16	92,50	92,78
5	7	7	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	66,66	70,00	77,00
5	7	7	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	91,26	91,30	91,35
5	7	7	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	64,4	65,0	67,3
5	7	7	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	3,00	3,20	3,50
5	7	7	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	1	0,9	0,9

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	7	7	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0
5	7	7	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	34,40	34,60	34,75
5	7	8		KECAMATAN TAKABONERATE				
5	7	8	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	97	97,5	97,6
5	7	8	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	80	80,3	80,5
5	7	8	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80	80,3	80,4
5	7	8	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	75	75,4	75,5
5	7	8	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80,2	80,3
5	7	8	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	3	2,5	2,4
5	7	8	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	1	0,7	0,6
5	7	8	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	75	75,3	75,4
5	7	9		KECAMATAN PASILAMBENA				
5	7	9	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	94	95
5	7	9	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	97	98	100
5	7	9	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75		80
5	7	9	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
5	7	9	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80
5	7	9	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,43	0,42	0,41
5	7	9	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0
5	7	9	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,6	47,6	47,7
5	7	10		KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR				
5	7	10	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	95	95

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
5	7	10	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	95	95	100
5	7	10	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80
5	7	10	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
5	7	10	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80
5	7	10	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,49	0,45	0,41
5	7	10	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0
5	7	10	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,6	47,6	47,7
5	7	11		KECAMATAN BUKI				
5	7	11	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	97,20	97,22	97,25
5	7	11	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	66,6	68,0	70,0
5	7	11	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	91,26	91,30	91,35
5	7	11	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	62,85	62,90	63,00
5	7	11	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	3,50	3,51	3,51
5	7	11	6	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	1	0,9	0,9
5	7	11	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	5	4	4
5	7	11	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,67	47,68	47,68
5	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
5	8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
5	8	1	1	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	30	30	30
5	8	1	3	Persentase Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang Mengikuti Pendidikan Politik	%	40	40	40
5	8	1	4	Jumlah konflik berlatar belakang politik	Kali Konflik	0	0	0
5	8	1	6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan	%	8,33	8,33	8,33
5	8	1	7	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	%	37,5	37,5	37,5

No.				Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun	
							2025	2026
				Dan Budaya Yang Dilaksanakan				
5	8	1	8	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	%	20	20	20
5	8	1	10	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	%	n/a	100	100

Sumber: BPS Kepulauan Selayar, RPJMD Kab. Kepulauan Selayar 2025-2029, OPD terkait urusan dan kewenangan masing-masing
Keterangan : Capaian yang kosong karena Data belum tersedia pada OPD atau Lembaga terkait

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dengan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada **Tabel 6.4.**

Tabel 6. 4 Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan / Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Nasional	Target		OPD
					2025	2026	
1.	Pendidikan						Disdikpora
1.1	Pendidikan Dasar						
	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	93,14	100	100	100	
1.2	Pendidikan Kesetaraan						
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	44,78	100	100	100	
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini						
	Persentase warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	93,78	100	100	100	
2.	Kesehatan						Dinkes
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,92	100	100	100	
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	
2.4	Pelayanan kesehatan balita						

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan / Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Nasional	Target		OPD
					2025	2026	
	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	90,73	100	100	100	
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	60,28	100	100	100	
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,						
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;						
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	70,93	100	100	100	
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						
	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100	
2.11	Pelayanan kesehatanorang terduga tuberkulosis						
	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	73,87	100	100	100	
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus						
	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	
3.	Pekerjaan Umum						Dis PUTR
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	59,01	100	100	100	
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	100	100	100	
4.	Perumahan Rakyat						DPKP
4.1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota						
	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota						

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan / Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Nasional	Target		OPD
					2025	2026	
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	
5.	Trantibumlinmas						
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						Satpol PP, Damkar
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100	100	
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana						BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	99,83	100	100	100	
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	99,23	100	100	100	
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	99,77	100	100	100	
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						Satpol PP, Damkar
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	96,67	100	100	100	
6.	Sosial						Dinsos
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti						
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota						
	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	

Sumber: Laporan Pelaksanaan SPM Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024, diolah

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPBp/SDGs) dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

Tabel 6. 5 Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator TPB/ SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2026

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
	Pilar Pembangunan Sosial					
	Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	10,79	9,65	10,21	Dinsos
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	98,81	98,5	100	Dinsos
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	36,72	48,58	46,42	Dinsos
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	23	24,00	72,708	Dinsos
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KPM	7.545	8.750	8.446	Dinsos
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnyamasyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	100	86,80	100	Dinkes
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	88,4	89,29	89,43	Dinkes
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	59,2	82,24	60,09	DP3AP2KB
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	7,22	7,60		Dis PUTR
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	10	99	16	Dis PUTR

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	24,58	11,00	29,00	DPKP
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	98,13	99,00		Disdikpora
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	82,22	97,00	85,93	Disdikpora
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	93,25	100,00	95,70	Disdukcapil
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana					
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi/ Desa	11	15	15	BPBD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	%	100	100	100	Dinsos
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	100	100	30,76	Dinsos
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Lokasi/ Desa	13	15	18	BPBD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Poin	133,58	138,8	120,24	BPBD
	Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	18,48	2,52	16,15	Dinkes
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remajaperempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,3	18,50	16,55	Dinkes
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	13,8	16,18	12,39	Dinkes
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	8,94	48,96	8,12	Dinkes
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	72,60	71,27	75,78	Dinkes
2.2.2.(b)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	79,80	79,97	81,05	Distan KP
	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	kematian per 100.000 kelahiran hidup	287	2	117	Dinkes
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	100	86,80	100	Dinkes
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	99,48	85,54	100	Dinkes
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.					
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1000 kelahiran hidup	10,3	1,3	9,32	Dinkes

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	per 1000 Penduduk	0,009	< 1	0,10	Dinkes
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,4	0,00054	0,07	Dinkes
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS).	Per 100.000 penduduk	334	127	159	Dinkes
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	16,1	3,04	15,00	Dinkes
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	54,27	80,35	60,29	DP3AP2KB
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	59,2	82,24	60,09	DP3AP2KB
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	32,9	22,94	46,96	DP3AP2KB
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	3,75	1,11	4,45	DP3AP2KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Poin	2,10	2,05	2,13	DP3AP2KB
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	13,5	0,0	18,97	DP3AP2KB
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	98,81	100	99,63	DP3AP2KB
	Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua					
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	66,90	88,65	68,39	Disdikpora
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	57,89	80,77	58,95	Disdikpora
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	98,45	101,52	98,60	Disdikpora
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	82,83	97,81	83,66	Disdikpora
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.					
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	93,78	100,00	94,53	Disdikpora
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.					
	(1) SD/MI/ sederajat;	%	85,69	99,71	83,36	Disdikpora
	(2) SMP/MTs/ sederajat;	%	63,04	99,51	54,98	Disdikpora
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	93,08	98,14	94,04	Disdikpora

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	85,72	99,94	87,86	Disdikpora
	Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan					
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	0,03	0,10	0	DP3AP2KB
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	DP3AP2KB
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan					
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Usia	23	24	24	DP3AP2KB
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	37,5	0,93	35,00	DP3AP2KB
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat					
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	31,25	24,80	19,55	Kesbangpol
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	42,71	64,62	43,76	Kesbangpol
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	13,5	7,00	12,45	DP3AP2KB
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	100	100	100	DP3AP2KB
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	%	100	100	100	DP3AP2KB
	Pilar Pembangunan Lingkungan					
	Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua					
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	83,45	84,56		Dis PUTR
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	6,85	7,60		Dis PUTR
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	59	88	61	Dinkes
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	52,22	58,00	53,7	Dis PUTR
6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.					

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Das	1	1	1	Dis PUTR
	Pilar Pembangunan Sosial					
	Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua					
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	%	96,40	94,86	98,31	Setda
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kwh	311,14	284.187		Setda
	Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua					
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta/Jiwa	58,29	57,50	64,73	Setda
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%		10,78		Disperinaker
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	52	55,15	57,20	Disperinaker
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	8,27	26,00	9,60	Disperinaker
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	0,24	0,78	1,55	Disparbud
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	394	240	573	Disparbud
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	13.816	26.800	22.505	Disparbud
	Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi					
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.					
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Unit	1	1	1	Dishub
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	2	2	2	Dishub
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Unit	7	7	7	Dishub
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	5,43	199,76	6,92	Disperinaker
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.					
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	%	94,56	89,8	91,65	DLH
	Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra - Dan Antar Negara					
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.1.1*	Koefisien Gini.	Poin	0,329	0,310	0,325	Setda
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	10,79	9,65	10,21	Setda
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	2	8	0	Dis PMD
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	Desa	6	7	4	Dis PMD
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	22	16	37	Dis PMD
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	36,72	100	45,38	Disperinaker
	Tujuan 11. Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan					

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.					
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	0,97	29,00	23,80	DLH
	Tujuan 12. Menjamn Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan					
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun	14,24	1100	2897,51	DLH
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka					
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Unit	2	6	2	DLH
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.					
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk	26	30	26	DLH
	Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya					
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara					
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen		1	1	BPBD
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.					
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	1	1	1	DLH
	Tujuan 14. Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan					
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%		100	3,12	Disper
	Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelolah Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati					
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Ha		19,09		DLH
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.					
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	DLH
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.					
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dokumen		1		Distan KP
15.9	Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen		1		Distan KP
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.					
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	DLH

Kode	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		OPD
				2025	2026	
	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola					
	Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun keembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan					
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	0,02	0,00033	0	DP3AP2KB
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.					
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Poin	3,85	25,03	4,02	Itda
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	100	100	100	Itda
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.					
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	31,25	24,80	32,75	Kesbangpol
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	25,00	7,72	26,53	Kesbangpol
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	90,16	46,05		Disdukcapil
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional					
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	%	100	100	100	DP3AP2KB
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik	1	1	1	Diskominfo SP
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	%	100	100	100	Diskominfo SP
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang	1	35	1	Diskominfo SP
	Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan					
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,16	0,95	0,18	BPKPD

Sumber: RPJMD Kab. Kepulauan Selayar 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2026 berpedoman pada pada arah kebijakan dan sasaran pokok tahun 2026 dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 telah melalui tahapan panjang yang dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang berorientasi pada pendekatan teknokratik, partisipati, politis dan *top-down bottom-up* serta berorientasi pada substansi dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, yaitu: Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2026, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara target yang ditetapkan dalam RKPD dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026, untuk pemantapan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi seluruh sumber daya yang telah dialokasikan, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pengelolaan program pembangunan, maka dibutuhkan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bapperida dan seluruh OPD, dengan mengacu pada tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu:

1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat, dan seluruh stakeholder berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut:
    a. Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dalam rangka pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
    b. Renja Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati bersama;
3. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
4. Seluruh OPD harus menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2026 setiap triwulan;
5. Bapperida menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari OPD untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

Dengan beberapa langkah di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 mengacu dan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kepualauan Selayar tahun 2025-2029, serta disusun secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan stakeholders lainnya;
2. Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026 menjadi acuan/ pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026;
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan dan tema pembangunan tahun 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 yaitu: "**Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera**" sehingga program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD diarahkan pada pencapaian tema tersebut;

4. Untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan OPD dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif;
5. Sinergitas, kerja keras, disiplin dan kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pelaksana pemerintahan beserta seluruh lapisan masyarakat dan pemangku pembanguanan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap pencapaian target program pembangunan yang telah ditetapkan dan pada akhirnya program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI